KOTA MADIUN

CATATAN

ATAS LAPORAN KEUANGAN

(audited)

BAB

1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pemerintah Daerah dihadapkan pada suatu keadaan dimana pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada manajemen keuangan yang sehat. Setelah tahun anggaran 2024 berakhir, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, bahwa Pemerintah Daerah telah menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024 berbasis akrual yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pemerintah Kota telah menerapkan basis akuntansi akrual sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 dengan menerbitkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kota Madiun.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun dan disediakan sebagai sarana informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama satu periode pelaporan.

Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, realisasi belanja, realisasi pembiayaan, posisi aset, posisi kewajiban, posisi ekuitas dana dan arus kas suatu entitas pelaporan. Selain itu, setiap entitas pelaporan keuangan daerah mempunyai kewajiban untuk

melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan.

Pelaporan keuangan pemerintah daerah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna (*stakeholders*) dalam menilai akuntabilitas dan transparansi pemerintahan daerah. Maksud dan tujuan dari penyusunan LKPD antara lain:

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaaan daerah periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran daerah.
2. Memberikan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dalam APBD.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah tercapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan.

1.3 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;.

8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang milik Daerah;
10. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 67 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Sistem Dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan Keuangan Daerah Berbasis Akrual;
11. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 68 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Madiun;
12. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 70 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Sistem Dan Prosedur Penatausahaan Pengeluaran Keuangan Daerah Berbasis Akrual;
13. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 69 Tahun 2023 tentang Bagan Akun Standar
14. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 80 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Pemerintah Kota Madiun Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Ringkasan

Memberikan informasi mengenai LKPD Tahun 2023 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLk).

Bab I Pendahuluan

Memberikan informasi mengenai maksud dan tujuan serta landasan hukum penyusunan LKPD Tahun 2024

Bab II Perkembangan Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Target Kinerja APBD

Memberikan informasi mengenai ekonomi makro dan kebijakan keuangan APBD Tahun Anggaran 2024.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja keuangan masing-masing OPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun selama tahun anggaran 2024.

Bab IV Kebijakan Akuntansi

Memberikan informasi mengenai kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota dalam menyusun LKPD Tahun 2024.

Bab V Penjelasan Pos - Pos Laporan Realisasi Anggaran

Memberikan informasi mengenai penjelasan masing-masing pos pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Bab VI Penjelasan Pos - Pos Laporan Perubahan SAL

Memberikan informasi mengenai penjelasan masing-masing pos pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL).

Bab VII Penjelasan Pos - Pos Neraca

Memberikan informasi mengenai penjelasan masing-masing pos pada Neraca.

Bab VIII Penjelasan Pos - Pos Laporan Operasional

Memberikan informasi mengenai penjelasan masing-masing pos pada Laporan Operasional (LO).

Bab IX Penjelasan Pos - Pos Laporan Arus Kas

Memberikan informasi mengenai penjelasan masing-masing pos pada Laporan Arus Kas.

Bab X Penjelasan Pos - Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Memberikan informasi mengenai penjelasan masing-masing pos pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Bab XI Penjelasan Informasi Non Keuangan

Memberikan informasi non keuangan Pemerintah Kota Madiun yang terjadi selama tahun anggaran 2024 dan kejadian-kejadian lain setelah tanggal neraca.

Bab XII Penutup

Memberikan informasi mengenai kesimpulan uraian secara ringkas Laporan Keuangan Daerah Kota Madiun.

BAB

2

PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN TARGET KINERJA APBD

2.1. PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO

Perkembangan kondisi ekonomi makro Kota Madiun Tahun 2024 telah menunjukkan perbaikan kinerja ekonomi daerah dalam pembangunan dan mengindikasikan sejauh mana kesejahteraan masyarakat daerah Kota Madiun tersebut telah terwujud. Beberapa variabel ekonomi makro terpenting yang menjadi indikator pencapaian pembangunan perekonomian daerah Kota Madiun adalah pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), laju inflasi, pengangguran, dan kemiskinan.

2.1.1. PERTUMBUHAN EKONOMI

Kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat dari beberapa indikator ekonomi daerah, seperti laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), baik ADHB/Atas Dasar Harga Berlaku maupun ADHK/Atas Dasar Harga Konstan. Berdasarkan data dari BPS Kota Madiun diketahui bahwa laju pertumbuhan perekonomian Kota Madiun pada Tahun 2024 adalah sebesar 5,55 (sampe dengan triwulan III). Hal tersebut menunjukkan adanya penurunan sebesar 0,25 persen jika dibandingkan dengan tahun 2023, di mana pada Tahun 2023 tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,80 Angka sementara penurunan (sampai triwulan III) pertumbuhan ekonomi ini ditopang oleh upaya Pemerintah Kota Madiun dalam menciptakan ruang usaha di Kota Madiun yang kondusif sesuai amanat Undang-Undang Cipta Kerja yaitu dengan memberikan kemudahan perijinan pendirian usaha, perlindungan usaha, pemberdayaan UMKM melalui pengelolaan terpadu UMKM, partisipasi UMKM dalam infrastruktur publik, layanan bantuan dan pendampingan hukum, kemudahan fasilitasi pembiayaan dan insentif fiskal, dan pelatihan serta optimalisasi fungsi lapak UMKM sebagai katalisator pendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat bawah. Rancangan kebijakan ekonomi Pemerintah Kota Madiun yang telah berhasil memberikan stimulus dalam upaya

mengakselerasi perekonomian daerah meskipun laju pertumbuhan ekonomi lanjutan di tahun 2024 angkanya masih fluktuatif, dengan mencatatkan angka Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun yang positif yang diproyeksikan pada angka pertumbuhan ekonomi sebesar 5,55 (sampai triwulan III).

Grafik 2.1.1.1

Grafik Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun Tahun 2020-2024

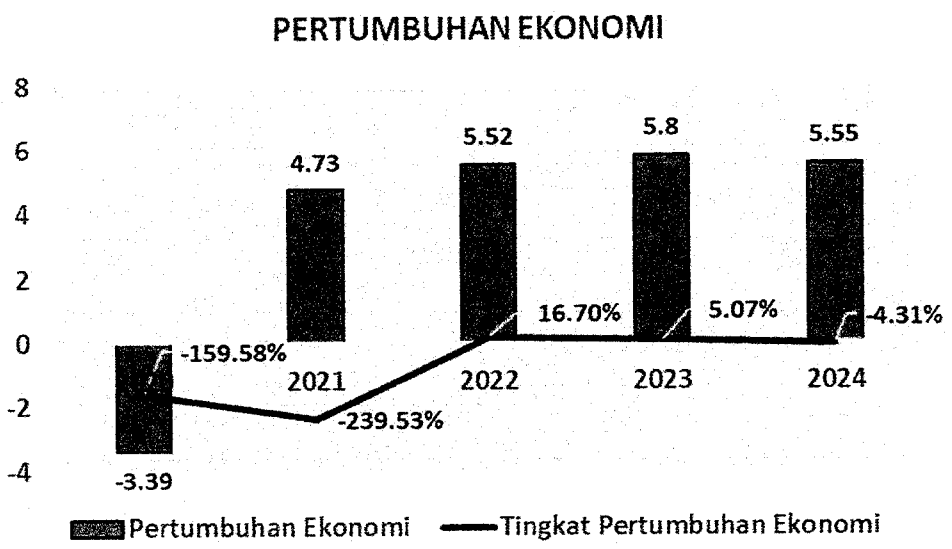

Sumber : BPS Kota Madiun Tahun 2024

****) Angka Sementara (samapai triwulan III)***

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam perekonomian daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah pada umumnya dipandang sebagai kenaikan kapasitas produksi suatu daerah dari tahun ke tahun yang dapat diindikasikan oleh kenaikan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil dari tahun ke tahun. Pengukuran laju pertumbuhan ekonomi adalah dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan (PDRB ADHK) yaitu dengan menghitung pertumbuhan PDRB riil Kota Madiun.

Pertumbuhan ekonomi Kota Madiun periode 2020-2024 menunjukkan terjadi fluktuatif. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun mengalami kontraksi yang cukup tajam berada pada angka -3,39 persen, hal itu disebabkan adanya wabah pandemi COVID 19 yang membatasi semua kegiatan ekonomi. Selanjutnya pada Tahun 2021 telah mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan jawa timur maupun nasional kenaikannya lebih dalam yaitu sebesar 4,73. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Madiun melanjutkan trend pemulihan yang positif dimulai pada Tahun 2021 dengan angka pertumbuhan 4,73 Tahun 2022 dengan angka pertumbuhan 5,52 dan Tahun 2023 2023 mengalami kenaikan pertumbuhan sebesar 5,80. Sedangkan pada Tahun 2024 selaras dengan program Pemerintah Pusat dalam pencanangan target pembangunan Manusia untuk mewujudkan Indonesia Emas,

Kota Madiun ditargetkan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi hingga 5,55% (samapai triwulan III). Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah kota Madiun telah memaksimalkan sektor-sektor yang menjadi core bisnis di Kota Madiun, seperti : Industri pengolahan, Perdagangan besar dan eceran, Reparasi dan persewaan mobil dan sepeda motor, Informasi dan komunikasi, Jasa keuangan dan asuransi serta melaksanakan program percepatan dan perluasan Digitalisasi Daerah guna mendorong Pertumbuhan dan Integritas Ekonomi Daerah serta dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah. Beberapa strategi Pemerintah Kota Madiun dalam mencapai target tersebut yaitu :

a. Melakukan percepatan digitalisasi daerah menuju ekosistem ekonomi yang berbasis teknologi digital;
b. Melakukan percepatan Belanja Pemerintah yang akan mampu mencitptakan multiplayer ekonomi daerah;
c. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menyederhanakan regulasi yang berkaitan investasi, sehingga dapat menarik para investor;
d. Meningkatkan peran digitalisasi UMKM melalui pelatihan peningkatan keterampilan digital para pelaku usaha;
e. Peningkatan daya saing ekonomi daerah berbasis kearifan lokal dan potensi lokal.
f. Meningkatkan kapasitas SDM yang unggul dan kompetitif. Dan melakukan upaya perluasan lapangan kerja bagi masyarakat.
g. Menetapkan dan meningkatkan serta mengawasi pelaksanaan upah minimum kota.
h. Meningkatkan dan memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat.
i. Mengembangkan industri kecil dan industri rumah tangga berdaya saing tinggi sesuai potensi keunggulan masing-masing, melalui dukungan terhadap pengusaha lokal melalui pengembangan ekonomi kreatif.

Dari kondisi tersebut, prospek perekonomian Kota Madiun pada Tahun 2024 sudah mengalami perbaikan yang cukup signifikan.

2.1.2. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Capaian kinerja perekonomian suatu daerah salah satunya dapat dilihat dari perkembangan PDRB nya, baik PDRB atas dasar harga konstan maupun PDRB atas dasar harga berlaku. Pembangunan ekonomi Kota Madiun telah sesuai target yang ditetapkan sesuai RPJP, RPJMD dan RKPD Kota Madiun. Kinerja ekonomi selalu pada trend pertumbuhan ekonomi positif. Pada Tahun 2021 hingga 2024 telah terjadi perbaikan data pertumbuhan ekonomi ini ditandai dengan meningkatnya total PDRB tahun 2021 hingga 2024 baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Pada Tahun 2021, 2022

dan 2023 bergerak positif, serta Tahun 2024 diproyeksikan mampu tumbuh di atas rata - rata daerah yang lain.

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Madiun pada tahun 2019 sampai dengan proyeksi 2023 dapat dilihat data di bawah ini.

Tabel 2.1.2.1
Pertumbuhan PDRB Kota Madiun Tahun 2020 sampai tahun 2024 (Milyar)

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2020	13.769,3	10.262,4	-3.39
2021	14.699,8	10.748,1	4,73
2022	15.018,7	11.273,7	5,52
2023	17.033,1	11.745,6	5,80
2024	18.383,23	12.474,61	5,95

Sumber : BPS Kota Madiun Tahun 2024

****) angka sementara (proyeksi)***

PDRB Kota Madiun terus mengalami peningkatan pada tahun 2021-2023. Nilai PDRB pada tahun 2021 baik berdasarkan harga konstan atau harga berlaku mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dimana untuk PDRB atas dasar harga konstan menjadi sebesar Rp10.262,4 (Milyar) dan untuk PDRB atas dasar Harga Berlaku sebesar Rp13.769,3 (milyar). Jika dibandingkan dengan Tahun 2019 untuk PDRB atas dasar harga konstan mengalami penurunan sebesar Rp361,40 (Milyar), sedangkan untuk PDRB atas dasar harga berlaku mengalami penurunan sebesar Rp338,0 (Milyar). Sedangkan untuk Tahun 2021 seiring dengan adanya pemulihan ekonomi, nilai PDRB atas dasar Harga Konstan sebesar Rp10.748,1 (Milyar) dan PDRB atas dasar Harga Berlaku sebesar Rp14.699,8 (Milyar) sedangkan Tahun 2022 nilai PDRB atas dasar Harga Konstan sebesar Rp11.273,7 (Milyar) dan PDRB atas dasar Harga Berlaku sebesar Rp15.818,61 (Milyar). Pada Tahun 2023 ekonomi Kota Madiun semakin membaik maka diproyeksikan nilai PDRB atas dasar Harga Konstan sebesar Rp11.764,40 (Milyar) dan PDRB atas dasar Harga Berlaku sebesar Rp17.256,23 (Milyar), serta Tahun 2024 diproyeksikan mampu tumbuh PDRB atas dasar Harga Konstan Rp12.420,95 dan PDRB atas dasar Harga Berlaku Rp18.353,17

Tabel 2.1.2.2
Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020 s/d 2024 (Milyard)

No	Uraian	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024*)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	120,59	108,7	110,35	121,77	121.77
2	Pertambangan dan Penggalian	2,95	2,91	2,71	2,65	2,65
3	Industri Pengolahan	1.780,97	1.985,25	2.099,37	2.340,47	2.340,47
4	Pengadaan Listrik dan Gas	11,48	11,72	12,89	13,75	13,75
5	Pengadaan Air dan Pengolahan Sampah,	30,4	32,65	34,76	36,82	36.82

	Limbah & Daur Ulang					
6	Konstruksi	798,95	805,73	928,22	1005,19	1.005,19
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Persewaan Mobil dan Motor	3.311,32	3.712,41	4.216,70	4.608,99	4.608,99
8	Transportasi dan Pergudangan	477,53	516,72	643,89	780,48	780,48
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	661,55	716,4	900,81	811,41	900,81
10	Informasi dan Komuniasi	2.172,16	2.296,07	2.435,44	2.632,13	2.632,13
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.423,02	1.462,62	1.583,93	1.668,21	1.668,21
12	Real Estate	381,91	388,09	413,3	438,04	438,04
13	Jasa Perusahaan	97,71	100,68	108,69	117,38	117,38
14	Administrasi Pemerintahaan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	452,66	447,71	454,35	465,47	465,47
15	Jasa Pendidikan	1.109,27	1.113,54	1.135,80	1.202,87	1.202,87
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	212,57	227,26	240,59	256,87	256,81
17	Jasa Lainnya	474,94	506,98	586,23	664,37	-
PDRB		**14.107,34**	**13.519,88**	**14.435,43**	**15.818,61**	**17.256,23**

Sumber : BPS Kota Madiun Tahun 2024

****) angka sementara (proyeksi)***

Dengan melihat besarnya peranan atau kontribusi dari masing-masing sektor maka struktur perekonomian Kota Madiun pada tahun 2020 hingga tahun 2024 mayoritas ditopang oleh tiga sektor utama yaitu sektor Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan persewaan mobil dan motor, sektor industri pengolahan dan sektor Informasi dan komunikasi. Ketiga sektor tersebut secara bersama-sama memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kota Madiun.

Tabel 2.1.2.3
Peranan Ekonomi Sektoral PDRB Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2020 s/d 2024 (%)

No	Uraian	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023*)	2024*)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	84,38	78,26	73,82	77,36	77,36
2	Pertambangan dan Penggalian	2,08	1,99	1,82	1,72	1,72
3	Industri Pengolahan	1.430,78	1.532,38	1.565,69	1.690,61	1.690,61
4	Pengadaan Listrik dan Gas	8,78	9,04	9,76	10,28	10,28
5	Pengadaan Air dan Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang	23,34	24,8	25,67	26,75	26,75
6	Konstruksi	616,69	611,17	661,51	693,46	693,46

7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Persewaan Mobil dan Motor	2.233,21	2.460,08	2.656,42	2.805,14	2.805,14
8	Transportasi dan Pergudangan	318,4	341,24	398,92	445,33	445,33
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	514,6	531,1	583,98	624,48	624,48
10	Informasi dan Komuniasi	1.940,86	2.032,96	2.153,80	2.153,80	2.286,79
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	941,3	945,67	948,75	975,52	975,53
12	Real Estate	263,89	267,05	280,64	292,84	292,84
13	Jasa Perusahaan	74,9	75,48	79,45	84,31	84,31
14	Administrasi Pemerintahaan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	315,18	312,05	310,7	312,28	312,28
15	Jasa Pendidikan	783,82	788,06	792,75	817,91	817,91
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	153,48	161,86	167,19	172,55	172,55
17	Jasa Lainnya	350,22	364,51	408,67	447,05	447,05
PDRB		**10.055,91**	**10.537,70**	**11.119,55**	**11.764,40**	**11.764,40**

Sumber : BPS Kota Madiun Tahun 2024
****) angka sementara (Proyeksi)***

Atas dasar harga konstan kontribusi sektor yang paling dominan memberikan kontribusi terhadap PDRB Kota Madiun pada tahun 2020 hingga 2024, mayoritas ditopang oleh sektor Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan persewaan mobil dan motor; sektor industri pengolahan dan sektor Informasi dan komunikasi. Ketiga sektor tersebut secara bersama-sama memberikan kontribusi sebesar 56,63% pada Tahun 2020, sebesar 58,01% pada Tahun 2021, sebesar 55,30% pada Tahun 2022, sebesar 56,52% pada Tahun 2023, dan sebesar 56,52% pada Tahun 2024.

2.1.3. INFLASI

Inflasi merupakan salah satu indikator makro yang mengukur perkembangan kenaikan harga secara umum dalam periode tertentu serta dapat berimplikasi pada kemampuan daya beli masyarakat. Deviasi antara pertumbuhan pendapatan dan tingkat inflasi memberikan gambaran umum mengenai kekuatan daya beli masyarakat. Hal ini bisa dikatakan jika pertumbuhan pendapatan diasumsikan sama dengan kesejahteraan masyarakat maka *gap* antara pertumbuhan pendapatan dengan tingkat inflasi menunjukan tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum. Dalam kurun waktu tahun 2020 s/d 2024 tingkat Inflasi Kota Madiun masih di bawah angka laju pertumbuhan ekonomi kurun waktu 2020 s/d 2024. Hal ini menunjukkan tingkat pendapatan dan daya beli penduduk Kota Madiun di atas kenaikan harga – harga yang terjadi dan kondisi perekonomian Kota Madiun relatif masih stabil dan terkendali. Pada tahun 2021 dan tahun 2022 telah menunjukkan angka inflasi yang positif dalam range yang terkontrol yang menunjukkan *outlook* perbaikan tingkat daya beli

masyarakat Kota Madiun. Pada Tahun 2024 perkembangan tingkat inflasi Kota Madiun diproyeksikan di angka *3±1* .Perkembangan capaian inflasi Kota Madiun lebih detail selama tahun 2020 - 2024 adalah sebagai berikut.

Grafik 2.1.3.1

Perkembangan Inflasi PDRB Kota Madiun Tahun 2020 - 2024

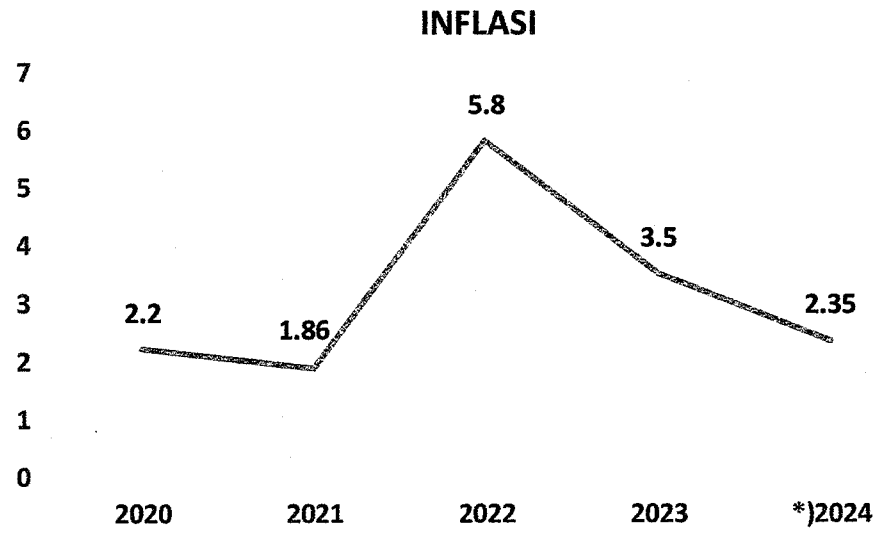

Sumber: BPS Kota Madiun Tahun 2024

***) Angka Proyeksi*

Tingkat inflasi di Kota Madiun pada tahun 2020 sampai dengan 2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 inflasi mengalami penurunan yang cukup besar menjadi sebesar 1,86 dan di tahun 2021 angka inflasi sebesar 1,86 yang berarti inflasi di Kota Madiun cenderung berubah menuju deflasi akibat ketimpangan *supply - demand* antara pasokan produksi dan kebutuhan konsumen akibat adanya pandemi COVID-19. Angka Inflasi di tahun 2021 sesuai rilis data dari BPS pada mengalami kenaikan menjadi sebesar tetap 2,00 (akibat mulai adanya *recovery* ekonomi yang ditopang dengan pertumbuhan uang beredar dan kenaikan produksi * akibat pulihnya kemampuan daya beli konsumen dengan mulai tumbuhnya geliat aktivitas ekonomi akibat terkendalinya penanganan pandemi COVID-19. Secara keseluruhan inflasi Kota Madiun selama 5 tahun terakhir sudah berangsur angsur terkendali.) Pada Tahun 2022 dan 2023 seluruh dunia mengalami krisis pangan dan energi yang menyebabkan inflasi menjadi lebih besar dan banyak negara yang mengalami krisis, memasuki Tahun 2024 kondisi ekonomi dibayangi Deflasi, sehingga angka Inflasi untuk Kota Madiun pada Tahun 2024 diproyeksikan sekitar 2,35 persen.

2.1.4. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)

Pengangguran merupakan salah satu fenomena ekonomi makro yang menjadi permasalahan pada setiap daerah, tidak terkecuali Kota Madiun. Di Kota Madiun Tingkat Pengangguran

Terbuka (TPT) merupakan indikator pada penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan. Namun demikian, permasalahan pengangguran sebenarnya merupakan persoalan yang menjadi tanggungjawab bersama lintas sektoral sehingga beberapa OPD harus saling mendukung terhadap upaya pengurangan tingkat pengangguran terbuka ini. Kondisi pengangguran mencerminkan tingkat kualitas Sumber Daya Manusia dengan kecukupan lapangan kerja di suatu daerah. Kinerja pembangunan ekonomi di Kota Madiun juga bisa tercermin dari indikator tingkat pengangguran terbuka ini.

Berikut merupakan gambaran mengenai perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Kota Madiun selama beberapa tahun terakhir.

GRAFIK 2.1.4.1
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2020-2024

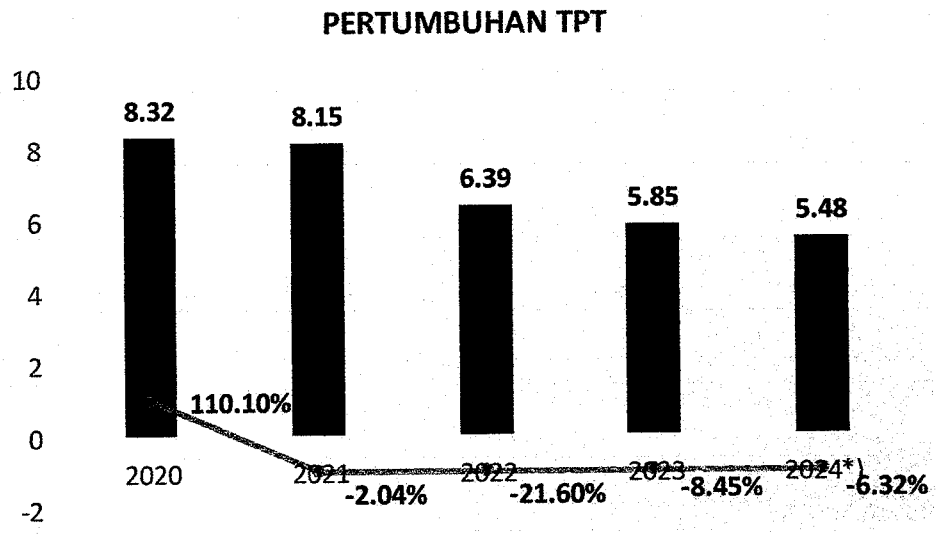

Sumber: BPS Kota Madiun Tahun 2024
**) Angka Sementara*

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Madiun mengalami penurunan selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020 Tingkat Pengangguran Terbuka diangka 8,32, mengalami penurunan sedikit sebesar 0,17 persen menjadi 8,15 di tahun 2021 dan juga pada tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup tajam menjadi 6,39 sebagai dampak adanya pandemic Covid-19 yang menyebabkan adanya PHK dan pelaku usaha tidak bisa melaksanakan usahanya secara maksimal. Sedangkan pada Tahun 2023 juga masih sama mengalami penurunan kembali sebesar 5,85, karena kondisi ekonomi masih sangat tertekan sehingga banyak terjadi PHK dan UMKM sudah mulai sedikit bangkit karena dukungan dari pemerintah, sedangkan pada Tahun 2024 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Madiun diproyeksikan juga mengalami penurunan sebesar 5,48.

2.1.5. KEMISKINAN

Perkembangan tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin Kota Madiun Tahun 2020 - 2024 dapat dilihat di bawah ini.

Grafik 2.1.5.1

Tingkat Kemiskinan dan Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kota Madiun Tahun 2020 – 2024

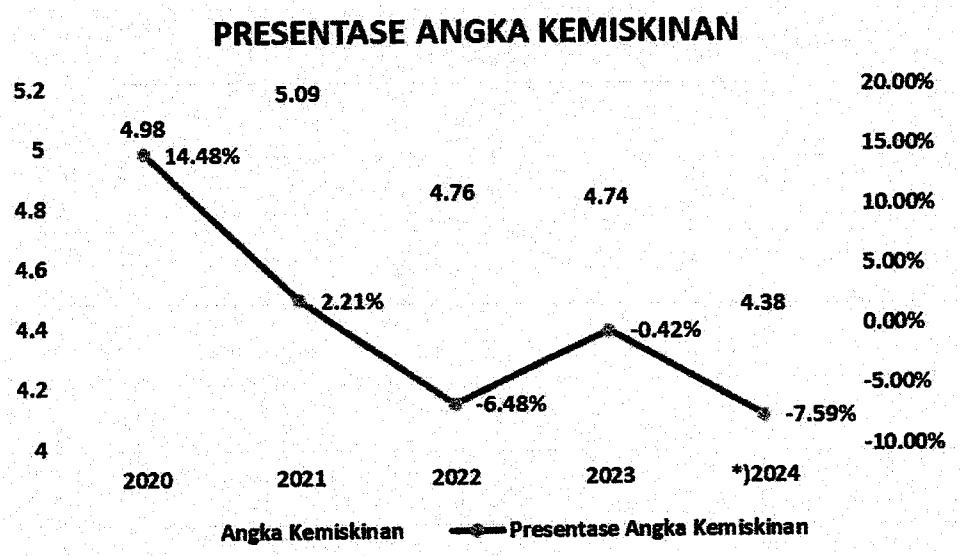

Sumber: BPS Kota Madiun Tahun 2024

Dari gambar di atas dapat dilihat perkembangan prosentase penduduk miskin Kota Madiun Tahun 2020 menunjukkan angka yang sangat rendah yang menunjukkan program program penanggulangan kemiskinan bisa berjalan dengan baik. Tetapi pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan yang juga sangat signifikan, hal ini disebabkan karena terjadinya pandemi Covid 19 yang menekan perekonomian global, nasional maupun daerah yang mempunyai efek jangka panjang. Pada Tahun 2022 Tingkat Kemiskinan berhasil diturunkan sejalan dengan dilaksanakannya program – program pengentasan kemiskinan dan stimulus ekonomi oleh Pemerintah Kota Madiun sebagai bagian upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi domestik sebagaimana melaksanakan apa yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Pusat dengan meluncurkan Program PEN. Kondisi tersebut masih berlanjut pada Tahun 2023, dimana Tingkat Kemiskinan terus mengalami penurunan, sedangkan Tahun 2024 Tingkat Kemiskinan diproyeksikan mengalami penurunan lagi sejalan kondisi ekonomi yang stabil dan mengalami perbaikan berkelanjutan, sehingga program-program penanggulangan kemiskinan oleh Pemerintah Kota Madiun bisa berjalan dengan baik.

2.1.6. INDEK PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Madiun dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Kemajuan tersebut terlihat dari peningkatan semua komponen penyusun IPM

yaitu Indeks Kesehatan, Angka Harapan Hidup, Indeks Pendidikan, Angka Melek Huruf, Rata-rata Lama Sekolah, Indeks PPP dan Kemampuan Daya Beli. Kemajuan pembangunan manusia di Kota Madiun tersebut mengindikasikan capaian pembangunan yang telah dilaksanakan sudah cukup baik, perlu dipertahankan dan ditingkatkan di masa mendatang.

Tabel 2.1.6.1
Perkembangan IPM Kota Madiun Tahun 2020 s/d 2024

Indeks	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
IPM	81,03	82,27	83,02	82,71	84,51
Indeks Kesehatan	0,81	0,81	0,82	0,82	0,82
Umur Harapan Hidup	72,81	72,83	73,13	73,44	75,67
Indeks Pengetahuan	0,85	0,78	0,79	0,79	0,79
Harapan Lama Sekolah	14,4	14,40	14,43	14,44	14,54
Rata-rata Lama Sekolah	11,14	11,37	11,67	11,82	12,11
Indeks Pengeluaran	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
Pengeluaran per kapita (000 Rp)	16,010	16,095	16,503	17,115	17,518

Sumber: BPS Kota Madiun Tahun 2024

**) Angka Sementara*

IPM Kota Madiun pada Tahun 2024 diproyeksikan mencapai 84,51 atau naik sebesar 0,54 poin dibanding Tahun 2023 yang mencapai 82,71 yang secara umum dapat dikatakan bahwa angka IPM yang naik menandakan pembangunan manusia di Kota Madiun mengalami kemajuan menuju ke arah yang lebih baik. Kota Madiun masuk daerah dengan IPM sangat tinggi karena lebih dari 80. Umur Harapan Hidup Kota Madiun diproyeksikan juga mengalami kenaikan dari 73,44 menjadi 75,67 atau mengalami peningkatan sebesar 2,23 dibandingkan tahun 2023, hal ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Sedangkan untuk angka Harapan Lama Sekolah dan Rata – Rata Lama Sekolah masing – masing mengalami kenaikan sebesar 14,54 dan 12,11 dibandingkan tahun 2023. Sementara angka Indeks Pengeluaran per kapita juga mengalami kenaikan sebesar 17,518 dibandingkan tahun 2023 yang mengindikasikan inflasi bergerak moderat terkendali yang menandakan tumbuhnya pertumbuhan ekonomi Kota Madiun yang cukup signifikan.

2.1.7. GINI RATIO (IPM)

Nilai Gini Ratio berkisar antara 0–1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Gini Ratio Kota Madiun pada tahun 2020-2024 tercatat secara rinci pada angka 0,390 pada tahun 2020, pada angka 0,345 pada tahun 2021, pada angka 0,398 pada tahun 2022, sedangkan pada tahun 2023 tercapai pada angka 0,416, dengan demikian termasuk Kota dengan ketimpangan sedang. Mulai Tahun 2024 pergerakan

sudah mulai melandai maka Gini Ratio Kota Madiun menunjukkan trend yang semakin menurun, yang menunjukkan ketimpangannya semakin berkurang.

Grafik 2.1.7.1
Perkembangan GINI RATIO Kota Madiun Tahun 2020 s/d 2024

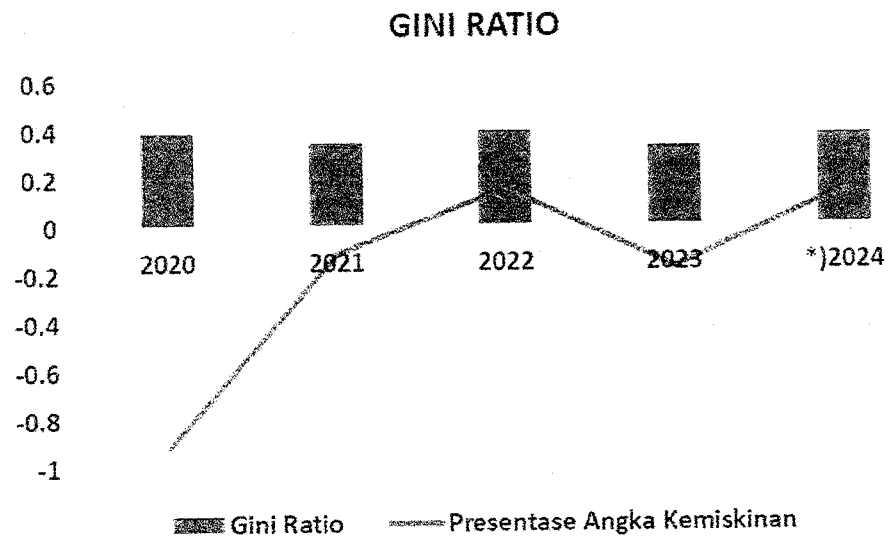

Sumber: BPS Kota Madiun Tahun 2024
***) Angka Proyeksi*

LAPORAN SERAPAN
INSENTIF FISKAL

Tabel Laporan TL.1
RENCANA PENGGUNAAN DANA INSENTIF DAERAH
(DID TAHUN BERJALAN PRIORITAS NASIONAL) TAHUN ANGGARAN 2024
KOTA MADIUN

Jenis Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Output	
			Jumlah	Satuan
BIDANG PENINGKATAN INVESTASI	**22.396.499.000**	**15.980.418.800**		
1. Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	7.826.100.000	1.410.019.800	854	Drainase
2. Pemeliharaan Berkala Jalan	14.570.399.000	14.570.399.000	20	Km
BIDANG PENURUNAN KEMISKINAN	**10.201.200.000**	**4.332.000.000**		
1.Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga (BLTD)	3.151.200.000	1.518.000.000	1313	Orang
2.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Bantuan Beasiswa Mahasiswa)	7.050.000.000	2.814.000.000	798	Orang
Jumlah	**32.597.699.000**	**20.312.418.800**		

2.1.8. RENCANA TARGET EKONOMI MAKRO KOTA MADIUN

Memasuki Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kota Madiun telah menentukan arah kebijakan ekonomi yang adaptif, akuntabel dan agile terhadap dinamika ekonomi, yang selalu mempertimbangkan perkembangan ekonomi domestik, regional dan global, karena kondisi perekonomian domestik sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian regional, nasional maupun global. Pada Tahun 2024 tantangan ekonomi sangat dipengaruhi oleh kondisi deflasi yang dipengaruhi oleh ketidakseimbangan *Supply & Demand* pada siklus ekonomi masyarakat yang dipengaruhi oleh transisi ekonomi menuju ekosistem digital, dimana kondisi itu telah memutus mata rantai jalur distribusi ekonomi dari produsen ke konsumen, sehingga pelaku dunia usaha dituntut untuk lebih adaptif dan kreatif dalam menjalankan pola usaha dan kegiatan ekonominya. Digitalisasi ekonomi merubah kapasitas ekonomi dengan memangkas jalur distribusi perdagangan mulai dari Distributor, Agen hingga Retailer, yang mengakibatkan menurunnya penyerapan jumlah tenaga kerja, kapasitas produksi dan menurunnya tingkat daya beli masyarakat yang beperan besar dalam menjaga keseimbangan ekonomi. Sebuah tantangan besar dalam ekonomi nasional dan daerah dalam memasuki era perluasan ekosistem ekonomi digital yang harus diiringi dengan peningkatan kapasitas SDM. Hal itu tentunya merupakan pekerjaan besar bersama semua leading sektor Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Pusat, melalui transformasi pendidikan yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan kebutuhan pasar. Tantangan lain yang masih berlangsung yaitu menghadapi kondisi harga pangan yang melonjak terutama kenaikan harga beras di tingkat konsumen, Pemerintah Kota Madiun secara rutin telah mengadakan operasi pasar murah Bahan Pokok, terutama beras murah. Hal tersebut dilakukan untuk menekan laju inflasi dan menopang daya beli masyarakat bawah terhadap kebutuhan harga bahan pokok. Selain tantangan di atas, kondisi Geopolitik & Geoekonomi juga sangat berpengaruh, dimana gejolak peperangan yang masih berlangsung di eropa dan timur tengah masih akan memberikan efek domino pada kondisi perekonomian global, dimana mengakibatkan penurunan konsumsi produk – produk dari Negara Asia termasuk Indonesia oleh Negara Eropa dan Timur Tengah. Hal itu akan berimplikasi pada pengurangan kapasitas produksi manufaktur dan akan mengurangi jumlah tenaga kerja. Efek domino dari rangkaian kondisi di atas Kota Madiun akan terimbas, terutama dari kondisi arus balik korban PHK yang mencoba untuk memulai usaha di Kota Madiun dalam jumlah yang relatif besar. Hal itu tercermin dari jumlah pedagang UMKM yang mengalami kenaikan yang cukup tajam.

Dengan melihat kondisi di atas Pemerintah Kota Madiun telah berupaya dengan memberikan stimulus ekonomi pada sektor menengah dan bawah dengan kebijakan – kebijakan Pro Rakyat sebagai upaya membantu berlangsungnya kegiatan ekonomi masyarakat. Pemerintah Kota Madiun juga selalu memperhatikan faktor ekonomi yang bersifat internal dan eksternal, yaitu kondisi ekonomi regional, nasional dan global yang

sangat mempengaruhi kondisi sosial dan ekonomi di tingkat daerah. Sehingga Pemerintah Kota Madiun juga merasakan tidak terlepas dari dampak tersebut dimana dalam postur APBD selalu melakukan penyesuaian prioritas program untuk menghadapi kondisi tersebut. Penajaman program unggulan yang bersifat kerakyatan menjadi hal yang utama dalam upaya memberi jalan keluar atas beberapa tantangan di atas, sehingga Kota Madiun telah melakukan penyesuaian terhadap kondisi tersebut.

Berdasarkan kondisi perekonomian global, nasional dan regional provinsi Jawa Timur, maka capaian perekonomian Kota Madiun tahun 2022, 2023 dan prospek tahun 2024 dapat dilihat dalam indikator ekonomi di bawah ini.

Tabel 2.1.8.1
Proyeksi Perekonomian Kota Madiun Tahun 2022 – 2024

KETERANGAN	Realisasi	Proyeksi	
	2022	2023	2024
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,52	5,80	5,55
PDRB ADHB (juta rupiah)	15.825,61	17.256,23	18.383,23
PDRB ADHK (juta rupiah)	11.119,55	11.764,40	12.474,61
PDRB per Kapita (juta rupiah)	79,45	85,65	88,92
TPT (%)	6,39	5,85	5,48
IPM	83,02	82,71	84,51
Inflasi (%)	5,8	2,35	2,35
Kemiskinan	4,76	4,74	4,38
Indeks Gini	0,398	0,416	0,385

Sumber: KUA Tahun 2024

Dari tabel di atas, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun secara moderat pada tahun 2023 mencapai 5,80 dan pada tahun 2024 diproyeksikan akan mencapai 6,12 persen. Proyeksi pertumbuhan ekonomi menghadapi tantangan baru yaitu percepatan digitalisasi, stabilitas harga pangan dan konflik geopolitik yang berimbas pada perlambatan ekonomi. Dengan level pertumbuhan ekonomi tersebut. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada proyeksi tahun 2024 sebesar 5,48 persen atau mengalami penurunan dari tahun 2023. Diharapkan pada tahun 2024 terjadi *recovery* ekonomi yang ditopang dengan kelanjutan atas program pemerintah yang dapat menurunkan tingkat resiko inflasi dan perlambatan ekonomi, sehingga angka TPT di proyeksikan mengalami penurunan sampai angka 5,48 persen pada tahun 2024. Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2023 tercapai sebesar 82,71 persen dan pada tahun 2024 diproyeksikan mengalami kenaikan menjadi sebesar 83,25. Begitu juga terhadap Tingkat Kemiskinan pada tahun 2023 sebesar 4,74 diperkirakan

menjadi 4,45 pada Tahun 2024 seiring dengan berjalannya *recovery* ekonomi yang telah mulai berjalan sejak tahun 2022.

Untuk mendukung capaian pemulihan ekonomi serta pertumbuhan ekonomi tersebut, maka ada beberapa strategi yang harus dilakukan agar target tersebut tercapai :

a. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menyederhanakan regulasi yang berkaitan investasi, sehingga dapat menarik para investor.
b. Meningkatkan peran KUMKM melalui penguatan kelembagaan dan rumusan kebijakan yang aplikatif untuk pelaku usaha.
c. Peningkatan daya saing ekonomi daerah berbasis kearifan lokal dan potensi lokal.
d. Meningkatkan kapasitas SDM yang unggul dan kompetitif.
e. Melakukan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan perluasan lapangan kerja bagi masyarakat, serta meningkatkan ketrampilan kerja dalam rangka menanggulangi peningkatan PHK.
f. Menetapkan dan meningkatkan serta mengawasi pelaksanaan upah minimum kota agar dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi jumlah pengangguran.
g. Meningkatkan dan memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat di setiap kelurahan sehingga mampu bersaing.
h. Mengembangkan industri kecil dan industri rumah tangga berdaya saing tinggi sesuai potensi keunggulan masing-masing.
i. Pengembangan dan peningkatan kemampuan teknologi industri serta pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas dan daya saing.
j. Peningkatan dukungan terhadap pengusaha lokal melalui pengembangan ekonomi kreatif.
k. Memberikan insentif fiskal kepada pengusaha kecil (UMKM) sebagai bantalan ekonomi dalam menghadapi fluktuasi harga pangan.

2.2. KEBIJAKAN KEUANGAN

2.2.1. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

2.2.1.1. KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH

Analisa dan proyeksi keuangan daerah didasarkan pada data masa lalu, baik pertumbuhan, nilai nominal, kebutuhan masyarakat, potensi penerimaan dan beberapa kondisi yang mempengaruhi. Proyeksi pendapatan daerah didasarkan pada potensi pendapatan daerah, baik PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Selanjutnya, proyeksi belanja daerah memperhatikan dan menyesuaikan dengan kemampuan pendanaan

daerah serta kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat dapat diidentifikasi dari hasil musrenbang, yang dilakukan mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai dengan Kota.

Dengan mengikuti arah kebijakan nasional, regional, dan mengacu pada RPJMD 2019–2024, maka perlu dirumuskan arah kebijakan keuangan Kota Madiun. Arah kebijakan keuangan daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta isu strategis daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana yang merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Terdapat beberapa arah kebijakan utama, antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan target pendapatan daerah secara terencana sesuai dengan kondisi perekonomian terkini dan potensi yang ada;
2. Penguatan kondisi fundamental ekonomi daerah sebagai dampak inflasi dan perlambatan ekonomi membutuhkan berbagai insentif fiskal baik dari sisi pendapatan maupun belanja;
3. Peningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah sesuai dengan perkembangan kondisi ekonomi dan sosial daerah dan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap memperhatikan tidak menambah beban bagi masyarakat yang pada akhirnya akan menjadi kontra produktif;
4. Optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya peningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah juga memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih baik;
5. Peningkatan peran dan fungsi Unit Pelaksana Teknis dan OPD Penghasil dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan sekaligus peningkatan pendapatan;
6. Optimaliasi penerimaan pendapatan transfer baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun yang bersumber dari pemerintah provinsi, terutama pendapatan transfer yang bersifat reward kepada daerah yang tentu saja dibuktikan dengan capaian keberhasilannya;
7. Peningkatan sistem pengelolaan aset dan keuangan daerah, terutama dalam hal meningkatkan pemanfaatan aset daerah agar bisa menghasilkan pendapatan daerah;

8. Peningkatan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam upaya pemenuhan kebutuhan fiskal daerah dengan pendanaan dari pusat maupun provinsi;
9. Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam pengelolaan pajak dan retribusi disertai dengan peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah dengan cara melakukan upaya perbaikan sistem pelayanan pungutan daerah; dan
10. Peningkatan penegakan hukum yang tegas terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah.

2.2.1.2. TARGET PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah), Dana Perimbangan (dana bagi hasil, DAU, DAK), dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Setiap sumber pendapatan daerah memiliki porsi yang berbeda dalam menentukan besarnya pendapatan daerah.

Grafik 2.2.1.2.1
Trend Persentase Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2020 – 2024

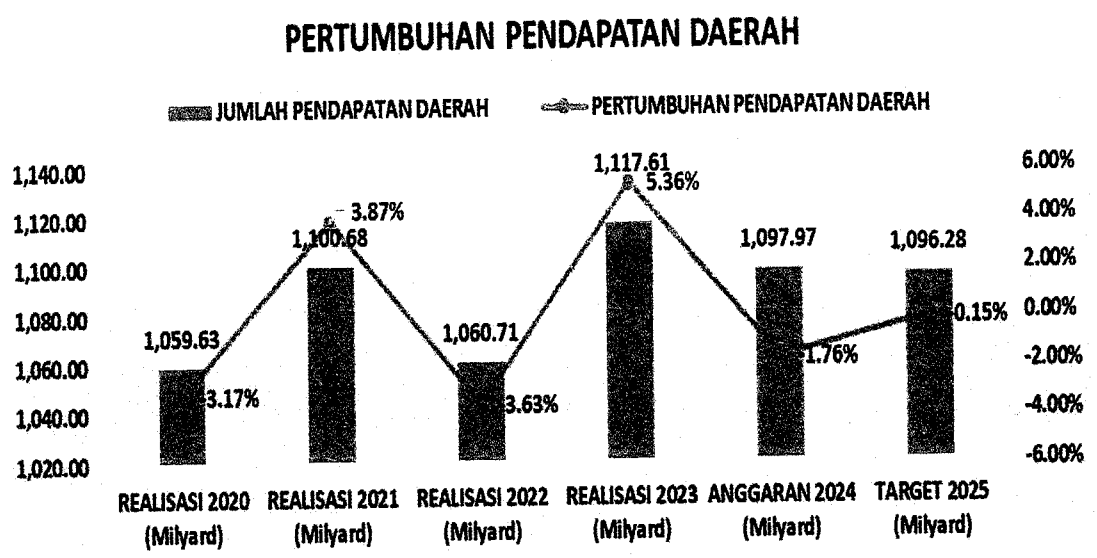

Sumber: BKAD Kota Madiun 2024 data diolah

Trend pendapatan daerah terus mengalami pertumbuhan yang fluktuatif mulai terbitnya perubahan regulasi yaitu dengan adanya perubahan kewenangan beberapa bidang urusan, pada Tahun 2020 mengalami penurunan pertumbuhan sebesar minus 3,17%. Pada Tahun 2021 realisasi Pendapatan Daerah sebesar 1.100,68 miliar atau mengalami pertumbuhan sekitar 3,87%. Pada tahun 2022 pendapatan mengalami penurunan menjadi sebesar 1.060,71

atau sebesar minus 3,63% karena adanya pengurangan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang disebabkan kompensasi pembiayaan atas pelaksanaan pengendalian pandemi COVID-19 Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh TNI/Polri yang dibiayai APBN. Sedangkan pada Tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 1.17,61 atau sebesar 1,73 %. Selanjutnya pada Tahun 2024 mengalami penurunan Kembali menjadi 1.097,97 atau sebesar 3,60%

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pemerintah secara konsisten berupaya memperkuat dan menyempurnakan kebijakan desentralisasi fiskal untuk mendukung tercapainya peningkatan layanan publik di daerah. Konsistensi tersebut diwujudkan tidak hanya melalui penguatan desentralisasi fiskal dari sisi pengeluaran, tetapi juga dari sisi penerimaan berupa perluasan *local taxing power*. Perluasan *local taxing power* diilhami dari rendahnya penerimaan Pajak dan Retribusi daerah yang diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi daerah kabupaten dan kota. Selama ini, sebagian besar pengeluaran APBD masih dibiayai dana transfer dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran daerah. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan adanya hubungan yang sinergi dan harmonis Keuangan Pusat dan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Harmonisasi Keuangan Pusat dan Daerah.

Selain pajak dan retribusi daerah komponen Pendapat Asli Daerah ada Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD Yang Sah. Dengan pengelolaan kekayaan daerah secara optimal maka diharapkan dapat memberikan pendapat bagi daerah yang akan digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan. Untuk Lain-Lain PAD yang yang komponen utamanya adalah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pengelolaan BLUD yang efektif dan efisien diharapkan bisa memberikan kontribusi yang besar pada PAD.

Secara keseluruhan Pemerintah Kota Madiun selalu berusaha untuk meningkatkan PAD dengan melakukan inovasi maupun terobosan baik dengan intensifikasi maupun ekstensifikasi dengan batasan apa yang dilakukan Pemerintah Kota Madiun tersebut tidak memberatkan bagi masyarakat.

Tabel 2.2.1.2.1
Peta Potensi Pajak Daerah

URAIAN	JUMLAH (Rp)				
	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023	REALISASI 2024	TARGET 2025
PAJAK DAERAH	**87.874.777.059,32**	**106.165.312.122,76**	**113.514.116.369,67**	**102.506.770.000,00**	**138.994.500,000.00**
Pajak Hotel	4.651.995.032,00	7.026.280.556,00	8,130,855,159.00	6,900,000,000.00	6,900,000,000.00
Pajak Restoran	12.191.757.300,09	19.278.495.104,00	23,343,654,772.00	18,000,000,000.00	18,000,000,000.00
Pajak Hiburan	416.770.721,00	1.638.210.592,00	1,845,737,251.00	1,375,000,000.00	1,375,000,000.00
Pajak Reklame	2.079.605.858,00	2.114.017.568,00	2,304,955,619.00	1,922,220,000.00	2,100,000,000.00
Pajak Penerangan Jalan	20.011.884.363,64	22.103.164.301,44	23,482,333,529.83	21,936,250,000.00	21,936,250,000.00
Pajak Parkir	664.001.863,00	1.434.441.434,55	1,683,862,056.00	1,350,000,000.00	1,350,000,000.00
Pajak Air Tanah	324.737.466,40	292.100.851,30	318,395,998.84	280,000,000.00	285,000,000.00
Pajak Bumi dan Banguunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	22.852.741.293,00	24.574.559.488,00	23,884,649,634.00	24,109,700,000.00	22,550,000,000.00
BPHTB-Pemindahan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	24.606.442.112,19	27.091.414.127,47	28,519,672,350.00	26,633,600,000.00	26,750,000,000.00
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	37.936.419.479,73	51.480.591.987,99	58.486.442.767,83	49.561.250.000,00	55.449.500.000,00
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0,00	0,00	0,00	0,00	24,650,000,000.00
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.210.000.000,00
Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00	25.959.699.464,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00	7.590.252.661,00

Tabel 2.2.1.2.2
Peta Potensi Retribusi Daerah

URAIAN	JUMLAH (Rp)				
	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023	REALISASI 2024	TARGET 2025
RETRIBUSI DAERAH	**17.501.688.195,00**	**21.385.348.837,00**	**22.551.072.553,00**	**18,012,701,000.00**	**131,142,088,290.00**
Retribusi Jasa Umum	3.456.867.597,00	4.255.304.240,00	3.795.130.578,00	3,718,317,000.00	117,046,856,340.00
Retribusi Jasa Usaha	13.366.161.598,00	16.102.531.597,00	17.565.540.621,00	13,543,304,000.00	13,345,231,950.00
Retribusi Perijinan Tertentu	678.659.000,00	1.027.513.000,00	1.190.401.354,00	751,080,000.00	750,000,000.00

Tabel 2.2.1.2.3
Peta Potensi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

URAIAN	JUMLAH (Rp)				
	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023	REALISASI 2024	TARGET 2025
HASIL PENGELOAAN KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN	**16.199.882.796,95**	**15.595.752.355,97**	**14.983.008.032.73**	**14,271,720,400.00**	**14,127,425,985.00**
Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	8.537.292.563,95	7,916,509,815.97	7,697,384,827.43	6,986,097,200.00	6,986,097,200.00
Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	7.662.590.233,00	7,679,242,540.00	7,285,623,205.30	7,285,623,200.00	7,141,328,785.00

Tabel 2.2.1.2.4
Peta Potensi Lain-Lain PAD Yang Sah

URAIAN	JUMLAH (Rp)				
	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023	REALISASI 2024	TARGET 2025
LAIN-LAIN PAD YANG SAH	**144.381.914.165,59**	**121,065,816,201.82**	**6,148,573,834.16**	**4,883,142,816.00**	**687,290,300.00**

Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan	38.983.000,00	512,718,642.00	481,891,662.00	32,000,000.00	34,000,000.00
Jasa Giro	84.665.913,20	89,080,155.53	599,729,647.13	80,000,000.00	525,000,000.00
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	106.912.536,22	98,561,827.86	75,333,024.01	128,290,316.00	128,290,300.00
Pendapatan Bunga	9.099.624.602,86	6,961,975,880.18	2,880,498,521.96	4,500,000,000.00	-
Pendapatan Denda Atas Keterlambatan	70.676.998,78	56,062,722.01	172,086,543.39	142,852,500.00	
Pendapatan Denda Pajak Daerah	159.920.658,00	624,387,027.00	629,196,758.00	-	-
Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	-	121838700		-
Pendapatan Dari Pengembalian	168.330.911,73	2,715,956,140.09	1,187,998,977.67		-
Pendapatan dari Angsuran/Cicilan/Penjualan	-	-	-	-	-
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	-	-	-	-
Pendapatan Lain-Lain	-	-	-	-	-
Pendapatan Denda atas Pelanggaran-Lengkap Perda	814.398.020,40	-	-	-	-

Persentase pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun kurun waktu enam tahun terakhir sebagai berikut.

Grafik 2.2.1.2.2
Persentase Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 – 2024

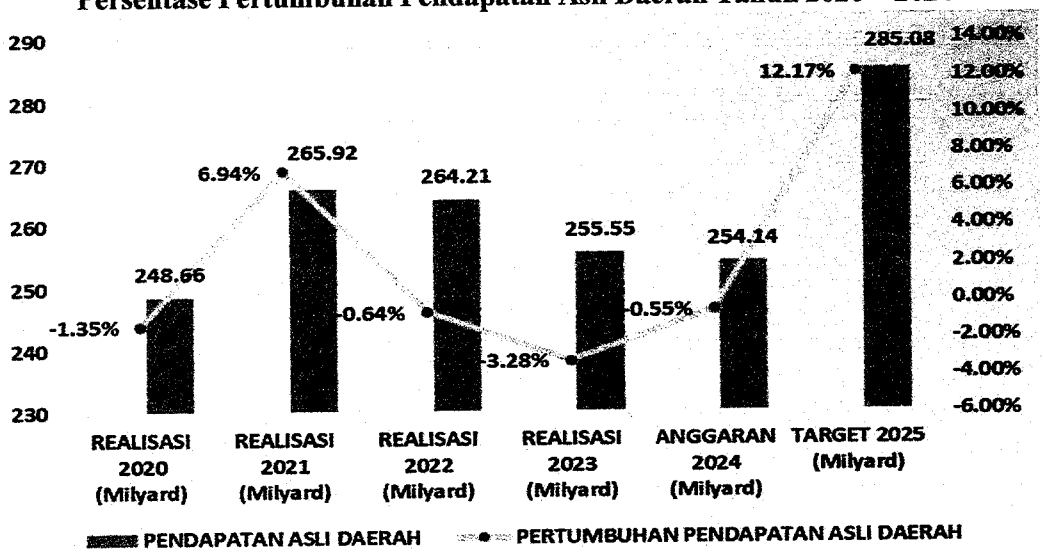

Sumber: BKAD Kota Madiun 2024 data diolah

2. Dana Perimbangan

Dari gambar perkembangan pendapatan dana perimbangan Kota Madiun di bawah ini, terlihat bahwa dana perimbangan masih didominasi oleh dana alokasi umum yang memang salah satunya diperuntukkan gaji pegawai serta pembangunan.

Grafik 2.2.1.2.3
Persentase Pertumbuhan Dana Transfer Tahun 2020 – 2024

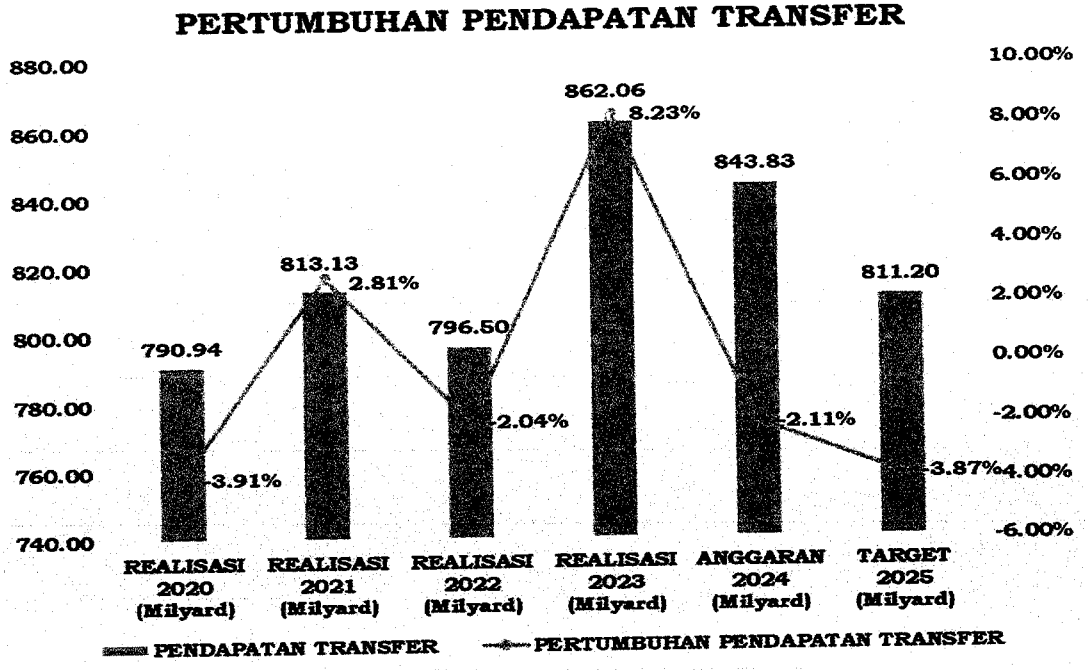

Sumber: BKAD Kota Madiun 2024 data diolah

Dana Transfer adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi, dana transfer terdiri dari dana transfer pusat dan dana transfer antar daerah. Dana Transfer ditujukan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dan antara pemerintah daerah, yang dialokasikan berupa Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah, DBH-CHT, Dana Bagi Hasil Provinsi dan Dana Bantuan Keuangan Provinsi.

2.2.2. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

2.2.2.1. KEBIJAKAN PERENCANAAN BELANJA DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa belanja daerah terdiri dari jenis belanja yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja operasi terdiri dari

belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

Sedangkan belanja modal terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal aset tetap lainnya dan belanja modal aset lainnya. Kebijakan untuk Tahun 2021 belanja digunakan untuk belanja yang terkait langsung dengan program dan kegiatan. Kebijakan pembangunan daerah untuk Tahun 2021 berpedoman pada RPJMD 2019-2024 dengan tetap melaksanakan program kegiatan sesuai dengan skala prioritas daerah dalam rangka mencapai target kinerja yang ada di RPJMD. Pencapaian hasil-hasil pembangunan dalam tahun anggaran sebelumnya akan terus ditingkatkan sesuai kemampuan keuangan daerah serta inovasi dan peningatan kinerja daerah. Selain itu, dalam penyusunan kebijakan belanja daerah digunakan prinsip efektifitas dan efisiensi yang menggunakan sistem anggaran berbasis kinerja *(money follow program)*.

Kebijakan belanja daerah di atas, didasari oleh beberapa asumsi pokok sebagai berikut :

1. Perkiraan penerimaan pendapatan daerah diharapkan dapat terpenuhi, sehingga dapat memberikan dukungan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah dan mampu mencukupi kebutuhan pelayanan dasar serta penyelenggaraan pemerintahan Kota Madiun.
2. Perkiraan kebutuhan belanja daerah dapat mendanai program-program strategis serta prioritas daerah dalam mendukung dan menjaga target-target indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2019 – 2024.

Arah kebijakan belanja daerah Kota Madiun adalah sebagai berikut.

1. Belanja gaji pegawai beserta tunjangan dan penerimaan lainnya dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Peningkatan alokasi belanja yang mengarah pada program yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, terutama pada kepentingan publik.
3. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dan disertai sistem pelaporan yang akuntabel.
4. Menitikberatkan pada pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Madiun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
5. Kebijakan belanja dititikberatkan pada prioritas pembangunan Kota Madiun tahun 2021 dan diarahkan pada optimalisasi pencapaian sasaran/target kinerja masing-masing OPD yang tertuang dalam Renstra dan Renja OPD.

6. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja (*money follow program*) dan disertai pengendalian, evaluasi dan sistem pelaporan yang akuntabel.
7. Optimalisasi pemanfaatan pendapatan transfer, dana dekonsentrasi, serta sumber dana lain dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
8. Peningkatan efektifitas penggunaan alokasi belanja daerah sesuai dengan TUPOKSI dan kewenangan masing-masing Perangkat Daerah.
9. Mendayagunakan penggunaan belanja daerah untuk menstimulasi tumbuh kembangnya partisipasi sektor swasta dan swadaya masyarakat dalam pembangunan daerah.
10. Belanja tidak terduga benar-benar dialokasikan untuk mengatasi kejadian luarbiasa yang bersifat *force mayor*.

Semuanya dianggarkan dan penggunaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.3. TARGET KINERJA APBD

Sebagai bentuk dari anggaran berbasis kinerja maka setiap pengeluaran belanja daerah harus memiliki kejelasan hasil dengan ditetapkannya target-target capaian pada setiap program dan kegiatan dari urusan pemerintah. Secara ringkas target pencapaian kinerja tahun anggaran 2023 pada setiap urusan pemerintahan.

2.3.1. URUSAN WAJIB

Urusan wajib di Pemerintah Kota Madiun terdiri dari 23 bidang kewenangan sebagaimana dijelaskan di bawah ini. Selain itu terbagi juga menjadi dua urusan wajib pelayanan dasar dan urusan wajib tidak pelayanan dasar.

a. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan
2. Urusan Kesehatan
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6. Urusan Sosial

b. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1. Urusan Tenaga Kerja
2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Urusan Pangan
4. Urusan Pertanahan
5. Urusan Lingkungan Hidup
6. Urusan Administrasi Kependudukan dan PencatatanSipil

7. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8. Urusan Perhubungan
9. Urusan Komunikasi dan Informatika
10. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
11. Urusan Penanaman Modal
12. Urusan Kepemudaan dan Olahraga
13. Urusan Statistik
14. Urusan Persandian
15. Urusan Kebudayaan
16. Urusan Perpustakaan
17. Urusan Kearsipan

2.3.2. URUSAN PILIHAN

Urusan pilihan di Pemerintah Kota Madiun terdiri dari 6 bidang kewenangan sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

1. Urusan Kelautan dan Perikanan
2. Urusan Pariwisata
3. Urusan Pertanian
4. Urusan Perdagangan
5. Urusan Perindustrian
6. Urusan Transmigrasi

2.3.3 URUSAN PENUNJANG

Urusan penunjang di Pemerintah Kota Madiun terdiri dari 8 bidang kewenangan sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

1. Unsur Staf (Sekretariat Daerah)
2. Pelayanan Administrasi dan Pemberian Dukungan Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD
3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
4. Perencanaan
5. Keuangan
6. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
7. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8. Kecamatan

2.3.4. TARGET KINERJA KEUANGAN OPD

Target kinerja keuangan untuk urusan wajib dan urusan pilihan pada masing-masing OPD disajikan dalam lampiran laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Daerah Kota Madiun.

Pengungkapan Perubahan Anggaran :

Selama Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kota Madiun telah melakukan sekali perubahan penjabaran APBD terkait mandatory spending yang harus dianggarkan. Perubahan anggaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3.4.1

Tabel Perubahan Anggaran

Struktur APBD	APBD Murni (Rp)	Perkada No. 27 Tahun 2024 Tanggal 27 Mei 2024 (Rp)	APBD Perubahan (Rp)
Pendapatan:	**1.097.967.032.000,00**	**1.125.132.576.700,00**	**1.097.967.032.000,00**
Pendapatan Asli Daerah	254.141.714.400,00	254.582.949.700,00	254.141.714.400,00
Pendapatan Transfer	843.825.317.600,00	870.549.627.000,00	843.825.317.600,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00
Belanja	**1.232.967.032.000,00**	**1.239.086.181.852,00**	**1.232.967.032.000,00**
Belanja Pegawai	498,361,265,622.00	498.820.604.622,00	498.361.265.622,00
Belanja Barang dan Jasa	496,250,751,989.00	500.888.513.394,00	496.250.751.989.00
Belanja Bunga	0.00	0,00	0.00
Belanja Subsidi	50,000,000.00	50.000.000,00	50.000.000.00
Belanja Hibah	34,955,559,517.00	34.955.559.517,00	34.955.559.517.00
Belanja Bantuan Sosial	27,905,758,000.00	33.428.774.528,00	27.905.758.000.00
Belanja Modal	173.443.696.872,00	168.035.591.558,00	173.443.696.872,00
Belanja Tak Terduga	2.000.000.000,00	2.907.138.233,00	2.000.000,000,00
Belanja Transfer	0,00	0,00	0,00
Pembiayaan Neto	**135.000.000.000,00**	**113.953.605.152,00**	**135.000.000.000,00**
SiLPA	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Sebelum Penetapan APBD-Perubahan Tahun 2024, Pemerintah Kota Madiun telah melakukan Perubahan Penjabaran APBD sebanyak satu kali, yaitu :

Perkada Nomor 27 Tahun 2024, Tanggal 27 Mei 2024

Alasan yang menyebabkan terjadinya perubahan adalah bahwa dengan terbitnya :

- Telah ditetapakannya Surat Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.3/46/KPTS/013/2024 tanggal 24 Januari 2024 tentang Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten Kota Se-Jawa Timur Berdasarkan Target APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024
  - Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor yang sebelumnya sebesar

Rp28.601.641.000,00 mengalami perubahan menjadi sebesar Rp30.277.000.000,00.

- Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang sebelumnya sebesar Rp12.062.084.000,00 mengalami perubahan menjadi sebesar Rp10.608.000.000,00.
- Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang sebelumnya sebesar Rp17.363.013.000,00 mengalami perubahan menjadi sebesar Rp28.968.000.000,00.
- Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan Rp.231.250,000,00 mengalami perubahan menjadi sebesar Rp.228.000.000,00.

➢ Telah ditetapkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/690/KPTS/013/2023 tanggal 12 Desember Tahun 2023, tentang Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota Sejawa Timur Berdasarkan Estimasi Pendapatan Pajak Rokok Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024.

- Bagi Hasil dari Pajak Rokok Rp.37.405.500,000,00 mengalami perubahan menjadi sebesar Rp.36.993.020.000,00.

➢ Adanya Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2024 Nomor 100.3.3.1/140/KPTS/013/2024 tentang Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan Kepada Kabupaten/Kota yang Diverifikasi oleh Dinas Pendidikan Jawa Timur Tahun Anggaran 2024.

- Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan Rp618.902.600,00 mengalami perubahan menjadi sebesar Rp670.650.000,00.

➢ Adanya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 84 Tahun 2024 Tanggal 5 Desember tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024.

- Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakaku Rp29.607.909.000,00 mengalami perubahan menjadi sebesar Rp26.402.123.000,00.

➢ Adanya Surat Direktur Jendral Perimbangan Keuangan Nomor S.54/PK/PK.2/2024 tanggal 26 Maret 2024 tentang Telah Ditransfer Treasure Deposit Facility (TDF) Kota Madiun sebesar Rp18.468.416.000,00.

➢ Adanya Penambahan Pendapatan Pajak Daerah sebelumnya Rp102.506.770.000,00 menjadi Rp104.610.950.000,00.

Sehingga harus melakukan perubahan Penjabaran APBD, karena harus melakukan penyesuaian pada pendapatan, belanja dan pembiayaan.

a. Kenaikan Target Pendapatan

   Berkaitan dengan target pendapatan pada perubahan APBD terjadi kenaikan walaupun relatif kecil, merupakan suatu upaya yang sangat luar biasa. Dimana kenaikan pendapatan secara total adanya kenaikan Pendapatan Asli Daerah khususnya pajak , karena di sisi yang lain pendapatan transfer juga mengalami kenaikan.

b. Kenaikan Anggaran Belanja

Pada sisi anggaran belanja terjadi kenaikan juga selain disebabkan karena adanya kenaikan pendapatan juga disebabkan adanya optimalisasi belanja yang lebih optimal optimal.

c. Penurunan Anggaran pembiayaan

Pada pembiayaan daerah terjadi pengurangan penerimaan pembiayaan yang berasal dari SiLPA, karena pada saat penyusunan APBD Tahun 2023 SiLPA yang dipergunakan sebagai acuan adalah SiLPA sebelum audited, setelah di audited maka dilakukan penyesuaian.

BAB

3

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Pengelolaan Keuangan Daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua Hak dan Kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara. Pencapaian kinerja keuangan tahun anggaran 2024 dapat tercermin melalui pelaksanaan program dan kegiatan menurut urusan pemerintahan daerah pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

3.1. URUSAN WAJIB

Urusan wajib di Pemerintah Kota Madiun terdiri dari 23 bidang kewenangan sebagaimana dijelaskan dibawah ini.

1. **Urusan Pendidikan**

   Belajar Urusan Wajib untuk bidang Pendidikan dari anggaran sebesar Rp245.272.392.151,00 dan terealisasi sebesar Rp 233.813.797.822,55, Nilai Realisasi Anggaran untuk bidang pendidikan ini sebesar 95,33 % dari total pagu belanja pada APBD.

   Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut :

Tabel 3.1.1

Urusan Wajib Bidang Pendidikan

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	174.988.572.500,00	168.796.485.052,00
program pengelolaan pendidikan	68.029.409.791,00	62.788.069.634,55
program pengembangan kurikulum	1.201.204.299,00	1.197.194.376,00
program pendidik dan tenaga kependidikan	1.053.205.561,00	1.032.048.760,00
Total	**245.272.392.151,00**	**233.813.797.822,55**

2. Urusan Kesehatan

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Kesehatan dari anggaran sebesar Rp 266.653.515.131,00 dan terealisasi sebesar Rp 257.833.917.992,14, Nilai Realisasi Anggaran untuk bidang Kesehatan ini sebesar 96,71 % dari total pagu belanja pada APBD. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut :

Tabel 3.1.2

Urusan Wajib Bidang Kesehatan

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	184.714.262.932,00	180.499.243.325,00
program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	76.532.897.399,00	72.057.194.038,14
program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	442.559.000,00	422.832.500,00
program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	305.327.000,00	274.710.600,00
program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	4.658.468.800,00	4.579.937.529,00
Total	**266.653.515.131,00**	**257.833.917.992,14**

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari anggaran sebesar Rp128.699.519.939,00 dan terealisasi sebesar Rp 123.336.341.850,11, Nilai Realisasi Anggaran untuk bidang pekerjaan umum dan penataan ruang ini sebesar 95,83 % dari total pagu belanja pada APBD. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut :

Tabel 3.1.3

Urusan Wajib Bidang Pekerjaan Umum & Penataan Ruang

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	14.829.034.007,00	13.108.114.010,00
program pengelolaan sumber daya air (sda)	12.580.676.000,00	11.893.261.130,00
program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	1.905.323.500,00	1.541.603.590,00
Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	12.352.748.400,00	11.410.246.073,00
program penataan bangunan gedung	23.584.359.814,00	22.981.707.842,00
program penataan bangunan dan lingkungannya	22.045.832.500,00	21.649.191.104,11
program penyelenggaraan jalan	38.554.253.532,00	38.181.409.647,00
program pengembangan jasa konstruksi	1.251.039.058,00	1.060.251.400,00
program penyelenggaraan penataan ruang	1.596.253.128,00	1.510.557.054,00
Total	**128.699.519.939,00**	**123.336.341.850,11**

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dari anggaran sebesar Rp47.116.521.888,00 dan terealisasi sebesar Rp 42.214.962.653,68, Nilai Realisasi Anggaran untuk bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman ini sebesar 89,59 % dari total pagu belanja pada APBD. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut :

Tabel 3.1.4

Urusan Wajib Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	10.207.724.111,00	9.818.198.979,00
program kawasan permukiman	17.433.326.000,00	15.421.221.816,88
program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	16.746.929.527,00	16.298.014.793,80
Program penyelesaian sengketa tanah	32.413.750,00	28.762.650,00

garapan		
Program penatagunaan tanah	773.378.500,00	648.764.414,00
Total	**47.116.521.888,00**	**42.214.962.653,68**

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dari anggaran sebesar Rp21.571.918.987,00 dan terealisasi sebesar Rp 19.187.818.797,49 . Nilai Realisasi Anggaran untuk bidang ketentraman dan ketertiban umum ini sebesar 88,94 % dari total pagu belanja pada APBD. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut :

Tabel 3.1.5

Urusan Wajib Bidang Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	14.023.972.562,00	12.697.430.697,49
program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	6.161.805.425,00	5.431.227.360,00
program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	1.386.141.000,00	1.059.160.740,00
Total	**21.571.918.987,00**	**19.187.818.797,49**

6. Urusan Sosial

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Sosial dari anggaran sebesar Rp29.053.430.122,00 dan terealisasi sebesar Rp 26.544.567.600,00, Nilai Realisasi Anggaran untuk bidang sosial ini sebesar 91,36 % dari total pagu belanja pada APBD. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut :

Tabel 3.1.6

Urusan Wajib Bidang Sosial

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	8.118.231.537,00	7.368.807.781,00
program pemberdayaan sosial	3.265.196.184,00	3.131.268.687,00
program rehabilitasi sosial	3.931.608.371,00	3.434.476.373,00
program perlindungan dan jaminan sosial	13.120.631.330,00	12.129.604.359,00
program penanganan bencana	447.562.100,00	325.239.800,00
program pengelolaan taman makam pahlawan	170.200.600,00	155.170.600,00
Total	**29.053.430.122,00**	**26.544.567.600,00**

7. Urusan Tenaga Kerja

Belanja Urusan Wajib untuk bidang Tenaga Kerja dari anggaran sebesar Rp9.338.594.949,00 dan terealisasi sebesar Rp 8.761.354.344,00. Nilai Realisasi Anggaran untuk bidang tenaga kerja ini sebesar 93,81 % dari total pagu belanja pada APBD. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut :

Tabel 3.1.7

Urusan Wajib Bidang Tenaga Kerja

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	6.489.338.267,00	6.020.709.298,00
program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	2.596.000.000,00	2.493.302.095,00
program penempatan tenaga kerja	253.256.682,00	247.342.951,00
Total	**9.338.594.949,00**	**8.761.354.344,00**

8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari anggaran sebesar Rp1.421.823.137,00,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.320.679.675,00. Nilai Realisasi Anggaran untuk bidang tenaga kerja ini sebesar 92,88 % dari total pagu belanja pada APBD. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut :

Tabel 3.1.8

Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Program pengarusutamaan gender & pemberdayaan perempuan	743.859.274,00	720.391.636,00
Program peningkatan kualitas keluarga	210.271.527,00	200.019.527,00
Program pengelolaan system data gender & anak	67.627.961,00	66.562.961,00
Program pemenuhan hak anak	326.795.688,00	264.517.051,00
Program perlindungan khusus anak	73.268.687,00	69.188.500,00
Total	**1.421.823.137,00**	**1.320.679.675,00**

9. Urusan Pangan

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Pangan dari anggaran sebesar Rp8.065.687.937,00 dan terealisasi sebesar Rp 7.646.274.479,00. Nilai Realisasi Anggaran untuk bidang pangan ini sebesar 94,80 % dari total pagu belanja pada APBD. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut :

Tabel 3.1.9

Urusan Wajib Bidang Pangan

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	7.530.622.937,00	7.125.120.543,00
program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	391.234.000,00	384.261.800,00
program penanganan kerawanan pangan	58.200.000,00	56.927.600,00
Program pengawasan keamanan pangan	85.631.000,00	79.964.536,00
Total	**8.065.687.937,00**	**7.646.274.479,00**

10.Urusan Pertanahan

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Pangan dari anggaran sebesar Rp805.792.250,00 dan terealisasi sebesar Rp 677.527.064,00. Nilai Realisasi Anggaran untuk bidang pertanahan ini sebesar 84,08 % dari total pagu belanja pada APBD. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut :

Tabel 3.1.10

Urusan Wajib Bidang Pertanahan

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
program pengelolaan izin lokasi	0,00	0,00
program penyelesaian sengketa tanah garapan	32.413.750,00	28.762.650,00
program penatagunaan tanah	773.378.500,00	648.764.414,00
Total	**805.792.250,00**	**677.527.064,00**

11.Urusan Lingkungan Hidup

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Lingkungan Hidup dari anggaran sebesar Rp26.915.380.276,00 dan terealisasi sebesar Rp 25.184.759.633,46. Nilai Realisasi Anggaran untuk bidang pertanahan ini sebesar 93,57 % dari total pagu belanja pada APBD. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut :

Tabel 3.1.11
Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	18.545.013.190,00	17.376.792.611,87
program perencanaan lingkungan hidup	279.440.000,00	271.754.880,00
program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	1.246.691.086,00	1.242.891.288,10
program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)	10.000.000,00	9.486.950,00
program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)	50.000.000,00	49.356.500,00
program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh)	264.150.000,00	262.247.800,00
program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	715.786.000,00	702.610.150,00
program penanganan pengaduan lingkungan hidup	247.000.000,00	245.706.300,00
program pengelolaan persampahan	5.557.300.000,00	5.023.913.153,49
Total	**26.915.380.276,00**	**25.184.759.633,46**

12.Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari anggaran sebesar Rp8.196.567.787,00 dan terealisasi sebesar Rp 8.057.554.523,00. Nilai Realisasi Anggaran untuk bidang pertanahan ini sebesar 98,30 % dari total pagu belanja pada APBD. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut :

Tabel 3.1.12

Urusan Wajib Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	7.861.679.054,00	7.724.979.223,00
program pendaftaran penduduk	87.604.025,00	87.580.000,00
program pencatatan sipil	113.993.195,00	111.889.300,00
program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	133.291.513,00	133.106.000,00
Total	**8.196.567.787,00**	**8.057.554.523,00**

13.Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dari anggaran sebesar Rp2.923.247.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 2.864.086.761,00 Nilai Realisasi Anggaran untuk bidang pertanahan ini sebesar 97,97 % dari total pagu belanja pada APBD. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut :

Tabel 3.1.13
Urusan Wajib Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
program pengendalian penduduk	213.907.000,00	212.849.653,00
program pembinaan keluarga berencana (kb)	1.355.866.000,00	1.339.485.658,00
program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (ks)	1.353.474.000,00	1.311.751.450,00
Total	**2.923.247.000,00**	**2.864.086.761,00**

14.Urusan Perhubungan

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Perhubungan dari anggaran sebesar Rp16.866.562.545,00 dan terealisasi sebesar Rp 16.640.901.937,00. Nilai Realisasi Anggaran untuk bidang pertanahan ini sebesar 98,66 % dari total pagu belanja pada APBD. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut :

Tabel 3.1.14
Urusan Wajib Bidang Perhubungan

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	10.048.675.055,00	9.886.046.370,00
program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (llaj)	6.817.887.490,00	6.754.855.567,00
Total	**16.866.562.545,00**	**16.640.901.937,00**

15. Urusan Komunikasi dan Informatika

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Komunikasi dan Informatika dari anggaran sebesar Rp28.244.906.935,00 dan terealisasi sebesar Rp 27.810.440.636,00 . Nilai Realisasi Anggaran untuk bidang pertanahan ini sebesar 98,46 % dari total pagu belanja pada APBD. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut :

Tabel 3.1.15

Urusan Wajib Bidang Komunikasi dan Informatika

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	7.948.661.563,00	7.560.326.934,00
program informasi dan komunikasi publik	3.421.850.097,00	3.408.476.409,00
program pengelolaan aplikasi informatika	16.874.395.275,00	16.841.637.293,00
Total	**28.244.906.935,00**	**27.810.440.636,00**

16. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dari anggaran sebesar Rp855.447.782,00 dan terealisasi sebesar Rp 792.070.005,00. Nilai capaian Realisasi Anggaran untuk bidang pertanahan ini sebesar 92,59 % dari total pagu belanja pada APBD. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut :

Tabel 3.1.16

Urusan Wajib Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Program pendidikan dan pelatihan perkoperasian	444.174.500,00	433.721.500,00
Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	150.586.523,00	149.427.400,0
Program pengembangan UMKM	260.686.759,00	208.921.105,00
Total	**855.447.782,00**	**792.070.005,00**

17. Urusan Penanaman Modal

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Penanaman Modal dari anggaran sebesar Rp 6.652.704.575,00 dan terealisasi sebesar Rp 6.464.122.545,00. Nilai Realisasi Anggaran untuk bidang pertanahan ini sebesar 97,16 % dari total pagu belanja pada APBD. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut :

Tabel 3.1.17

Urusan Wajib Bidang Penanaman Modal

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	5.087.324.175,00	4.962.548.009,00
program pengembangan iklim penanaman modal	109.550.000,00	103.175.000,00
program promosi penanaman modal	421.063.000,00	396.011.256,00
program pelayanan penanaman modal	409.495.000,00	404.153.720,00
program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	462.000.000,00	442.368.225,00
program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	163.272.400,0	155.866.335,00
Total	**6.652.704.575,00**	**6.464.122.545,00**

18. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Kepemudaan dan Olah Raga dari anggaran sebesar Rp5.865.938.521,00 dan terealisasi sebesar Rp5.819.379.253,11. Nilai Realisasi Anggaran untuk bidang pertanahan ini sebesar 99,20 % dari total pagu belanja pada APBD. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut :

Tabel 3.1.18

Urusan Wajib Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	100.000.000,00	98.585.100,00
program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	5.765.938.521,00	5.720.794.153,11
Total	**5.865.938.521,00**	**5.819.379.253,11**

19. Urusan Statistik

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Statistik dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 98.591.315,00. Nilai Realisasi Anggaran untuk bidang pertanahan ini sebesar 98,59 % dari total pagu belanja pada APBD. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut :

Tabel 3.1.19
Urusan Wajib Bidang Statistitik

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
program penyelenggaraan statistik sektoral	100.000.000,00	98.591.315,00
Total	**100.000.000,00**	**98.591.315,00**

20. Urusan Persandian

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Persandian dari anggaran sebesar Rp241.752.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 234.918.999,00. Nilai Realisasi Anggaran untuk bidang pertanahan ini sebesar 97,17 % dari total pagu belanja pada APBD. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut :

Tabel 3.1.20
Urusan Wajib Bidang Persandian

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	241.752.000,00	234.918.999,00
Total	**241.752.000,00**	**234.918.999,00**

21. Urusan Kebudayaan

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Kebudayaan dari anggaran sebesar Rp10.724.572.010,00 dan terealisasi sebesar Rp9.177.840.616,00. Nilai Realisasi Anggaran untuk bidang pertanahan ini sebesar 95,67 % dari total pagu belanja pada APBD. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut :

Tabel 3.1.21
Urusan Wajib Bidang Kebudayaan

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	6.928.772.010,00	6.552.648.235,00
program pengembangan kebudayaan	2.334.535.000,00	2.297.600.290,00
program pengembangan kesenian tradisional	50.000.000,00	49.413.000,00
program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	279.765.000,00	278.179.091,00
Total	**9.593.072.010,00**	**9.177.840.616,00**

22. Urusan Perpustakaan

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Perpustakaan dari anggaran sebesar Rp5.793.531.519,00 dan terealisasi sebesar Rp 5.543.572.686,00. Nilai Realisasi Anggaran untuk bidang pertanahan ini sebesar 95,68 % dari total pagu belanja pada APBD. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut :

Tabel 3.1.22

Urusan Wajib Bidang Perpustakaan

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	4.784.695.320,00	4.548.935.822,00
program pembinaan perpustakaan	928.836.199,00	919.063.864,00
program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	80.000.000,00	75.573.000,00
Total	**5.793.531.519,00**	**5.543.572.686,00**

23. Urusan Kearsipan

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Kearsipan dari anggaran sebesar Rp773.386.636,00 dan terealisasi sebesar Rp 765.469.350,00. Nilai Realisasi Anggaran untuk bidang pertanahan ini sebesar 98,97 % dari total pagu belanja pada APBD. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut :

Tabel 3.1.23

Urusan Wajib Bidang Kearsipan

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
program pengelolaan arsip	619.386.636,00	613.398.650,00
program perlindungan dan penyelamatan arsip	154.000.000,00	152.070.700,00
Total	**773.386.636,00**	**765.469.350,00**

3.2. URUSAN PILIHAN

Urusan pilihan di Pemerintah Kota Madiun terdiri dari 6 bidang kewenangan sebagaimana dijelaskan dibawah ini.

1. **Urusan Kelautan dan Perikanan**

   Belajar Urusan Wajib untuk bidang Kelautan dan Perikanan dari anggaran sebesar Rp 972.681.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 953.373.337,00. Nilai Realisasi Anggaran untuk bidang pertanahan ini sebesar 98,01 % dari total pagu belanja pada APBD. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut :

Tabel 3.2.1

Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Program pengelolaan perikanan budidaya	436.605.000,00	431.218.363,00
Program pengawasan sumber daya kelautan & perikanan	70.022.000,00	67.230.200,00
Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	466.054.000,00	454.924.774,00
Total	**972.681.000,00**	**953.373.337,00**

2. **Urusan Pariwisata**

   Belajar Urusan Wajib untuk bidang Pariwisata dari anggaran sebesar Rp1.131.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.125.020.582,00. Nilai Realisasi Anggaran untuk bidang pertanahan ini sebesar 99,42% dari total pagu belanja pada APBD. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut :

Tabel 3.2.2

Urusan Pilihan Bidang Pariwisata

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	248.000.000,00	247.727.326,00
Program pemasaran pariwisata	605.500.000,00	600.563.056,00
Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	278.000.000,00	276.730.200,00
Total	**1.131.500.000,00**	**1.125.020.582,00**

3. **Urusan Pertanian**

   Belajar Urusan Wajib untuk bidang Pertanian dari anggaran sebesar Rp8.007.892.367,00 dan terealisasi sebesar Rp 7.268.576.672,00. Nilai Realisasi Anggaran untuk bidang pertanahan ini

sebesar 90,76 % dari total pagu belanja pada APBD. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut :

Tabel 3.2.3

Urusan Pilihan Bidang Pertanian

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Program penyediaan & pengembangan sarana pertanian	2.439.213.000,00	2.419.250.483,00
Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	1.459.043.910,00	1.398.283.225,00
Program pengendalian kesehatan hewan & kesehatan masyarakat	407.740.090,00	403.687.255,00
Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	109.800.000,00	103.461.000,00
Program perizinan usaha pertanian	33.600.000,00	12.069.100,00
Program penyuluhan pertanian	3.558.495.367,00	2.931.825.609,00
Total	**8.007.892.367,00**	**7.268.576.672,00**

4. Urusan Perdagangan

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Perdagangan dari anggaran sebesar Rp16.855.913.628,00 dan terealisasi sebesar Rp16.237.998.426,91. Nilai Realisasi Anggaran untuk bidang pertanahan ini sebesar 96,33 % dari total pagu belanja pada APBD. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut :

Tabel 3.2.4

Urusan Pilihan Bidang Perdagangan

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	10.264.246.844,00	9.768.876.778,00
program perizinan dan pendaftaran perusahaan	86.160.400,00	86.078.900,00
program peningkatan sarana distribusi perdagangan	5.643.298.691,00	5.534.825.503,91
program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	300.254.200,00	291.153.235,00
program standardisasi dan perlindungan konsumen	224.674.843,00	221.500.900,00
program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	337.278.650,00	335.563.110,00
Total	**16.855.913.628,00**	**16.237.998.426,91**

5. Urusan Perindustrian

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Perindustrian dari anggaran sebesar Rp5.439.948.196,00 dan terealisasi sebesar Rp 4.604.790.533,00. Nilai Realisasi Anggaran untuk bidang pertanahan ini

sebesar 84,64% dari total pagu belanja pada APBD. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut :

Tabel 3.2.5

Urusan Pilihan Bidang Perindustrian

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Program hubungan industrial	3.667.160.448,00	3.174.578.080,00
Program perencanaan dan pengembangan industri	1.607.187.748,00	1.264.939.669,00
Program pengelolaan system informasi industry nasional	165.600.000,00	165.272.784,00
Total	**5.439.948.196,00**	**4.604.790.533,00**

6. Urusan Transmigrasi

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Transmigrasi dari anggaran sebesar Rp 0,00 dan terealisasi sebesar Rp 0,00 . Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut :

Tabel 3.2.6

Urusan Pilihan Bidang Transmigrasi

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Total	0,00	0,00

3.3. PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD

Pencapaian kinerja keuangan untuk urusan wajib dan urusan pilihan pada masing-masing OPD disajikan dalam lampiran laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Daerah Kota Madiun.

BAB

4

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ENTITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH

(01) Tujuan entitas pelaporan keuangan untuk menunjukkan entitas akuntansi pada pusat-pusat pertanggung jawaban keuangan daerah.

(02) Entitas pelaporan keuangan mengacu pada konsep bahwa setiap pusat pertanggungjawaban harus bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(03) Entitas pelaporan keuangan adalah Pemerintah Kota Madiun, sedangkan pusat-pusat pertanggungjawaban adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Madiun yaitu, Sekretariat Daerah terdiri dari 6 Bagian, Sekretariat DPRD, 6 Badan, 15 Dinas, 3 kecamatan dan Inspektorat.

4.2 BASIS AKUNTANSI

(04) Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis akrual.

(05) Basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi penerimaan kas atau pangeluaran kas pada saat uang diterima atau dibayar oleh kas daerah.

(06) Basis kas untuk pengakuan pendapatan LRA, dan belanja, pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Aliran Kas. Pengakuan atas pendapatan dan belanja yang didanai dari Dana Badan Layanan Umum Daerah dan Dana Bantuan Operasional Sekolah berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B).

(07) Basis akrual yaitu pengakuan transaksi dan kejadian keuangan dalam periode berjalan pada saat hak dan kewajiban timbul meskipun penerimaan atau pengeluaran kas dari transaksi dan kejadian dimaksud belum terealisir.

(08) Basis akrual untuk pengakuan pendapatan LO, beban dalam Laporan Operasional, aset, kewajiban dan ekuitas dana dalam Neraca.

4.3 BASIS PENGUKURAN

(09) Kas dan setara kas diukur berdasarkan nilai nominalnya.

(10) Investasi jangka pendek diukur berdasarkan nilai perolehannya.

(11) Piutang diukur berdasarkan nilai nominalnya.

(12) Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) dengan klasifikasi sebagai berikut :

No	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 - 1 tahun	Lancar	1%
2	1 - 2 tahun	Kurang Lancar	10%
3	Di atas 2 tahun	Macet	100%

(13) Persediaan diukur berdasarkan biaya perolehannya apabila diperoleh dengan pembelian, nilai wajar apabila diperoleh dari donasi.

(14) Persediaan dinilai dengan menggunakan harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenisnya.

(15) Biaya perolehan persediaan sebesar harga pembelian. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.

(16) Investasi jangka panjang diukur berdasarkan nilai perolehannya.

(17) Penggunaan penilaian investasi jangka panjang didasarkan pada kriteria sebagai berikut :

a. kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;

b. kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;

c. kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;

d. kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan;

e. Penilaian investasi Pemerintah Daerah menggunakan metode biaya tidak mempertimbangkan jumlah prosentase kepemilikan sebagaimana dijelaskan pada point a sampai dengan d di atas.

(18) Aktiva tetap diukur berdasarkan nilai perolehannya, apabila penilaian aktiva tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

(19) Pemerintah Daerah menetapkan bahwa pengeluaran harus dikapitalisir sebagai aset tetap apabila pengeluaran tersebut dialokasikan dalam anggaran belanja modal dan nilai minimum sebesar Rp500.000.

(20) Apabila pengeluaran atas perolehan aset tetap yang dialokasikan dalam anggaran belanja modal

dan nilainya dibawah Rp500.000 tidak perlu dicatat dalam neraca tetapi tetap cukup dicatat dalam buku ekstra kompabel.

(21) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

(22) Metode penyusutan yang dapat dipergunakan adalah metode garis lurus (straight line method).

(23) Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

(24) Perkiraan masa manfaat aset tetap dan nilai sisa masing-masing kelompok aset mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi Aset Tida Berwujud di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

(25) Penambahan masa manfaat akan diterapkan jika OPD terkait mengajukan permohonan untuk diterapkan, jika belum atau tidak baik overhaul atau renovasi hanya akan menambah nilai aset definitif dan tidak menambah masa manfaatnya.

(26) Hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali.

4.4 PENETAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

(27) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 80 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun meliputi:

(28) Kebijakan Akuntansi Nomor 01 Penyajian Laporan Keuangan

(29) Kebijakan Akuntansi Nomor 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas

(30) Kebijakan Akuntansi Nomor 03 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

(31) Kebijakan Akuntansi Nomor 04 Neraca

(32) Kebijakan Akuntansi Nomor 05 Laporan Operasional

(33) Kebijakan Akuntansi Nomor 06 Laporan Arus Kas

(34) Kebijakan Akuntansi Nomor 07 Laporan Perubahan Ekuitas

(35) Kebijakan Akuntansi Nomor 08 Catatan atas Laporan Keuangan

(36) Kebijakan Akuntansi Nomor 09 Akuntansi Pendapatan

(37) Kebijakan Akuntansi Nomor 10 Akuntansi Belanja dan Beban

(38) Kebijakan Akuntansi Nomor 11 Akuntansi Aset

(39) Kebijakan Akuntansi Nomor 12 Akuntansi Kewajiban

(40) Kebijakan Akuntansi Nomor 13 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa

(41) Kebijakan Akuntansi Nomor 14 Laporan Keuangan Konsolidasi.

(42) Kebijakan Akuntansi Nomor 15 Laporan Keuangan Properti Investasi

4.5 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI

(43) Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.

(44) Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan termasuk yang melaksanakan tata kelola keuangan BLUD sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal yaitu Pemerintah Kota Madiun.

(45) Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, entitas pelaporan di lingkungan Pemerintah Kota Madiun sebanyak 28 perangkat daerah dengan perincian sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah terdiri dari 6 bagian sebagai entitas pelaporan yaitu : Bagian Umum, Bagian Pemerintahan, Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat; Bagian Hukum, Bagian Organisasi, Bagian Pengadaan Barang Jasa dan Administrasi Pembangunan
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat;
4. Dinas Pendidikan;
5. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga;
6. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
7. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Dinas Perdagangan;
11. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
12. Dinas Komunikasi dan Informatika;
13. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
14. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
15. Dinas Perhubungan;
16. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
17. Dinas Lingkungan Hidup;
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
19. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

20. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
21. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
22. Badan Pendapatan Daerah;
23. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
24. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
25. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
26. Kecamatan Kartoharjo;
27. Kecamatan Manguharjo;
28. Kecamatan Taman.

(46) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) badan yang dibentuk Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan umum, mengelola dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, dan tidak termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan. Perangkat Daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan BLUD di lingkugan Pemerintah Kota Madiun adalah UPT pada Dinas Kesehatan dan KB yang terdiri dari Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas Manguharjo, Puskesmas Oro-Oro Ombo, Puskesmas Patihan, Puskesmas Demangan, Puskesmas Banjarejo dan Puskesmas Tawangrejo.

(47) Laporan keuangan konsolidasi Pemerintah Kota Madiun terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

(48) Laporan keuangan konsolidasi disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.

BAB

5

PENJELASAN POS-POS REALISASI ANGGARAN

5.1. PENDAPATAN

5.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
PAD	**262.282.977.933,00**	**279.229.358.932,97**	**106,46**	**255.554.493.407,62**

Penerimaan dari sektor Pendapatan Asli daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp279.229.358.932,97 atau mencapai 106,46% yang berarti Rp16.946.380.999,97 atau 6,46% lebih tinggi dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp262.282.977.933,00. Realisasi Pendapatan Asli daerah (PAD) tahun anggaran 2024 sebesar Rp279.229.358.932,97 dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2023 sebesar Rp255.554.493.407,62 terjadi peningkatan sebesar Rp23.674.865.525,35 atau 9,26%.

Perincian anggaran dan realisasi PAD untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.1.1.
Pendapatan Asli Daerah

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
Pajak Daerah	109.603.926.000,00	121.651.792.796,00	110,99	113.514.116.369,67
Retribusi Daerah	136.312.408.000,00	138.902.841.650,97	101,90	22.551.072.553,00

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	14.127.425.900,00	13.456.071.814,53	95,25	14.983.008.032,73
Lain-lain PAD yang sah	2.239.218.033,00	5.218.652.671,47	233,06	104.506.296.452,22
Total	**262.282.977.933,00**	**279.229.358.932,97**	**106,46**	**255.554.493.407,62**

5.1.1.1. Pajak Daerah

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
Pajak Daerah	**109.603.926.000,00**	**121.651.792.796,00**	**110,99**	**113.514.116.369,67**

Realisasi seluruh pajak daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah adalah sebesar Rp121.651.792.796,00 atau mencapai 110,99% yang berarti sebesar Rp12.047.866.796,00 atau 10,99% lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp109.603.926.000,00. Realisasi pajak daerah tahun anggaran 2024 sebesar Rp121.651.792.796,00 dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2023 sebesar Rp113.514.116.369,67 terjadi peningkatan sebesar Rp8.137.676.426,33 atau lebih tinggi 7,17%. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Beberapa Rincian Objek Pajak Daerah di tahun anggaran 2024 mengalami perubahan Rincian Objek Pajak. yaitu Rincian Objek Pajak Barang Jasa Tertentu.

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan pajak daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.1.1.1.
Pajak Daerah

Pajak Daerah	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.1.01.06. Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	8.130.855.159,00
4.1.01.07. Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	23.343.654.772,00

4.1.01.08. Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	1.845.737.251,00
4.1.01.09. Pajak Reklame	2.372.500.000,00	2.867.767.796,00	120,88	2.304.955.619,00
4.1.01.10. Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	23.482.333.529,83
4.1.01.11. Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	1.683.862.056,00
4.1.01.12. Pajak Air Tanah	350.000.000,00	450.821.413,00	128,81	318.395.998,84
4.1.01.15. PBB P2	22.360.000.000,00	22.998.810.935,00	102,86	23.884.649.634,00
4.1.01.16. BPHTB	26.675.000.000,00	30.575.437.417,00	114,62	28.519.672.350,00
Pajak Barang Jasa Tertentu	**57.846.426.000,00**	**64.758.955.235,00**	**111,95**	**0,00**
4.1.01.19.01. PBJT Makanan Minuman	24.200.000.000,00	27.722.629.419,00	114,56	0,00
4.1.01.19.02. PBJT Tenaga Listrik	23.225.000.000,00	25.480.021.040,00	109,71	0,00
4.1.01.19.03. PBJT Jasa Perhotelan	7.200.000.000,00	7.683.440.676,00	106,71	0,00
4.1.01.19.04. PBJT Jasa Parkir	900.000.000,00	1.123.769.041,00	124,86	0,00
4.1.01.19.05. PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan	2.321.426.000,00	2.749.095.059,00	118,42	0,00
Jumlah	**109.603.926.000,00**	**121.651.792.796,00**	**110,99**	**113.514.116.369,67**

1. Realisasi pajak reklame sebesar Rp2.867.767.796,00 atau mencapai 120,88% yang berarti sebesar Rp495.267.796,00 atau 20,88% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp2.372.500.000,00. Realisasi pajak reklame tahun anggaran 2024 sebesar Rp2.867.767.796,00 dibandingkan dengan realisasi pajak reklame tahun 2023 sebesar Rp2.304.955.619,00 terjadi peningkatan sebesar Rp562.812.177,00 atau lebih tinggi 24,42%. Pencapaian target kinerja pajak reklame sesuai dengan potensi riil.
2. Realisasi pajak air tanah sebesar Rp450.821.413,00 atau mencapai 128,81% yang berarti sebesar Rp100.821.413,00 atau 28,81% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp350.000.000,00. Realisasi pajak air tanah tahun anggaran 2024 sebesar Rp450.821.413,00 dibandingkan dengan realisasi pajak air

tanah tahun 2023 sebesar Rp318.395.998,84 terjadi peningkatan sebesar Rp132.425.414,16 atau lebih tinggi 41,59%. Pencapaian target kinerja pajak air tanah sesuai dengan potensi riil.

3. Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) P2 sebesar Rp22.998.810.935,00 atau mencapai 102,86% yang berarti sebesar Rp638.810.935,00 atau 2,86% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp22.360.000.000,00. Realisasi pajak PBB tahun anggaran 2024 sebesar Rp22.998.810.935,00 dibandingkan dengan realisasi pajak PBB tahun 2023 sebesar Rp23.884.649.634,00 terjadi penurunan sebesar Rp885.838.699,00 atau lebih rendah 3,71%. Pencapaian target kinerja Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) P2 sesuai dengan potensi riil.

4. Realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp30.575.437.417,00 atau mencapai 114,62% yang berarti sebesar Rp3.900.437.417,00 atau 14,62% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp26.675.000.000,00. Realisasi pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan tahun anggaran 2024 sebesar Rp30.575.437.417,00 dibandingkan dengan realisasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan tahun 2023 sebesar Rp28.519.672.350,00 terjadi peningkatan sebesar Rp2.055.765.067,00 atau lebih tinggi 7,21%. Pencapaian target kinerja Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sesuai dengan potensi riil.

5. Realisasi pajak barang jasa tertentu makanan minuman sebesar Rp27.722.629.419,00 atau mencapai 114,56% yang berarti Rp 3.522.629.419,00 atau 14,56% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp24.200.000.000,00. Realisasi pajak barang jasa tertentu makanan minuman tahun anggaran 2024 sebesar Rp 27.722.629.419,00 dibandingkan dengan realisasi pajak restoran tahun 2023 sebesar Rp23.343.654.772,00 atau terjadi peningkatan sebesar Rp4.378.974.647,00 atau lebih tinggi 18,76%. Pencapaian target kinerja pajak barang jasa tertentu makanan minuman sesuai dengan potensi riil. Pencapaian target kinerja tersebut dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak restoran dalam melakukan pembayaran pajak restoran dan peningkatan kinerja petugas pungut pajak yang semakin berkualitas, dan telah dilaksanakan penggunaan aplikasi SIMPADAMA sehingga memudahkan Wajib Pajak restoran dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak restoran secara online.

6. Realisasi pajak barang jasa tertentu tenaga listrik sebesar Rp25.480.021.040,00 atau mencapai 109,71% yang berarti Rp2.255.021.040,00 atau 9,71% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp23.225.000.000,00. Realisasi pajak barang jasa tertentu tenaga listrik tahun anggaran 2024 sebesar Rp25.480.021.040,00 dibandingkan dengan realisasi pajak penerangan jalan tahun 2023 sebesar Rp23.482.333.529,83 terjadi peningkatan sebesar Rp1.997.687.510,17 atau lebih 8,51%.

7. Realisasi pajak barang jasa tertentu jasa perhotelan sebesar Rp7.683.440.676,00 atau mencapai 106,71% yang berarti Rp483.440.676,00 atau 6,71% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp7.200.000.000,00. Realisasi pajak barang jasa tertentu jasa perhotelan tahun anggaran 2024 sebesar Rp7.683.440.676,00 dibandingkan dengan realisasi pajak hotel tahun 2023 sebesar Rp8.130.855.159,00 terjadi penurunan sebesar Rp447.414.483,00 atau lebih rendah 5,50%. Pencapaian target kinerja pajak barang jasa tertentu jasa perhotelan sesuai dengan potensi riil.
8. Realisasi pajak barang jasa tertentu jasa parkir sebesar Rp1.123.769.041,00 atau mencapai 124,86% yang berarti Rp223.769.041,00 atau 24,86% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp900.000.000,00. Realisasi pajak barang jasa tertentu jasa parkir tahun anggaran 2024 sebesar Rp1.123.769.041,00 dibandingkan dengan realisasi pajak parkir tahun 2023 sebesar Rp1.683.862.056,00 terjadi penurunan sebesar Rp560.093.015,00 atau lebih rendah 33,26%. Pencapaian target kinerja pajak barang jasa tertentu jasa parkir sesuai dengan potensi riil.
9. Realisasi pajak barang jasa tertentu jasa kesenian dan hiburan sebesar Rp2.749.095.059,00 atau mencapai 118,42% yang berarti sebesar Rp427.669.059,00 atau 18,42% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp2.321.426.000,00. Realisasi pajak barang jasa tertentu jasa kesenian dan hiburan tahun anggaran 2024 sebesar Rp2.749.095.059,00 dibandingkan dengan realisasi pajak hiburan tahun 2023 sebesar Rp1.845.737.251,00 terjadi peningkatan sebesar Rp903.357.808,00 atau lebih tinggi 48,94%. Pencapaian target kinerja pajak barang jasa tertentu jasa kesenian dan hiburan sesuai dengan potensi riil

5.1.1.2. Retribusi Daerah

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
Retribusi Daerah	**136.312.408.000,00**	**138.902.841.650,97**	**101,90**	**22.551.072.553,00**

Realisasi retribusi daerah adalah sebesar Rp138.902.841.650,97 atau mencapai 101,90% yang berarti sebesar Rp2.590.433.650,97 atau 1,90% lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD 2024 sebesar Rp136.312.408.000,00. Realisasi retribusi daerah anggaran 2024 sebesar Rp138.902.841.650,97 dibandingkan realisasi retribusi daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp22.551.072.553,00 terjadi peningkatan sebesar Rp116.351.769.097,97 atau lebih tinggi 515,95%.

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 obyek pendapatan retribusi tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.1.1.2.
Retribusi Daerah

Retribusi Daerah	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.1.02.01. Jasa Umum	121.043.487.400,00	119.872.742.621,97	99,03	3.797.537.578,00
4.1.02.02. Jasa Usaha	14.518.920.600,00	18.310.380.781,00	126,11	17.563.133.621,00
4.1.02.03. Perizinan tertentu	750.000.000,00	719.718.248,00	95,96	1.190.401.354,00
Jumlah	**136.312.408.000,00**	**138.902.841.650,97**	**101,90**	**22.551.072.553,00**

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi jasa umum untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 tersaji dibawah ini.

Tabel 5.1.1.2.a.
Retribusi Jasa Umum

4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.1.02.01.01. Retribusi Pelayanan Kesehatan **(Dinas Kesehatan & RSUD)**	117.669.910.000,00	117.186.065.666,00	99,59	0,00
4.1.02.01.02. Retribusi PelayananPersampahan Kebersihan **(Dinas Lingkungan Hidup & Donas Perkim)**	186.126.000,00	288.273.905,97	154,88	171.940.000,00
4.1.02.01.04. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum **(Dinas Perhubungan)**	3.187.451.400,00	2.398.403.050,00	75,25	2.986.960.408,00
4.1.02.01.05. Retribusi Pelayanan Pasar/Kios **(Dinas Perhubungan)**	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1.02.01.06. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor **(Dinas Perhubungan)**	0,00	0,00	0,00	364.421.204,00
4.1.02.01.11. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang **(Dinas Perdagangan)**	0,00	0,00	0,00	71.884.000,00
4.1.02.01.13. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikas **(Dinas Komunikasi dan Informatika**	0,00	0,00	0,00	202.331.966,00
Jumlah	**121.043.487.400,00**	**119.872.742.621,97**	**99,03**	**3.797.537.578,00**

1. Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan dikelola Dinas Kesehatan dan RSUD sebesar Rp117.186.065.666,00 atau mencapai 99,59% yang berarti sebesar Rp484.366.547,08 atau 0,41% lebih rendah dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp117.669.910.000. Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan tahun anggaran 2024 sebesar Rp117.186.065.666,00 merupakan realisasi yang mengalami perubahan dari obyek pendapatan lain lain pendapatan asli daerah yang sah ke obyek pendapatan retribusi daerah yaitu retribusi pelayanan kesehatan sesuai dengan PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang KUPDRD.
2. Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dikelola Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perkim sebesar Rp288.273.905,97 atau mencapai 154,88% yang berarti sebesar Rp102.147.905,97 atau 54,88% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp186.126.000,00. Realisasi pelayanan persampahan/kebersihan tahun anggaran 2024 sebesar Rp288.273.905,97 dibandingkan dengan realisasi pelayanan persampahan/ kebersihan tahun 2023 sebesar Rp171.940.000,00 terjadi peningkatan sebesar Rp116.333.905,97 atau lebih tinggi 67,66%. Pencapaian target kinerja Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sesuai dengan potensi riil.
3. Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dikelola Dinas Perhubungan sebesar Rp2.398.403.050,00 atau mencapai 75,25% yang berarti Rp789.048.350,00 atau 24,75% lebih rendah dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp3.187.451.400,00. Realisasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum tahun anggaran 2024 sebesar Rp2.398.403.050,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum tahun 2023 sebesar Rp2.986.960.408,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp588.557.358,00 atau lebih rendah 19,70%. Realisasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum terjadi penurunan

dikarenakan kondisi makro ekonomi di Kota Madiun mengalami deflasi (penguatan mata uang/semakin sedikit uang yang beredar, semakin berkembangnya layanan online, sebaran tempat keramaian yang semakin banyak contoh : lapak kelurahan. Pencapaian target kinerja retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sesuai dengan potensi riil.

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi jasa usaha untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 tersaji dibawah ini.

Tabel 5.1.1.2.b.
Retribusi Jasa Usaha

4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.1.02.02.01. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	7.907.071.600,00	11.317.711.022,00	143,13	8.564.678.574,00
4.1.02.02.02. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan	4.604.000.000,00	4.797.996.181,00	104,21	7.456.013.647,00
4.1.02.02.05. Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.080.439.000,00	906.370.000,00	83,89	781.654.000,00
4.1.02.02.07. Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	32.410.000,00	19.396.000,00	59,85	23.079.000,00
4.1.02.02.09. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	700.000.000,00	1.008.991.878,00	144,14	737.708.400,00
4.1.02.02.20. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	195.000.000,00	259.915.700,00	133.29	0,00
Jumlah	**14.518.920.600,00**	**18.310.380.781,00**	**126,11**	**17.563.133.621,00**

4. Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dikelola oleh beberapa OPD tersaji pada tabel berikut dari :

Tabel 5.1.1.2.b1.
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

4.1.02.02 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.1.02.02.01. Dinas PU	566.917.000,00	578.910.000,00	102,12	5.025.000,00
4.1.02.02.01. Dinas Budparpora	250.000.000,00	455.675.000,00	182,27	368.756.000,00
4.1.02.02.01. BKPSDM	100.000.000,00	272.335.000,00	272,34	136.775.000,00
4.1.02.02.01. BKAD	3.507.387.600,00	4.849.774.078,00	138,27	3.602.802.949,00
4.1.02.02.01. Kec,Kartoharjo	1.065.000.000,00	1.397.420.354,00	131,21	1.337.932.175,00
4.1.02.02.01. Kec,Manguharjo	1.020.000.000,00	1.720.222.230,00	168,65	1.443.472.670,00
4.1.02.02.01. Kec,Taman	1.239.000.000,00	1.642.820.910,00	132,59	1.478.462.780,00
4.1.02.02.01. Dinas Pertanian	29.067.000,00	24.077.000,00	82,83	29.067.000,00
4.1.02.02.01. Dinas Perkim	0,00	0,00	0,00	162.385.000,00
4.1.02.02.01. Dinas Nakersos	0,00	21.500.000,00	0,00	0,00
4.1.02.02.01. Dinas Kesehatan	129.700.000,00	354.976.450,00	273,69	0,00
Jumlah	**7.907.071.600,00**	**11.317.711.022,00**	**143,13**	**8.564.678.574,00**

a. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp578.910.000,00 atau mencapai 102,12% yang berarti sebesar Rp11.993.000,00 atau 2,12% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp566.917.000,00. Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2024 sebesar Rp578.910.000,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2023 sebesar Rp5.025.000,00 terjadi peningkatan sebesar Rp573.885.000,00 atau 11.420,60%. Pencapaian target kinerja Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai dengan potensi riil.

b. **Dinas Kebudayaan ,Pariwisata,Kebudayaan dan Olah Raga (Budparpora)**

Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp455.675.000,00 atau mencapai 182,27% yang berarti sebesar Rp205.675.000,00 atau 82,27% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp250.000.000,00. Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2024 sebesar Rp455.675.000,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp368.756.000,00 peningkatan sebesar Rp86.919.000,00 atau 23,57%. Pencapaian target kinerja Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai dengan potensi riil.

c. **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)**

Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp272.335.000,00 atau mencapai 272,34% yang berarti sebesar Rp172.335.000,00 atau 172,34% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp100.000.000,00. Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2024 sebesar Rp272.335.000,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2023 sebesar Rp136.775.000,00 terjadi peningkatan sebesar Rp135.560.000,00 atau lebih tinggi 99,11%. Pencapaian target kinerja Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai dengan potensi riil.

d. **Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)**

Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp4.849.774.078,00 atau mencapai 138,27% yang berarti sebesar Rp1.342.386.478,00 atau 38,27% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp3.507.387.600,00. Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2024 sebesar Rp4.849.774.078,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2023 sebesar Rp3.602.802.949,00 terjadi peningkatan sebesar Rp1.246.971.129,00 atau lebih tinggi 34,61%. Hal ini dipengaruhi kerjasama pemanfaatan sewa dengan PT SRITANAYA berupa KSP Pengelolaan Plaza Lawu pembayaran kontribusi tetap dari tahun 2014-2024 senilai Rp1.312.500.000 akan dibayarkan secara mengangsur sesuai dengan Surat permohonan Audensi kepada walikota madiun tanggal 20 Desember 2024 Nomor 006/ADM-LEAS/HO/STM-PL/XII/2024 .

e. **Kecamatan Kartoharjo**

Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kecamatan Kartoharjo sebesar Rp1.397.420.000,00 atau mencapai 131,21% yang berarti sebesar Rp332.420.354,00 atau lebih tinggi 31,21% dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp1.065.000.000,00. Retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2024 yang dikelola oleh Kecamatan

Kartoharjo terdiri dari sewa gedung kecamatan dan sewa bengkok untuk ditanami padi. Realisasi sebesar Rp46.777.477,00 berupa sewa gedung kecamatan dan realisasi sebesar Rp1.350.642.877,00 berupa sewa bengkok untuk ditanami padi. Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2024 sebesar Rp1.397.420.000,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2023 sebesar Rp1.337.932.175,00 terjadi peningkatan sebesar Rp59.488.179,00 atau lebih tinggi 4,45%. Pencapaian target kinerja Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai dengan potensi riil.

f. **Kecamatan Manguharjo**

Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kecamatan Manguharjo sebesar Rp1.720.222.230,00 atau mencapai 168,65% yang berarti sebesar Rp700.222.230,00 atau 68,65% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp1.020.000.000,00. Retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2024 yang dikelola oleh Kecamatan Manguharjo terdiri dari sewa gedung kecamatan dan sewa bengkok untuk ditanami padi. Realisasi sebesar Rp19.450.000,00 adalah berupa sewa gedung kecamatan dan realisasi sebesar Rp1.700.772.230,00 berupa sewa bengkok untuk ditanami padi. Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2024 sebesar Rp1.720.222.230,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2023 sebesar Rp1.443.472.670,00 terjadi peningkatan sebesar Rp276.749.560,00 atau lebih tinggi 19,17%. Pencapaian target kinerja Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai dengan potensi riil.

g. **Kecamatan Taman**

Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kecamatan Taman sebesar Rp1.642.820.910,00 atau mencapai 132,59% yang berarti sebesar Rp403.820.910,00 atau 32,59% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp1.239.000.000,00. Retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2024 yang dikelola oleh Kecamatan Taman terdiri dari sewa gedung kecamatan dan sewa bengkok untuk ditanami padi. Realisasi sebesar Rp78.550.000.000,00 adalah berupa sewa gedung kecamatan dan realisasi sebesar Rp1.564.270.910,00 berupa sewa bengkok untuk ditanami padi. Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2024 sebesar Rp1.642.820.910,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2023 sebesar Rp1.478.462.780,00 terjadi peningkatan sebesar Rp164.358.130,00 atau lebih tinggi 11,12 %. Pencapaian target kinerja Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai dengan potensi riil.

h. **Dinas Pertanian**

Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp24.077.000,00 atau mencapai 82,83.% yang berarti sebesar Rp4.990.000,00 atau 17,17% lebih rendah dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp29.067.000,00. Retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2024 sebesar Rp24.077.000,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2023 sebesar Rp29.067.000,00 terjadi penurunan sebesar Rp4.990.000,00 atau lebih rendah 17,17 %. Hal ini dikarenakan belum ada pembayaran dari satu cafe yang masa sewanya habis pada bulan Desember dan terus diupayakan untuk menawarkan kepada pelaku usaha perikanan. Pencapaian target kinerja Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai dengan potensi riil.

i. **Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (DINASKER)**

Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Dinas Tenaga Kerja Koperasi UKM tahun anggaran 2024 sebesar Rp21.500.000,00 merupakan sewa dari Dekranasda dan sewa PBC Pahlawan Busnis Center. Pencapaian target kinerja Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai dengan potensi riil

j. **Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari Retribusi Penyewaan Tanah dan bangunan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp.129.700.000,00. merupakan retribusi penyewaan tanah dan bangunan sebesar Rp64.700.000,00 dan retribusi penyewaan tanah sebesar Rp65.000.000,00 dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2024. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari Retribusi Penyewaan Tanah dan bangunan tahun anggaran 2024 sebesar Rp.354.976.450,00 atau mencapai 273,69.% yang berarti sebesar Rp225.276.450,00 atau 173,69% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp129.700.000,00 merupakan sewa untuk lahan parkir dan koperasi. Pencapaian target kinerja Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai dengan potensi riil.

5. Realisasi Retribusi Pasar Grosir dan/pertokoan dikelola Dinas Perdagangan sebesar Rp4.797.996.181,00 atau mencapai 104,21% yang berarti sebesar Rp193.996.181,00 atau 4,21% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp4.604.000.000,00. Realisasi retribusi Pasar Grosir dan/Pertokoan dinas perdagangan tahun 2024 sebesar Rp4.797.996.181,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi Pasar Grosir dan/Pertokoan dinas perdagangan tahun 2023 sebesar Rp7.456.013.647,00 terjadi penurunan sebesar

Rp2.658.017.466,00 atau lebih rendah 35,65% Pencapaian target kinerja Retribusi Pasar Grosir dan/pertokoan sesuai dengan potensi riil.

6. Realisasi Retribusi Tempat Khusus Parkir meliputi lahan parkir Sumber Umis atas, parkir jalan jawa, parkir terminal dan parkir exs Terminal Barang dikelola Dinas Perhubungan sebesar Rp906.370.000,00 atau mencapai 83,89% yang berarti sebesar Rp174.069.000,00 atau 16,11% lebih rendah dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp1.080.439.000,00. Realisasi Retribusi Tempat Khusus Parkir tahun anggaran 2024 sebesar Rp 906.370.000,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum tahun 2023 sebesar Rp781.654.000,00 terjadi peningkatan sebesar Rp124.716.000,00 atau lebih tinggi 15,96%. Pencapaian target kinerja Retribusi Tempat Khusus Parkir sesuai dengan potensi riil.

7. Realisasi Retribusi Rumah Potong Hewan dikelola Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp19.396.000,00 atau mencapai 59,85% yang berarti Rp13.014.000,00 atau 40,15% lebih rendah dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp32.410.000,00. Realisasi retribusi Rumah Potong Hewan tahun anggaran 2024 sebesar Rp19.396.000,00 dibandingkan dengan Realisasi retribusi Rumah Potong Hewan tahun anggaran 2023 sebesar Rp23.079.000,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp3.683.000,00 atau 15,96%. Hal ini dikarenakan Kurangnya tenaga pemeriksa AM PM hewan yang dipotong belum ada juru sembelih Halal. Pencapaian target kinerja Retribusi Rumah Potong Hewan sesuai dengan potensi riil.

8. Perincian anggaran dan Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dikelola oleh beberapa OPD untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 tersaji dibawah ini :

Tabel 5.1.1.2.b2.
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

4.1.02.02.09 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.1.02.02.09. Dinas Perkim	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00
4.1.02.02.09. Dinas Budparpora	700.000.000,00	1.008.991.878,00	144,14	725.208.400,00
Jumlah	**700.000.000,00**	**1.008.991.878,00**	**144,14**	**737.708.400,00**

a. Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim)

Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga tahun anggaran 2024 mengalami perubahan rincian objek pendapatan retribusi yaitu pindah ke rincian objek pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah.

b. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kebudayaan dan Olah Raga (Budparpora).

Realisasi retribusi tempat rekreasi dan olah raga sebesar Rp1.008.991.878,00 atau mencapai 144,14% yang berarti sebesar Rp308.991.878,00 atau 44,14% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp700.000.000,00. Realisasi retribusi tempat rekreasi dan olah raga tahun anggaran 2024 sebesar Rp1.008.991.878,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi tempat rekreasi dan olah raga tahun 2023 sebesar Rp725.208.400,00 terjadi peningkatan sebesar Rp283.783.478,00 atau lebih tinggi 39,13%. Pencapaian target kinerja retribusi tempat rekreasi dan olah raga sesuai dengan potensi riil.

Perincian anggaran dan Realisasi Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah dikelola oleh beberapa OPD untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 tersaji dibawah ini :

Tabel 5.1.1.2.b3.
Retribusi Pemanfatan Aset

4.1.02.02.20 Retribusi Pemanfaatan aset	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.1.02.02.20. Dinas Perdagangan	10.000.000,00	10.238.500,00	102,39	0,00
4.1.02.02.20. Dinas Perkim	185.000.000,00	249.677.200,00	134,96	0,00
Jumlah	**195.000.000,00**	**259.915.700,00**	**133,29**	**0,00**

a. Dinas Perdagangan

Realisasi retribusi pemanfaatan aset sebesar Rp10.238.500,00 atau mencapai 102,39% yang berarti sebesar Rp238.500,00 atau 2,39% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp10.000.000,00. Realisasi retribusi pemanfaatan aset tahun anggaran 2024 sebesar Rp 10.238.500,00 merupakan sewa container di sepanjang jalan rimbakaya dan pahlawan stret center (PSC). Pencapaian target kinerja retribusi pemanfaatan aset sesuai dengan potensi riil.

b. Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim).

Realisasi retribusi pemanfaatan aset sebesar Rp249.677.200,00 atau mencapai 134,96% yang berarti sebesar Rp64.677.200,00 atau 34,96% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp185.000.000,00. Realisasi retribusi pemanfaatan aset tahun anggaran 2024 sebesar Rp249.677.200,00 merupakan sewa rusunawa dan alon alon utara dan ruang terbuka hijau (RTH). Pencapaian target kinerja retribusi pemanfaatan aset sesuai dengan potensi riil.

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi perizinanan tertentu untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 tersaji dibawah ini.

Tabel 5.1.1.2.c
Retribusi Perizinan Tertentu

4.1.02.03 Retribusi Perizinan Tertentu	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.1.02.03.01. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan **(Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**	750.000.000,00	719.718.248,00	95,96	1.189.201.354,00
4.1.02.03.03. Retribusi Izin Trayek **(Dinas Perhubungan)**	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Jumlah	**750.000.000,00**	**719.718.248,00**	**95,96**	**1.190.401.354,00**

1. Realisasi retribusi persetujuan bangunan dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp719.718.248,00 atau mencapai 95,96% yang berarti sebesar Rp30.281.752,00 atau 4,04% lebih rendah dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp750.000.000,00. Realisasi retribusi persetujuan bangunan tahun anggaran 2024 sebesar Rp719.718.248,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi IMB tahun 2023 sebesar Rp1.189.201.354.000,00 terjadi penurunan sebesar Rp469.483.106,00 atau lebih rendah 39,48%. Pencapaian target kinerja retribusi persetujuan bangunan sesuai dengan potensi riil.
2. Realisasi retribusi izin trayek dikelola Dinas Perhubungan tahun anggaran 2024 sudah tidak mengelola retribusi izin trayek.

5.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahan	**14.127.425.900,00**	**13.456.071.814,53**	**95,25**	**14.983.008.032,73**

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah sebesar Rp13.456.071.814,53 atau 95,25% yang berarti sebesar Rp671.354.085,47 atau 4,75% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp14.127.425.900,00. Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun anggaran 2024 sebesar Rp13.456.071.814,53 apabila dibandingkan dengan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun anggaran 2023 sebesar Rp14.983.008.032,73 terjadi penurunan sebesar Rp1.526.936.218,20 atau lebih rendah 10,19%.

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.1.1.3.
Hasil PengelolaanKekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.1.03.02.01 Bank Jatim & Bank Daerah	6.986.097.200,00	7.291.764.184,53	104,38	7.697.384.827,43
4.1.03.02.02 Perumda Aneka Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.02.03 Perumda PDAM	7.141.328.700,00	6.164.307.630,00	86,32	7.285.623.205,30
Total	**14.127.425.900,00**	**13.456.071.814,53**	**95,25**	**14.983.008.032,73**

1. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dari PT Bank Jatim dan Bank Daerah tahun 2024 sebesar Rp7.291.764.184,53 atau mencapai 104,38% yang berarti 4,38% dari target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp6.986.097.200,00. Realisasi ini berdasarkan Surat dari Direksi Bank Jatim Pusat Surabaya

No.2 Tahun Buku 2024 yang memuat hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun buku 2024 tanggal 12 April 2024 oleh Notaris. Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PT Bank Jatim tahun anggaran 2024 sebesar Rp7.117.480.429,43 dan Perumda BPR Bank Daerah dihitung berdasarkan perolehan laba bersih setelah pajak berdasarkan Laporan Keuangan Perumda Bank Pasar per 31 Desember 2023. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah, harus menyetorkan ke kas daerah sebesar 55% dari laba bersih setelah pajak.

2. Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Perumda Air Minum anggaran 2024 sebesar Rp 6.164.307.630,00 atau mencapai 86,32% yang berarti sebesar Rp977.021.070,00 atau 13,68% lebih rendah dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp7.141.328.700,00. Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Perumda Air Minum sebesar Rp6.164.307.630,00 dibandingkan dengan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Perumda Air Minum tahun 2023 sebesar Rp7.285.623.205,30 terjadi penurunan sebesar Rp 1.121.315.575,30 atau lebih rendah 15,39%.
3. Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Perumda Aneka Usaha tahun 2024 belum ada target anggaran dan realisasi berdasarkan Surat Nomor 900/4594/401.202/2024 tanggal 16 Agusus 2024 tentang setoran laba Perumda Aneka Usaha Tahun 2024, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang perumda Aneka Usaha Kota Madiun Pasal 122 Jika Perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Aneka Usaha dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Berdasarkan pasal ini, Perumda Aneka Usaha untuk Surat Penetapan target anggaran tahun anggaran 2024 berdasarkan Laporan Keuangan Perumda Aneka Usaha per 31 Desember 2023 tidak perlu menyetorkan ke kas daerah sampai seluruh kerugian tertutup. Dan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012. harus menyetorkan ke kas daerah sebesar 55% dari laba bersih setelah pajak.

5.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
Lain-lain PAD yang sah	2.239.218.033,00	5.218.652.671,47	233,06	104.506.296.452,22

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar Rp5.218.652.671,47 atau 233,06% yang

berarti sebesar Rp2.979.434.638,47 atau 133,06% lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp2.239.218.033,00. Realisasi lain-lain pendapatan asli daerah tahun anggaran 2024 sebesar Rp5.218.652.671,47 dibandingkan dengan realisasi lain-lain pendapatan asli daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp104.506.296.452,22 terjadi penurunan sebesar Rp99.287.643.780,75 atau lebih rendah 95,01%.

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan lain-lain PAD yang sah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 per obyek pendapatan tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.1.1.4.
Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

4.1.04 Lain-Lain PAD yang sah	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
a. 4.1.04.01.02 Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	383.979.980,00	0,00	449.118.662,00
b. 4.1.04.01.05 Hasil Penjualan Aset Tetap Lainya	32.000.000,00	32.876.000,00	102,74	32.773.000,00
c. 4.1.04.05 Jasa giro	80.000.000,00	810.070.401,32	1.012,59	599.729.647,13
d 4.1.04.06 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	128.290.300,00	70.987.392,25	55,33	75.333.024,01
e. 4.1.04.07 Pendapatan Bunga Deposito	992.335.233,00	1.267.092.988,64	127,69	2.880.498.521,96
f. 4.1.04.11 Pendapatan Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan	0,00	220.591.369,81	0,00	172.086.543,39
g. 4.1.04.12 Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	658.795.250,00	0,00	629.196.758,00
h. 4.1.04.13 Pendapatan Denda Retribusi Daerah	142.852.500,00	44.610.000,00	31,23	121.838.700,00
i. 4.1.04.15 Pendapatan dari Pengembalian	0,00	509.412.385,09	0,00	1.187.998.977,67

4.1.04 Lain-Lain PAD yang sah	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
j. 4.1.04.16 Pendapatan BLUD	863.740.000,00	1.220.236.904,36	141,27	98.357.722.618,06
Jumlah	**2.239.218.033,00**	**5.218.652.671,47**	**233,06**	**104.506.296.452,22**

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan lain-lain PAD yang sah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 per OPD tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.1.1.4.a
Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah

4.1.04 Lain-Lain PAD yang sah Per OPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
1.BKAD	**1.200.625.533,00**	**3.262.134.517,11**	**271,70**	**5.364.765.376,16**
a. 4.1.04.01 .02Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	383.979.980,00	0,00	449.118.662,00
b. 4.1.04.05.01 Jasa Giro	80.000.000,00	810.070.401,32	1.012,59	599.729.647,13
c. 4.1.04.06.01 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	128.290.300,00	70.987.392,25	55,33	75.333.024,01
d. 4.1.04.07.01 Pendapatan Bunga Deposito	992.335.233,00	1.267.092.988,64	127,69	2.880.498.521,96
e. 4.1.04.11.01 Pendapatan Denda atas Keterb Pelak Pekerjaan		220.591.369,81	0,00	172.086.543,39
f. 4.1.04.15 Pendapatan dari Pengembalian		509.412.385,09	0,00	1.187.998.977,67
2. BAPENDA,DISHUB ,PERKIM				

4.1.04 Lain-Lain PAD yang sah Per OPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
a. 4.1.04.12 Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	658.795.250,00	0,00	629.196.758,00
b.. 4.1.04.13 Pendapatan Denda Retribusi Daerah	142.852.500,00	44.610.000,00	31,23	121.838.700,00
3.Dinas Ketahanan Pangan & Pertanian				
a. 4.1.04.05 Hasil Penjualan Biota Perairan ikan budidaya	32.000.000,00	32.876.000,00	102,74	32.773.000,00
5.Dinas Kesehatan,Pengedalian Penduduk dan KB & RSUD				
4.1.04.16 Pendapatan BLUD	863.740.000,00	1.220.236.904,36	141,27	98.357.722.618,06
Jumlah	**2.239.218.033,00**	**5.218.652.671,47**	**233,06**	**104.506.296.452,22**

1.BKAD.

a Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin

Realisasi Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp383.979.980,00 ini meliputi realisasi atas penjualan alat Kantor dan Rumah Tangga alat kantor alat kantor lainnya sebesar Rp215.179.980,00 dan realisasi atas penjualan Alat Angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor lainnya sebesar Rp168.800.000,00. Realisasi penjualan peralatan dan Mesin tahun anggaran 2024 sebesar Rp383.979.980,00 tidak ditargetkan dalam APBD dibandingkan dengan realisasi pendapatan penjualan peralatan dan Mesin tahun anggaran 2023 sebesar Rp449.118.662,00 terdapat penurunan sebesar Rp65.138.682,00 atau lebih rendah 14,50%, karena realisasi Penjualan Peralatan dan Mesin tidak dapat diprediksi perolehannya.

a. Pendapatan jasa giro.

Realisasi pendapatan jasa giro sebesar Rp810.070.401,32 atau mencapai 1.012,59% yang berarti sebesar Rp730.070.401,32 atau 912,59% lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp80.000.000,00. Realisasi pendapatan jasa giro anggaran 2024 sebesar Rp810.070.401,32 dibandingkan dengan realisasi pendapatan jasa giro tahun anggaran 2023 sebesar Rp599.729.647,13 terdapat peningkatan sebesar Rp210.340.754,19 atau lebih tinggi 35,07%.

b. Pendapatan hasil pengeloaan dana bergulir berupa pendapatan dari LKK.

Realisasi pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir LKK sebesar Rp70.987.392,25 atau mencapai 55,33% yang berarti sebesar Rp57.302.907,75 atau 44,67% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp128.290.316,00. Realisasi pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir LKK tahun anggaran 2024 sebesar Rp70.987.392,25 dibandingkan dengan realisasi pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir LKK tahun anggaran 2023 sebesar Rp75.333.024,01 terdapat penurunan sebesar Rp4.345.631,76 atau lebih rendah 5,77%.

c. Pendapatan Bunga Deposito.

Realisasi pendapatan bunga deposito sebesar Rp1.267.092.988,64 atau 127,69% yang berarti sebesar Rp274.757.755,64 atau 27,69% lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp992.335.233,00. Realisasi pendapatan bunga deposito tahun anggaran 2024 sebesar Rp1.267.092.988,64 dibandingkan dengan realisasi pendapatan bunga deposito tahun anggaran 2023 sebesar Rp2.880.498.521,96 terdapat penurunan sebesar Rp1.613.405.533,32 atau lebih rendah 56,01%. Turunnya pendapatan bunga deposito karena berkurangnya dana yang didepositokan.

d. Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan.

Realisasi pendapatan dari pengembalian sebesar Rp220.591.369,81. Pendapatan ini tidak dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2024 karena merupakan pendapatan yang tidak bisa diprediksi di tahun 2024.

e. Pendapatan dari Pengembalian

Realisasi pendapatan dari pengembalian tahun 2024 sebesar Rp509.412.385,09 merupakan pendapatan yang tidak bisa diprediksi di tahun 2024. Pendapatan ini meliputi dari pengembalian belanja tahun lalu baik hasil temuan BPK maupun Inspektorat. Realisasi pendapatan dari pengembalian tahun anggaran 2024 pendapatan ini tidak dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2024.

2. **Badan Pendapatan Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan dan Pemukiman**

a. Pendapatan Denda Pajak Daerah.

Realisasi pendapatan denda pajak daerah berupa denda Pajak Hotel, Pajak Restoran,Pajak Rumah Kost, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) dan BPHTB dikelola Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp658.795.250,00. Pendapatan denda pajak daerah tidak dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2024 karena realisasi denda Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Rumah Kost, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) dan BPHTB tidak dapat diprediksi perolehannya.

b. Pendapatan Denda Retribusi Daerah.

Realisasi pendapatan denda retribusi daerah berupa denda retribusi jasa usaha dari pemakaian

kekayaan daerah-penyewaan bangunan dikelola Dinas Perhubungan dan Dinas Perkim sebesar Rp44.610.000,00. Pendapatan denda retribusi daerah tidak dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2024

3. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

a. Pendapatan hasil penjualan Aset Tetap Lainnya berupa penjualan Biota Perairan.

Realisasi pendapatan penjualan Aset Tetap Lainnya berupa penjualan Biota Perairan sebesar Rp32.876.000,00 atau mencapai 102,74% yang berarti sebesar Rp876.000,00 atau 2,74% lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp32.000.000,00. Realisasi pendapatan penjualan Aset Tetap Lainnya berupa penjualan Biota Perairan tahun anggaran 2024 sebesar Rp32.876.000,00 dibandingkan dengan realisasi pendapatan penjualan hasil perikanan tahun anggaran 2023 sebesar Rp32.773.000,00 terdapat peningkatan sebesar Rp103.000,00 atau lebih tinggi 0,31%.

4. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

a. Pendapatan BLUD berupa pendapatan BLUD Puskesmas dan BLUD RSUD .

Realisasi pendapatan BLUD sebesar Rp1.220.236.904,36 atau mencapai 141,27% yang berarti Rp356.496.904,36 atau 41,27% lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp863.740.000,00. Realisasi pendapatan BLUD tahun anggaran 2024 sebesar Rp1.220.236.904,36 meliputi pendapatan jasa giro BLUD dibandingkan dengan realisasi pendapatan BLUD tahun anggaran 2023 sebesar Rp98.357.722.618,06 terdapat penurunan sebesar Rp97.137.485.713,70 atau lebih rendah sebesar 98,76%. Penurunan ini di akibatkan karena Pendapatan BLUD tahun anggran 2024 ada perubahan beberapa objek pendapatan, perubahan dimaksud adalah perpindahan kode rekening objek pendapatan dari pendapatan Lain Lain PAD Yang sah pindah masuk ke Pendapatann retribusi pelayanan kesehatan berupa pendapatan BLUD Puskesmas dan BLUD RSUD .

5.1.2. PENDAPATAN TRANSFER

5.1.2.1. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.2.01.Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	**762.805.557.000,00**	**774.640.399.685,63**	**101,55**	**740.785.552.012,80**

Penerimaan dari Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan terealisasi sebesar Rp774.640.399.685,63 mencapai 101,55% yang berarti sebesar Rp11.834.842.685,63 atau 1,55% lebih tinggi dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp762.805.557.000,00. Realisasi transfer pemerintah pusat dana perimbangan pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp774.640.399.685,63 dibandingkan dengan realisasi transfer pemerintah pusat dana perimbangan tahun anggaran 2023 sebesar Rp740.785.552.012,80 terjadi peningkatan sebesar Rp33.854.847.672,83 atau lebih tinggi 4,57%. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permenkeu Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil atau Dana Alokasi Umum yang di salurkan secara non tunai melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility dan Permenkeu. Dengan demikian, kenaikan maupun penurunan dana bagi hasil merupakan kewenangan penuh dari Pemerintah Pusat.

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat dana pembangunan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.1.2.1
Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
Bagi Hasil Pajak	42.910.277.000,00	24.113.939.741,00	56,20	24.092.136.000,00
Bagi Hasil Bukan Pajak	26.554.349.000,00	27.094.012.200,00	102,03	36.475.210.342,00
Dana Alokasi Umum	510.653.158.000,00	509.310.785.281,00	99,74	487.141.770.396,00
Dana Alokasi Khusus	123.687.951.000,00	117.131.678.463,63	94,70	82.402.483.839,80
Dana Insentif Fiskal	32.597.699.000,00	49.368.525.000,00	151,45	74.714.922.000,00
Dana Bagi Hasil Cukai	26.402.123.000,00	47.621.459.000,00	180,37	35.959.029.435,00
Jumlah	**762.805.557.000,00**	**774.640.399.685,63**	**101,55**	**740.785.552.012,80**

5.1.2.1.1. Bagi Hasil Pajak

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.2.01.01.01 Dana Bagi Hasil	**42.910.277.000,00**	**24.113.939.741,00**	**56,20**	**24.092.136.000,00**

Realisasi bagi hasil pajak sebesar Rp24.113.939.741,00 atau mencapai 56,20% yang berarti sebesar Rp.18.796.337.259,00 atau 43,80 yang berarti lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp42.910.277.00,00. Realisasi bagi hasil pajak tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp24.113.939.741,00 dibandingkan dengan realisasi dana bagi hasil tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp24.092.136.000,00 terjadi peningkatan sebesar Rp21.803.741,00 atau lebih tinggi 0,09%. Pendapatan yang berasal dari dana bagi hasil merupakan pendapatan yang tidak dapat dikontrol karena sangat tergantung realisasi DBH Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 tahun 2024 tentang pengelolaan Dana Bagi Hasil atau Dana Alokasi Umum. Dengan demikian, kenaikan maupun penurunan dana bagi hasil merupakan kewenangan penuh dari Pemerintah Pusat.

Perincian anggaran dan realisasi bagi hasil pajak untuk periode yang berakhir 30 September 2024 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.1.2.1.1.
Bagi Hasil Pajak

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.2.01.01.01.0001 Bagi Hasil PBB	21.612.094.000,00	2.815.756.741,00	13,03	2.725.606.000,00
4.2.01.01.01.0003 Bagi hasil PPh Pasal 25 dan 29	21.298.183.000,00	21.298.183.000,00	100,00	21.366.530.000,00
Total	**42.910.277.000,00**	**24.113.939.741,00**	**56,20**	**24.092.136.000,00**

1. Realisasi bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp2.815.756.741,00 atau mencapai 13,03% yang berarti sebesar Rp18.796.337.259,00 atau 86,97% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2024 sebasar Rp21.612.094.000,00. Realisasi bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun anggaran 2024 sebesar Rp2.815.756.741,00 apabila

dibandingkan dengan Realisasi bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun anggaran 2023 sebesar Rp2.725.606.000,00 terjadi peningkatan sebesar Rp90.150.741,00 atau lebih tinggi 3,31%.

2. Realisasi bagi hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan 29 sebesar Rp21.298.183.000,00 atau mencapai 100,00% yang berarti sama dengan target anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp21.298.183.000,00. Realisasi bagi hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan 29 tahun anggaran 2024 sebesar Rp21.298.183.000,00 apabila dibandingkan dengan Realisasi bagi hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan 29 tahun anggaran 2023 sebesar Rp21.366.530.000,00 terjadi penurunan sebesar Rp68.347.000,00 atau lebih rendah 0,32%.

5.1.2.1.2. Bagi Hasil Bukan Pajak

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	3
4.2.01.01.01 Bagi Hasil Bukan Pajak	**26.554.349.000,00**	**27.094.012.200,00**	**102,03**	**36.475.210.342,00**

Realisasi bagi hasil bukan pajak sebesar Rp27.094.012.200,00 atau mencapai 102,03% yang berarti sebesar Rp 539.663.200,00 atau 2,03% lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp 26.554.349.000,00. Realisasi bagi hasil bukan pajak tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp27.094.012.200,00 dibandingkan dengan realisasi bagi hasil bukan pajak tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp36.475.210.342,00 terjadi penurunan sebesar Rp9.381.198.142,00 atau lebih rendah 25,72%. Pendapatan yang berasal dari bagi hasil bukan pajak merupakan pendapatan yang tidak dapat dikontrol karena sangat tergantung realisasi DBH Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang pengelolaan Dana Bagi Hasil atau Dana Alokasi Umum. Dengan demikian, kenaikan maupun penurunan dana bagi hasil merupakan kewenangan penuh dari Pemerintah Pusat.

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan bagi hasil bukan pajak untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.1.2.1.2.
Bagi Hasil Bukan Pajak

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.2.01.01.01.0005 Bagi Hasil Bukan Pajak Minyak Bumi	24.619.133.000,00	25.158.425.000,00	102,19	33.797.056.552,00

4.2.01.01.01.0007 Bagi Hasil Bukan Pajak Panas Bumi	15.859.000,00	16.230.200,00	102,34	12.969.320,00
4.2.01.01.01.0008 Bagi Hasi Bukan Pajak Mineral dan Batubara Landrent	692.136.000,00	311.461.200,00	45,00	938.550.591,00
4.2.01.01.01.0009 Bagi Hasi Bukan Pajak Mineral dan Batubara Royalti	0,00	380.674.800,00	0,00	0,00
4.2.01.01.01.0010 Bagi Hasil Bukan Pajak Kehutanan	153.410.000,00	153.410.000,00	100,00	281.746.668,00
4.2.01.01.01.0013 Bagi Hasil Bukan Pajak Perikanan	1.073.811.000,00	1.073.811.000,00	100,00	1.444.887.211,00
Total	**26.554.349.000,00**	**27.094.012.200,00**	**102,03**	**36.475.210.342,00**

1. Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak Minyak Bumi sebesar Rp25.158.425.000,00 atau 102,19% yang berarti sebesar Rp539.292.000,00 atau 2,19% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp24.619.133.000,00. Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak Minyak Bumi tahun anggaran 2024 sebesar Rp25.158.425.000,00 apabila dibandingkan dengan Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak Minyak Bumi tahun anggaran 2023 sebesar Rp33.797.056.552,00 terjadi penurunan sebesar Rp8.638.631.552,00 atau lebih rendah 25,56%. Penyebab terjadinya kenaikan atau penurunan Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak Minyak Bumi merupakan pendapatan yang *uncontrollabe*.
2. Realisasi Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pengusaha Panas Bumi sebesar Rp16.230.200,00 atau 102,34% yang berarti sebesar Rp371.200,00 atau 2,34% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp15.859.000,00. Realisasi Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pengusaha Panas Bumi tahun anggaran 2024 sebesar Rp16.230.200,00 apabila dibandingkan dengan Realisasi Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pengusaha Panas Bumi tahun anggaran 2023 sebesar Rp12.969.320,00 terjadi peningkatan sebesar Rp3.260.880,00 atau lebih tinggi 25,14%. Realisasi dihitung berdasarkan prosentase yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Penyebab terjadinya Kenaikan atau penurunan Pendapatan bagi hasil dari Sumber Daya Alam Panas Bumi merupakan pendapatan yang *uncontrollabe*.
3. Realisasi Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pengusaha Mineral dan Batu Bara Landrent sebesar Rp311.461.200,00 atau 45,00% yang berarti sebesar Rp380.674.800,00 atau 55,00% lebih rendah dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp692.136.000,00. Realisasi Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pengusaha Mineral dan Batu

Bara Landrent tahun anggaran 2024 sebesar Rp311.461.200,00 apabila dibandingkan dengan Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak Mineral dan Batu Bara tahun anggaran 2023 sebesar Rp938.550.591,00 terjadi penurunan sebesar Rp627.089.391,00 atau lebih rendah 66,81%. Penyebab terjadinya Kenaikan atau penurunan disebabkan mengingat pendapatan bagi hasil dari Pertambangan Mineral dan Batu Bara merupakan pendapatan yang *uncontrollabe.*

4. Realisasi Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pengusaha Mineral dan Batu Bara Royalty sebesar Rp380.674.800,00 . Realisasi Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pengusaha Mineral dan Batu Bara Royalty merupakan pendapatan yang *uncontrollabe* mengingat pendapatan bagi hasil dari Pertambangan Mineral dan Batu Bara royalty merupakan kewenangan penuh dari Pemerintah Pusat.
5. Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak Kehutanan sebesar Rp153.410.500,00 atau 100,00% yang berarti sama dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp153.410..000,00. Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak Kehutanan tahun anggaran 2024 sebesar Rp153.410.500,00 apabila dibandingkan Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak Kehutanan tahun anggaran 2023 sebesar Rp281.746.668,00 terjadi penurunan sebesar Rp128.746.668,00 atau lebih rendah 45,55%. Penyebab terjadinya Kenaikan atau penurunan pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak Kehutanan dari iuran Provinsi Sumber Daya Hutan merupakan pendapatan yang *uncontrolable.*
6. Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak Perikanan sebesar Rp1.073.811.000,00 atau 100,00% yang berarti sama dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD anggaran 2024 sebesar Rp1.073.811.000,00. Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak Perikanan tahun anggaran 2024 sebesar Rp1.073.811.000,00 apabila dibandingkan Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak Perikanan tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.444.887.211,00 terjadi penurunan sebesar Rp371.076.211,00 atau lebih rendah 25,68%. Penyebab terjadinya Kenaikan atau penurunan pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak Perikanan merupakan pendapatan yang *uncontrolable.*

5.1.2.1.3. Dana Alokasi Umum

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.2.01.01.02 DAU	510.653.158.000,00	509.310.785.281,00	99,74	487.141.770.396,00

Realisasi dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp 509.310.785.281,00 atau 99,74% yang berarti sebesar Rp1.342.372.719,00 atau 0,26% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp510.653.158.000,00. Realisasi dana alokasi umum (DAU) tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp509.310.785.281,00 apabila dibandingkan dengan realisasi DAU tahun anggaran 2023 sebesar

Rp487.141.770.396,00 terjadi penurunnan sebesar Rp22.169.014.885,00 atau 4,55%. Penyebab terjadinya kenaikan atau penurunan pendapatan dana alokasi umum merupakan pendapatan yang *uncontrolable* karena menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Dengan demikian, kenaikan maupun penurunan dana alokasi umum merupakan kewenangan penuh dari Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah hanya menyajikan data-data berkaitan dengan penghitungan dana alokasi umum namun tidak berhak menentukan seberapa besar dana yang akan diterima. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang pengelolaan dana bagi hasil dan dana alokasi umum

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan dana alokasi Umum (DAU) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.1.2.1.4
Dana Alokasi Umum

Penerimaan Dana Alokasi Umum	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.2.01.01.02.0001 DAU	471.940.090.000,00	471.940.090.000,00	100,00	459.508.986.396,00
4.2.01.01.02.0002 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	5.400.000.000,00	5.400.000.000,00	100,00	5.400.000.000,00
4.2.01.01.02.0004 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Penggajian P3K	6.727.293.000,00	5.384.920.281,00	80,05	22.232.784.000,00
4.2.01.01.02.0005 DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	17.226.408.000,00	17.226.408.000,00	100,00	0,00
4.2.01.01.02.0006 DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	9.359.367.000,00	9.359.367.000,00	100,00	0,00
Jumlah	**510.653.158.000,00**	**509.310.785.281,00**	**99,74**	**487.141.770.396,00**

5.1.2.1.4. Dana Alokasi Khusus

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.2.01.01.03 DAK	**123.687.951.000,00**	**117.131.678.463,63**	**94,70%**	**82.402.483.839,80**

Realisasi Dana Alokasi Khusus adalah sebesar Rp117.131.678.463,63 atau 94,70% yang berarti sebesar Rp6.556.272.536,37 atau 5,30% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp123.687.951.000,00. Realisasi dana alokasi khusus tahun anggaran 2024 sebesar Rp117.131.678.463,63 apabila dibandingkan dengan Realisasi dana alokasi khusus tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp 82.402.483.839,00 terjadi penurunan sebesar Rp34.729.194.623,83 atau lebih rendah 42,15%. Pendapatan yang berasal dari dana alokasi khusus merupakan pendapatan yang *uncontrolable* karena menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Dengan demikian, kenaikan maupun penurunan dana alokasi khusus merupakan kewenangan penuh dari Pemerintah pusat.Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang pengelolaan dana bagi hasil dan dana alokasi umum

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan dana alokasi khusus (DAK) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.1.2.1.4
Dana Alokasi Khusus

Penerimaan Dana Alokasi Khusus	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.2.01.01.03 DAK Fisik	34.637.942.000,00	29.693.124.361,00	85,72	5.699.869.054,00
4.2.01.01.04 DAK Non Fisik	89.050.009.000,00	87.438.554.102,63	98,19	76.702.614.785,80
Jumlah	**123.687.951.000,00**	**117.131.678.463,63**	**94,70**	**82.402.483.839,80**

Sedangkan perincian anggaran dan realisasi pendapatan dana alokasi khusus (DAK) fisik dan non fisik untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023.

Tabel 5.1.2.1.5.
Dana Alokasi Khusus

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4 =(3/2)	5
4.2.01.01.03.				
Dana Alokasi Khusus (DAK)Fisik	***34.637.942.000,00***	***29.693.124.361,00***	***85,72***	***5.699.869.054,00***
4.2.01.01.03.0001 Pendidikan Reguler PAUD	205.379.000,00	200.710.000,00	97,73	0,00
4.2.01.01.03.0002 Pendidikan Reguler SD	1.401.384.000,00	1.195.679.541,00	85,32	2.876.952.272,00
4.2.01.01.03.0003 *Pendidikan Reguler SMP*	5.839.444.000,00	5.494.500.000,00	94,09	1.706.171.149,00
4.2.01.01.03.0017 Kesehatan& KB Reguler KB Penugasan penguatan stunting	123.016.000,00	122.500.000,00	99,58	1.042.518.233,00
4.2.01.01.03.0027 DAK Fisik Bid Perumahan dan Pemukiman Reguler Penyediaan Rumah Swadaya	9.882.732.000,00	9.487.211.315,00	96,00	74.227.400,00
4.2.01.01.03.0037 DAK Fisik Bidang Air Minum - Reguler	440.981.000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.03.0039 DAK Fisik Bidang Air Minum - Penugasan	1.009.680.000,00	1.199.292.000,00	118,78	0,00
4.2.01.01.04.0040 DAK Fisik Bidang Sanitasi-Reguler	13.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.04.0042 DAK Fisik Bidang Sanitasi-Penugasan	2.275.000.000,00	11.593.151.185,00	509,59	0,00
4.2.01.01.04.0060 *DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Reguler dan KB-*	460.326.000,00	400.080.320,00	86,91	0,00

Penguatan Sistem Kesehatan

4.2.01.01.04. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	***89.050.009.000,00***	***87.438.554.102,63***	***98,19***	***76.702.614.785,80***
4.2.01.01.04.0001 DAK Non Fisik –BOS Reguler	24.307.800.000,00	24.350.144.401,00	100,17	19.860.631.414,80
4.2.01.01.04.0003 DAK Non Fisik –BOS Kinerja	925.000.000,00	580.000.000,00	62,70	717.500.000,00
4.2.01.01.04.0004 DAK Non Fisik –TPG PNSD	45.418.623.000,00	32.025.723.800,00	70,51	45.266.704.000,00
4.2.01.01.04.0005 DAK Non Fisik –Tamsil Guru PNSD	727.459.000,00	14.294.664.200,00	1.965,01	605.685.285,00
4.2.01.01.04.0011 DAK Non Fisik – BOKKB-BOK	4.906.748.000,00	4.899.923.648,00	99,86	99.000.000,00
4.2.01.01.04.0012 DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	305.327.000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.04.0015 DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	2.482.252.000,00	1.799.631.180,00	72,50	2.301.503.000,00
4.2.01.01.04.0020 DAK Non Fisik – Fasilitas Penanaman Modal	415.178.000,00	413.315.500,00	99,55	4.958.759.000,00
4.2.01.01.04.0023 DAK Non Fisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	455.000.000,00	455.000.000,00	100,00	381.618.950,00
4.2.01.01.04.0025 DAK Non Fisik-PK2UMK	420.357.000,00	417.700.000,00	99,37	2.195.894.686,00
4.2.01.01.04.0028 DAK Non Fisik- Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	3.969.240.000,00	3.952.199.547,63	99,57	0,00

4.2.01.01.04.0029 DAK Non Fisik- DAK Non Fisik- Dana BOSP- PAUD Kinerja	210.000.000,00	180.000.000,00	85,71	0,00
4.2.01.01.04.0030 DAK Non Fisik- BOSP—BOP Kesetaraan Reguler	683.320.000,00	670.010.000,00	98,05	315.318.450,00
Jumlah	**123.687.951.000,00**	**117.131.678.463,63**	**94,70**	**82.402.483.839,80**

5.1.2.1.5. Dana Bagi Hasil Cukai

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.2.01.01.01 Dana Bagi Hasil Cukai	26.402.123.000,00	47.621.459.000,00	180,37	35.959.029.435,00

Realisasi Dana Bagi Hasil Cukai adalah sebesar Rp47.621.459.000,00 atau 180,37% yang berarti sebesar Rp21.219.336.000,00 atau 80,37% lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp26.402.123.000,00. Realisasi dana bagi hasil cukai tahun anggaran 2024 sebesar Rp47.621.459.000,00 apabila dibandingkan dengan realisasi dana bagi hasil cukai tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp 35.959.029.435,00 terjadi peningkatan sebesar Rp11.662.429.565,00 atau lebih tinggi 32,43%. Pendapatan yang berasal dari dana bagi hasil cukai merupakan pendapatan yang *uncontrolable* . Dengan demikian, kenaikan maupun penurunan dana bagi hasil cukai merupakan kewenangan penuh dari Pemerintah pusat. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 130 tahun 2024 tentang rincian anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 tahun 2024 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024.

5.1.2.2. Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	32.597.699.000,00	49.368.525.000,00	151,45%	74.714.922.000,00

Realisasi transfer pemerintah pusat – lainnya yang berupa Dana Penyesuaian yang terdiri dari Dana Insentif Daerah adalah sebesar Rp49.368.525.000,00 atau 151,45% yang berarti sebesar Rp16.770.826.000,00 atau 51,45% yang berarti lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp 32.597.699.000,00. Pendapatan yang berasal dari Dana Penyesuaian merupakan pendapatan yang *uncontrolable* karena menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 130 tahun 2024 tentang rincian anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024. Realisasi transfer pemerintah pusat – lainnya yang berupa Dana Insentif Daerah /DID tahun anggaran 2024 sebesar Rp49.368.525.000,00 apabila dibandingkan dengan realisasi transfer pemerintah

pusat – lainnya yang berupa Dana Insentif Daerah /DID tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp 74.714.922.000,00 terjadi penurunan sebesar Rp25.346.397.000,00 atau lebih rendah 33,92%.
Dengan demikian, kenaikan maupun penurunan merupakan kewenangan penuh dari Pemerintah pusat.

5.1.2.2.1 Dana Penyesuaian

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.3.4.01 Dana Insentif Daerah	32.597.699.000,00	49.368.525.000,00	151,45%	74.714.922.000,00

Realisasi pendapatan Dana Insentif Daerah yang merupakan bagian dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah sebesar Rp49.368.525.000,00 atau 151,45% yang berarti lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp32.597.699.000,00. Realisasi Dana Penyesuaian merupakan pendapatan yang *uncontrolable* karena menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Dengan demikian, kenaikan maupun penurunan merupakan kewenangan penuh dari Pemerintah pusat.
Realisasi pendapatan Dana Insentif Daerah tahun anggaran 2024 sebesar Rp49.368.525.000,00 dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2023 sebesar Rp74.714.922.000,00 terjadi penurunan sebesar Rp25.346.397.000,00 atau lebih rendah 33,92%.

5.1.2.3. Transfer Pemerintah Provinsi

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
Transfer Pemerintah Provinsi	107.744.070.000,00	117.643.297.100,00	109,19%	121.272.084.812,00

Penerimaan dari transfer pemerintah provinsi sebesar Rp117.643.297.100,00 atau 109,19% yang berarti sebesar Rp9.899.227.100,00 atau 9,19% lebih tinggi dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp107.744.070.000,00. Realisasi transfer pemerintah provinsi – dana perimbangan tahun anggaran 2024 sebesar Rp117.643.297.100,00 dibandingkan dengan realisasi transfer pemerintah provinsi dana perimbangan tahun anggaran 2023 sebesar Rp121.272.084.812,00 terjadi penurunan sebesar Rp3.628.787.712,00 atau lebih rendah 2,99%. Penerimaan dari pendapatan

transfer pemerintah provinsi dana perimbangan sesuai dengan Keputusan gubernur Jawa Timur nomor 188/180/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah untuk kabupaten/Kota tahun anggaran 2024 Berdasarkan Realisasi Pajak daerah Triwulan I Tahun Anggaran 2024.

5.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
5.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak	**107.074.020.000,00**	**116.973.247.100,00**	**109,25**	**120.565.582.200,00**

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari propinsi adalah sebesar Rp 116.973.247.100,00 mencapai 109,25% yang berarti sebesar Rp9.899.227.100,00 atau 8,97% lebih tinggi dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp107.074.020.000,00. Pendapatan yang berasal dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari propinsi merupakan pendapatan yang *uncontrolable* karena menjadi kewenangan pemerintah propinsi. Dengan demikian, kenaikan maupun penurunan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari propinsi merupakan kewenangan penuh dari pemerintah provinsi. Realisasi dana bagi hasil pajak dari provinsi tahun anggaran 2024 sebesar Rp116.973.247.100,00 dibandingkan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari provinsi tahun anggaran 2023 sebesar Rp120.565.582.200,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp3.892.335.100,00 atau lebih rendah 3,23%.

Perincian anggaran dan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari provinsi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.1.2.3.1
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.2.02.01.0001 Pendapatan Bagi Hasil Pajak PKB	30.277.000.000,00	34.171.954.000,00	112,86	34.918.489.800,00
4.2.02.01.0002 Pendapatan Bagi Hasil Pajak BBNKB	10.608.000.000,00	13.954.270.800,00	131,54	15.339.681.100,00

4.2.02.01.0003 Pendapatan Bagi Hasil Pajak PBBKB	28.968.000.000,00	33.317.236.500,00	115,01	29.292.250.400,00
4.2.02.01.0004 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	228.000.000,00	253.777.100,00	111,31	371.681.600,00
4.2.02.01.0005 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	36.993.020.000,00	35.276.008.700,00	95,36	40.643.479.300,00
Total	**107.074.020.000,00**	**116.973.247.100,00**	**109,25**	**120.565.582.200,00**

1. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp34.171.954.000,00 atau mencapai 112,86% yang berarti sebesar Rp3.894.954.000,00 atau 12,86% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp30.277.000.000,00. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun anggaran 2024 sebesar Rp34.171.954.000,00 dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun 2023 sebesar Rp34.918.489.800,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp746.535.800,00 atau lebih rendah 2,14%.
2. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp13.954.270.800,00 atau mencapai 131,54% yang berarti sebesar Rp3.346.270.800,00 atau 31,54% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp10.608.000.000,00.Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)tahun anggaran 2024 sebesar Rp13.954.270.800,00 dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tahun 2023 sebesar Rp15.339.681.100,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp1.385.410.300,00 atau lebih rendah 9,03%.
3. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar Rp33.317.236.500,00 atau mencapai 115,01% yang berarti sebesar Rp4.349.236.500,00 atau 15,01% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp28.968.000.000,00. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tahun anggaran 2024 sebesar Rp33.317.236.500,00 dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tahun 2023 sebesar Rp29.292.250.400,00 atau terjadi peningkatan sebesar Rp4.024.986.100,00 atau lebih tinggi 13,74%.
4. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebesar Rp253.777.100,00 atau mencapai 111,31% yang berarti sebesar Rp25.777.100,00 atau 11,31% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp228.000.000,00. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan tahun anggaran 2024

sebesar Rp253.777.100,00 dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan tahun 2023 sebesar Rp371.681.600,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp117.904.500,00 atau lebih rendah 31,72%.

5. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp35.276.008.700,00 atau mencapai 95,36% yang berarti sebesar Rp1.717.011.300,00 atau 4,64% lebih rendah dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp36.993.020.000,00.Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok tahun anggaran 2024 sebesar Rp35.276.008.700,00 dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok tahun 2023 sebesar Rp40.643.479.300,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp5.367.470.000 ,00 atau lebih rendah 13,21%.

5.1.2.3.2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Bantuan Keuangan dari Propinsi/Pemerintah Lainnya

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.2.02.02.02.0001 Bantuan Keuangan dari Provinsi/ Pemda Lainnya	**670.050.000,00**	**670.050.000,00**	**100%**	**706.502.612,00**

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Bantuan Keuangan dari Propinsi sebesar Rp670.050.000,00 atau mencapai 100% yang berarti sebesar sama dengan target yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp670.050.000,00. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Bantuan Keuangan dari Propinsi tahun aggaran 2024 sebesar Rp670.050.000,00 dibandingkan dengan realiasi Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Bantuan Keuangan dari Propinsi tahun anggaran 2023 sebesar Rp706.502.000,00 terjadi penurunan sebesar Rp36.452.612,00 atau lebih rendah 5,16%. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Bantuan Keuangan dari Propinsi merupakan pendapatan yang *uncontrolable* karena menjadi kewenangan pemerintah propinsi berdasarkan ketetapan Gubernur Jawa Timur nomor 100.3.3.1/140/KPTS/013/ tahun 2024 tentang Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang Diverifikasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024. Perincian anggaran dan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Bantuan Keuangan dari Propinsi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.1.2.3.2
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
Bantuan Keuangan dari Propinsi /Pemerintah Lainnya

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) selama 6 bulan Ta.2024	476.850.000,00	476.850.000,00	100%	476.850.000,00
Honorarium Kinerja Guru Non PNS Sejenjang TK/SD/SMP selama 10 Bulan Ta.2024	30.000.000,00	30.000.000,00	100%	30.000.000,00
Honorarium Kinerja Kepala /GuruTK/Paud Non PNS selama 6 bulan ta 2024	163.200.000,00	163.200.000,00	100%	163.200.000,00
Bantuan Keuangan khusus Bidang Kesehatan Ta.2024			100%	30.452.612,00
Honorarium Kinerja Guru Non PNS jenjang /TK/SD/SMP selama 2 bulan ta 2024			0,00%	6.000.000,00

Total	**670.050.000,00**	**670.050.000,00**	**100%**	**706.502.612,00**

5.1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
5.1.3. Lain-lain pendapatan yang sah	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**

Penerimaan dari lain-lain pendapatan yang sah tahun anggaran 2024 tidak ada realisasi. Penerimaan dari pendapatan dana hibah terdiri dari Pendapatan dana BOS tahun anggaran 2024 pindah ke realisasi dana alokasi khusus non fisik. Realisasi lain-lain pendapatan yang ini merupakan merupakan pendapatan yang *uncontrolable*.

Perincian anggaran dan realisasi lain-lain pendapatan yang sah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.1.3.
Lain Lain Pendapatan Yang Sah

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.3.03.01.01.0001 Pendapatan hibah Dana BOS	0,00	0,00		0,00
4.3.03.01.02.0005 Pendapatan atas pengembalian hibah	0,00	0,00		0,00
Total	**0,00**	**0,00**		**0,00**

5.1.3.1. Pendapatan Dana Hibah

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.3.03.01.01. Pendapatan Dana Hibah	**0,00**	**0,00**		**0,00**

Penerimaan dari pendapatan dana hibah terdiri dari Pendapatan dana BOS tahun anggaran 2024 pindah ke realisasi dana alokasi khusus non fisik. Pada tahun 2024 tidak terdapat penerimaan dari pendapatan dana hibah Bos, karena di reklas menjadi pendapatan DAK Non Fisik.

5.2. BELANJA

5.2.1. BELANJA OPERASI

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
Belanja Operasi	**1.075.729.133.941,00**	**1.012.766.107.583,76**	**94,15**	**975.874.375.042,70**

Realisasi belanja Operasi sebesar Rp1.012.766.107.883,76 atau mencapai 94,15% yang berarti sebesar Rp62.963.026.357,24 atau 5,86% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp1.075.729.133.941,00.

Perincian anggaran dan realisasi belanja operasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.2.1
Belanja Operasi

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
5.2.1.1 Belanja Pegawai	470.001.790.757,00	438.170.995.927,75	93,23	423.896.152.844,39
5.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa	526.647.293.235,00	497.881.778.674,38	94,54	487.718.322.693,31
5.2.1.3 Belanja Subsidi	50.000.000,00	49.955.750,00	99,91	99.146.000,00
5.2.1.4 Belanja Hibah	45.969.265.421,00	45.781.591.231,63	99,59	32.355.896.005,00
5.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial	33.061.084.528,00	30.881.786.000,00	93,41	31.804.857.500,00
Jumlah Belanja Operasi	**1.075.729.133.941,00**	**1.012.766.107.583,76**	**94,15**	**975.874.375.042,70**

5.2.1.1. Belanja Pegawai

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
Pegawai	**470.001.490.757,00**	**438.170.995.927,75**	**93,23**	**423.896.152.844,39**

Realisasi belanja pegawai sebesar Rp438.170.995.927,75 atau mencapai 93,23% yang berarti sebesar Rp31.830.794.829,25 atau sebesar 6,77% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp470.001.490.757,00. Hal ini dikarenakan banyak pegawai yang sudah pensiun.

Realisasi belanja pegawai dibandingkan dengan realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2023 sebesar Rp423.896.152.844,39 terjadi kenaikan sebesar Rp14.274.843.083,36 atau sebesar 3,37%. Perincian obyek belanja anggaran dan realisasi belanja pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.2.1.1
Belanja Pegawai

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan	245.186.069.483,00	231.278.137.979,00	94,33	210.825.345.289,00
5.1.1.02 Tambahan Penghasilan ASN	145.205.369.961,00	131.866.176.802,00	90,81	132.981.043.160,00
5.1.1.03 Tambahan Penghasilan berdasar Pertimbangan Obyektif Lainnya	60.564.755.418,00	57.630.417.107,45	95,16	64.056.690.831,33
5.1.1.04 Belanja Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD	15.789.368.665,00	15.039.533.046,00	95,25	14.287.484.704,00
5.1.1.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	964.144.614,00	678.832.513,30	70,41	912.138.860,06
5.1.1.06 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD, KDH/WKDH	778.180.000,00	744.580.000,00	95,68	731.340.000,00
5.1.1.88 Belanja Pegawai BOS	642.065.200,00	0,00	00,00	0,00
5.1.1.99 Belanja Pegawai BLUD	871.537.416,00	933.318.480,00	107,09	102.110.000,00
Jumlah Belanja Pegawai	**470.001.490.757,00**	**438.170.995.927,75**	**93,23**	**423.896.152.844,39**

Perincian anggaran dan realisasi belanja pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 OPD tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.2.1.1.1

Belanja Pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

Belanja Pegawai OPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4 =(3/2)	5
Dinas Pendidikan	164.737.368.200,00	159.144.871.610,00	96,61	159.677.191.999,00
Dinas Kesehatan PP & KB	88.013.379.245,00	84.650.314.927,00	96,18	71.923.686.377,00

Belanja Pegawai OPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Dinas PU TR	7.750.905.630,00	6.805.633.078,00	87,80	6.741.362.679,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5.320.394.695,00	5.066.925.249,00	95,24	4.787.941.364,00
Satpol PP & Damkar	7.110.064.275,00	6.494.142.959,00	91,34	6.239.014.742,00
BPBD	1.784.734.806,00	1.773.490.829,00	99,37	1.701.613.226,00
Dinas Sosial	5.691.468.024,00	5.194.962.296,00	91,28	5.424.675.511,00
Dinas Tenaga Kerja	5.095.280.088,00	4.654.436.934,00	91,35	5.067.862.752,00
Dinas Ket. Pangan & Pertanian	4.810.601.937,00	4.423.226.641,00	91,95	4.204.677.559,00
Dinas LH	9.269.813.666,00	8.292.384.099,00	89,46	9.297.966.573,00
Dispendukcapil	4.635.438.114,00	4.544.738.378,00	98,04	4.317.572.955,00
Dinas Perhubungan	6.418.117.025,00	6.282.182.536,00	97,88	6.228.595.727,00
Dinas Kominfo	5.365.426.963,00	5.003.317.840,00	93,25	4.931.346.454,00
Dinas PM & PTSP	3.935.691.114,00	3.903.958.972,00	99,19	3.818.343.136,00
Dinas Budparpora	4.588.132.907,00	4.215.979.804,00	91,89	4.265.260.370,00
Dinas Perpustakaan	3.934.318.155,00	3.778.129.518,00	96,03	3.723.966.456,00
Dinas Perdagangan	8.654.573.876,00	8.213.981.531,00	94,91	8.343.248.151,00
Bagian Pemerintahan	899.410.000,00	708.486.262,00	78,77	816.749.507,00
Bagian Organisasi	837.422.668,00	804.014.807,00	96,01	790.595.690,00
Bagian Hukum	906.721.390,00	827.003.410,00	91,21	829.661.789,00
Bagian PBJ & Adbang	1.527.581.430,00	1.448.781.373,00	94,84	1.652.305.058,00
Bagian Perekkesra	1.081.294.810,00	850.117.200,00	78,62	906.628.617,00
Bagian Umum	13.291.697.835,00	10.937.245.577,00	82,29	11.090.677.770,00
Sekretariat DPRD	19.061.966.082,00	18.027.160.192,00	94,57	17.377.019.689,00
BAPELITBANGDA	5.413.846.449,00	4.574.356.082,00	84,49	4.693.769.022,00
BKAD	29.672.879.931,00	20.343.872.547,00	68,56	18.764.087.938,00
Bependa	8.593.173.274,00	7.732.644.935,75	89,99	7.725.180.552,39
BKPSDM	5.893.367.000,00	5.621.087.086,00	95,38	5.690.093.810,00
Inspektorat	7.516.857.781,00	7.451.210.586,00	99,13	7.166.570.507,00
Kec Manguharjo	11.514.430.659,00	10.718.265.394,00	93,09	11.070.556.260,00

Belanja Pegawai OPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Kec Kartoharjo	11.028.547.331,00	10.713.111.447,00	97,14	10.742.772.955,00
Kec Taman	11.659.170.471,00	11.273.079.029,00	96,69	10.266.975.319,00
Bakesbangpol	3.987.414.926,00	3.697.882.799,00	92,74	3.618.182.330,00
Total	**470.001.490.757,00**	**438.170.995.927,75**	**93,23**	**423.896.152.844,39**

5.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
Belanja Barang dan Jasa	**526.647.293.235,00**	**497.881.778.674,38**	**94,54**	**487.718.322.693,31**

Realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp497.881.778.674,38 atau mencapai 94,54% yang berarti sebesar Rp28.765.514.560,62 atau sebesar 5,46% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp526.647.293.235,00. Hal ini disebabkan adanya efisiensi belanja barang dan jasa karena adanya beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan karena pertimbangan tertentu. Perincian anggaran dan realisasi obyek belanja barang dan jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebelum dilakukan reklas tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.2.1.2
Belanja Barang dan Jasa
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Belanja Barang dan Jasa		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1		2	3	4 = (3/2)	5
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa		**526.647.293.235,00**	**497.881.778.674,38**	**94,54**	**487.718.322.693,31**
5.1.02.01 Belanja Barang		**106.450.429.863,00**	**101.817.737.067,00**	**95,65**	**122.590.404.708,50**
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	102.709.707.798,00	98.243.988.847,00	95,65	121.594.690.615,50
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	699.683.912,00	694.003.220,00	99,19	995.714.093,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria	3.041.038.153,00	2.879.745.000,00	94,70	0,00
5.1.02.02 Belanja Jasa		**193.198.568.427,00**	**179.875.796.850,23**	**93,03**	**191.169.925.758,63**
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	140.723.226.358,00	131.155.626.262,00	93,10	138.950.330.745,70

Belanja Barang dan Jasa		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
	1	2	3	4 = (3/2)	5
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan Asuransi	34.061.136.800,00	31.895.182.438,36	93,64	33.350.830.308,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	0,00	0,00	00,00	98.058.450,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.600.089.328,00	3.305.175.746,00	91,81	5.050.319.519,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	861.763.474,00	621.368.468,00	72,10	808.833.130,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	131.801.760,00	114.259.792,00	86,69	131.839.800,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.632.228.687,00	1.525.131.694,00	93,44	1.109.490.690,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	6.161.242.168,00	5.771.799.178,87	93,68	6.807.330.669,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	487.500.000,00	487.500.000,00	100,00	530.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek & Diklat	5.320.372.000,00	4.799.072.915,00	90,20	4.205.608.886,00
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif pegawai non ASN atas pemungutan	219.207.852,00	200.680.356,00	91,55	127.283.560,93
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**	**49.280.670.242,00**	**46.845.075.390,15**	**95,06**	**25.428.091.070,18**
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	0,00	0,00	00,00	1.131.743.591,90
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan	18.974.952.062,00	17.071.141.372,00	89,97	5.747.336.369,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung & Bangunan	11.883.748.989,00	11.433.341.680,85	96,21	8.841.745.814,28
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan & Irigasi	16.982.651.000,00	16.919.359.484,00	99,63	9.079.879.600,00
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap	539.367.000,00	521.994.413,30	96,78	627.385.695,00
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak	899.951.191,00	899.238.440,00	99,92	0,00

Belanja Barang dan Jasa		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1		2	3	4 = (3/2)	5
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**	**51.743.814.851,00**	**43.762.654.322,00**	**84,58**	**41.205.029.504,00**
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam	51.289.353.182,00	43.762.654.322,00	85,33	39.262.456.274,00
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar	454.461.669,00	0,00	00,00	1.942.573.230,00
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**	**4.866.752.260,00**	**4.689.132.680,00**	**96,35**	**4.183.782.600,00**
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.844.427.260,00	4.675.457.680,00	96,51	3.926.482.600,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	22.325.000,00	13.675.000,00	61,25	257.300.000,00
5.1.02.88	**Belanja Barang dan Jasa BOS**	**16.753.081.390,00**	**17.571.294.042,00**	**104,88**	**17.756.446.336,00**
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	16.753.081.390,00	17.571.294.042,00	104,88	17.756.446.336,00
5.1.02.90	**Belanja Barang dan Jasa BOK**	**3.317.316.000,00**	**3.284.767.700,00**	**99,02**	**0,00**
5.1.02.90.01	Belanja Barang dan Jasa BOK	3.317.316.000,00	3.284.767.700,00	99,02	0,00
5.1.02.99	**Belanja Barang dan Jasa BLUD**	**101.036.660.202,00**	**100.035.320.623,00**	**99,16**	**85.384.642.716,00**
5.1.02.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	101.036.660.202,00	100.035.320.623,00	99,16	85.384.642.716,00

Perincian anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 OPD tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.2.1.2.1
Belanja Barang dan Jasa Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

Belanja Barang dan Jasa OPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4 =(3/2)	5
Dinas Pendidikan	37.468.503.454,00	35.918.144.312,00	95,86	53.079.016.505,01
Dinas Kesehatan PP & KB	170.120.771.340,00	165.559.335.463,00	97,32	150.714.595.708,50
Dinas PU TR	27.853.862.272,00	25.740.033.928,00	92,41	21.271.408.630,67
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	21.754.587.996,00	21.121.456.066,30	97,09	20.384.711.510,00

Belanja Barang dan Jasa OPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Satpol PP & Damkar	12.996.541.412,00	11.239.254.656,49	86,48	14.570.976.270,00
BPBD	2.236.257.000,00	2.201.976.605,00	98,47	1.906.036.750,00
Dinas Sosial	10.644.720.460,00	9.545.997.182,00	89,68	10.375.921.776,00
Dinas Tenaga Kerja	10.328.281.839,00	9.295.437.008,00	90,00	6.167.232.530,69
Dinas Ket. Pangan & Pertanian	11.035.054.307,00	10.279.889.597,00	93,16	6.997.365.725,00
Dinas LH	15.412.599.860,00	14.700.425.509,87	95,38	13.111.415.204,26
Dispendukcapil	2.792.917.291,00	2.745.077.645,00	98,29	2.151.651.519,00
Dinas Perhubungan	9.257.567.227,00	9.173.304.296,00	99,09	10.305.567.592,21
Dinas Kominfo	23.200.081.972,00	23.120.333.110,00	99,66	25.784.803.453,00
Dinas PM & PTSP	2.697.095.301,00	2.540.858.573,00	94,21	3.104.851.437,00
Dinas Budparpora	10.226.423.624,00	10.152.702.826,11	99,28	11.997.219.231,90
Dinas Perpustakaan	2.564.335.000,00	2.463.330.168,00	96,06	2.824.534.718,40
Dinas Perdagangan	7.716.753.202,00	7.550.467.441,00	97,85	6.571.766.182,00
Bagian Pemerintahan	2.697.966.220,00	2.472.702.491,00	91,65	2.516.839.475,00
Bagian Organisasi	1.822.427.719,00	1.783.197.578,00	97,85	1.743.535.582,00
Bagian Hukum	1.690.478.251,00	1.629.468.981,00	96,39	1.447.167.083,00
Bagian PBJ & Adbang	1.325.697.000,00	1.318.190.240,48	99,43	1.525.127.316,00
Bagian Perekkesra	4.205.034.952,00	3.611.862.232,87	85,89	2.831.143.183,00
Bagian Umum	17.272.388.093,00	15.966.934.871,93	92,44	21.682.748.142,10
Sekretariat DPRD	32.925.816.067,00	25.564.756.682,00	77,64	25.300.933.755,00
BAPELITBANGDA	7.771.584.463,00	7.523.467.890,00	96,81	5.948.828.901,00
BKAD	26.690.526.080,00	24.748.745.681,36	92,72	23.056.547.075,00
Bependa	2.876.082.163,00	2.747.884.149,00	95,54	2.126.399.791,93
BKPSDM	5.195.730.924,00	4.754.248.383,00	91,50	5.342.016.703,00
Inspektorat	2.936.610.000,00	2.841.797.685,00	96,77	2.206.273.886,00
Kec Manguharjo	12.078.626.710,00	11.885.519.036,96	98,40	9.336.694.143,64
Kec Kartoharjo	11.250.365.036,00	11.130.641.801,00	98,94	8.613.550.630,00
Kec Taman	12.087.451.760,00	11.884.808.139,01	98,32	9.836.692.809,00
Bakesbangpol	5.514.154.240,00	4.669.528.445,00	84,68	2.884.749.474,00

Belanja Barang dan Jasa OPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Total	526.647.293.235,00	497.881.778.674,38	94,48	487.718.322.693,31

Perincian anggaran dan realisasi belanja barang jasa yang berasal dari belanja BOS untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 Sekolah SDN dan SMPN di lingkungan Dinas Pendidikan tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.2.1.2.2
Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Belanja Barang dan Jasa BOS Per Sekolah	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
SDN 01 Kartoharjo	260.498.500,00	265.030.687,00	101,74	239.930.825,00
SDN 02 Kartoharjo	30.678.000,00	58.171.558,00	189,62	56.861.454,00
SDN 01 Klegen	254.173.000,00	234.045.200,00	92,08	263.821.160,00
SDN 02 Klegen	107.247.000,00	103.315.405,00	96,33	93.551.745,00
SDN 03 Klegen	287.200.000,00	290.909.097,00	101,29	263.909.058,00
SDN 04 Klegen	74.688.000,00	77.658.000,00	103,98	80.778.000,00
SDN Oro Oro Ombo	195.436.000,00	178.240.400,00	91,20	187.653.293,00
SDN Rejomulyo	76.690.000,00	78.525.803,00	102,39	84.102.646,00
SDN 01 Kanigoro	64.300.000,00	66.608.145,00	103,59	64.543.864,00
SDN 02 Kanigoro	130.325.000,00	132.301.015,00	101,52	132.006.212,00
SDN 03 Kanigoro	135.555.000,00	136.951.261,00	101,03	110.077.417,00
SDN Sukosari	20.583.000,00	26.532.651,00	128,91	21.958.502,00
SDN Pilangbango	189.505.000,00	201.949.333,00	106,57	187.182.896,00
SDN 01 Tawangrejo	113.447.000,00	129.196.750,00	113,88	121.034.194,00
SDN 02 Tawangrejo	67.790.000,00	78.590.000,00	115,93	83.980.728,00
SDN Kelun	132.223.950,00	108.463.500,00	82,03	123.251.500,00
SDN 01 Manguharjo	192.729.600,00	192.728.920,00	100,00	185.773.127,00
SDN 01 Nambangan Lor	232.220.000,00	204.369.620,00	88,01	205.005.227,00
SDN 02 Nambangan Lor	110.680.000,00	111.669.792,00	100,89	120.677.090,00
SDN 01 Madiun Lor	86.580.000,00	83.606.205,00	96,57	88.397.666,00
SDN 02 Madiun Lor	62.707.900,00	83.907.899,00	133,81	87.307553,00

Belanja Barang dan Jasa BOS Per Sekolah	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
SDN 03 Madiun Lor	450.181.000,00	452.129.826,00	100,43	438.484.270,00
SDN 04 Madiun Lor	231.375.000,00	265.666.995,00	114,82	279.399.458,00
SDN 05 Madiun Lor	246.562.600,00	335.590.359,00	136,11	369.603.950,00
SDN 01 Nambangan Kidul	88.010.000,00	141.828.732,00	161,15	94.883.828,00
SDN 02 Nambangan Kidul	95.214.000,00	84.765.787,00	89,03	95.887.500,00
SDN 03 Nambangan Kidul	246.980.000,00	229.170.650,00	92,79	238.552.000,00
SDN 01 Winongo	224.910.000,00	228.073.460,00	101,41	222.149.935,00
SDN 02 Winongo	52.440.000,00	42.241.920,00	80,55	55.439.872,00
SDN Ngegong	131.338.400,00	146.187.972,00	111,31	139.622.849,00
SDN Patihan	214.083.000,00	188.761.800,00	88,17	192.976.000,00
SDN Pangongangan	201.340.000,00	413.471.659,00	205,36	243.360.630,00
SDN Sogaten	140.490.000,00	148.320.000,00	105,57	153.417.242,00
SDN 01 Taman	354.448.000,00	324.829.806,00	91,64	371.939.712,00
SDN 02 Taman	58.265.000,00	51.391.884,00	88,20	57.491.364,00
SDN 03 Taman	78.550.000,00	70.581.365,00	89,86	59.665.855,00
SDN 01 Pandean	263.580.000,00	259.620.000,00	98,50	287.557.590,00
SDN 02 Pandean	198.911.600,00	224.638.128,00	112,93	241.061.493,00
SDN Banjarejo	314.850.000,00	354.935.160,00	112,73	303.201.647,00
SDN 01 Mojorejo	86.604.000,00	78.683.913,00	90,85	81.182.897,00
SDN 02 Mojorejo	423.928.000,00	382.933.706,00	90,33	401.403.085,00
SDN 01 Manisrejo	227.828.900,00	231.715.318,00	101,71	260.653.076,00
SDN 02 Manisrejo	187.320.000,00	207.929.735,00	111,00	228.393.100,00
SDN 03 Manisrejo	106.650.000,00	97.393.276,00	91,32	142.630.304,00
SDN 04 Manisrejo	152.360.000,00	158.169.830,00	103,81	157.303.044,00
SDN 01 Demangan	102.628.000,00	93.982.054,00	91,58	111.670.175,00
SDN 02 Demangan	135.990.000,00	121.070.000,00	89,03	124.030.500,00
SDN 01 Josenan	142.715.300,00	155.494.356,00	108,95	143.770.773,00
SDN 02 Josenan	148.485.000,00	141.469.639,00	95,28	147.570.724,00
SDN 03 Josenan	61.948.200,00	60.172.685,00	97,13	60.986.500,00

Belanja Barang dan Jasa BOS Per Sekolah	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
SDN Kejuron	35.640.000,00	36.622.288,00	102,76	35.974.749,00
SDN Kuncen	68.556.600,00	68.550.381,00	99,99	73.323.390,00
SMP NEGERI 1	810.138.540,00	842.297.042,00	103,97	859.041.086,00
SMP NEGERI 2	803.160.000,00	801.948.417,00	99,85	851.291.301,00
SMP NEGERI 3	492.960.000,00	580.833.900,00	117,83	581.187.404,00
SMP NEGERI 4	942.114.000,00	942.498.800,00	100,04	998.195.541,00
SMP NEGERI 5	411.170.000,00	453.300.000,00	110,25	465.985.111,00
SMP NEGERI 6	580.520.000,00	632.934.261,00	109,03	666.671.908,00
SMP NEGERI 7	749.321.600,00	782.901.599,00	104,48	773.364.483,00
SMP NEGERI 8	479.757.500,00	461.441.825,00	96,18	473.446.485,00
SMP NEGERI 9	491.570.000,00	461.358.850,00	93,85	476.609.054,00
SMP NEGERI 10	485.803.200,00	522.917.400,00	107,64	580.587.818,00
SMP NEGERI 11	616.307.200,00	685.344.300,00	111,20	758.295.900,00
SMP NEGERI 12	572.660.000,00	634.745.485,00	110,84	589.189.281,00
SMP NEGERI 13	729.300.000,00	826.458.650,00	113,32	778.788.426,00
SMP NEGERI 14	290.859.800,00	303.149.588,00	104,23	288.400.869,00
Total	**16.753.081.390,00**	**17.571.294.042,00**	**104,88**	**17.756.446.336,00**

Perincian anggaran dan realisasi belanja barang jasa yang berasal dari belanja BLUD untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan periode 31 Desember 2023 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.2.1.2.3
Belanja Barang dan Jasa BLUD Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Barang dan Jasa BLUD				
Belanja Barang	46.525.194.373,00	46.400.535.386,00	107,30	31.180.220.179,00
Belanja Jasa	48.526.920.148,00	48.009.809.143,00	93,87	48.646.782.419,00
Belanja Pemeliharaan	4.714.701.718,00	4.596.196.862,00	87,94	3.987.889.031,00
Belana Perjalanan Dinas	1.269.843.963,00	1.028.779.232,00	68,04	1.569.751.087,00
Total Belanja Barang dan Jasa	**101.036.660.202,00**	**100.035.320.623,00**	**98,92**	**85.384.642.716,00**

5.2.1.3 BELANJA SUBSIDI

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
Hibah	**50.000.000,00**	**49.955.750,00**	**99,91**	**99.146.000,00**

Realisasi belanja subsidi tahun anggaran 2024 sebesar Rp49.955.750,00 atau 99,91% yang berarti Rp44.250,00 atau 0,09% sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp50.000.000,00. Belanja subsidi ini dalam rangka untuk penekanan inflasi melalui program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di kegiatan pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota pada sub kegiatan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) kabupaten/ kota.

Perincian anggaran dan realisasi belanja Subsidi yang berasal dari beberapa OPD untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.2.1.3
Belanja Subsidi

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
5.1.04.01. Belanja Subsidi kepada BUMN	50.000.000,00	49.955.750,00	99,91	99.146.000,00
Jumlah Belanja Subsidi	**50.000.000,00**	**49.955.750,00**	**99,91**	**99.146.000,00**

5.2.1.4. Belanja Hibah

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
Hibah	**45.969.265.421,00**	**45.781.591.231,63**	**99,59**	**32.355.896.005,00**

Realisasi belanja hibah sebesar Rp45.781.591.231,63 atau mencapai 99,59% yang berarti sebesar Rp187.674.189,37 atau 0,41% lebih rendah dari Anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp45.969.265.421,00 sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor : 400-401.202/8/2024 tentang Badan/Lembaga/Organisasi/Kelompok Masyarakat/ Perorangan Penerima

Hibah dan Bantuan Sosial Yang Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Surat Keputusan Wali Kota Madiun nomor : 400-401.202/9/2024 tentang Pejabat Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah terhadap Hibah yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Realisasi belanja hibah tahun 2024 termasuk belanja hibah berupa bantuan kepada parpol pada tahun 2024 sebesar Rp949.894.600,00

Perincian anggaran dan realisasi belanja hibah yang berasal dari beberapa OPD untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.2.1.4
Belanja Hibah

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
5.1.05.01. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	7.044.575.904,00	6.713.335.400,00	95,30	6.383.188.600,00
5.1.05.05. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan, yang berbadan Hukum Indonesia	28.856.306.017,00	28.748.938.733,00	99,63	25.022.143.905,00
5.1.05.06. Belanja Hibah Dana BOS	4.410.910.000,00	4.522.212.951,00	102,52	0,00
5.1.05.07. Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	950.563.500,00	949.894.600,00	99,93	950.563.500,00
5.1.05.08. Belanja Hibah Dana BOSP	4.706.910.000,00	4.847.209.547,63	102,98	0,00
Jumlah Belanja Hibah	**45.969.265.421,00**	**45.781.591.231,63**	**99,59**	**32.355.896.005,00**

5.2.1.5. Belanja Bantuan Sosial

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
Bantuan Sosial	**33.061.084.528,00**	**30.881.786.000,00**	**93,41**	**31.804.857.500,00**

Realisasi belanja bantuan sosial sebesar Rp30.881.786.000,00 atau mencapai 93,41% yang berarti sebesar Rp2.179.298.528,00 atau 6,59% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp33.061.084.528,00. Realisasi belanja bantuan sosial tersebut Sesuai dengan Surat Keputusan Wali Kota Madiun Nomor : 400-401.202/8/2024 tentang

Badan/Lembaga/Organisasi/Kelompok Masyarakat/ Perorangan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Yang Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Perincian anggaran dan realisasi belanja bantuan sosial untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.2.1.5
Belanja Bantuan Sosial

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu	30.200.519.528,00	28.093.111.000,00	93,02	27.376.940.000,00
5.1.06.04 Belanja Bantuan Sosial Kepada lembaga non pemerintahan	2.860.565.000,00	2.788.675.000,00	97,49	4.427.917.500,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial	**33.061.084.528,00**	**30.881.786.000,00**	**93,41**	**31.804.857.500,00**

Belanja Bantuan Sosial Lembaga Non Pemerintah terdiri bantuan sosial kepada pengelola tempat ibadah, kelompok guru dan pegawai sekolah swasta, panti asuhan, beasiswa mahasiswa dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Belanja Sosial kepada Individu terdiri bantuan sosial kepada perintis kemerdekaan, pengabdian Tokoh Masyarakat, bantuan sosial akibat bencana, bantuan pangan non tunai (BPNT), kinerja guru TK/PAUD Non PNS (BK Prop), Bantuan Sosial Insentif guru dan tenaga kependidikan swasta di lembaga PAUD, SD dan SMP.

5.2.2. BELANJA MODAL

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2		4 = (3/2)	5
Modal	**168.557.076.144,00**	**159.166.507.474,73**	**94,43**	**217.790.302.662,69**

Realisasi jenis belanja modal sebesar Rp159.166.507.474,73 atau mencapai 94,43% yang berarti sebesar Rp9.390.568.669,27 atau 5,57% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp168.557.076.144,00. Hal ini disebabkan adanya efisiensi belanja yang berasal dari sisa kontrak dan adanya beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan karena pertimbangan tertentu. Belanja modal terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan dan belanja modal aset tetap lainnya. Realisasi belanja modal tahun anggaran 2024 sebesar Rp159.166.507.474,73 dibandingkan dengan

realisasi belanja Modal tahun anggaran 2023 sebesar Rp217.790.302.662,69 terjadi penurunan sebesar Rp58.623.795.187,96 atau lebih rendah 26,92%.

Perincian anggaran dan realisasi belanja modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.2.2
Belanja Modal

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
5.2.2.1 Tanah	0,00	0,00		0,00
5.2.2.2 Peralatan & mesin	26.303.310.160,00	24.597.646.021,00	93,52	71.585.868.051,04
5.2.2.3 Gedung & bangunan	45.581.145.997,00	41.774.680.516,62	91,65	80.940.539.683,65
5.2.2.4 Jalan, irigasi, jaringan	93.594.443.387,00	90.028.130.537,11	96,19	62.832.477.443,00
5.2.2.5 Aset tetap lainnya	2.213.911.600,00	2.015.705.050,00	91,05	2.431.417.485,00
5.2.2.6 Aset lainnya	864.265.000,00	750.345.350,00	86,82	0,00
Jumlah Total	**168.557.076.144,00**	**159.166.507.474,73**	**94,43**	**217.790.302.662,69**

5.2.2.1. Belanja Modal Tanah

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
Modal Tanah	**0,00**	0,00	00,00	**0,00**

Pemerintah Kota Madiun pada tahun anggaran 2024 tidak ada alokasi anggaran belanja modal tanah

5.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
Modal Peralatan dan Mesin	**26.303.310.160,00**	**24.597.646.021,00**	**93,52**	**71.585.868.051,04**

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp24.597.646.021,00 atau mencapai 93,52 % yang berarti sebesar Rp1.705.664.139,00 atau 6,48% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp26.303.310.160,00. Hal ini disebabkan adanya efisiensi belanja yang berasal dari sisa kontrak. Realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun anggaran 2024 sebesar

Rp24.597.646.021,00 dibandingkan dengan belanja modal peralatan dan mesin tahun tahun anggaran 2023 sebesar Rp71.585.868.051,04 terjadi penurunan sebesar Rp46.988.222.030,04 atau lebih rendah 65,64%.

Perincian anggaran dan realisasi belanja modal peralatan dan mesin untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.2.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Belanja Modal Peralatan dan Mesin		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1		2		4 =	5
5.2.02.	**Belanja modal Peralatan dan Mesin**	**26.303.310.160,00**	**24.597.646.021,00**	**93,52**	**71.585.868.051,04**
5.2.02.01	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Besar/ Berat	2.285.538.613,00	2.188.901.500,00	95,77	2.654.100.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	4.916.671.838,00	4.336.308.440,00	88,20	3.243.522.130,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel/ Alat Ukur	93.600.000,00	92.950.000,00	99,95	81.120.000,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	92.050.000,00	79.620.000,00	86,50	128.500.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat kantor/ Rumah Tangga	9.855.527.750,00	9.470.132.350,00	96,09	4.624.879.550,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	173.931.970,00	158.652.090,00	91,22	872.617.018,00
5.2.02.07	Belanja Modal Peralatan Kedokteran	2.403.521.196,00	2.086.508.700,00	86,81	4.804.418.371,00
5.2.3.02.10	Belanja Modal Komputer	1.509.275.670,00	1.494.054.680,00	98,99	50.089.399.142,00
5.2.3.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	0,00	0,00	00,00	25.308.000,00
5.2.3.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Permurnian	0,00	0,00	00,00	0,00
5.2.3.02.14	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	20.360.000,00	19.931.715,00	97,90	0,00
5.2.3.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0,00	0,00	00,00	35.030.000,00
5.2.3.02.18	Belanja Modal Rambu - Rambu	932.212.263,00	931.449.500,00	99,92	3.058.049.636,04

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2		4 =	5
5.2.3.02.19 Belanja Modal Peralatan Olah Raga	100.000.000,00	99.459.330,00	99,46	126.928.500,00
5.2.3.02.88 Belanja Modal Peralatan Mesin BOS	750.236.610,00	896.262.344,00	119.46	1.048.869.678,00
5.2.3.02.99 Belanja Modal Peralatan Mesin BLUD	3.170.384.250,00	2.743.415.372,00	86,53	793.126.026,00

Perincian anggaran dan realiasi belanja modal peralatan dan mesin untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 per OPD tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.2.2.2.1
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Modal Peralatan dan Mesin OPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
Dinas Pendidikan	3.037.230.110,00	3.036.483.344,00	99,98	51.496.407.814,00
Dinas Kesehatan KB	9.738.612.529,00	8.793.824.272,00	90,30	8.085.234.765,00
Dinas PU TR	1.217.028.198,00	1.130.428.020,00	92,88	2.109.075.000,00
Dinas Perumahan	777.353.197,00	773.543.630,00	99,51	2.261.467.636,04
Kantor Satpol PP & Damkar	1.201.908.300,00	1.193.797.100,00	99,33	307.330.000,00
BPBD	74.945.000,00	64.200.000,00	85,66	29.010.182,00
Dinas Sosial	142.930.000,00	114.206.000,00	79,9	263.900.000,00
Dinas Tenaga Kerja	210.429.000,00	208.340.940,00	99,01	193.032.738,00
Dinas Ket. Pangan & Pertanian	650.808.060,00	644.308.250,00	99,00	343.989.456,00
Dinas LH	871.966.750,00	849.372.440,00	97,41	759.652.700,00
Dispendukcapil	768.212.382,00	767.738.500,00	99,94	74.480.000,00
Dinas Perhubungan	1.190.878.293,00	1.185.415.105,00	99,54	1.392.407.274,00
Dinas Infokom	21.150.000,00	20.300.000,00	95,98	153.440.000,00
Dinas PM, PTSP/KPPT	19.918.160,00	19.305.000,00	96,92	57.996.900,00
Dinas Budparpora	18.954.000,00	18.426.000,00	97,21	17.300.000,00
Dinas Perpustakaan	0,00	0,00	00,00	11.400.000,00
Dinas Perdagangan	134.586.550,00	127.370.100,00	94,64	137.445.700,00

Modal Peralatan dan Mesin OPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
Bagian Pemerintahan	15.000.000,00	14.985.000,00	99,90	0,00
Bagian Organisasi	0,00	0,00	00,00	26.267.344,00
Bagian Hukum	0,00	0,00	00,00	245.459.830,00
Bagian Adbang	268.143.091,00	267.986.000,00	99,94	48.257.600,00
Bagian Perekkesra	124.926.160,00	112.676.000,00	90,19	2.865.000,00
Bagian Umum	4.133.653.000,00	3.664.855.420,00	88,66	1.474.385.000,00
Sekretariat DPRD	179.487.000,00	110.000.000,00	61,29	150.927.000,00
BAPELITBANGDA	63.777.580,00	63.375.000,00	99,37	43.925.000,00
BKAD	262.802.920,00	261.225.000,00	99,40	842.070.000,00
Bependa	130.373.250,00	128.511.270,00	98,57	244.700.000,00
BPK SDM	131.391.730,00	120.435.000,00	91,66	201.890.000,00
Inspektorat	204.000.000,00	203.020.450,00	99,52	0,00
Kec Kartoharjo	173.288.270,00	171.480.680,00	98,96	171.316.142,00
Kec Manguharjo	324.189.920,00	321.249.000,00	99,09	146.125.720,00
Kec Taman	205.725.180,00	204.968.500,00	99,63	226.237.950,00
Bakesbangpol	9.641.530,00	5.820.000,00	60,36	67.871.300,00
Total	**26.303.310.160,00**	**24.597.646.021,00**	**93,52**	**71.585.868.051,04**

5.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
Modal Gedung dan Bangunan	**45.581.145.997,00**	**41.774.680.516,62**	**91,65**	**80.940.539.683,65**

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp 41.774.680.516,62 atau 91,65% yang berarti Rp3.806.465.480,38 atau mencapai 8,35% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp45.581.145.997,00. Hal ini disebabkan adanya efisiensi belanja yang berasal dari sisa kontrak.

Perincian anggaran dan realisasi belanja modal gedung dan bangunan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 tersaji pada tabel dibawah ini

Tabel 5.2.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2		4 = (3/2)	5
5.2.3.03 Belanja modal Gedung dan Bangunan	**45.581.145.997,00**	**41.774.680.516,62**	**91,65**	**80.940.539.683,65**
5.2.3.03.01 Belanja Modal Gedung Tempat Kerja	45.453.496.197,00	41.657.671.173,10	91,65	79.753.930.683,65
5.2.3.03.02 Belanja Modal Monumen	6.000.000,00	5.943.000,00	99,05	681.564.000,00
5.2.3.03.01 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	121.649.800,00	111.066.343,52	91,30	0,00
5.2.3.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	0,00	0,00	00,00	505.045.000,00

Perincian anggaran dan realiasi belanja modal gedung dan bangunan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 per OPD tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.2.3.3.1
Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Modal Gedung dan Bangunan OPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
Dinas Pendidikan	16.579.873.787,00	13.413.684.044,55	80,90	4.344.326.045,50
Dinas Kesehatan KB	615.108.000,00	610.036.508,14	99,18	24.557.084.208,74
Dinas PU TR	15.522.139.764,00	15.365.996.090,00	98,99	34.910.704.931,00
Dinas Perkim	6.491.850.000,00	6.096.976.923,38	93,92	10.648.663456,29
Kantor Satpol PP & Damkar	184.040.000,00	182.624.082,00	99,23	250.860.057,57
Dinas Sosial	21.980.000,00	21.980.000,00	100,00	0,00
Dinas Ket. Pangan & Pertanian	549.797.000,00	520.800.000,00	94,73	36.000.000,00
Dinas LH	967.000.000,00	957.150.654,00	98,98	2.209.603.137,04
Dispendukcapil	0,00	0,00	00,00	212.520.600,00
Dinas Perhubungan	0,00	0,00	00,00	0,00
Dinas Komunikasi	0,00	0,00	00,00	0,00
Dinas Budparpora	757.000.000,00	747.731.821,00	98,78	0,00
Perpustakaan & Kearsipan	0,00	0,00	00,00	0,00
Dinas Perdagangan	300.000.000,00	296.223.604,91	98,74	0,00
Bapenda	0,00	0,00	00,00	19.086.250,00
Inspektorat	223.790.000,00	222.421.458,12	99,39	461.606.622,51
Kec Kartoharjo	96.681.600,00	95.479.000,00	98,76	0,00
Kec Manguharjo	3.271.885.846,00	3.243.576.330,52	99,13	3.232.120.375,00
Kec Taman	0,00	0,00	00,00	57.964.000,00
BAPELITBANGDA	0,00	0,00	00,00	0,00
Total	**45.581.145.997,00**	**41.774.680.516,62**	**91,65**	**80.940.539.683,65**

5.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	**93.594.443.387,00**	**90.028.130.537,11**	**96,19**	**62.832.477.443,00**

Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp90.028.130.537,11 atau mencapai 96,19% yang berarti Rp3.566.312.849,89 atau 3,81% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp93.594.443.387,00. Hal ini disebabkan adanya efisiensi belanja yang berasal dari sisa kontrak.

Perincian anggaran dan realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 tersaji pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.2.2.4

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Belanja Modal Jalan, irigasi dan jaringan		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
	1	2	3	4 = (3/2)	5
5.2.04.01	**Belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan**	**93.594.443.387,00**	**90.028.130.537,11**	**96,19**	**62.832.477.443,00**
5.2.04.01	Belanja modal Jalan dan jembatan	51.620.771.048,00	49.602.699.428,14	96,09	34.989.390.906,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	37.765.672.339,00	36.268.625.734,11	96,04	24.239.146.850,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	0,00	0,00	00,00	3.125.017.187,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	4.208.000.000,00	4.156.805.374,86	98,78	478.922.500,00

Perincian anggaran dan realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 per OPD tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.2.2.4.1
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Per Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan OPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
Dinas Pendidikan	0,00	0,00		0,00
Dinas Kesehatan	0,00	0,00		478.922.500,00
Dinas PU TR	68.860.908.171,00	67.239.844.734,11	97,65	52.306.847.300,00
Dinas Perkim	5.974.836.000,00	4.247.595.025,00	71,09	689.991.000,00
Kantor Satpol PP & Damkar	0,00	0,00		201.512.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00		0,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	0,00		204.129.475,00
Dinas Lingkungan Hidup	394.000.000,00	385.426.930,59	97,82	0,00
Bapenda	0,00	0,00		20.000.000,00
Kecamatan Manguharjo	4.214.605.912,00	4.189.122.836,00	99,40	0,00
Kecamatan Kartoharjo	6.498.460.000,00	6.388.867.001,36	98,31	4.385.444.607,00
Kecamatan Taman	7.651.633.304,00	7.577.274.010,05	99,03	4.545.630.561,00
Bakesbangpol	0,00	0,00		0,00
Total	**93.594.443.387,00**	**90.028.130.537,11**	**96,19**	**62.832.477.443,00**

5.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
Modal Aset Tetap Lainnya	**2.213.911.600,00**	**2.015.705.050,00**	**91,05**	**2.431.417.485,00**

Realisasi belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp2.015.705.050,00 atau mencapai 91,05% yang berarti Rp198.206.550,00 atau 8,95% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD

tahun anggaran 2024 sebesar Rp2.213.911.600,00. Hal ini disebabkan adanya efisiensi belanja yang berasal dari sisa kontrak.

Perincian anggaran dan realisasi belanja modal aset tetap lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 tersaji pada tabel dibawah ini

Tabel 5.2.2.5
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Belanja Modal Aset tetap lainnya	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
5.2.05 Belanja modal Aset Tetap lainnya	**2.213.911.600,00**	**2.015.705.050,00**	**91,05**	**2.431.417.485,00**
5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan	0,00	0,00	00,00	73.487.150,00
5.2.05.02 Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olah Raga	79.365.000,00	78.000.000,00	98,28	263.074.464,00
5.2.05.08 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	00,00	43.465.000,00
5.2.05.88 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	2.134.546.600,00	1.937.705.050,00	90,78	2.051.390.871,00

Perincian anggaran dan realisasi belanja modal aset tetap lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 per OPD tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.2.2.5.1
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Per Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Modal Aset Tetap Lainnya SKPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
Dinas Pendidikan	2.134.546.600,00	1.937.705.050,00	90,78	2.181.483.335,00
Dinas PU TR	0,00	0,00	00,00	19.545.000,00
Kantor Satpol PP & Damkar	79.365.000,00	78.000.000,00	98,28	0,00
Dispendukcapil	0,00	0,00	00,00	0,00
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan & Olah Raga	0,00	0,00	00,00	0,00

Bagian Pereksos	0,00	0,00	00,00	141.000.000,00
Dinas Komunikasi	0,00	0,00	00,00	23.920.000,00
Dinas Perdagangan	0,00	0,00	00,00	0,00
Kecamatan Kartoharjo	0,00	0,00	00,00	0,00
Dinas Perpustakaan	0,00	0,00	00,00	65.469.150,00
Total	**2.213.911.600,00**	**2.015.705.050,00**	**91,05**	**2.431.417.485,00**

5.2.2.6. Belanja Modal Aset Lainnya

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	2	3	4 = (3/2)	5
Modal Aset Lainnya	**864.265.000,00**	**750.345.350,00**	**86,82**	**0,00**

Realisasi belanja modal aset lainnya Per 31 Desember 2024 sebesar Rp750.345.350,00 atau 86,22% yang berarti Rp113.919.650,00 atau 13,18% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp864.265.000,00 Hal ini disebabkan adanya efisiensi belanja yang berasal dari sisa kontrak dan adanya beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan karena pertimbangan tertentu.

Perincian anggaran dan realisasi belanja modal aset lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.2.2.6
Belanja Modal Aset Lainnya
untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Belanja Modal Aset lainnya		Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
	1	2	3	4 = (3/2)	5
5.2.3.06	**Belanja modal Aset Lainnya**	**864.265.000,00**	**750.345.350,00**	**86,82**	**0,00**
5.2.3.06.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Sofware	864.265.000,00	750.345.350,00	86,82	0,00

Tabel 5.2.2.5.1
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Per Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Modal Aset Lainnya SKPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
Dinas Pendidikan	0,00	0,00	00,00	0,00
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	0,00	0,00	00,00	0,00
Dinas PU TR	421.000.000,00	312.200.000,00	74,16	00
Dinas Perkim	375.000.000,00	370.563.000,00	98,82	0,00
Dinas Perpustakaan	68.265.000,00	67.582.350,00	99,00	0,00
Total	**864.265.000,00**	**750.345.350,00**	**86,82**	**0,00**

5.2.3. BELANJA TIDAK TERDUGA

5.2.3.1. Belanja Tidak Terduga

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
Belanja Tidak Terduga	**2.500.000.000,00**	**273.889.083,00**	**10,96**	**1.238.717.822,00**

Realisasi belanja tidak terduga sebesar Rp273.889.083,00 atau mencapai 10,96% yang berarti Rp2.226.110.917,00 atau 89,04% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp2.500.000.000,00.

Perincian realisasi belanja tidak terduga untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan periode yang berakhir 31 Desember 2023 tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.2.3.1
Belanja Tidak Terduga

Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3
Belanja Barang	217.476.913,00	551.363.000,00
Belanja Jasa	7.712.058,00	0,00
Belanja Perjalanan		0,00
Belanja Pemeliharaan		0,00
Belanja Bantuan Sosial		0,00
Belanja Pengembalian	26.312.712,00	641.753.696,00
Pengembalian Pajak	18.187.400,00	26.011.126,00
Pengembalian Retribusi	4.200.000,00	17.576.000,00
Pengembalian ganti rugi sewa tanah		2.014.000,00
Total	**273.889.083,00**	**1.238.717.822,00**

Perincinan Dinas yang mengunakan anggaran Belanja Tidak Terduga tersaji pada table dibawah ini :

Tabel 5.2.3.2
OPD yang menggunakan Beban Tidak Terduga

Uraian	Realisasi 2024 (Rp)
1	2
Dinas Pendidikan	0,00
Dinas Kesehatan	7.712.058,00
Badan Penanggulangan Bencana	187.057.413,00
Dinas Perhubungan	0,00
Dinas Kebudayaan	4.200.000,00
Dinas Perdagangan	30.419.500,00
BKAD	26.312.712,00
Kelurahan Klegen	-
Badan Pendapatan Daerah	18.187.400,00
Total	**273.889.083,00**

5.3. PEMBIAYAAN

5.3.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN

5.3.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
SiLPA	**113.953.605.152,00**	**113.953.605.152,46**	**100,00**	**191.243.672.447,43**

Realisasi SiLPA Tahun Anggaran 2024 diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) tahun anggaran 2023 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024 sebesar Rp113.953.605.152,46 dibandingkan realisasi sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) tahun anggaran 2023 sebesar Rp191.243.672.447,43 terjadi penurunan sebesar Rp77.290.067.294,43 atau lebih rendah 40,41% .

5.3.1.2. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
Penerimaan Kembali Pinjaman	**0,00**	**0,00**	**00,00**	**1.198.000,00**

Pemerintah Kota Madiun pada tahun anggaran 2024 tidak terdapat realisasi penerimaan kembali pemberian pinjaman .

5 . 4 . SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SiLPA)

Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3
SiLPA	**113.260.156.729,57**	**113.953.605.152,46**

Jumlah tersebut merupakan realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

Perincian realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.4.1
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3
Surplus (Defisit)	(693.448.422,89)	(77.291.265.294,97)
Pembiayaan Neto	113.953.605.152,46	191.244.870.447,43
Total	**113.260.156.729,67**	**113.953.605.152,46**

BAB

6

PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SAL

6.1. SAL Awal

Uraian	1 Januari 2024 (Rp)	1 Januari 2023 (Rp)
Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal	**113.953.605.152,46**	**191.243.672.447,43**

Jumlah tersebut merupakan jumlah sisa anggaran lebih (SAL) milik Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 1 Januari tahun 2024 dan pada tanggal 1 Januari 2023.

6.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	**113.953.605.152,46**	**191.243.672.447,43**

Jumlah tersebut merupakan jumlah penerimaan pembiayaan yang berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

6.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berjalan

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Sisa lebih /kurang pembiayaan tahun berjalan	**113.260.156.729,57**	**113.953.605.152,46**

Jumlah tersebut merupakan jumlah sisa lebih/kurang pembiayaan tahun berjalan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023. Sisa lebih/kurang pembiayaan tahun berjalan yang berasal dari surplus (defisit) ditambah pembiayaan netto tahun berjalan.

6.4. SAL Akhir

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
SAL Akhir	**113.260.156.729,57**	**113.953.605.152,46**

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo anggaran lebih akhir milik Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023. SAL akhir diperoleh dari SAL awal, penggunaan SAL, Sisa lebih/kurang pembiayaan tahun berjalan, koreksi kesalahan tahun sebelumnya, dan lain-lain.

BAB

7

PENJELASAN POS-POS NERACA

7.1. ASET

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Aset	**2.877.511.028.803,11**	**2.829.387.208.598,82**

Jumlah aset merupakan jumlah saldo aset milik Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp2.877.511.028.803,11 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp2.829.387.208.598,82. Apabila dibandingkan antara jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp2.877.511.028.803,11 dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp2.829.387.208.598,82 terjadi kenaikan sebesar Rp48.123.820.204,29 atau sebesar 1,70%.

Perincian aset milik Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 7.1
Aset Pemerintah

Aset	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Aset lancar	151.102.920.412,99	146.619.826.286,07
Investasi	164.828.967.440,08	155.818.150.212,56
Aset Tetap	2.286.782.219.367,56	2.381.738.610.915,86
Property Investasi	167.375.514.653,27	0,00
Aset Lainnya	107.421.406.929,21	145.210.621.184,33
Total	**2.877.511.028.803,11**	**2.829.387.208.598,82**

7.1.1. ASET LANCAR

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Aset Lancar	**151.102.920.412,99**	**146.619.826.286,07**

Jumlah aset lancar merupakan jumlah saldo aset lancar milik Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp151.102.920.412,99 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp146.619.826.286,07. Apabila dibandingkan jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp151.102.920.412,99 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp146.619.826.286,07 terjadi kenaikan sebesar Rp4.483.094.126,92 atau sebesar 3,06%.

Perincian aset lancar milik Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 7.1.1
Aset Lancar

Aset Lancar	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1. Kas di kas daerah	65.071.277.733,03	67.071.188.644,14
2. Deposito Berjangka 1 Bulan	0,00	0,00
3. Kas di bendahara pengeluaran	0,00	601.132.820,00
4. Kas di bendahara penerimaan	7.006.000,00	10.230.722,00
5. Kas di BLUD RSUD	38.226.719.616,04	38.758.539.712,32
6. Kas di BLUD Puskesmas	9.732.906.535,35	7.503.164.480,85
7. Kas Lainnya BOS	189.688.433,15	187.018.419,15
8. Kas Lainnya BOP	0,00	0,00
9. Kas Lainnya BOK	32.558.412,00	423.463.174,00
9. Piutang Pajak Daerah	16.829.329.323,35	11.995.973.053,35
10 Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(5.498.977.003,09)	(4.296.540.965,20)
11. Piutang Retribusi Daerah	13.231.639.457,05	4.625.019.057,00
12. Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	(2.673.417.788,46)	(2.068.159.551,60)
13. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	110.358.980,00	110.358.980,00
14. Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	(110.358.980,00)	(110.358.980,00)
15. Piutang Lain-lain	85.684.300,00	8.072.837.702,85
16. Penyisihan Piutang Lain-Lain	(85.684.300,00)	(165.826.573,75)
17. Persediaan	15.621.339.731,80	13.537.733.840,96
18. Belanja dibayar dimuka	332.849.962,77	364.051.750,00
Total	**151.102.920.412,99**	**146.619.826.286,07**

7.1.1.1. Kas dan Bank

7.1.1.1.1. Kas di Kas Daerah

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Kas di Kas Daerah	**65.071.277.733,03**	**67.071.188.644,14**

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo bank Rekening Kas Umum (RKUD) Daerah Kota Madiun pada Bank Jatim Cabang Madiun pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp65.071.277.733,03 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp67.071.188.644,14. Apabila dibandingkan antara jumlah Kas di Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp Rp65.071.277.733,03 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp67.071.188.644,14 terjadi penurunan sebesar Rp1.999.910.911,11 atau sebesar 2,98 %.
Kas di kas daerah merupakan saldo rekening Bank Jatim 0051021333 RKUD Kota Madiun. Perincian kas di kas daerah milik Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp65.071.277.733,03 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp67.071.188.644,14 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 7.1.1.1.1
Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 Rp)
1. Bank Jatim 0051021333	65.071.277.733,03	67.071.188.644,14
Total	**65.071.277.733,03**	**67.071.188.644,14**

Kas di Kas Daerah terdiri dari kas yang tidak ditentukan penggunaannya dan kas yang telah ditentukan penggunaannya (*mandatory*). Perincian kas di kas daerah sesuai peruntukannya tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 7.1.1.1.1
Rincian Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1. Kas yang tidak di tentukan penggunaannya	**57.533.151.889,03**	**53.207.253.793,14**
2. Kas yang ditentukkan penggunaannya (mandatory)	**7.538.125.844,00**	**13.863.934.851,00**
- DAU (Pendidikan, Kesehatan dan Kelurahan)	584.969.910,00	535.751.239,00
- DBH CHT	3.015.920.265,00	9.846.387.780,00
- DID	1.597.285.700,00	1.862.474.575,00
- DAK Non Fisik Total	2.339.949.969,00	1.619.321.257,00
Total	**65.071.277.733,03**	**67.071.188.644,14**

Perincian Kas yang ditentukan penggunaanya (mandatory) sebagai berikut :

7.1.1.1a. Mandatory dari DAU

Mandatory yang berasal dari dana DAU Per 31 Desember 2024 sebesar Rp Rp584.969.910,00 yang menjadi saldo awal 1 Januari 2025 dan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp535.751.239,00 terjadi kenaikan sebesar Rp49.218.671,00 atau sebesar 9,19%.

Tabel 7.1.1.1.1a
Mandatory dari DAU

Perubahan 2024 DAU	Saldo 1 Januari 2024	Penambahan	Pengurangan	Saldo Per 31 Desember 2024
	1	2	3	4 = (1 + 2 – 3)
DAU Kelurahan	-	5.400.000.000,00	5.400.000.000,00	-
DAU Pendidikan	-	17.226.408.000,00	16.706.419.924,00	519.988.076,00
DAU Kesehatan	535.751.239,00	9.359.367.000,00	9.830.136.405,00	64.981.834,00
Jumlah	**535.751.239,00**	**31.985.775.000,00**	**31.936.556.329,00**	**584.969.910,00**

7.1.1.1b. Mandatory dari BHCHT

Mandatory yang berasal dari dana DBHCHT Per 31 Desember 2024 sebesar Rp 3.015.920.265,00 yang menjadi saldo awal 1 Januari 2025 dan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp9.846.387.780,00 terjadi penurunan sebesar Rp6.830.467.515,00 atau sebesar 69,37%.

Tabel 7.1.1.1.1b
Mandatory dari DBHCHT

Perubahan 2024 DBH CHT	Saldo 1 Januari 2024	Penambahan	Pengurangan	Saldo Per 31 Desember 2024
	1	2	3	4 = (1 + 2 – 3)
DBHCHT - Bidang kesejahteraan masyarakat	4.923.193.890,00	8.215.332.266,00	11.460.719.994,00	1.677.806.162,00
DBHCHT - Bidang penegakan hukum	984.638.778,00	1.571.492.002,00	2.167.097.839,00	389.032.941,00
DBHCHT - Bidang kesehatan	3.938.555.112,00	17.366.218.732,00	20.721.267.578,00	583.506.266,00
DBHCHT - Bidang program prioritas dan kebutuhan	-	2.000.000.000,00	1.634.425.104,00	365.574.896,00
Jumlah	**9.846.387.780,00**	**29.153.043.000,00**	**35.983.510.515,00**	**3.015.920.265,00**

7.1.1.1c. Mandatory dari DID

Mandatory yang berasal dari dana DID Per 31 Desember 2024 sebesar Rp 1.597.285.700,00 dan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.862.474.575,00 terjadi penurunan sebesar Rp265.188.875,00,00 atau sebesar 14,24 %.

Tabel 7.1.1.1.1c
Mandatory dari DID

Perubahan 2024 DID	Saldo 1 Januari 2024	Penambahan	Pengurangan	Saldo Per 31 Desember 2024
	1	2	3	4 = (1 + 2 – 3)
Insentif Fiskal Kinerja Tahun Sebelumnya	1.862.474.575,00	32.597.699.000,00	32.862.887.875,00	1.597.285.700,00
Insentif Fiskal Kesejahteraan Masyarakat	-	16.770.826.000,00	16.770.826.000,00	-
Jumlah	**1.862.474.575,00**	**49.368.525.000,00**	**47.771.239.300,00**	**1.597.285.700,00**

7.1.1.1d. Mandatory dari DAK Non Fisik

Mandatory yang berasal dari dana DAK Non Fisik Per 31 Desember 2024 sebesar Rp 2.339.949.969,00 yang menjadi saldo awal 1 Januari 2025 dan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.619.321.257,00 terjadi kenaikan sebesar Rp720.628.712,00 atau sebesar 44,50 %.

Tabel 7.1.1.1.1d
Mandatory dari DAK NON FISIK

Perubahan 2024 DAK NON FISIK	Saldo 1 Januari 2024	Penambahan	Pengurangan	Saldo Per 31 Desember 2024
	1	2	3	4 = (1 + 2 – 3)
Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah	595.344.300,00	45.433.073.000,00	44.526.133.700,00	1.502.283.600,00
Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah	24.685.285,00	887.315.000,00	737.750.000,00	174.250.285,00
Dana Bantuan Operasional Kesehatan	312.151.352,00	4.899.923.648,00	4.888.097.755,00	323.977.245,00
Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	682.620.820,00	1.799.631.180,00	2.427.699.311,00	54.552.689,00
Dana Fasilitasi Penanaman Modal	1.862.500,00	413.315.500,00	400.179.250,00	14.998.750,00

Perubahan 2024 DAK NON FISIK	Saldo 1 Januari 2024	Penambahan	Pengurangan	Saldo Per 31 Desember 2024
	1	2	3	4 = (1 + 2 – 3)
Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-	455.000.000,00	195.050.100,00	259.949.900,00
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	2.657.000,00	417.700.000,00	410.419.500,00	9.937.500,00
Jumlah	**1.619.321.257,00**	**54.305.958.328,00**	**53.585.329.616,00**	**2.339.949.969,00**

7.1.1.1.2. Deposito

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Deposito	**0**	**0**

Jumlah tersebut merupakan jumlah deposito berjangka 1 bulan Pemerintah Kota Madiun pada Bank Jatim Cabang Madiun pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah jatuh tempo Per 31 Desember 2024

7.1.1.1.2. Kas di Bendahara Pengeluaran

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Kas di Bendahara Pengeluaran	**0,00**	**601.132.820,00**

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo kas di bendahara pengeluaran SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun berupa uang persediaan, ganti uang persediaan dan tambahan uang yang belum dipertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran serta belum disetor ke kas daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Seluruh OPD telah melaksanakan *cash opname* pada tanggal 31 Desember 2024 untuk mengetahui posisi kas dibendahara pengeluaran pada tanggal 31 Desember 2024. Kas dibendahara pengeluaran terdiri dari Kas di Bendahara Pengeluaran OPD, Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu SMPN, SDN, Puskesmas, Kelurahan, Kas di Bendahara BTT dan Rekening Penampungan Bantuan Langsung Tunai Daerah Pemerintah Kota Madiun. Rekening bendahara pengeluaran telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Madiun Nomor : 900-401.202/251/2023 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2024, Keputusan Walikota Madiun Nomor : 900-401.202/263/2022 tentang Penunjukan Bendahara Belanja Tidak Terduga di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2022 dan dan Keputusan Walikota Madiun

Nomor : 400-401.202/313/2021 tentang Penunjukan Bank sebagai Penempatan Rekening Penampungan Bantuan Langsung Tunai Daerah Pemerintah Kota Madiun Tahun 2023 serta Keputusan Walikota Madiun Nomor : 900-401.202/205/2022 Tentang Nama dan Nomor Rekening Kas Umum Daerah Kota Madiun.

7.1.1.1.4. Kas di Bendahara Penerimaan

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Kas di Bendahara Penerimaan	7.006.000,00	10.230.722,00

Jumlah saldo kas di bendahara penerimaan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun atas pendapatan yang telah diterima dan belum disetor ke kas daerah pada tanggal 31 Desember 2024 yang merupakan saldo Kas Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan atas setoran Pendapatan Retribusi Pelayanan Tepi Jalan Umum Rp5.385.000,00 dan Pendapatan Tempat Khusus Parkir sebesar Rp1.621.000,00. Pendapatan retribusi di tahun anggaran 2024 sebagian sudah dilakukan secara non tunai. Hal ini merupakan tindak lanjut program GNNT (Gerakan Uang Non Tunai) bertujuan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap penggunaan uang tunai dan mendorong adopsi metode pembayaran digital atau non-tunai yang lebih efisien dan aman. Program Pemerintah dalam Elektronikfikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang dicanangkan oleh Bank Indonesia. Perubahan terjadi pada setoran semua jenis pendapatan baik pajak dan retribusi dengan mekanisme penyetoran ke rekening penampungan terlebih dahulu. Rekening penampungan dibuka berdasarkan jenis pendapatan dan retribusi yang dikelola beberapa OPD. Apabila dibandingkan antara jumlah Kas di Bendahara Penerimaan pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp7.006.000,00 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp10.230.722,00. Seluruh OPD telah melaksanakan *cash opname* pada tanggal 31 Desember 2024 untuk mengetahui posisi kas dibendahara penerimaan pada tanggal 31 Desember 2024. Kas dibendahara penerimaan terdiri dari saldo kas tunai kas di bendahara penerimaan OPD dan saldo kas di rekening penampungan penerimaan. Rekening penampungan penerimaan ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Nomor : 400-401.203/224/2021 tentang Penunjukan Bank sebagai Penempatan Rekening Penampungan Pajak Daerah sebagai Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah Kota Madiun dan Keputusan Walikota Madiun Nomor 900-401.202/363/2021 tentang Penunjukan Bank sebagai Penempatan Rekening Penampungan Retribusi Parkir, Pengujian Kendaraan Bermotor dan E-tilang pada Dinas Perhubungan, Keputusan Walikota Madiun Nomor 400-401.203/224/2021 tentang Penunjukan Bank sebagai Penempatan Rekening Penampungan Pajak Daerah sebagai Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Kota Madiun pada Badan Pendapatan Daerah, dan Keputusan Walikota Madiun Nomor : 400-401.202/312/2021 tentang Penunjukan Bank Rekening Penampungan Retribusi Pelayanan Pasar Secara Elektronik (E-Retribusi) Pemerintah Kota Madiun pada Dinas Perdagangan.

Rincian kas di bendahara penerimaan pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp7.006,000,00 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp10.230.722,00 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 7.1.1.1.4
Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1. Bendahara Penerimaan RSUD	0,00	4.975.722,00
2. Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan	7.006.000,00	5.255.000,00
Total	**7.006.000,00**	**10.230.722,00**

7.1.1.1.5. Kas di BLUD RSUD

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Kas di BLUD RSUD	**38.226.719.616,04**	**38.758.539.712,32**

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo kas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD milik Pemerintah Kota Madiun yang merupakan saldo Kas di Bank pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp38.226.719.616,04 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp38.758.539.712,32. Apabila dibandingkan antara jumlah Kas di BLUD RSUD pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp38.226.719.616,04 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp38.758.539.712,32 terjadi penurunan sebesar Rp531.820.096,28 atau sebesar 1,37%.

Perincian kas di BLUD RSUD Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp38.226.719616,04 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp38.758.539.712,32 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 7.1.1.1.5
Kas BLUD RSUD

Kas di BLUD RSUD	Nomer Rekening	Tahun 2024	Tahun 2023
1. Giro Bank Jatim	0051035160	37.966.957.382,81	38.500.313.570,14
2. Giro Bank Jatim	0051050011	0,00	0,00
3. Tabungan Bank Mandiri	171-00-1250000-8	103.620.413,43	103.148.530,38
4. Tabungan BRI	0045-01-001272-56-9	103.774.262,80	102.945.401,80
5. Tabungan BNI	8125909889	52.367.557,00	52.132.210,00
Total		**38.226.719.616,04**	**38.758.539.712,32**

7.1.1.1.6. Kas di BLUD Puskesmas/JKN

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Kas di BLUD	**9.732.906.535,35**	**7.503.164.480,85**

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo kas BLUD Puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun yang terdiri dari saldo Kas di Bank pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp9.732.906.535,35 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp7.503.164.480,85. Apabila dibandingkan antara jumlah Kas di BLUD Puskesmas/JKN pada tanggal 31 Desember 2024 Rp9.732.906.535,35 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp7.503.164.480,85 terjadi kenaikan sebesar Rp2.229.742.054,50 atau 29,72%. Perincian kas di kas BLUD Puskesmas milik Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp9.732.906.535,35 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp7.503.164.480,85 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 7.1.1.1.6
Kas BLUD Puskesmas

Kas di BLUD Puskesmas	Nomer Rekening	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1. BLUD Puskesmas Ngegong	0051036131	1.047.134.183,86	764.180.165,12
2. BLUD Puskesmas Manguharjo	0051036123	2.267.720.516,64	1.692.218.890,43
3. BLUD Puskesmas Banjarejo	0051036158	2.315.269.337,83	2.057.882.759,58
4. BLUD Puskesmas Demangan	0051036140	1.071.620.789,88	720.386.632,28
5. BLUD Puskesmas Sukosari	0051036166	1.478.019.693,42	1.082.810.835,20
6. BLUD Puskesmas Tawangrejo	0051036174	1.553.142.013,72	1.185.685.198,24
Total		**9.732.906.535,35**	**7.503.164.480,85**

7.1.1.1.7. Kas Lainnya

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Kas Lainnya	**222.246.845,15**	**610.481.593,15**

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo kas lainnya yang bersasal dari sisa kas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Negeri, SMP Negeri , Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) TK Negeri Pembina di lingkungan Dinas Pendidikan dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp222.246.845,15 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp610.481.593,15. Apabila dibandingkan antara jumlah Kas Lainnya pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp222.246.845,15 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp610.481.593,15. terjadi penurunan sebesar Rp388.234.748,00 atau sebesar 63,56%. Seluruh sekolah negeri telah melaksanakan

cash opname pada tanggal 31 Desember 2024 untuk mengetahui posisi kas dibendahara pengeluaran BOS Negeri dan TK Negeri Pembina pada tanggal 31 Desember 2024. Rekening Bendahara Pengeluaran BOS sekolah ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Madiun Nomor 420-401.101/2/2024 tentang Penetapan Nomor Rekening Dana Bantuan Operasional Sekolah Negeri dan Keputusan Walikota Madiun Nomor 420-401.101/9/2024 tentang Penetapan Nomor Rekening Dana Bantuan Operasional Sekolah Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Kota Madiun untuk TK Negeri Pembina pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2024.

Perincian kas di kas lainnya milik Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar sebesar Rp222.246.845,15 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp610.481.593,15 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 7.1.1.1.7
Kas Lainnya

Kas Lainnya	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1. Dana BOS SDN Negeri (OS Reguler + BOS Kinerja	9.624.183,78	40.111.846,78
2. Dana BOS SMPN Negeri (BOS Reguler + BOS Kinerja)	180.064.249,37	146.906.572,37
3. Kas Lainnya BOK	32.558.412,00	423.463.174,00
Total	**222.246.845,15**	**610.481.593,15**

7.1.1.2. Piutang Pajak Daerah

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Piutang Pajak Daerah	**16.829.329.323,35**	**11.995.973.053,35**

Jumlah saldo piutang pajak daerah tersebut merupakan jumlah tagihan pajak daerah yang belum tertagih sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp16.829.329.323,35 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp11.995.973.053,35. Apabila dibandingkan antara jumlah Piutang Pajak Daerah pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp16.829.329.323,35 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp11.995.973.053,35 terjadi kenaikan sebesar Rp4.833.356.270,00 atau sebesar 40,29%.

Perincian perubahan piutang pajak daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp16.829.329.323,35 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp11.995.973.053,35 tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.1.1.2.a
Piutang Pajak Daerah

Perubahan 2024	Saldo 1 Januari 2024	Penambahan	Pengurangan	Saldo Per 31 Desember 2024
Piutang Pajak Daerah	**1**	**2**	**3**	**4 = (1 + 2 – 3)**
Pajak Reklame	194.618.740,00	3.116.405.999,00	2.867.767.796,00	443.256.943,00
Pajak Air Tanah	4.780.752,00	506.650.181,00	450.821.413,00	60.609.520,00
PBB-P2	9.424.063.619,00	24.267.595.724,00	22.998.810.935,00	10.692.848.408,00
BPHTB	54.099.400,00	30.594.835.130,00	30.575.437.417,00	73.497.113,00
PBJT Makanan dan/ata Minuman	98.717.322,00	30.034.618.965,00	27.722.629.419,00	2.410.706.868,00
PBJT Tenaga Listrik	2.201.237.660,35	[illegible]	25.480.021.040,00	2.148.789.356,35
PBJT Jasa Perhotelan	700.000,00	8.345.445.228,00	7.683.440.676,00	662.704.552,00
PBJT Jasa Parkir	17.455.560,00	1.196.971.758,00	1.123.769.041,00	90.658.277,00
PBJT Jasa Kesenian d Hiburan	300.000,00	2.995.053.345,00	2.749.095.059,00	246.258.286,00
	11.995.973.053,35	**126.485.149.066,00**	**121.651.792.796,00**	**16.829.329.323,35**
Penyisihan Piutang Pajak Daerah Per 31 Desember 2024				**5.498.977.003,09**
Piutang Pajak Daerah Neto Per 31 Desember 2024				**11.330.352.320,27**

1. **Pajak Reklame**

   Piutang pajak reklame sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp443.256.943,00

   - Pada tanggal 2 Pebruari 2024 terdapat lebih setor sebesar Rp34.000,00 atas pembayaran piutang pajak reklame papan nama dengan wajib pajak Toko Elmira yang mana ketetapan yang terbit sebesar Rp126.000,00 dan melakukan pembayaran sebesar Rp160.000,00. Lebih setor ini menambah realisasi pajak reklame akan tetapi tidak berpengaruh pada pengurangan piutang pajak reklame secara keseluruhan.

2. **Pajak Air Tanah**

   Piutang pajak Air tanah sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp60.609.520,00

   - Piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2024 terdiri dari piutang pajak:

     Tahun 2021 sebesar Rp178.716,00

     Tahun 2022 sebesar Rp1.304.814,00

     Tahun 2023 sebesar Rp3.200.226,00

     Tahun 2024 sebesar Rp55.925.764,

3. **Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2)**

PBB-P2 mempunyai piutang sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp10.692.848.408,00. SPPT PBB-P2 yang terbit di awal tahun 2024 sebesar Rp23.822.502.918,00.

Terdapat mutasi pelayanan yang menambah jumlah SPPT PBB-P2 awal tahun yang telah diterbitkan sebesar Rp. 542.441.522,00 dan terdapat mutasi pelayanan yang mengurangi jumlah SPPT PBB-P2 awal tahun 2024 sebesar Rp232.102.031,00.

Terdapat realisasi piutang piutang tahun 2002 s/d 2017 yang telah dilakukan penghapusan piutang pajak yang menambah penghitungan pendapatan LO sebesar Rp 134.753.315,00.

4. Pajak BPHTB

Pajak BPHTB mempunyai piutang sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp73.497.113,00 yang terdiri dari piutang dari hasil terbitnya SKPDKB (surat ketetapan pajak daerah kurang bayar) untuk tahun :

2024 sebesar Rp19.397.713,00
2022 sebesar Rp2.800.000,00, dan
2021 sebesar Rp51.299.400,00

5. PBJT Makanan dan/ atau Minuman

PBJT Makanan dan/atau Minuman terdiri dari PBJT Restoran dan PBJT Penyedia jasa boga atau catering. Piutang pajak restoran per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.410.706.868,00. Dari total piutang tersebut terdiri dari piutang PBJT restoran sebesar Rp2.304.763.110,00 dan piutang PBJT Penyedia jasa boga/catering sebesar Rp105.943.758,00.

Pada tanggal 25 Januari 2024 terdapat pembayaran piutang pajak PBJT Restoran tahun 2022 atas nama wajib pajak Ayam Jumbo Pak Poen dengan NPWPD 1.005.00653.02.04 dengan piutang pajak sebesar Rp3.498.151,00 dan dibayar sebesar Rp3.500.000,00 sehingga terdapat lebih setor sebesar Rp1.849,00. Lebih setor ini menambah realisasi pajak restoran akan tetapi tidak berpengaruh pada pengurangan piutang PBJT Makanan dan/atau Minuman secara keseluruhan.

6. PBJT Tenaga Listrik

Piutang PBJT Tenaga Listrik per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.148.789.356,35. Piutang ini adalah piutang tahun 2022 sebesar Rp3.007.275,00, piutang tahun 2023 sebesar Rp79.460,35 dan piutang tahun 2024 sebesar Rp2.145.702.621,00.

7. PBJT Jasa Perhotelan

PBJT Jasa Perhotelan terdiri dari PBJT Hotel dan PBJT Tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel. Piutang PBJT Jasa Perhotelan sampai dengan 31 Desember 2024 memiliki piutang sebesar Rp662.704.552,00. Rincian piutang tersebut adalah sebagai berikut :

- Piutang tahun 2020 sebesar Rp160.000,00
- Piutang tahun 2021 sebesar Rp360.000,00
- Piutang tahun 2022 sebesar Rp180.000,00
- Piutang tahun 2024 sebesar Rp662.004.552,00

8. PBJT Jasa Parkir

PBJT JasaParkir per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp90.658.277,00 yaitu merupakan piutang tahun 2024

9. PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan

Saldo piutang PBJT Jasa Kesenian dan hiburan sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp246.258.286,00. Piutang pajak tersebut merupakan piutang pajak tahun 2022 pada wajib pajak Cave Diva, Jl. Mancung Sari sebesar Rp300.000,00 dan piutang tahun 2024 sebesar Rp245.958.286,00

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 3 klasifikasi sebagai berikut:

No	UmurPiutang	KualitasPiutang	Taksiran Piutang Tak Tertag
1	0 – 1 tahun	Lancar	1%
2	1 – 2 tahun	Kurang Lancar	10%
3	Diatas 2 tahun	Macet	100%

Berdasarkan klasifikasi umur piutang tersebut, maka besaran penyisihan piutang berdasarkan umur piutang pajak daerah per 31 Desember 2024 tersaji dibawah ini.

Tabel 7.1.1.2.b
Umur Piutang Pajak Daerah

Klasifikasi Umur Piutang	≤ 1 tah	> 1 th< 2	> 2 Tah
Pajak Reklame	274.515.693,00	99.547.740,00	69.193.510,00
Pajak Air Tanah	55.925.764,00	3.200.226,00	1.483.530.,00
PBB-P2	3.607.469.202,00	2.127.621.144,00	4.957.758.062,00
BPHTB	19.397.713,00	0,00	54.099.400,00
PBJT Makanan dan/atau Minuman	2.315.487.697,00	0,00	95.219.171,00
PBJT Tenaga Listrik	2.145.702.621,00	79.460,35	3.007.275,00
PBJT Jasa Perhotelan	662.004.552,00	0,00	700.000,00
PBJT Jasa Parkir	90.658.277,00	0,00	0,00
PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan	245.958.286,00	00,00	300.000,00

	9.417.119.805,00	2.230.448.570,35	5.181.760.948,00
Penyisihan Piutang	1%	10%	100%
Penyisihan pajak	94.171.198,05	223.044.857,04	5.181.760.948,00
	9.322.948.606,95	2.007.403.713,31	0,00

7.1.1.3. Piutang Retribusi Daerah

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Piutang Retribusi Daerah	**13.231.639.457,05**	**4.625.019.057,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo piutang retribusi daerah di lingkungan Pemeritah Kota Madiun yang belum tertagih dan belum disetor ke kas daerah sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp13.231.639.457,05 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp4.625.019.057,00. Apabila dibandingkan antara jumlah Piutang Retribusi Daerah pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp13.231.639.457,05 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp4.625.019.057,00 terjadi kenaikan sebesar Rp8.606.620.400,05 atau sebesar 186,09%..

Perincian perubahan piutang retribusi daerah per 31 Desember 2024 tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.1.1.3
Piutang Retribusi Daerah

Perubahan 2024	Saldo 1 Januari 2024	Penambahan	Pengurangan	Sal 31 Desember 2(
Piutang Retribusi Daerah				4 = 1 + 2
Jasa Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
Jasa Usaha	4.625.019.057,00	27.596.116.837,90	18.989.496.437,85	13.231.639.457,05
Perizinan Tertentu	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Retribusi Daerah 2024	**4.625.019.057,00**	**27.596.272.087,90**	**18.989.496.437,85**	**13.231.639.457,05**
	Penyisihan Piutang Retribusi Daerah 2024			**(2.673.417.788,46)**
	Piutang Retribusi Daerah Netto 2024			**10.558.221.668,59**

Tabel 7.1.1.3.a
Piutang Retribusi OPD
Per 31 Desember 2024

Perubahan 2024	Saldo 1 Januari 2024	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2024
Piutang Retribusi Daerah	1	2	3	4 = 1 + 2 – 3
1. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	0,00	14.760.087.270,70	8.024.444.602,85	6.735.642.667,85

Jasa Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
Jasa Usaha	0,00	14.760.087.270,70	8.024.444.602,85	6.735.642.667,85
Perizinan Tertentu	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dinas Perumahan dan Pemukiman	**17.000.000,00**	**870.000,00**	**0,00**	**17.870.000,00**
Jasa Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
Jasa Usaha	17.000.000,00	870.000,00	0,00	17.870.000,00
Perizinan Tertentu	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dinas Budparpora	**184.591.936,00**	**0,00**	**184.591.936,00**	**0,00**
Jasa Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
Jasa Usaha	184.591.936,00	0,00	184.591.936,00	0,00
Perizinan Tertentu	0,00	0,00	0,00	0,00
4. BKPSDM	**39.675.000,00**	**0,00**	**39.675.000,00**	**0,00**
Jasa Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
Jasa Usaha	39.675.000,00	0,00	39.675.000,00	0,00
Perizinan Tertentu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. BPKAD	**1.724.347.991,00**	**4.903.578.838,00**	**4.849.774.078,00**	**1.778.152.751,00**
Jasa Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
Jasa Usaha	1.724.347.991,00	4.903.578.838,00	4.849.774.078,00	1.778.152.751,00
Perizinan Tertentu	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Dinas Perdagangan	**2.659.404.130,00**	**7.931.580.729,20**	**5.891.010.821,00**	**4.699.974.038,20**
Jasa Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
Jasa Usaha	2.659.404.130,00	7.931.580.729,20	5.891.010.821,00	4.699.974.038,20
Perizinan Tertentu	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Retribusi Daerah 2024	**4.625.019.057,00**	**27.596.272.087,90**	**18.989.496.437,85**	**13.231.639.457,05**
	Penyisihan Piutang Retribusi Daerah 2024			**(2.673.417.788,46)**
	Piutang Retribusi Daerah Netto 2024			**10.558.221.668,59**

Sesuai dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 90 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun, piutang disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) atau NRV. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama dengan timbulnya piutang.

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 3 klasifikasi sebagai berikut:

No	Umur Piutang	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 – 1 tahun	Lancar	1%

2	1 – 2 tahun	Kurang lancer	10%
3	diatas 2 tahun	Macet	100%

Berdasarkan klasifikasi umur piutang tersebut, maka besaran penyisihan piutang berdasarkan umur piutang retribusi daerah per OPD per 31 Desember 2024 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 7.1.1.3.b
Umur Piutang Retribusi Daerah

Klasifikasi Umur Piutar	≤ 1 tahun	> 1 th < 2 th	> 2 Tahun	Jumlah
Piutang Retribusi Daer				
1. Dinas Kesehatan	6.606.168.861,00	126.465.587,67	3.008.219,18	6.735.642.667,85
2. Dinas Perumahan , Pemukiman	870.000,00	17.000.000,00	0,00	17.870.000,00
3. BKAD	1.393.479.000,00	37.096.600,00	347.577.151,00	1.778.152.751,00
4. Dinas Perdagangan	1.860.803.171,20	701.670.898,00	2.137.499.969,00	4.699.974.038,20
Total Piutang Retribusi 2024	**9.861.321.032,20**	**882.233.085,67**	**2.488.085.339,18**	**13.231.639.457,05**
Penyisihan Piutang Retribusi 2024	**1%**	**10%**	**100%**	
Penyisihan Piutang Retribusi 2024	**(98.613.210,32)**	**(88.223.308,57)**	**(2.486.581.269,59)**	**(2.673.417.788,46)**
Piutang Retribusi Netto 2024	**9.762.707.821,88**	**794.009.777,10**	**1.504.069,59**	**10.558.221.668,59**

7.1.1.4. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Bagian lancar tagihan penjualan angsuran	**110.358.980,00**	**110.358.980,00**

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo bagian lancar tagihan penjualan angsuran di lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 1 tahun yang akan datang, yang diperoleh dari reklasifikasi dari tagihan penjualan angsuran sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp110.358.980,00 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp110.358.980,00. Apabila dibandingkan antara jumlah Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp110.358.980,00 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp110.358.980,00 tidak mengalami perubahan karena tidak ada realisasi pembayaran.

Tagihan penjualan angsuran tersebut merupakan tagihan atas penjualan bedak pasar yang dikelola oleh Dinas Perdagangan yang telah jatuh tempo pada 31 Desember 2024.

Perincian perubahan bagian lancar tagihan penjualan angsuran per 31 Desember 2024 sebesar Rp110.358.980,00 tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.1.1.4.a
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Perubahan 2024	Saldo 1 Januari 2024	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2024
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 2024	110.358.980,00	0,00	0,00	110.358.980,00
Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 2024	(110.358.980,00)	0,00	0,00	(110.358.980,00)
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto 2024				**0,00**

Sesuai dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 90 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun, piutang disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) atau NRV. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama dengan timbulnya piutang.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 3 klasifikasi sebagai berikut:

No	Umur Piutang	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 – 1 tahun	Lancar	1%
2	1 – 2 tahun	Kurang lancer	10%
3	diatas 2 tahun	Macet	100%

Berdasarkan klasifikasi umur piutang tersebut, maka besaran penyisihan piutang berdasarkan umur bagian lancar tagihan penjualan angsuran per 31 Desember 2024 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 7.1.1.4.b
Umur Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
Per 31 Desember 2024

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	≤ 1 tahun	> 1 th < 2 th	> 2 Tahun	Jumlah
Pasar Logam	0,00	0,00	36.816.850,00	36.816.850,00
Pasar Srijaya I	0,00	0,00	1.067.130,00	1.067.130,00
Pasar Srijaya II	0,00	0,00	46.603.000,00	46.603.000,00
Pasar Sleko	0,00	0,00	25.872.000,00	25.872.000,00
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 2024	**0,00**	**0,00**	**110.358.980,00**	**110.358.980,00**
Penyisihan 2024	**1%**	**10%**	**100%**	
Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 2024	**0,00**	**0,00**	**(110.358.980,00)**	**(110.358.980,00)**

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto 20:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

7.1.1.5. Piutang Lain-lain

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Piutang Lain-lain	**85.684.300,00**	**8.072.837.702,85**

Jumlah tersebut merupakan jumlah piutang lain-lain yang seharusnya diterima Pemerintah Kota Madiun tetapi belum tertagih sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp85.684.300,00 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp8.072.837.702,85. Apabila dibandingkan antara jumlah Piutang Lain – Lain pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp85.684.300,00 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp8.072.837.702,85 terjadi penurunan sebesar Rp7.987.153.402,85 atau sebesar 98,94%. Hal ini disebabkan karena berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengamanatkan bahwa Pendapatan BLUD yang sebelumnya tersaji di Anggaran Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah mulai tahun anggaran 2024 mengalami menjadi pendapatan Retribusi Daerah.

Piutang lain-lain hanya menyajikan piutang bagian lancar investasi dana bergulir Perincian perubahan piutang lain-lain per 31 Desember 2024 tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.1.1.5.a
Piutang Lain Lain

Perubahan 2024	Saldo 1 Januari 2024	Penambaha	Pengurangan	Saldo 31 Desember 20:
Piutang Lain-Lain	**1**	**2**	**3**	**4 = (1 + 2 -3)**
Bagian lancar investasi dana bergulir	85.684.300,00	0,00	0,00	85.684.300,00
Piutang BLUD	7.987.153.402,85	0,00	7.987.153.402,85	0,00
	8.072.837.702,85	**0,00**	**7.987.153.402,85**	**85.684.300,00**
	Penyisihan Piutang lain lain 2024			**(85.684.300,00)**
	Piutang Lain-Lain Netto 2024			**0,00**

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 80 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun, piutang disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net*

realizable value) atau NRV. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama dengan timbulnya piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 3 klasifikasi sebagai berikut:

No	Klasifikasi Umur Piutang	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 – 1 tahun	Lancar	1%
2	1 – 2 tahun	Kurang lancar	10%
3	diatas 2 tahun	Macet	100%

Berdasarkan klasifikasi umur piutang tersebut, maka besaran penyisihan piutang lain-lain berdasarkan umur piutang per 31 Desember 2024 tersaji dibawah ini.

Tabel 7.1.1.5.b
Umur Piutang Lain Lain

Klasifikasi Umur Piutang	≤ 1 tahun	> 1 th < 2 th	> 2 Tahun	Jumlah
Piutang lain-lain				
Bagian lancar investasi dana bergul	0,00	0,00	85.684.300,00	85.684.300,00
Jumlah Piutang Lain-lain 2024	**0,00**	0,00	**85.684.300,00**	**85.684.300,00**
Penyisihan 2024	**1%**	**10%**	**100%**	
Penyisihan Piutang Lain-lain 202	**0,00**	**0,00**	**85.684.300,00**	**(85.684.300,00)**
Piutang Lain-Lain Netto 2024	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

7.1.1.5.1. Bagian Lancar Investasi Dana Bergulir

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Bagian Lancar Investasi Dana Bergulir	**85.684.300,00**	**85.684.300,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo jumlah bagian lancar investasi dana bergulir yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 1 tahun yang akan datang, yang diperoleh dari reklasifikasi dari investasi dana bergulir tetapi belum tertagih sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp85.684.300,00 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp85.684.300,00. Apabila dibandingkan antara jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2024 Rp85.684.300,00 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp85.684.300,00 tidak mengalami perubahan atau tidak ada realisasi pembayaran.

Perincian perubahan investasi dana bergulir per 31 Desember 2024 tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.1.1.5.1.a
Bagian Lancar Investasi Dana Bergulir

Perubahan 2024	Saldo 1 Januari 2024	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2024
Bagian Lancar Investasi Dana Bergulir				
Industri Kecil Menengah Dana Bergulir 2002	3.760.000,00	0,00	0,00	3.760.000,00
Industri Kecil Menengah Dana Bergulir 2004	51.320.100,00	0,00	0,00	51.320.100,00
Industri Kecil Menengah Dana Bergulir 2005	14.440.000,00	0,00	0,00	14.440.000,00
Koperasi dan UKM Dana Bergul 2006	16.164.200,00	0,00	0,00	16.164.200,00
Bagian Lancar Investasi Dana Bergulir 2024	**85.684.300,00**	**0,00**	**0,00**	**85.684.300,00**
			Penyisihan Bagian Lancar Invstasi Dana Bergulir 2024	**(85.684.300,00)**
			Bagian Lancar Investasi Dana Bergulir Netto 2024	**0,00**

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 80 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun, piutang disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) atau NRV. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama dengan timbulnya piutang.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 3 klasifikasi sebagai berikut:

No	Klasifikasi Umur Piutang	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 – 1 tahun	Lancar	1%
2	1 – 2 tahun	Kurang lancar	10%
3	diatas 2 tahun	Macet	100%

Berdasarkan klasifikasi umur piutang tersebut, maka besaran penyisihan piutang lain-lain berdasarkan umur piutang per 31 Desember 2024 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 7.1.1.5.1.b
Piutang Investasi Dana Bergulir

Klasifikasi Umur Piutang	≤ 1 tahun	> 1 th < 2 th	> 2 Tahun	Jumlah
Bagian Lancar Investasi Dana Bergulir				
Industri Kecil Menengah Dana Bergulir 2002	0,00	0,00	3.760.000,00	3.760.000,00
Industri Kecil Menengah Dana Bergulir 2004	0,00	0,00	51.320.100,00	51.320.100,00

Industri Kecil Menengah Dana Bergulir 2005	0,00	0,00	14.440.000,00	14.440.000,00
Koperasi dan UKM Dana Bergul 2006	0,00	0,00	16.164.200,00	16.164.200,00
Bagian Lancar Investasi Dana Bergulir 2024	**0,00**	**0,00**	**85.684.300,00**	**85.684.300,00**
Penyisihan 2024	**1%**	**10%**	**100%**	
Penyisihan bagian lancar investasi dana bergulir 2024	**0,00**	**0,00**	**(85.684.300,00)**	**(85.684.300,00)**
Bagian Lancar Investasi Dana Bergulir Netto 2024	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

7.1.1.5.2.Piutang BLUD

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Piutang BLUD	**0,00**	**7.987.153.402,85**

Jumlah saldo piutang BLUD tersebut merupakan jumlah tagihan piutang BLUD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang belum tertagih sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp7.987.153.402,85. Apabila dibandingkan antara jumlah Piutang BLUD pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp7.987.153.402,85 terjadi penurunan sebesar Rp7.987.153.402,85 hal ini disebabkan Peraturan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) yang mengamanatkan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi diatur dalam satu Peraturan daerah. Piutang BLUD terdiri dari Piutang BLUD pada Puskesmas di Lingkungan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun.

Perincian perubahan Piutang BLUD per 31 Desember 2024 tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.1.1.5.2
Piutang BLUD

Perubahan Piutang BLU	Saldo 1 Januari 2024	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2024
Puskesmas	17.182.100,00	0,00	17.182.100,00	0,00
RSUD	7.969.971.302,85	0,00	7.969.971.302,85	0,00
Piutang BLUD 2024	**7.987.153.402,85**	**0,00**	**7.987.153.402,85**	0,00
			Penyisihan Piutang BLUD 2024	**(0,00)**
			Piutang BLUD Netto 2024	**0,00**

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 80 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun, piutang disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net*

realizable value) atau NRV. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama dengan timbulnya piutang. Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 3 klasifikasi sebagai berikut:

No	Umur Piutang	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 – 1 tahun	Lancar	1%
2	1 – 2 tahun	Kurang lancar	10%
3	diatas 2 tahun	Macet	100%

7.1.1.6. Persediaan

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Persediaan	**15.621.339.731,80**	**13.537.733.840,96**

Jumlah tersebut merupakan jumlah persediaan yang masih tersisa berdasarkan hasil perhitungan fisik (*stock opname*) yang terdiri dari persediaan tak habis pakai, persediaan pakai habis dan persediaan bekas pakai 31 Desember 2024 sebesar Rp15.621.339.731,80 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp13.537.733.840,96. Apabila dibandingkan antara jumlah Persediaan 31 Desember 2024 sebesar Rp15.621.339.731,80 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp13.537.733.840,96 terjadi kenaikan sebesar Rp2.083.605.890,84 atau sebesar 15,39%.

Setelah memperhitungkan persediaan kedaluwarsa yang belum dilakukan penghapusan pada tahun 2024. Persediaan berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 terbagi menjadi persedian tak habis pakai dan persediaan pakai habis serta persediaan bekas pakai.

Perincian saldo persediaan 31 Desember 2024 sebesar Rp15.621.339.731,80 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp13.537.733.840,96 tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.1.1.6.c
Persediaan Pakai Habis
Per 31 Desember 2024

	Persediaan Bahan Pakai Habis	Saldo 1 Januari 2024	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2024
1	Dinas Kesehatan & KB	10.932.672.447,96	12.858.579.142,10	10.968.027.699,06	12.823.223.891,00
2	Dinas Perumahan & Pemukiman	858.025.724,00	849.946.000,00	305.884.224,00	1.402.087.500,00
3	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	906.865.662,00	181.857.000,00	536.047.404,00	552.675.258,00
4	Dinas Perhubungan	120.525.000,00	10.000.000,00	92.255.000,00	38.270.000,00
5	Dinas Sosial	4.035.000,00	0,00	810.000,00	3.225.000,00
6	Bagian Umum	260.920.722,00	75.554.000,00	82.141.253,00	254.333.469,00

7 Bagian Hukum	4.768.000,00	0,00	4.768.000,00	0,00
8 Badan Pendapatan Daerah	4.558.050,00	0,00	0,00	4.558.050,00
9 Dinas Pertanian	421.637.038,00	300.365.101,00	209.545.842,20	512.456.296,80
10Dinas Perdagangar	22.057.400,00	8.812.967,00	3.929.000,00	26.941367,00
11Sekretariat DPRD	1.668.797,00	3.568.900,00	1.668.797,00	3.568.900,00
Jum	**13.537.733.840,96**	**14.288.683.110,10**	**12.205.077.219,26**	**15.621.339.731,80**

7.1.1.7. Belanja Dibayar Dimuka

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Belanja Dibayar Dimuka	**332.849.962,77**	**364.051.750,00**

Jumlah tersebut merupakan belanja dibayar dimuka per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023. Jumlah tersebut merupakan belanja asuransi yang telah dibayar tersebut memiliki masa manfaat 372 hari terhitung sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan 26 Maret 2025 sesuai Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Asuransi Barang Milik Daerah antara Pemerintah Kota Madiun dengan PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1976 Nomor: 027/PPK/021/401.202/2024 tanggal 20 Maret 2024 yang meliputi polis asuransi kebakaran (*property all risk)*, polis asuransi gempa bumi, dan polis asuransi kendaraan bermotor.

7.1.2. INVESTASI JANGKA PANJANG

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Investasi Jangka Panjang	**164.828.967.440,08**	**155.818.150.212,56**

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo investasi jangka panjang milik Pemerintah Kota Madiun sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp164.828.967.440,08 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp155.818.150.212,56. Apabila dibandingkan antara jumlah Investasi Jangka Panjang pada tanggal per 31 Desember 2024 sebesar Rp165.068.524.779,25 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp155.818.150.212,56 terjadi kenaikan sebesar Rp9.010.817.227,52 atau sebesar 5,78%.

Perincian investasi jangka panjang Per 31 Desember 2024 sebesar Rp164.828.967.440,08 dan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp155.818.150.212,56 sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 7.1.2
Investasi Jangka Panjang

No	Investasi Jangka Panjang	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)

1	Investasi Non Permanen	15.487.455.432,07	15.283.625.503,56
2	Investasi Permanen	149.341.512.008,01	140.534.524.709,00
	Jum	**164.828.967.440,08**	**155.818.150.212,56**

7.1.2.1. Investasi Non Permanen

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Investasi Non Permanen	**15.487.455.432,07**	**15.283.625.503,56**

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo investasi non permanen netto setelah memperhitungkan cadangan penyisihan milik Pemerintah Kota Madiun sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp15.487.455.432,07 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp15.283.625.503,56. Apabila dibandingkan antara jumlah Investasi Non Permanen pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp15.487.455.432,07 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp15.283.625.503,56 terjadi kenaikan sebesar Rp203.829.928,51 atau sebresar 1,33%.

7.1.2.1.2.Investasi Dana Bergulir

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Investasi Dana Bergulir	**15.487.455.432,07**	**15.283.625.503,56**

Jumlah tersebut merupakan jumlah investasi non permanen kepada Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp15.487.455.432,07 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp15.283.625.503,56 yang terdiri dari modal yang bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota dan pemupukan modal setelah memperhitungkan penyisihan piutang LKK. Apabila dibandingkan antara jumlah Investasi Dana Bergulir pada 31 Desember 2024 Rp15.487.455.432,07 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp15.283.625.503,56 terjadi kenaikan sebesar Rp 203.829.928,51 atau sebesar 1,33%.

Perincian investasi dana bergulir LKK 31 Desember 2024 sebesar Rp15.487.455.432,07 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 15.283.625.503,56 sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 7.1.2.1.2.a
Investasi Dana Bergulir LKK

No	Investasi Dana Bergulir LKK	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Modal Pemerintah Kota Madiun	11.761.997.436,00	11.761.997.436,00
2	Modal Pemerintah Pusat dan Provinsi	1.161.342.067,00	1.161.342.067,00
3	Pemupukan Modal dari Laba Usaha	12.182.671.752,86	11.732.983.845,41

4	Koreksi selisih lebih/kurang		0,00
5	Laba / Rugi LKK Kota Madiun	774.581.937,10	762.194.165,48
6	**Jumlah Investasi Dana Bergulir L**	**25.880.593.192,96**	**25.418.517.513,89**
7	**Cadangan Penyisihan Piutang L**	**(10.393.137.760,89)**	**(10.134.892.010,33)**
	Investasi Dana Bergulir LKK Netto	**15.487.455.432,07**	**15.283.625.503,56**

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa perguliran nilai Investasi Non Permanen-Dana Bergulir yang disajikan oleh Pemerintah Kota Madiun Per 31 Desember 2024 sebesar Rp15.487.455.432,07 Nilai tersebut termasuk modal yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, nilai pemupukan modal beserta Laba yang diperoleh LKK. Rincian laba berasal dari total LKK yang mendapatkan laba sebesar Rp810.382.609,10 dikurangi dengan LKK yang rugi sebesar -Rp35.800.672,00 maka diperoleh laba keseluruhan sebesar Rp774.581.937,10 Selain itu, nilai penyisihan Per 31 Desember 2024 sebesar Rp10.393.137.760,89. Rincian investasi non permanen-dana bergulir Per 31 Desember 2024 sebesar Rp15.487.455.432,07 dan Penyisihan Investasi Dana Bergulir sebesar Rp10.393.137.760,89 tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.1.2.1.1.b

Investasi Non Permanen Dana Bergulir

	Saldo 1 Januari 2024	Penambahan	Pengurangan	**Saldo 31 Desember 2024**
Dana Bergulir LKK				
Modal	12.923.339.503,00	0,00	0,00	12.923.339.503,00
Pemupukan Modal	11.732.983.845,41	468.799.209,45	-19.111.302,00	12.182.671.752,86
Koreksi selisih lebih/kurang	0,00	0,00	0,00	0,00
Laba atau Rugi LKK	762.194.165,48	48.188.443,62	-35.800.672,00	774.581.937,10
Dana Bergulir Tahun 2024	**25.418.517.513,89**	**516.987.653,07**	**-54.911.974,00**	**25.880.593.192,96**
			Penyisihan Dana Bergulir LKK 2024	-10.393.137.760,89
			Dana Bergulir LKK Neto 2024	15.487.455.432,07

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 80 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun, investasi non permanen tahun 2020 disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value)* NRV. LKK mengklasifikasikan pinjaman dana yang digulirkan kepada masyarakat sesuai kategori yaitu lancar, kurang lancar dan macet. Perincian investasi non permanen berupa investasi dana bergulir 31 Desember 2024 sebesar Rp10.302.262.891,55 tersaji di bawah ini.

Tabel 7.1.2.1.1.c

Investasi Non Permanen Dana Bergulir

Per 31 Desember 2024

Perubahan 2024	Saldo 1 Januari 2024	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2024
Investasi Dana Bergulir LKK				
Modal	**12.923.339.503,00**			**12.923.339.503,00**
Kec Kartoharjo				
Kanigoro	2.236.316.770,78	114.557.750,53	-	2.350.874.521,31
Tawangrejo	49.752.456,00	113.408,00	-	49.865.864,00
Rejomulyo	48.718.809,00		(7.423.819,00)	41.294.990,00
Pilangbango	635.890.961,50	45.497.307,00	-	681.388.268,50
Oro-Oro Ombo	228.252.617,40	6.394.914,60	-	234.647.532,00
Sukosari	345.789.655,00	21.509.661,00	-	367.299.316,00
Kelun	691.515.252,94	14.100.587,94	-	705.615.840,88
Kartoharjo	398.024.156,40	1.334.316,60		399.358.473,00
Klegen	57.385.043,18	1.087.774,47	-	58.472.817,65
Kec Manguharjo				
Ngegong	860.581.380,83	50.203.299,56	-	910.784.680,39
Sogaten	291.572.962,70	12.547.033,00	-	304.119.995,70
Madiun Lor	213.114.084,00		(5.539.866,00)	207.574.218,00
Patihan	185.623.533,00	9.532.598,00	-	195.156.131,00
Nambangan Kidul	703.597.039,90	13.412.437,00	-	717.009.476,90
Manguharjo	290.517.658,20		(523.316,00)	289.994.342,20
Pangongangan	234.397.836,61	9.540.091,20	-	243.937.927,81
Nambangan Lor	150.212.594,40	13.330.610,40	-	163.543.204,80
Winongo	122.583.922,00	1.409.857,00	-	123.993.779,00
Kec Taman				
Demangan	-13.735.815,00		(2.923.548,00)	(16.659.363,00)
Taman	120.575.930,20	4.380.648,00	-	124.956.578,20
Kuncen	372.447.475,60	21.659.870,00	-	394.107.345,60
Banjarejo	617.350.364,10	28.725.195,00	-	646.075.559,10
Josenan	686.595.265,00	49.436.627,00	-	736.031.892,00
Kejuron	422.064.363,40	4.322.215,20	-	426.386.578,60
Mojorejo	1.279.505.227,08	39.859.496,34	-	1.319.364.723,42
Pandean	483.525.784,20	5.843.511,60	-	489.369.295,80
Manisrejo	20.808.517,00	-	(2.700.753,00)	18.107.764,00
Laba atau Rugi LKK Th. 2024	762.194.165,48	48.188.443,62	-35.800.672,00	**774.581.937,10**
Investasi Dar Bergulir LK 202	**25.418.517.513,89**	**516.987.653,07**	-54.911.974,00	**25.880.593.192,96**

	Penyisihan Investasi Dana Bergulir LKK 2024	10.393.137.760,89
	Investasi Dana Bergulir LKK Neto 2024	**15.487.455.432,07**

Penambahan dari pendistribusian Laba LKK tahun 2023 untuk Pemupukan Modal sebesar 60% yaitu Rp467.389.352,35. Sedangkan untuk 40% dari Laba LKK 2023 telah didistribusikan untuk insentif pengurus sebesar 12%, insentif pengawas sebesar 8%, insentif karyawan sebesar 10%, serta PAD sebesar 10%. Penambahan yang lainnya merupakan penambahan atas Laba LKK tahun 2024 sebesar Rp599.083.401,60 yang belum didistribusikan untuk pemupukan modal sebesar 60%, insentif pengurus sebesar 12%, insentif pengawas sebesar 8%, insentifkaryawan sebesar 10%, serta PAD sebesar 10%. Pengurangan atas pendistribusian rugi LKK tahun 2023 sebesar Rp19.111.302,00 dan rugi LKK tahun 2024 sebesar Rp23.639.905,00. Sesuai dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 90 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun, piutang disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) atau NRV. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama dengan timbulnya piutang. Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 3 klasifikasi sebagai berikut:

No	Umur Piutang	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 – 1 tahun	Lancar	1%
2	1 – 2 tahun	Kurang lancar	10%
3	diatas 2 tahun	Macet	100%

Khusus klarifikasi umur piutang investasi non permanen dana bergulir LKK penyisihan dilakukan berdasarkan jumlah piutang yang beredar pada LKK sebesar Rp20.130.362.925,89 bukan berdasarkan jumlah nilai investasi nonpermanen LKK.

Tabel 7.1.2.1.1.d

Umur Piutang Investasi Non Permanen Dana Bergulir

Per 31 Desember 2024

Klasifikasi Umur Piutang	< 1 tahun	> 1 th < 2 th	> 2 Tahun	Jumlah
Investasi Non Permanen Dana Bergulir LKK				
Kec Kartoharjo	**2.910.631.000,00**	**451.701.000,00**	**3.542.146.120,00**	**6.904.478.120,00**
Kanigoro	1.109.775.000,00	124.365.500,00	539.601.000,00	1.773.741.500,00
Tawangrejo	3.500.000,00	-	530.275.870,00	533.775.870,00
Rejomulyo	18.771.500,00	1.963.000,00	282.966.650,00	303.701.150,00
Pilangbango	764.242.000,00	67.802.500,00	286.046.200,00	1.118.090.700,00

Oro-Oro Ombo	270.512.500,00	32.325.000,00	367.040.700,00	669.878.200,00
Sukosari	388.995.000,00	101.700.000,00	258.625.000,00	749.320.000,00
Kelun	253.035.000,00	121.545.000,00	637.799.400,00	1.012.379.400,00
Kartoharjo	99.700.000,00	-	186.683.300,00	286.383.300,00
Klegen	2.100.000,00	2.000.000,00	453.108.000,00	457.208.000,00
Kec Manguharjo	**2.334.479.000,00**	**568.723.422,22**	**3.324.609.783,67**	**6.227.812.205,89**
Ngegong	503.235.000,00	125.572.222,22	339.462.666,67	968.269.888,89
Sogaten	239.885.000,00	175.066.000,00	193.545.445,00	608.496.445,00
Madiun Lor	356.331.500,00	73.995.200,00	249.195.950,00	679.522.650,00
Patihan	256.065.000,00	4.370.000,00	358.819.670,00	619.254.670,00
Nambangan Kidul	158.655.000,00	31.375.000,00	477.320.500,00	667.350.500,00
Manguharjo	197.715.000,00	20.700.000,00	538.295.000,00	756.710.000,00
Pangongangan	297.775.000,00	81.370.000,00	328.602.500,00	707.747.500,00
Nambangan Lor	280.800.000,00	36.750.000,00	406.872.802,00	724.422.802,00
Winongo	44.017.500,00	19.525.000,00	432.495.250,00	496.037.750,00
Kec Taman	**3.123.556.500,00**	**593.181.500,00**	**3.281.334.600,00**	**6.998.072.600,00**
Demangan	-	-	108.458.500,00	108.458.500,00
Taman	155.872.500,00	44.679.000,00	316.046.000,00	516.597.500,00
Kuncen	351.935.000,00	22.070.000,00	182.089.300,00	556.094.300,00
Banjarejo	705.103.000,00	197.085.000,00	267.483.500,00	1.169.671.500,00
Josenan	1.010.559.000,00	44.525.000,00	74.408.000,00	1.129.492.000,00
Kejuron	40.597.000,00	24.848.500,00	473.476.300,00	538.921.800,00
Mojorejo	622.380.000,00	187.960.000,00	655.503.500,00	1.465.843.500,00
Pandean	210.910.000,00	44.620.000,00	688.544.500,00	944.074.500,00
Manisrejo	26.200.000,00	27.394.000,00	515.325.000,00	568.919.000,00
Piutang Dana Bergulir LKK 2024	**8.368.666.500,00**	**1.613.605.922,22**	**10.148.090.503,67**	**20.130.362.925,89**
Penyisihan piutang LKK	**1%**	**10%**	**100%**	
Penyisihan piutang Dana Bergulir LKK 2024	**83.686.665,00**	**161.360.592,22**	**10.148.090.503,67**	**10.393.137.760,89**
Investasi Non Permanen Dana Bergulir LKK Neto 2024	**8.284.979.835,00**	**1.452.245.330,00**	**0,00**	**9.737.225.165,00**

7.1.2.1.2.Penyisihan Dana Bergulir

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Penyisihan Kerugian Dana Bergulir	10.393.137.760,89	10.134.892.010,33

Jumlah tersebut merupakan jumlah penyisihan piutang dana bergulir investasi non permanen pada LKK di lingkungan Pemerintah Kota Madiun pada akhir tanggal 31 Desember 2024 Rp10.393.137.760,89 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp10.134.892.010,33 sesuai dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 90 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota

Madiun Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun, menyatakan bahwa penyajian atas investasi non permanen berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value* (NRV)). Berdasarkan perhitungan penyisihan dana bergulir per 31 Desember 2024 sebesar Rp10.393.137.760,89 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp10.134.892.010,33 sebagaimana tersebut di atas. Pemerintah Kota Madiun menyajikan nilai penyisihan tidak berdasarkan nilai investasi non permanen — investasi dana bergulir yang sesungguhnya yaitu dana yang dikelola oleh Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) dari perolehan modal pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kota. Penyisihan tersebut dihitung berdasarkan nilai piutang yang beredar pada seluruh LKK , bukan dihitung berdasarkan jumlah nilai investasi non permanen LKK. Apabila dibandingkan antara jumlah Penyisihan Dana Bergulir pada 31 Desember 2024 Rp10.393.137.760,89 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp10.134.892.010,33 terjadi kenaikan sebesar Rp167.370.881,22. Perincian penyisihan investasi non permanen berupa investasi dana bergulir Per 31 Desember 2024 sebesar Rp10.302.262.891,55 dan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.134.892.010,33 tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel 7.1.2.1.2
Penyisihan Piutang Dana Bergulir

No	Penyisihan Piutang	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Penyisihan Piutang Lancar	83.686.665,00	82.473.081,67
2	Penyisihan Piutang Ragu-Ragu	161.360.592,22	195.616.116,67
3	Penyisihan Piutang Macet	10.148.090.503,67	9.856.802.812,00
		10.393.137.760,89	10.134.892.010,33

7.1.2.2. Investasi Permanen

7.1.2.2.1.Penyertaan Modal Pemda

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Penyertaan Modal Pemda	**149.341.512.008,01**	**140.534.524.709,00**

Jumlah tersebut merupakan jumlah penyertaan modal Pemerintah Kota Madiun yang telah diinvestasikan dalam perusahaan daerah sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp149.341.512.008,01 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp140.534.524.709,00. Apabila dibandingkan antara jumlah Penyertaan Modal Pemda pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp149.341.512.008,01 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp40.534.524.709,00 terjadi kenaikan sebesar Rp8.806.987.299,01 atau sebesar 6,27%. Sedangkan investasi permanen pada Bank Jatim menggunakan *cost method* sehingga

investasi dicatat sebesar modal yang ditempatkan pada Bank Jatim. Perincian investasi permanen Per 31 Desember 2024 tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.1.2.2.1.a
Investasi Permanen

Perubahan 2024	Saldo 1 Januari 2024	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2024
Penyertaan Modal Pemda				
PDAM	68.815.164.850,00	13.350.157.952,00	7.311.146.345,99	74.854.176.456,01
PD Bank Daerah	30.266.988.124,00	1.617.868.593,17	75.720.869,17	31.809.135.848,00
PD Aneka Usaha	7.936.264.985,00	1.439.343.966,00	213.515.997,00	9.162.092.954,00
Bank Jatim	33.516.106.750,00	0,00	0,00	33.516.106.750,00
Jum	**140.534.524.709,00**	**16.407.370.511,17**	**7.600.383.212,16**	**149.341.512.008,01**

Perumda Air Minum (PDAM)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perumda PDAM ditetapkan modal disetor sebesar Rp50.000.000.000,00 yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan air minum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek ekonomi, kesehatan, dan pelayanan umum. Menurut Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2019 tentang PDAM, Pasal 70 ayat (2) laba bersih Perumda PDAM setelah dikurangi pajak ditetapkan bagian laba/deviden untuk APBD sebesar 55%. Nilai penyertaan modal Perumda PDAM sebesar Rp68.815.164.848,00. Modal awal Perumda PDAM terdiri atas kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp200.099.148,50 ditambah dari penyisihan sebagian Anggaran Keuangan Daerah dan/ atau sumber-sumber lain yang sah.

Jumlah tersebut merupakan jumlah penyertaan modal Perumda PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun yang telah diinvestasikan dalam perusahaan daerah sampai dengan 31 Desember 2020. Pencatatan investasi permanen pada Perumda PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun menggunakan *equity method* sehingga setiap tahun investasi permanen akan bertambah sebesar laba perusahaan dan akan berkurang sebesar laba yang telah didistribusikan sesuai dengan peruntukannnya. Berdasarkan hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2023 terdapat kelebihan pembayaran atas pembagian Tantiem dan Jasa Produksi atas laba tahun buku 2021 yang dibagikan tahun 2023 pada Perumda Air Minum Tirta Tama sari sebesar Rp1.125.593.570,61 dan tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah Pasal 103 ayat (1) yang menyatakan bahwa Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut maka Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun telah menindaklanjuti dan mengembalikan kelebihan sebesar Rp1.009.628.400,00.

Dan terdapat saldo piutang merupakan saldo audited sebelum terbit keputusan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya. Saldo Tahun 2024 merupakan saldo yang sesuai Petikan putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/PN Sby Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan perkara pada terdakwa Pegawai Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun.

Tabel 7.1.2.2.1.b
Investasi Permanen PDAM
Per 31 Desember 2024

Setoran modal dasar Pemerintah Kota Madiun sesuai Peraturan Daerah Kodya Dati II Madiun Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Madiun, dan terakhir diubah dengan Perda No. 17 Tahun 2001		200,099,148.50
Anggaran Pemerintah Kota Madiun Tahun 1993/1994 pasal No. 2P.0.172.01-002 disetor tanggal 04 Maret 1994		4.000.000,00
Anggaran Pemerintah Kota Madiun Tahun 1994/1995 pasal No. 2P.5.202-002 disetor tanggal 20 Maret 1995		2.000.000,00
Pelunasan hutang RPD No. RDA-210/DP3/1994 dan Loan IBRD No. 4017-IND, PPP No. SLA-114/DP3/1999 oleh Pemerintah Kota Madiun dengan Surat Keputusan Walikota Madiun No. 4 tahun 2002		5.969.273.000,00
Bantuan Modal sesuai SK Walikota No. 18 Tahun 2002		2.000.000.000,00
Bantuan dari Pemerintah Kota Madiun sesuai BAC Nomor 650/73/413.401/2003 (antara Walikota dan Direktur PDAM)		486.610.000,00
Penyerahan Pengelolaan dan Pemanfaatan atas Hasil Pembangunan Sektor Air Bersih Kota Madiun (Berita Acara Pemerihtah Kota Madiun No : 650/202/413.109/2000 tanggal 2 Januari 2001) terdiri dari :		267.872.000,00
a. Pipa Distribusi PK 50 Ø sepanjan 2.757 m sebesar	49.148.000	
b. Instalasi Gas Chlor 1 unit, pompa panel kapasitas 40 l/dt H=30 m lengkap dengan panel dan pompa 1 unit sebesar	99.990.000,00	
c. Pompa submersible kapasitas 40l/dt H= 40 m, 2 unit dan motor protektor 2 unt sebesar	118.734.000,00	
Bantuan dari Pemerintah Kota Madiun sesuai BAC 650/825/413.401/2003 (antara Walikota dan Direktur PDAM)		281.500.000,00

Bantuan dari Pemerintah Kota Madiun atas pengelolaan dan pemanfaatan atas hasil PDP SB-AB sesuai BA No. 650/001A/413.401/2005 (antara Walikota dan Direktur PDAM)		173,500,000.00
Bantuan dari Pemerintah Kota Madiun yang dananya dari ABT Pasca Bencana Sekt Sumber Daya Air tahun anggaran 2004 Kota madiun Sesuai Berita Acara N 050/1800a/401.109/2005 (antara Walikota dan Direktur PDAM) dengan perincian :		1.993.728.000,00
a. Sumur Dalam	312.513.000,00	
b. Pompa Submerble	247.041.000,00	
c. Jaringa Perpipaan	1.087.614.000,00	
d. Pemb R.Jaga Operator/Panel Pompa	135.383.000,00	
e. Instalasi Gas Chlor	82.642.000,00	
f. Pagar keliling Instalasi Sumur	128.5356.000,00	
Bantuan dari Pemerintah Kota Madiun berupa barang Sesuai Berita Acara No. 030/3180/401.024/2007 berupa :		885.287.000,00
a. Alat-alat Pengolahan Air	69.300.000,00	
b. Jaringan Pipa Distribusi	463.850.000,00	
c. Sumur-sumur	352.137.000,00	
Bantuan dari Pemerintah Kota Madiun berupa hasil kegiatan pembangunan salura pemukiman dan jaringan air bersih kota Madiun sesuai Berita Acara Nomor 050/880/401.109/2008 denga rincian :		1.569.029.000,00
a. Sumur-sumur	515.999.000,00	
b. Peralatan Pompa	67.331.000,00	
c. Alat-alat Pengolahan Air	158.774.000,00	
d. Jaringan pipa distribusi	826.925.000,00	
Berita Acara Serah Terima Konstruksi Jaringan Air Milik Pemerintah Kota Madiun No. 028/802/401.012/2009 tertanggal 2 September 2009 berupa :		1.692.665.000,00

a. Pengadan dan Pemasangan jaringan pipa distribusi serta pembuatan MCK 7 (tujuh)	434.220.000,00	
b. Pengadaan generator set 150 kva	399.645.000,00	
c. Pembuatan sumur dalam lengkap dengan pompa q=30 liter per detik	287.900.000,00	
d. Sambungan rumah murah	570.900.000,00	
Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minu Milik Pemerintah Kota Madiun No. 030/1333/401.012/2010 tertanggal 30 Agustus 201 dengan rincian sebagai berikut :		2.158.667.500,00
a. Pengadaan dan pemasangan Jaringan Pipa Transmisi	632.478.000,00	
b. Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa distribusi	830.742.000,00	
c. Pemasangan sambungan rumah	695.447.500,00	
Berita Acara Serah Terima Walikota Madiun dengan Direktur Utama PDAM Kota Madiu No. 050/2246/401.109/2011 tentang Berita acara serah terima pemanfaatan/pengelolaa hasil kegiatan pengembangan sistim distribusi air minum (DAK)		543.431.000,00
Berita Acara Serah Terima Walikota Madiun dengan Direktur Utama PDAM Kota Madiu No. 050/785/401.109/2011 tentang Berita acara serah terima pemanfaatan/pengelolaa hasil kegiatan pengembangan sistim distribusi air minum (DAK)		775.782.000,00
Berita Acara Serah Terima Walikota Madiun dengan Direktur Utama PDAM Kota Madiu No. 050/211/401.101/2013 tentang Berita Acara Serah Terima pemanfaatan/pengelolaa hasil kegiatan pengembangan Sistem Distribusi Air Minum (DAK), Jaringan pipa Distribus Meter Air Induk dan Sambungan Rumah		1.089.956.000,00
Penyertaan Modal Pemerintah Pusat : Koreksi penenyertaan modal pemerintah pusat per 31 desember 2014 dengan rincia sebagai berikut :		8.094.640.563,00
a. Bantuan meter air dari Direktorat teknik penyehatan departemen penyehatan umum sebesar	30.970.000,00	
b Sarana dan prasarana air bersih dari PPSAB JATIM tahun 1972 sd 1979 sebesar	127.445.650,00	
c. Sarana dan prasarana air bersih dari PPSAB JATIM tahun 1983 sd 1991 sebesar	3.243.396.718,00	
d. Bantuan tangki air dari PPSB Jatim sebesar	39.985.000,00	
e. Bantuan dari PPSPB tahun 1994 sebesar	374.220,00	
f. Bantuan Pipa dari PPSAB 1997 tanggal 10 Agustus 1997 No.PDB-Jatim/30/97 sebesar	26.164.575,00	

g. Bantuan Pipa GMS,SOCK GI dari PPSAB tanggal 29 Maret 1999 sebesar	2.544.000,00	
h. Surat Perintah Mengeluarkan Barang dari kantor proyek peningkatan prasarana pemukiman Jawa Timur tertanggal 18 Oktober 1999 No.PL.03.01.03.Ca.13.01/X/99-006 berupa Pipa ACP 250 diameter 240 sebesar	11.419.200,00	
i. Berita Acara tangal 9 Nopember 1999 No.01/BA/P4/1999 Antara pemimpin proyek peningkatan prasarana pemukiman Jawa Timur dengan Direktur Utama PDAM Kota Madiun berupa sebuah sumur dalam sebesar	180.744.300,00	
j. Berita Acara tanggal 31 Maret 2000 No.SPL.050/2238/413.109/2000 antara pemimp proyek program penyediaan dan pengelolaan air bersih SPL OECF INP 23 LG tahu anggaran 1999/2000 dengan Walikota Madiun berupa :		
- Sebuah sumur dalam	223.419.000	
- Pipa distribusi ukuran 2Q dan 4Q	329.373.000	
- Pipa distribusi ukuran 4Q dan 6Q	224.268.000	
k. Kendaraan dinas truk tangki air minum bantuan Pemerintah Pusat Departemen Pekerjaan umum Direktorat Jenderal Cipta Karya Satker PKP air minum Jatim. Berita Acara Serah Terima Sementara No.02/BAST_PBS/PKP-AM/XII/2007.	187.220.000	
l. Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Sementara Nomor,75/bast/pk-pam.jt/2009 tanggal 15 Desember 2009 antara kepala satuan kerja pengembangan kinerja pengelolaan air minum Jawa Timur dengan Direktur PDAM Kota Madiun berupa pekerjaan perpipaan	1.819.915.900	
m. Bukti pengeluaran barang No.157/mdn/pkp/-am/III/2010 tertanggal 3 Maret 2010 dari kantor Cipta Karya Pengembangan Kinerja pengelolaan air minum Jawa Timur berupa perpipaan	14.238.700,00	
n. Berita Acara Serah Terima Nomor.10/BAST/PK-PAM.JT/2013 tanggal 30 Desember 2013 antara kepala Satuan Kerja pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Propinsi Jawa Timur dengan Direktur PDAM Kota Madiun berupa pengelolaan air minum senilai	1.633.162.300,00	
Penyertaan Modal Pemerintah Jawa Timur :		
Penyertaan Propinsi Jawa Timur yang belum ditentukan statusnya per 31 Desember 201 dan 2014 dengan perincian sebagai berikut :		168.346.000,00

a. Berita Acara Serah Terima Nomor : 602.1/638.3/121/PP/2005 tanggal 12 Desember 2005 antara Kepala Sub Dinas Pengembangan Perkotaan Dinas Pemukiman Propinsi Jawa Timur dengan Direktur PDAM Kota Madiun berupa pengadaan dan pemasangan pipa PVC S12,5 50Q+Accesoris=2.511 M dan Pipa GI 50Q+Accesoris=-30m	100.000.000,00	
b. Berita Acara Serah Terima Nomor: 602.1/PK121/2007 tanggal 12 Juli 2007 antara kepala sub dinas pengembangan perkotaan dinas pemukiman propinsi Jawa Timur dengan Direktur PDAM Kota Madiun berupa pemasangan sambungan rumah sebanyak 180 sambungan per sambungan Rp379.700 sehingga totalnya	68.346.000,00	
Penambahan Nilai Investasi Permanen Sebelum tahun 2012		28.356.386.211,50
Penambahan Nilai Investasi Permanen Sebelum tahun 2012		1.919.306.250,50
Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2012		**30.275.692.462,00**
Penam nilai inves permanet selama th 2012 dan 2013		850.389.361,20
a. Laba Tahun 2011	4.251.946.806,00	
b. Deviden dari laba tahun 2011 (PAD)	(2.338.570.743,30)	
c. Dana Sosial & Pendidikan	(212.597.340,30)	
d. Dana Pensiun dan Sokongan	(425.194.680,60)	
e. Jasa Produksi	(425.194.680,60)	
Penambahn Modal Pemerintah Kota Madiun sesuai		
Berita Acara No. 050/211/401.101/2013		1.089.956.000,00
Koreksi Cadangan		(173.890.609,00)
Penambahan nilai investasi permanen th 2012		295.902.693,75
Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2012		**32.338.050.507,95**
Penambahan nilai investasi permanen selama th 2012 dan 2013		909.569.900,34
a. Laba Tahun 2012	4.547.849.501,75	
b. Deviden dari laba tahun 2012 (PAD)	(2.501.317.225,96)	

c. Dana Sosial & Pendidikan	(227.392.475,09)	
d. Dana Pensiun dan Sokongan	(454.784.950,18)	
e. Jasa Produksi	(454.784.950,18)	
Penambahn Modal Pemerintah Kota Madiun sesuai Berita Acara No. 050/1642/401.501/2013		53.855.000,00
Penambahan nilai investasi permanen th 2013		117.827.232,25
Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2013		**33.419.302.040,54**
Penambahan nilai investasi permanen selama th 2013 dan 2014		933.135.346,80
a. Laba Tahun 2013	4.665.676.734,00	
b. Deviden dari laba tahun 2013 (PAD)	(2.566.122.203,70)	
c. Dana Sosial & Pendidikan	(233.283.836,70)	
d. Dana Pensiun dan Sokongan	(466.567.673,40)	
e. Jasa Produksi	(466.567.673,40)	
f. Koreksi Cadangan		-168.299.732,00
Penambahan nilai investasi permanen th 2014		1.804.284.739,00
Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2014		**35.988.422.394,34**
Penambahan nilai investasi permanen selama th 2014 dan 2015		1.293.992.294,60
a. Laba Tahun 2014	6.469.961.473,00	
b. Deviden dari laba tahun 2014 (PAD)	(3.558.478.810,15)	
c. Dana Sosial & Pendidikan	(323.498.073,65)	
d. Dana Pensiun dan Sokongan	(646.996.147,30)	
e. Jasa Produksi	(646.996.147,30)	
f. Sambungan Gratis dari dangan umum		(823.200.000,00)
Penyertaan dari Pemda sesuai Berita Acara No. :		
No. 050/088/401.501/2015		1.457.833.000,00
No. 050/359/401.501/2014		1.129.206.000,00
No. 050/361/401.501/2014		15.000.000,00

Penyertaan Dari Pemerinth Jatim sesuai Berita Acara:		
Nomor: 10/BAST/PK-PAM.JT/2013		1.633.162.300,00
Penambahan nilai investasi permanen th 2015		151.789.812,00
Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2015		**40.846.206.400,94**
Penambahan nilai investasi permanen selama th 2015 dan 2016		1.324.350.257,00
a. Laba Tahun 2013	6.621.751.285,00	
b. Deviden dari laba tahun 2013 (PAD)	(3.641.963.206,75)	
c. Dana Sosial & Pendidikan	(331.087.564,25)	
d. Dana Pensiun dan Sokongan	(662.175.128,50)	
e. Jasa Produksi	(662.175.128,50)	
Penambahan nilai investasi permanen th 2016		3.260.477.959,00
Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2016		**45.431.034.016,94**
Penambahan nilai investasi permanen selama th 2016 dan 2017		1.976.445.848,80
a. Laba Tahun 2016	9.882.229.244,00	
b. Deviden dari laba tahun 2016 (PAD)	(5.435.226.084,20)	
c. Dana Sosial & Pendidikan	(494.111.462,20)	
d. Dana Pensiun dan Sokongan	(988.222.924,40)	
e. Jasa Produksi	(988.222.924,40)	
f. Sambungan Gratis dari dangan umum		(386.399.991,00)
g. Koreksi Penyertaan Modal Pusat		1.633.162.300,00
h. Koreksi pengurangan modal pemth Jatim		(1.633.162.300,00)
Penambahan nilai investasi permanen th 2017		427.964.813,17

Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2017		**47.449.045.287,91**
Penambahan nilai investasi permanen selama th 2016 dan 2017		2.062.038.811,43
a. Laba Tahun 2017	10.310.194.057,17	
b. Deviden dari laba tahun 2017 (PAD)	(5.670.606.731,44)	
c. Dana Sosial & Pendidikan	(515.509.702,86)	
d. Dana Pensiun dan Sokongan	(1.031.019.405,72)	
e. Jasa Produksi	(1.031.019.405,72)	
f. Sambungan Gratis dari dangan umum		-564.910.128,00
Penambahan nilai investasi permanen th 2018		74.437.015,11
Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2018		**49.020.610.386,45**
Penambahan nilai investasi permanen selama th 2018 dan 2019		2.076.926.214,32
a. Laba Tahun 2018	10.384.631.072,14	
b. Deviden dari laba tahun 2018 (PAD)	(5.711.547.089,75)	
c. Dana Sosial & Pendidikan	(519.231.553,61)	
d. Dana Pensiun dan Sokongan	(1.038.463.107,23)	
e. Jasa Produksi	(1.038.463.107,23)	
f. Sambungan Gratis dari dangan umum		(215.398.331,00)
Penambahan nilai investasi permanen selama th 2019		1.525.987.809,72

Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2019		**52.408.126.679,49**
Penambahan nilai investasi permanen selama th 2019 dan 2020		2.808.236.486,28
a. Laba Tahun 2019	12.336.731.592,00	
b. Deviden dari laba tahun 2019 (PAD)	(6.550.840.385,10)	
c. CSR	(238.212.377,65)	
d. Tantiem Dewas dan Direksi	(357.318.566,47)	
e. Dana Kesejahteraan	(1.191.061.888,25)	
f. Jasa Produksi	(1.191.061.888,25)	
Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2020		**55.216.363.165,77**
Penambahan nilai investasi permanen selama th 2020 dan 2021		2,637,209,955.00
a. Laba Tahun 2020	12,506,595,229.00	
b. Deviden dari laba tahun 2020 55%	(6.785.202.376,15)	
c. CSR 2%	(246,734,632.00)	
d. Tantiem Dewas dan Direksi 3%	(370,101,948.00)	
e. Dana Kesejahteraan 10%	(1.233.673.159,30)	
f. Jasa Produksi 10%	(1.233.673.159,30)	
g. Sambungan Gratis cadangan umum		(479.520.000,00)
Penambahan nilai investasi permanen tahun 2021 berupa tana berdasarkan Perda No. 9 tahun 2020 tentang Penyertaan Mod Pemerintah Daerah di Kota Madiun		1.918.126.800,00
Koreksi Investasi permanen PDAM karena desimal		(599,77)
Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2021		**59.292.179.321,00**
Penambahan nilai investasi permanen selama th 2021 dan 2023		3.241.311.462,00
a. Laba Tahun 2021	13.246.587.646,00	
b. Deviden dari laba tahun 2021	(6.878.627.376,00)	
c. CSR	(250.131.905,00)	
d. Tantiem Dewas dan Direksi	(375.197.857,00)	
e. Dana Kesejahteraan	(1.250.659.523,00)	
f. Jasa Produksi %	(1.250.659.523,00)	

g. Sambungan Gratis cadangan umum		(1.046.520.000,00)
Koreksi Investasi permanen PDAM karena desimal		
Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2023		**61.486.970.783,00**
Penambahan nilai investasi permanen selama th 2021 dan 2023		7.328.194.065,32
a. Laba Tahun 2024	12.984.234.155,35	
b. Deviden dari laba tahun 2023	(6.665.668.490,03)	
c. Pengembalian Tantiem & Jaspro tahun buku 2021	1.009.628.400,00	
Yang dibagikan Tahun 2023		
Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2024		**68.815.164.850,00**
Penambahan nilai investasi permanen selama th 2023 dan 2024		5.989.332.079,01
a. Laba Tahun 2024	13.236.902.281,00	
b. Deviden dari laba tahun 2023	(6.784.262.345,99)	
c. Pengembalian Tantiem & jaspro th buku 2021 yang dibagikan th 2022	63.576.144,00	
d. csr ngrowo ae	(83.784.000,00)	
e. Pasang Baru gratis	(443.100.000,00)	
Koreksi investasi permanen PDAM karena desimal		
JURNAL KOREKSI BPK ATAS KEKURANGAN PENGAKUKAN LABA PDAM BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN AUDITE KAP		49.679.527,00
Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2024		**74.854.176.456,01**

PERUMDA BPR

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kota Madiun, Pasal 6 ditetapkan modal dasar sebesar Rp25.000.000.000,00. Modal disetor sampai dengan 31 Desember 2008 sebesar Rp8.000.032.295,00. Pada tahun 2009 penyertaan modal kepada Perumda BPR Bank Daerah Kota Madiun bertambah sebesar Rp1.200.000.000,00 yang dimaksudkan untuk memberikan fasilitas kredit lunak kepada usaha kecil dan menengah serta petani binaan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun dalam rangka membantu permodalan dengan memberikan suku bunga rendah sebagai pengganti dana perguliran yang selama ini dikucurkan melalui OPD yang membidangi koperasi, UMKM, pertanian, perindustrian, dan perdagangan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kota Madiun, Pasal 95 ayat (2) laba bersih Perumda BPR Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kota Madiun setelah dikurangi pajak ditetapkan bagian laba/deviden untuk daerah sebesar 50%.

Pada Tahun 2024 terdapat permasalahan di Bank Daerah dan telah dilaksanakan bentuk tindak lanjut penyelesaian penyalahgunaan kredit dan deposito yang dilakukan pegawai Bank Pada tahun 2024 Bank menemukan adanya penyalahgunaan kredit dan deposito yang dilakukan oleh pegawai dengan potensi kerugian sebesar Rp5.654.843.400 dan Rp40.000.000. Tindak lanjut penyelesaian penyalahgunaan kredit yang telah dilakukan oleh Bank Daerah. Saat ini masih dalam proses penyidikan untuk melengkapi barang bukti dan pemanggilan saksi. Sampai dengan posisi pemeriksaan nominal kerugian tersebut belum dilakukan koreksi pada Laporan Keuangan Bank posisi 31 Desember 2024. Bank akan melakukan koreksi pada Laporan Keuangan posisi 31 Desember 2024 dengan melakukan reklasifikasi kerugian tersebut sesuai POJK tentang KAP PPAP atas aset non produktif tagihan BPR yang timbul akibat pihak lawan tidak memenuhi kewajiban kepada BPR dan BPR akan membentuk cadangan sebesar 100% (seratus persen) atas akun tagihan BPR tersebut.

Tabel 7.1.2.2.1.c
Investasi Permanen PD. BPR Bank Daerah
Per 31 Desember 2024

1	Setoran modal dasar Pemerintah Kota Madiun		8.000.032.295,00
2	Setoran penyertaan modal fasilitas kredit lunak		1.200.000.000,00
3	Saldo Cadangan Umum, Cadangan tujuan dan Laba ditahan		2.261.467.409,00
4	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanent selama tahun 200 dan tahun 2010		567.952.316,00
	a. Laba Tahun 2009	1.893.174.388,00	
	b. Deviden Tahun 2009	(946.587.194,00)	
	c. Dana Kesra dan Jasa Produksi	-378.634.878,00	
	d. Penambahan Cadangan tujuan		115.395.000,00
	Saldo Perubahan Ekuitas		**12.144.847.020,00**
5	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanent selama tahun 2010 dan tahun 2011		615.882.958,00
	a. Laba Tahun 2010	2.052.943.192,00	
	b. Deviden Tahun 2011	(1.026.471.596,00)	
	c. Dana Kesra dan Jasa Produksi	(410.588.638,00)	
	d. Penambahan Cadangan tujuan		128.549.500,00
	Saldo Perubahan Ekuitas		**12.889.279.478,00**
6	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanent selama tahun 2011 dan tahun 2012		730.580.401,00
	a. Laba Tahun 2011	2.435.268.003,00	
	b. Deviden Tahun 2012	(1.217.634.004,00)	
	c. Dana Kesra dan Jasa Produksi	(487.053.600,00)	
	d. Penambahan Cadangan tujuan		30.805.500,00
	Saldo Perubahan Ekuitas		**13.650.665.379,00**
7	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanent selama tahun 2012dan tahun 2013		847.803.031,00
	a. Laba Tahun 2012	2.826.010.104,00	
	b. Deviden Tahun 2013	(1.413.005.052,00)	
	c. Dana Kesra dan Jasa Produksi	(565.202.021,00)	
	Saldo Perubahan Ekuitas		**14.498.468.410,00**
8	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanent selama tahun 2013 dan tahun 2014		847.334.873,00
	a. Laba Tahun 2013	2.824.449.575,00	
	b. Deviden Tahun 2014	(1.412.224.788,00)	

	c. Dana Kesra dan Jasa Produksi	(564.889.915,00)	
	Saldo Perubahan Ekuitas		**15.345.803.283,00**
9	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanent selama tahun 2014 dan tahun 2015		978.878.099,00
	a. Laba Tahun 2014	3.262.926.995,00	
	b. Deviden Tahun 2014	(1.631.463.498,00)	
	c. Dana Kesra dan Jasa Produksi	(652.585.399,00)	
	Saldo Perubahan Ekuitas		**16.324.681.381,00**
10	Tambahan Penyertaan Modal secara tunai berdasarkan SP2D Nomor :900/SPP-LS/052/401.207/2015 tanggal 24 Nopember 2015		12.106.967.705,00
11	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanent selama tahun 2015 dan tahun 2016		957.561.317,00
	a. Laba Tahun 2015	3.191.871.055,00	
	b. Deviden Tahun 2015	(1.595.935.528,00)	
	c. Dana Kesra dan Jasa Produksi	(638.374.211,00)	
	Saldo Perubahan Ekuitas		**29.389.210.403,00**
12	Tambahan Penyertaan Modal berupa Hibah Tanah dengan nilai buku 492.400.000,00 berdasarkan BA Nomor : 028/1938/401.207/2015 Tanggal 5 Oktober 2015 dengan nilai appraisal Rp 3.693.000.000,00		3.693.000.000,00
13	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanent selama tahun 2016 dan tahun 2017		1.220.671.042,00
	a. Laba Tahun 2016	4.068.903.474,00	
	b. Deviden Tahun 2016	(2.034.451.735)	
	c. Dana Kesra dan Jasa Produksi	(813.780.695,00)	
14	Pengurangan cadangan tujuan untuk Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (BPHTB) sesuai surat No.580/82/401.502/2017 tanggal 28 Pebruari 2017		-181.650.001,00
	Saldo Perubahan Ekuitas		**34.121.231.444,00**
15	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanent selama tahun 2017 dan tahun 2018		824.849.966,00
	a. Laba Tahun 2017	2.749.499.888,00	
	b. Deviden Tahun 2017	(1.374.749.944,00)	
	c. Dana Kesra dan Jasa Produksi	(549.899.978,00)	

	Saldo Perubahan Ekuitas		**34.946.081.410,00**
16	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanent selama tahun 2018 dan tahun 2019		1.273.041.820,00
	a. Laba Tahun 2018	4.243.472.734,00	
	b. Deviden Tahun 2018	(2.121.736.367,05)	
	c. Dana Kesra dan Jasa Produksi	(848.694.547,00)	
	Saldo Perubahan Ekuitas		**36.219.123.230,00**
17	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanent selama tahun 2019 dan tahun 2020		495.252.541,00
	a. Laba Tahun 2019	2.476.262.706,00	
	b. Deviden Tahun 2019	(1.361.944.488,00)	
	c. Dana Kesejahteraan	(247.626.271,00)	
	e. Dana Tantiem	(99.050.508,00)	
	F Jasa Produksi	(198.101.016,00)	
	G CSR	(74.287.881,00)	
	Saldo Perubahan Ekuitas 31 Desember 2020		**36.714.375.772,00**
18	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanent selama tahun 2020 dan tahun 2021		722.998.293,00
	a. Laba Tahun 2021	3.614.991.463,00	
	b. Deviden Tahun 2020 55%	(1.988.245.305,00)	
	c. Dana Kesejahteraan 10%	(361.499.146,00)	
	e. Tantiem untuk Dewas dan Direksi 4%	(144.599.659,00)	
	F Jasa Produksi 8%	(289.199.317,00)	
	G CSR 3%	(108.449.744,00)	
	Saldo Perubahan Ekuitas 31 Desember 2021		**37.437.374.065,00**
19	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanent selama tahun 2021 dan tahun 2023		338.331.828,00
	a. Laba Tahun 2021 dan 2023	1.691.659.137,00	
	b. Deviden dari Laba Tahun 2021 55%	(930.412.525,00)	

	c. Dana Kesejahteraan 10%	(169.165.914,00)	
	e. Tantiem untuk Dewas dan Direksi 4%	(67.666.365,00)	
	F Jasa Produksi 8%	(135.332.731,00)	
	G CSR 3%	(50.749.774,00)	
20	**Saldo Perubahan Ekuitas 31 Desember 2023**		**37.775.705.893,00**
	Penambahan nilai investasi selama tahun 2023 audited		1.054.371.632,00
	Saldo Perubahan Ekuitas 2023		**38.830.077.525,00**
	Pengurangan penyertaan modal ke PD Bank Daerah karena mengalami kerugian berdasarkan laporan keuangan audited Per 31 Desember 2024		(7.719.592.095,00)
	Penyesuaian berkurangnya investasi permanen pada bumd pd bank daerah karena pembagian deviden sebesar Rp579.904.398,00 ; dana kesejahteraan pegawai sebesar Rp105.437.163,00 ; jasa produksi sebesar Rp84.349731,00 ; csr sebesar Rp31.631.149,00 dan tantiem sebesar Rp42.174.865,00		(843.497.306,00)
21	**Saldo Perubahan Ekuitas 31 Desember 2024**		**30.266.988.124,00**
22.	Penambahan nilai investasi permanen selama Tahu 2024 Unaudited		1.617.868.593,17
23	KOREKSI ATAS KELEBIHAN PENGAKUKAN LAB PERUMDA BPR KOTA MADIUN BERDASARKA LAPORAN KEUANGAN AUDITED KAP		(75.720.869,17)
	Saldo Perubahan Ekuitas Tahun 2024 Unaudited		**31.809.135.848,00**

Perumda Aneka Usaha

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perumda Aneka Usaha Pasal 5, modal awal perusahaan terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan berupa tanah dan bangunan, peralatan mesin cetak, fasilitas alat perbengkelan dan fasilitas pelayanan SPBU dan dapat ditambah dari penyisihan sebagain anggaran keuangan daerah dan atau sumber-sumber lain yang sah. Menurut Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perumda Aneka

Usaha, Pasal 45 ayat (1) laba bersih Perumda Aneka Usaha setelah dikurangi pajak ditetapkan bagian laba/deviden untuk APBD sebesar 55%. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perumda Aneka Usaha Kota Madiun Pasal 116 dan Pasal 117 berkaitan dengan Pelaporan Dewan Pengawas dan Pelaporan Direksi, BAB X, Pasal 119 ayat (1) tentang Penggunaan Laba Perumda Aneka Usaha. Serta memperhatikan Hasil Audit atas Laporan Keuangan Perumda Aneka Usaha Kota Madiun Tahun Buku 2023 tertanggal 07 Februari 2024 oleh Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi dan Rekan Nomor LAI : 60001/3.0437/AU.2/05/1237-2/1/II/2024. Dinyatakan bahwa Laba Perumda Aneka Usaha Kota Madiun Tahun Buku 2023 sebesar Rp2.141.247.247,00 (dua milliar seratus empat puluh satu juta dua ratus empat puluh tujuh dua ratus empat puluh tujuh rupiah).

Sesuai Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Madiun Pasal 122 menyatakan bahwa : "Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Aneka Usaha dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka Penggunaan Laba Perumda Aneka Usaha Tahun Buku 2023 sebesar Rp2.141.247.247,00 (dua milliard seratus empat puluh satu juta dua ratus empat puluh tujuh dua ratus empat puluh tujuh rupiah) seluruhnya digunakan untuk menutup kerugian tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 7.1.2.2.1.d
Investasi Permanen PD. Aneka Usaha
Per 31 Desember 2024

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Setoran modal awal Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Keputusan Walikota Madiun Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Modal awal Perusahaan Daerah Aneka Usaha.	4.085.502.000,00
2	Penyertaan modal pembangunan SPBU pada tahun 2007 tertuang dalam Berita Acara serah terima pemanfaatan/pengelolaan hasil kegiatan peningkatan sarana praarna aparatur sub kegiatan perencanaan pengawasan teknik serta lanjutan pembangunan SPBU tahun anggaran 2005 – tahun anggaran 2007 Nomor: 050/5689/401.015/2007 Tanggal 19 Desember 2007	4.489.766.850,00
3	Rugi Tahun – tahun sebelumnya	(2.307.352.895,00)
4	**Saldo Awal Tahun 2008**	**6.267.915.955,00**
5	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama tahun 2008 dan tahun 2009 a. Laba Tahun 2008 423.402.038,00	282.884.044,00

	b. Deviden, sosial pendidikan, sokongan, jasa produksi	(176.266.244,00)	
	c. Kenaikan cadangan	35.748.250,00	
	d. Pengurangan laba ditahan		(474.431.588,00)
	Saldo Perubahan Ekuitas		**6.076.368.411,00**
6	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanent selama tahun 2009 dan tahun 2010		228.277.463,00
	a. Laba Tahun 2009	550.651.565,00	
	b. Deviden, sosial pendidikan, sokongan, jasa produksi	(423.402.038,00)	
	c. Kenaikan cadangan	101.027.936,00	
	d. Pengurangan laba ditahan		(838.470.116.00)
	Saldo Perubahan Ekuitas		**5.466.175.758,00**
7	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanent selama tahun 2010 dan tahun 2011		90.552.939,00
	a. Laba Tahun 2010	531.074.191,00	
	b. Deviden, sosial pendidikan, sokongan, jasa produksi	(550.651.565,00)	
	c. Kenaikan cadangan	110.130.313,00	
	d. Pengurangan laba ditahan		(1.059.866.296,00)
	Saldo Perubahan Ekuitas		**4.496.862.401,00**
8	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama tahun 2011 dan tahun 2012		(241.533.519,00)
	a. Laba Tahun 2011	389.896.947,00	
	b. Deviden, sosial pendidikan, sokongan, jasa produksi	(531.074.191,00)	
	c. Kenaikan cadangan	(100.356.275,00)	
	Saldo Perubahan Ekuitas		**4.255.328.882,00**
9	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanent selama tahun 2012 dan tahun 2013		105.556.865,00
	a. Laba Tahun 2012	361.281.487,00	
	b. Deviden	(214.443.320,85)	
	c. Sosial pendidikan, sokongan, jasa produksi	(175.453.626,15)	
	d. Kenaikan cadangan	134.172.325,00	
	Saldo Perubahan Ekuitas		**4.360.885.747,00**
10	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama tahun 2013 dan tahun 2014		21.380.797,00
	a. Laba Tahun 2013	310.405.987,00	
	b. Deviden	(198.704.817,85)	
	c. Sosial pendidikan, sokongan, jasa produksi	(162.576.669,15)	
	d. Kenaikan cadangan	72.256.297,00	
	e. Koreksi saldo laba		(188.648.413,00)
	Saldo Perubahan Ekuitas		**4.193.618.131,00**
11	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama tahun 2014 dan tahun 2015		(109.968.733,00)

	a. Laba Tahun 2014	138.356.057,00	
	b. Deviden, sosial pendidikan, sokongan, jasa produksi	(248.324.790,00)	
	c. Koreksi saldo laba		(1.956.299.461,00)
	Saldo Perubahan Ekuitas		**2.127.349.937,00**
12	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanent selama tahun 2015 dan tahun 2016		24.628.851,00
	a. Laba Tahun 2015	307.932.523,00	
	b. Deviden, sosial pendidikan, sokongan, jasa produksi	(283.303.672,00)	
	Saldo Perubahan Ekuitas		**2.151.978.788,00**
13	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanent selama tahun 2016 dan tahun 2017		(418.308.949,00)
	a. Laba Tahun 2016	(171.962.931,00)	
	b. Deviden, sosial pendidikan, sokongan, jasa produksi	(246.346.018,00)	
	c. Koreksi saldo laba		(2.079.500,00)
	Saldo Perubahan Ekuitas		**1.731.590.339,00**
14	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanent selama tahun 2017 dan tahun 2019		741.463.024,00
	a. Laba Tahun 2017	741.463.024,00	
	b. Deviden, sosial pendidikan, sokongan, jasa produksi		
	Saldo Perubahan Ekuitas		**2.473.053.363,00**
15	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanent selama tahun 2017dan tahun 2018		668.179.700,00
	a. Laba Tahun 2018	1.261.350.119,00	
	b. Deviden	(407.804.663,00)	
	c. Sosial pendidikan, sokongan, jasa produksi	(185.365.756,00)	
	Saldo Perubahan Ekuitas		**3.141.233.063,00**
16	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanent selama tahun 2018 dan tahun 2019		521.062.283,00
	a. Laba Tahun 2017	1.530.142.378,00	
	b. Deviden	(693.742.600,00)	
	c. Sosial Pendidikan, Sokongan, jasa Produksi	(315.337.495,00)	
	Penyertaan Modal Pemda Tahun 2019		1.500.000.000,00
	Saldo Perubahan Ekuitas tahun 2019		**5.162.295.346,00**
17	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanent selama tahun 2019 dan tahun 2020		371.136.750,00
	a. Laba Tahun 2019	1.595.250.651,00	
	b. Deviden	(841.578.307,90)	
	c. Dana Sosial dan Pendidikan	(76.507.118,00)	
	E Dana Pensiun dan Sokongan	(153.014.238,00)	
	F Jasa Produksi	(153.014.238,00)	

	Saldo Perubahan Ekuitas 31 Desember 2020		**5.533.432.096,00**
18	Penambahan dan pengurangan nilai investasi perman ent selama tahun 2020 dan tahun 2021		179.463.413,20
	a. Laba Tahun 2021	1.455.663.934,00	
	b. Deviden tahun 2020 55%	(877.387.858,05)	
	c. Dana Sosial dan Pendidikan 5%	159.525.065,10)	
	d. Dana Pensiun dan Sokongan 10%	(159.525.065,10)	
	e. Tantiem Direksi dan Dewan Pengawas	(15.952.506,51)	
	F Bonus Karyawan	(63.810.026,04)	
	Saldo Perubahan Ekuitas 31 Desember 2021		**5.712.895.509,20**
19	**Penambahan nilai investasi permanent selama tahun 2021 dan tahun 2023**		976.716.099,80
	a. Laba Tahun 2023	2.141.247.247,00	
	b. Deviden tahun 2020 55%	(800.615.163,70)	
	c. Dana Sosial dan Pendidikan 5%	(145.566.393,40)	
	e. Dana Pensiun dan Sokongan 10%	(145.566.393,40)	
	e. Tantiem Direksi dan Dewan Pengawas	(14.556.639,34)	
	F Bonus Karyawan	(58.226.557,36)	
	Saldo Perubahan Ekuitas 31 Desember 2023		**6.689.611.609,00**
	Penambahan nilai investasi permanen selama th 2023 dan 2024		1.246.653.376,00
	a. Laba Tahun 2024	1.246.653.376,00	
	b. Deviden dari laba tahun 2023		
	c. Dana Sosial & Pendidikan		
	d. Dana Pensiun dan Sokongan		
	e. Tantiem Direksi dan Dewan Pengawas		
	f. Bonus Karyawan		
	Saldo Perubahan Ekuitas 31 Desember 2023		**7.936.264.985,00**
20	Penambahan nilai investasi permanen selama th 2022 dan 2023		1.439.343.966,00
	a. Laba Tahun 2023	1.439.343.966,00	
21	KOREKSI ATAS KELEBIHAN PENGAKUAN LABA PD ANEKA USAHA BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN AUDITED KAP		(213.515.997,00)
	Saldo Perubahan Ekuitas Tahun 2024 Audited		**9.162.092.954,00**

PT. Bank Jatim

Berdasarkan Surat Penyampaian Lembar Saham dari PT. Bank Jatim bahwa bukti kepemilikan saham Pemerintah Kota Madiun pada PT. Bank Jatim adalah Rp33.516.106.750,00 termasuk sebesar Rp3.125.106.750,00 merupakan cadangan yang dikonversi menjadi Saham sesuai Surat dari PT. Bank Jatim: 050/019/Dir/Djl-Dn Tanggal 25 Juli 2014. Rincian penyertaan modal pada PT. Bank Jatim Per 31 Desember 2024 sebesar Rp33.516.106.750,00 tersaji dalam dibawah ini.

Tabel 7.1.2.2.1.e
Per 31 Desember 2024
Investasi Permanen PT. Bank Jatim

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Setoran sampai dengan tanggal 1 September 2008	890.000.000,00
2	Setoran tanggal 20 April 2009	1.000.000.000,00
3	Setoran tanggal 22 Pebruari 2010	1.000.000,00
4	Setoran tanggal 21 Pebruari 2012	1.000.000.000,00
5	Setoran tanggal 27 Oktober 2012	7.500.000.000,00
6	Setoran tanggal 17 Pebruari 2014	20.000.000.000,00
7	Cadangan yang dikonversi saham	3.125.106.750,00
	Total Penyertaan Modal PT Bank Jatim 2024	**33.516.106.750,00**

7.1.3. ASET TETAP

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Aset Tetap	**2.286.782.219.367,56**	**2.381.738.610.915,86**

Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp2.286.782.219.367,56 dan Rp2.381.738.610.915,86. Nilai netto Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.286.782.219.367,56 berasal dari nilai bruto sebesar Rp4.062.769.078.220,98 dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp1.775.986.858.853,42.

Aset tetap terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan.

Perincian aset tetap milik Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 7.1.3

Perincian Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Aset Tetap	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1. Tanah	569.241.160.443,00	710.169.521.272,27
2. Peralatan dan mesin	809.633.596.575,10	776.839.667.064,50
3. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan mesin	*(683.796.065.798,82)*	*(638.444.793.528,54)*
4. Peralatan dan mesin Netto	125.837.530.776,28	138.394.873.535,96
5. Gedung dan bangunan	1.123.452.256.788,96	1.051.357.839.620,13
6. Akumulasi Penyusutan Gedung dan bangunan	*(272.020.303.132,84)*	*(214.838.706.903,30)*
7. Gedung dan bangunan Netto	851.431.953.656,12	836.519.132.716,83
8. Jalan, irigasi dan jaringan	1.545.977.211.602,34	1.464.805.790.487,14
9. Akumulasi Penyusutan Jalan, irigasi dan jaringan	*(818.870.836.862,60)*	*(780.193.133.666,00)*
10. Jalan, irigasi dan jaringan Netto	727.106.374.739,74	684.612.656.821,14
11. Aset tetap lainnya	6.788.766.303,19	6.698.636.203,19
12. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	*(1.299.653.059,16)*	*(1.179.386.093,92)*
13. Aset tetap lainnya Netto	5.489.113.244,03	5.519.250.109,27
14. Konstruksi dalam pengerjaan	7.676.086.508,39	6.523.176.460,39
Jumlah bruto (1+2+5+8+11+14)	**4.062.769.078.220,98**	**4.016.394.631.107,62**
Akumulasi penyusutan aset tetap (3+6+9+12)	***(1.775.986.858.853,42)***	***(1.634.656.020.191,76)***
Jumlah neto	**2.286.782.219.367,56**	**2.381.738.610.915,86**

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2024 dibandingkan per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp94.956.391.548,30 atau 3,99 %. Penurunan aset tetap karena pengurangan aset tetap berupa aset properti investasi tanah sebesar Rp140.928.360.829,27, atau 19,84%. Aset tetap peralatan dan mesin mengalami kenaikan sebesar Rp32.793.929.510,60 atau 4,22 %, Aset tetap gedung dan bangunan mengalami kenaikan sebesar Rp72.094.417.168,83 atau 6,86%, aset tetap jalan, irigasi dan jaringan mengalami kenaikan sebesar Rp81.171.421.115,20 atau 5,54 % dan aset tetap lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp90.130.100,00 atau 1,35% serta konstruksi dalam pengerjaan juga mengalami kenaikan sebesar Rp1.152.910.048,00 atau 17,67%.

Berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 90 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun dan Peraturan Walikota Nomor 18 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi Aset Tidak Berwujud di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, Pemerintah Kota Madiun menerapkan penyusutan atas aset tetap peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan berdasarkan umur ekonomis masing–masing asset tetap. Sedangkan aset tetap lainnya berupa alat musik yang disusutkan sedangkan lainnya seperti hewan, tanaman, taman dan buku perpustakaan tidak disusutkan.

Mutasi penambahan aset tetap tahun 2024 berasal dari beberapa hal yaitu :

- ☑ Realisasi belanja modal yang diperoleh dari APBD tahun anggaran 2024.
- ☑ Koreksi aset tetap karena belum tercatat, kurang catat, salah catat, atau kesalahan posting.
- ☑ Perolehan non APBD seperti perolehan aset tetap karena hibah/sumbangan, mutasi antar OPD, hibah dari pusat, hibah dari provinsi, dana BOS, dana blockgrand, komite sekolah, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi.

Mutasi pengurangan aset tetap selama tahun 2024 berasal dari beberapa hal yaitu:

- ☑ reklas realisasi belanja modal yang diperoleh dari APBD tahun anggaran 2024 ke beban lain-lain karena tidak memenuhi nilai kapitasilasi aset tetap yaitu nilai perolehan aset sebesar Rp500.000,00 untuk aset tetap tanah, sebesar Rp1.000.000,00 untuk aset tetap peralatan dan mesin, sebesar Rp10.000.000,00 untuk aset tetap gedung dan bangunan dan aset tetap jalan, jaringan dan irigasi dan sebesar Rp500.000,00 untuk aset tetap lainnya berupa alat musik.
- ☑ reklas aset tetap rusak berat atas peralatan dan mesin ke aset lain-lain karena sudah tidak dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintahan.
- ☑ Koreksi aset tetap karena belum tercatat, kurang catat, salah catat, kesalahan posting, penghapusan dan antar OPD.

Mutasi penambahan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin selama tahun 2024 berasal dari beberapa hal yaitu :

- ☑ Beban tahun berjalan atas aset tetap.
- ☑ Koreksi perubahan akumulasi penyusutan aset tetap atas kejadian tahun sebelumnya karena belum tercatat, kurang catat, salah catat, kesalahan posting, penghapusan dan antar OPD.

Mutasi pengurangan akumulasi penyusutan aset tetap selama tahun 2024 berasal dari beberapa hal :

☑ Beban tahun berjalan atas aset tetap.

☑ Koreksi perubahan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin atas kejadian tahun sebelumnya karena belum tercatat, kurang catat, salah catat, kesalahan posting, penghapusan dan antar OPD.

7.1.3.1. Tanah

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Tanah	**569.241.160.443,00**	**710.169.521.272,27**

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh badan/dinas/kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023. Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp569.241.160.443,00 terdiri dari :

Tabel 7.1.3.1.1

Rincian Tanah

Saldo Awal 1 Januari 2023	710.169.521.272,27
Penambahan	18.906.250.000,00
Pengurangan	159.834.610.829,27
Saldo Akhir 31 Desember 2024	569.241.160.443,00

Penambahan Aset Tetap Tanah sebesar Rp18.906.250.000,00 terdiri dari :

Tabel 7.1.3.1.2

Rincian Penambahan Tanah Tahun 2024

No.	Uraian	Jumlah
1	Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga	18.906.250.000,00
	Jumlah	**18.906.250.000,00**

Adapun penjelasan atas penambahan Aset Tetap Tanah berupa penambahan aset tetap tanah dari BOT yang telah berakhir masa BOT nya untuk Carefour sebesar Rp8.500.000.000,00 dan THR sebesar Rp10.406.250.000,00 dan dicatat menjadi aset tetap tanah pada BKAD selaku pengelola barang. Namun aset tetap tanah tersebut untuk kemudian dikurangkan untuk masuk ke aset properti investasi karena akan dioptimalkan pemanfaatannya.

Pengurangan Aset Tetap Tanah sebesar Rp159.834.610.829,27 terdiri dari :

Tabel 7.1.3.1.3

Rincian Pengurangan Tanah Tahun 2024

No.	Uraian	Jumlah
1	Properti Investasi	159.834.610.829,27
	Jumlah	**159.834.610.829,27**

Adapun penjelasan atas pengurangan Aset Tetap Tanah Tahun 2024 berupa pengurangan pencatatan Aset Tetap Tanah untuk disajikan dalam properti investasi karena akan dioptimalkan pemanfaatannya yang berada di BKAD sebesar Rp35.684.008.160,00, Kecamatan Kartoharjo sebesar Rp48.865.735.050,00, Kecamatan Manguharjo sebesar Rp46.271.591.969,27, Kecamatan Taman sebesar Rp15.737.275.650,00 dan Dinas Perdagangan sebesar Rp13.276.000.000,00.

Perincian mutasi tambah dan kurang aset tetap tanah dapat di lihat di **Lampiran 7.1.3.1.1**.

Aset tetap tanah milik Pemerintah Kota Madiun sebanyak 2.430 bidang, terdiri atas tanah sawah/bangunan/usaha sebanyak 916 bidang, tanah dibawah jalan sebanyak 1.473 bidang dan tanah irigasi sebanyak 41 bidang. Atas tanah milik Pemerintah Kota Madiun sebanyak 2.430 bidang yang sudah bersertifikat sebanyak 2.334 bidang dan yang belum bersertifikat sebanyak 96 bidang, dengan perincian berupa tanah sawah/bangunan/usaha yang sudah bersertifikat sebanyak 894 bidang dan yang belum bersertifikat sebanyak 22 Bidang, tanah dibawah jalan yang telah bersertifikat sebanyak 1.411 bidang dan yang belum bersertifikat sebanyak 62 bidang, sedangkan berupa tanah irigasi yang sudah bersertifikat sebanyak 29 bidang dan yang belum bersertifikat sebanyak 12 bidang. Tidak terdapat aset tetap tanah yang dalam sengketa hukum. Terdapat aset tetap tanah milik Pemerintah Kota Madiun yang saat ini dimanfaatkan oleh pihak lain dalam bentuk pinjam pakai tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 7.1.3.1.4

Pemanfaatan Aset Tetap Tanah oleh Pihak Lain dalam bentuk Pinjam Pakai

Perubahan di tahun 2024	Saldo 31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2024 (Rp)
Tanah	1	2	3	4
PMI Cabang Madiun	155.200.000,00	0,00	0,00	155.200.000,00
KUA Manguharjo	29.835.000,00	0,00	0,00	29.835.000,00
Polsekta Kartoharjo	2.812.000.000,00	0,00	0,00	2.812.000.000,00

Primkop Kartika Merak Jaya	57.040.000,00	0.00	0.00	57.040.000,00
Koramil Manguharjo	13.600.000,00	0.00	0.00	13.600.000,00
Kwarcab Kota Madiun	540.000.000,00	0.00	0.00	540.000.000,00
Baznas Kota Madiun	494.775.000,00	0.00	0.00	494.775.000,00
	4.102.450.000,00	**0,00**	**0,00**	**4.102.450.000,00**

Perincian pemanfaatan aset tetap tanah oleh pihak lain dalam bentuk pinjam pakai sebagaimana **Lampiran 7.1.3.1.2.**

7.1.3.2. Peralatan dan Mesin

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Peralatan dan Mesin	**809.633.596.575,10**	**776.839.667.064,50**

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo peralatan dan mesin yang dimiliki dan dikuasai oleh badan/dinas/kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023. Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp809.633.596.575,10 terdiri dari :

Tabel 7.1.3.2.1

Rincian Peralatan dan Mesin

Saldo Awal 1 Januari 2023	776.839.667.064,50
Penambahan	36.107.382.007,00
Pengurangan	3.313.452.496,40
Saldo Akhir 31 Desember 2024	809.633.596.575,10

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp36.107.382.007,00 terdiri dari :

Tabel 7.1.3.2.2

Rincian Penambahan Peralatan dan Mesin Tahun 2024

No.	Uraian	Jumlah
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024	24.597.646.021,00
2	Perolehan dari Hibah	1.854.194.670,00
3	Mutasi antar pengguna barang	1.888.431.666,00
4	Reklasifikasi antar aset tetap	317.970.000,00
5	Koreksi	7.449.139.650,00
	Jumlah	**36.107.382.007,00**

Adapun penjelasan atas penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2024 dari Belanja Modal Tahun 2024 sebesar Rp24.597.646.021,00.
2. Perolehan hibah sebesar Rp1.854.194.670,00 pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan PP dan KB, Dinas Sosial PP dan PA, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Komunikasi dan Informatika dan Kecamatan Manguharjo.
3. Mutasi aset Peralatan Mesin sebesar Rp1.888.431.666,00 pada 6 Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
4. Reklasifikasi antar aset tetap sebesar Rp317.970.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
   a) Reklasifikasi antar aset tetap dari belanja modal aset tetap lainnya pada Dinas Pendidikan sebesar Rp700.000,00.
   b) Reklasifikasi antar aset tetap dari belanja modal gedung dan bangunan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman sebesar Rp198.500.000,00.
   c) Reklasifikasi antar aset tetap dari belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rp118.770.000,00.
5. Koreksi berupa reklasifikasi salah catat yang berasal dari perolehan lainnya sebesar Rp7.449.139.650,00 dengan rincian sebagai berikut :
   a) Reklasifikasi dari belanja barang dan jasa pada Dinas Pendidikan sebesar Rp590.134.320,00
   b) Reklasifikasi dari belanja pemeliharaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp3.045.485.480,00.
   c) Reklasifikasi dari belanja barang dan jasa pada Dinas Sosial PP dan PA sebesar Rp33.070.000,00.
   d) Reklasifikasi dari belanja barang dan jasa pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah sebesar Rp100.000.000,00.
   e) Reklasifikasi dari belanja barang dan jasa pada Bagian Perekokesra Sekretariat Daerah sebesar Rp48.120.000,00.
   f) Reklasifikasi dari perolehan lainnya berupa hasil BOT THR dan carefour yang telah berakhir masa kontraknya pada BKAD sebesar Rp 3.152.484.000,00.
   g) Reklasifikasi dari belanja barang dan jasa pada Pendapatan Daerah sebesar Rp264.335.850,00.
   h) Reklasifikasi dari belanja barang dan jasa pada Bagian Perekokesra Sekretariat Daerah sebesar Rp215.510.000,00.

Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.313.452.496,40 terdiri dari :

Tabel 7.1.3.2.3

Rincian Pengurangan Peralatan dan Mesin Tahun 2024

No.	Uraian	Jumlah
1	Reklasifikasi ke Beban Lain-lain	1.421.622.330,40
2	Mutasi antar pengguna barang	1.888.431.666,00
3	Koreksi	3.398.500,00
	Jumlah	**3.313.452.496,40**

Adapun penjelasan atas pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Reklasifikasi realisasi belanja modal yang diperoleh dari APBD tahun anggaran 2024 ke beban lain-lain karena tidak memenuhi nilai kapitasilasi aset tetap sebesar Rp1.421.622.330,40 pada 19 Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
2. Mutasi aset Peralatan Mesin sebesar Rp1.888.431.666,00 pada pada 9 Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
3. Koreksi berupa reklasifikasi salah catat yang seharusnya tercatat sebagai Aset Tetap Tidak Berwujud sebesar Rp3.398.500,00 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Perincian mutasi tambah dan kurang aset tetap peralatan dan mesin dapat di lihat di **Lampiran 7.1.3.2.1**.

Akumulasi penyusutan aset tetap peralatan mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp683.796.065.798,82 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp638.444.793.528,54. Perincian akumulasi penyusutan aset tetap peralatan dan mesin dapat di lihat di **Lampiran 7.1.3.2.2.**

Terdapat aset tetap peralatan dan mesin yang saat ini dimanfaatkan oleh pihak lain dalam bentuk pinjam pakai tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 7.1.3.2.3

Pemanfaatan Aset Tetap Peralatan dan Mesin oleh Pihak Lain dalam bentuk Pinjam Pakai

Perubahan di tahun 2024	Saldo 31 Desember 2023	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2024
Kendaraan Roda 4	1	2	3	4
Denpom V/1	232.725.000,00	0,00	0,00	232.725.000,00
Kodim 0803/ Madiun	232.725.000,00	0,00	0,00	232.725.000,00
Polres Madiun Kota	208.850.000,00	0,00	0,00	208.850.000,00
PD. Aneka Usaha	208.850.000,00	0,00	0,00	208.850.000,00
Yonir Para Raider Bajra Yudha	162.840.000,00	0,00	0,00	162.840.000,00

Dewan Masjid Indonesia	232.725.000,00	0,00	0,00	232.725.000,00
Baznas Kota Madiun	265.000.000,00	0,00	0,00	265.000.000,00
Kwarcab Kota Madiun	208.490.000,00	0,00	0,00	208.490.000,00
PGRI Kota Madiun	162.840.000,00	0,00	0,00	162.840.000,00
PMI Kota Madiun	175.490.000,00	0,00	0,00	175.490.000,00
MUI Kota Madiun	175.490.000,00	0,00	0,00	175.490.000,00
IPHI Kota Madiun	175.490.000,00	0,00	0,00	175.490.000,00
NU Kota Madiun	175.490.000,00	0,00	0,00	175.490.000,00
Muhammadiyah Kota Madiun	175.490.000,00	0,00	0,00	175.490.000,00
Kendaraan Roda 2				
Kwarcab Kota Madiun	41.500.000,00	0,00	0,00	41.500.000,00
	2.833.995.000,00	**0,00**	**0,00**	**2.833.995.000,00**

Perincian pemanfaataan aset tetap peralatan dan mesin oleh pihak lain dalam bentuk pinjam pakai sebagaimana **Lampiran 7.1.3.2.3.**

7.1.3.3. Gedung dan Bangunan

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Gedung dan Bangunan	**1.123.452.256.788,96**	**1.051.357.839.620,13**

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo gedung dan bangunan yang dimiliki dan dikuasai oleh badan/dinas/kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023. Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.014.790.740.066,49 terdiri dari :

Tabel 7.1.3.3.1

Rincian Gedung dan Bangunan

Saldo Awal 1 Januari 2023	1.051.357.839.620,13
Penambahan	97.126.781.770,53
Pengurangan	25.032.364.601,70
Saldo Akhir 31 Desember 2024	1.123.452.256.788,96

Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp97.126.781.770,53 terdiri dari :

Tabel 7.1.3.3.2

Rincian Penambahan Gedung dan Bangunan Tahun 2024

No.	Uraian	Jumlah
1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024	41.774.680.516,62
2	Perolehan dari Hibah	21.441.977.000,00
3	Reklasifikasi antar aset tetap	9.232.521.103,91
4	Koreksi	24.677.603.150,00
	Jumlah	**97.126.781.770,53**

Adapun penjelasan atas penambahan Gedung dan Bangunan Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2024 dari Belanja Modal Tahun 2024 sebesar Rp41.774.680.516,62.
2. Perolehan hibah sebesar Rp21.441.977.000,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
3. Reklasifikasi antar aset tetap sebesar Rp9.232.521.103,91 dengan rincian sebagai berikut :
   a) Reklasifikasi antar aset tetap dari KDP tahun sebelumnya pada Dinas Pendidikan sebesar Rp538.848.412,00.
   b) Reklasifikasi antar aset tetap dari KDP tahun sebelumnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp98.980.000,00.
   c) Reklasifikasi antar aset tetap dari belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp206.460.000,00.
   d) Reklasifikasi antar aset tetap dari belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pada Kecamatan Kartoharjo sebesar Rp4.156.805.374,86.
   e) Reklasifikasi antar aset tetap dari belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pada Kecamatan Taman sebesar Rp4.231.427.317,05.
4. Koreksi berupa reklasifikasi salah catat yang berasal dari perolehan lainnya sebesar Rp24.677.603.150,00 dengan rincian sebagai berikut :
   a) Koreksi berupa reklasifikasi kurang catat yang berasal dari perolehan lainnya berupa hasil BOT THR dan carefour yang telah berakhir masa kontraknya pada BKAD sebesar Rp24.602.625.750,00.
   b) Koreksi berupa pengakuan P1 aset tetap gedung dan bangunan atas retensi belanja perencanaan dan pengawasan tahun 2024 sebesar Rp74.977.400,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp25.032.364.601,70 terdiri dari :

Tabel 7.1.3.3.3

Rincian Pengurangan Bangunan dan Gedung Tahun 2024

No.	Uraian	Jumlah
1	Reklasifikasi ke Beban Lain-lain	12.471.001.978,70
2	Reklasifikasi antar aset tetap	1.817.860.525,00
3	Koreksi	10.743.502.098,00
	Jumlah	**25.032.364.601,70**

Adapun penjelasan atas pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Reklasifikasi realisasi belanja modal yang diperoleh dari APBD tahun anggaran 2024 ke beban lain-lain karena tidak memenuhi nilai kapitasilasi aset tetap sebesar Rp12.471.001.978,70 pada 6 Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
2. Reklasifikasi antar aset tetap sebesar Rp1.817.860.525,00 dengan rincian sebagai berikut :
   a) Reklasifikasi antar aset tetap ke KDP pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp200.066.540,00.
   b) Reklasifikasi antar aset tetap ke KDP pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp58.780.800,00.
   c) Reklasifikasi antar aset tetap ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp198.500.000,00.
   d) Reklasifikasi antar aset tetap ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.360.513.185,00.
3. Koreksi sebesar Rp10.743.502.098,00 dengan rincian sebagai berikut :
   a) Koreksi atas pengakuan aset tetap gedung dan bangunan yang berasal dari belanja modal gedung dan bangunan tahun 2024 yang seharusnya untuk pembayaran utang belanja sebesar Rp112.479.950,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
   b) Koreksi atas pengurangan pencatatan Aset Tetap Gedung dan Bangunan untuk disajikan dalam properti investasi karena akan dioptimalkan pemanfaatannya sebesar Rp10.631.022.148,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan BKAD.

Perincian mutasi tambah dan kurang aset tetap gedung dan bangunan dapat di lihat di **Lampiran 7.1.3.3.1**.

Akumulasi penyusutan aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp272.020.303.132,84 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp214.838.706.903,30. Perincian akumulasi penyusutan aset tetap gedung dan bangunan dapat di lihat di **Lampiran 7.1.3.3.2**.

7.1.3.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	**1.545.977.211.602,34**	**1.464.805.790.487,14**

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo jalan, irigasi dan jaringan yang dimiliki dan dikuasai oleh badan/dinas/kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023. Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.545.977.211.602,34 terdiri dari :

Tabel 7.1.3.4.1

Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Awal 1 Januari 2023	1.464.805.790.487,14
Penambahan	91.796.532.653,11
Pengurangan	10.625.111.537,91
Saldo Akhir 31 Desember 2024	1.545.977.211.602,34

Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp91.796.532.653,11 terdiri dari :

Tabel 7.1.3.4.2

Rincian Penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024

No.	Uraian	Jumlah
1	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024	90.028.130.537,11
2	Reklasifikasi antar aset tetap	1.360.513.185,00
3	Koreksi	407.888.931,00
	Jumlah	**91.796.532.653,11**

Adapun penjelasan atas penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Penambahan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024 dari Belanja Modal Tahun 2024 sebesar Rp90.028.130.537,11.
2. Reklasifikasi antar aset tetap dari aset tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.360.513.185,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
3. Koreksi berupa pengakuan P1 aset tetap gedung dan bangunan atas retensi belanja perencanaan dan pengawasan tahun 2024 sebesar Rp407.888.931,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp10.625.111.537,91 terdiri dari :

Tabel 7.1.3.4.3

Rincian Pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024

No.	Uraian	Jumlah
1	Reklasifikasi ke Beban Lain-lain	141.189.846,00
2	Reklasifikasi antar aset tetap	10.245.353.811,91
3	Koreksi	238.567.880,00
	Jumlah	**10.625.111.537,91**

Adapun penjelasan atas pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Reklasifikasi realisasi belanja modal yang diperoleh dari APBD tahun anggaran 2024 ke beban lain-lain karena tidak memenuhi nilai kapitasilasi aset tetap sebesar Rp141.189.846,00 pada 3 Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
2. Reklasifikasi antar aset tetap sebesar Rp10.245.353.811,91 dengan rincian sebagai berikut :
   a) Reklasifikasi antar aset tetap ke KDP pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.531.891.120,00.
   b) Reklasifikasi antar aset tetap ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp118.770.000,00.
   c) Reklasifikasi antar aset tetap ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp206.460.000,00.
   d) Reklasifikasi antar aset tetap ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Kecamatan Kartoharjo sebesar Rp4.156.805.374,86.
   e) Reklasifikasi antar aset tetap ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Kecamatan Taman sebesar Rp4.231.427.317,05.
3. Koreksi sebesar Rp238.567.880,00 berupa koreksi atas pengakuan aset tetap gedung dan bangunan yang berasal dari belanja modal gedung dan bangunan tahun 2024 yang seharusnya untuk pembayaran utang belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Perincian mutasi tambah dan kurang aset tetap jalan, jaringan dan irigasi dapat di lihat di **Lampiran 7.1.3.4.1.**

Akumulasi penyusutan aset tetap jalan, jaringan dan irigasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp818.870.836.862,60 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp780.193.133.666,00. Perincian akumulasi penyusutan aset tetap jalan, jaringan dan irigasi dapat di lihat di **Lampiran 7.1.3.4.2.**

7.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Aset Tetap Lainnya	**6.788.766.303,19**	**6.698.636.203,19**

Jumlah tersebut merupakan jumlah aset tetap lainnya yang dimiliki dan dikuasai oleh badan/dinas/kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp6.788.766.303,19 terdiri dari :

Tabel 7.1.3.5.1

Rincian Aset Tetap Lainnya

Saldo Awal 1 Januari 2023	6.698.636.203,19
Penambahan	2.053.653.050,00
Pengurangan	1.963.522.950,00
Saldo Akhir 31 Desember 2024	6.788.766.303,19

Penambahan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp2.053.653.050,00 terdiri dari :

Tabel 7.1.3.5.2

Rincian Penambahan Aset Tetap Lainnya Tahun 2024

No.	Uraian	Jumlah
1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2024	2.015.705.050,00
2	Perolehan dari Hibah	37.948.000,00
	Jumlah	**2.053.653.050,00**

Adapun penjelasan atas penambahan Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Penambahan Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 dari Belanja Modal Tahun 2024 sebesar Rp2.015.705.050,00.
2. Perolehan hibah sebesar Rp37.948.000,00 pada Dinas Pendidikan.

Pengurangan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.963.522.950,00 terdiri dari :

Tabel 7.1.3.5.3

Rincian Pengurangan Aset Tetap Lainnya Tahun 2024

No.	Uraian	Jumlah
1	Reklasifikasi ke Beban Lain-lain	1.962.822.950,00
2	Reklasifikasi antar aset tetap	700.000,00
	Jumlah	**1.963.522.950,00**

Adapun penjelasan atas pengurangan Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Reklasifikasi realisasi belanja modal yang diperoleh dari APBD tahun anggaran 2024 ke beban lain-lain karena tidak memenuhi nilai kapitasilasi aset tetap sebesar Rp1.962.822.950,00 pada Dinas Pendidikan.
2. Reklasifikasi antar aset tetap ke Aset Peralatan dan Mesin pada Dinas Pendidikan sebesar Rp700.000,00.

Perincian mutasi tambah dan kurang aset tetap lainnya dapat di lihat di **Lampiran 7.1.3.5.1.**

Akumulasi penyusutan aset tetap lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.299.653.059,16 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.179.386.093,92. Perincian akumulasi penyusutan aset tetap lainnya dapat di lihat di **Lampiran 7.1.3.5.2.**

7.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	**7.676.086.508,39**	**6.523.176.460,39**

Jumlah tersebut merupakan jumlah konstruksi dalam pengerjaan bangunan yang masih dalam tahap pengerjaan oleh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023. Saldo Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.676.086.508,39 terdiri dari :

Tabel 7.1.3.6.1

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Awal 1 Januari 2023	6.523.176.460,39
Penambahan	1.790.738.460,00
Pengurangan	637.828.412,00
Saldo Akhir 31 Desember 2024	7.676.086.508,39

Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp1.790.738.460,00 terdiri dari :

Tabel 7.1.3.6.2

Rincian Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024

No.	Uraian	Jumlah
1	Reklasifikasi antar aset tetap	1.790.738.460,00
	Jumlah	**1.790.738.460,00**

Adapun penjelasan atas penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Reklasifikasi antar aset tetap sebesar Rp1.790.738.460,00 dengan rincian sebagai berikut :
   a) Reklasifikasi antar aset tetap dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp200.066.540,00.
   b) Reklasifikasi antar aset tetap dari Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.531.891.120,00.
   c) Reklasifikasi antar aset tetap dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp58.780.800,00.

Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp637.828.412,00 terdiri dari :

Tabel 7.1.3.5.3

Rincian Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024

No.	Uraian	Jumlah
1	Reklasifikasi antar aset tetap	637.828.412,00
	Jumlah	637.828.412,00

Adapun penjelasan atas pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Reklasifikasi antar aset tetap sebesar Rp637.828.412,00 dengan rincian sebagai berikut :
   a) Reklasifikasi antar aset tetap ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp538.848.412,00.
   b) Reklasifikasi antar aset tetap ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp98.980.000,00.

Perincian mutasi tambah dan kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat di lihat di **Lampiran 7.1.3.6.1**.

7.1.4. PROPERTI INVESTASI

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Properti Investasi	**167.375.514.653,27**	**0,00**

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo properti investasi milik Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023. Nilai netto Properti Investasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp167.375.514.653,27 berasal dari nilai bruto sebesar Rp170.465.632.977,27 dikurangi Akumulasi Penyusutan Properti Investasi sebesar Rp3.090.118.324,00.

Perincian properti investasi yang dimiliki dan dikuasai oleh badan/dinas/kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 (PSAP 17) Properti Investasi, Pemerintah Daerah harus menerapkan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan properti investasi dalam Laporan Keuangan untuk tujuan umum bagi entitas Pemerintah Daerah. Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif dan tidak untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kota Madiun belum menyajikan potensi properti investasi berupa tanah dan/atau tanah dan bangunan yang tidak digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan menghasilkan pendapatan atas sewa karena belum diatur dalam kebijakan akuntansi.

Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp170.465.632.977,27 terdiri dari :

Tabel 7.1.4.1

Rincian Properti Investasi

Saldo Awal 1 Januari 2023	0,00
Penambahan	170.465.632.977,27
Pengurangan	0,00
Saldo Akhir 31 Desember 2024	170.465.632.977,27

Penambahan Properti Investasi sebesar Rp170.465.632.977,27 terdiri dari :

Tabel 7.1.4.2

Rincian Penambahan Properti InvestasiTahun 2024

No.	Uraian	Jumlah
1	Reklasifikasi dari Aset Tetap Tanah	159.834.610.829,27
2	Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan	10.631.022.148,00
	Jumlah	**170.465.632.977,27**

Adapun penjelasan atas penambahan Properti Investasi Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Reklasifikasi dari Aset Tetap Tanah sebesar Rp159.834.610.829,27 dengan rincian sebagai berikut :
   a) Reklasifikasi dari Aset Tetap Tanah pada BKAD sebesar Rp35.684.008.160,00.
   b) Reklasifikasi dari Aset Tetap Tanah pada Kecamatan Kartoharjo sebesar Rp48.865.735.050,00.
   c) Reklasifikasi dari Aset Tetap Tanah pada Kecamatan Manguharjo sebesar Rp46.271.591.969,27.
   d) Reklasifikasi dari Aset Tetap Tanah pada Kecamatan Taman sebesar Rp15.737.275.650,00.
   e) Reklasifikasi dari Aset Tetap Tanah pada Dinas Perdagangan sebesar Rp13.276.000.000,00.
2. Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp10.631.022.148,00 dengan rincian sebagai berikut :
   a) Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp8.221.181.448,00.
   b) Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada BKAD sebesar Rp2.409.840.700,00.

Perincian Properti Investasi dapat di lihat di **Lampiran 7.1.4.**

Akumulasi penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.090.118.324,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00. Perincian akumulasi properti investasi dapat di lihat di **Lampiran 7.1.4.1.1.**

7.1.5. ASET LAINNYA

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Aset Lainnya	**107.421.406.929,21**	**131.985.533.181,33**

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo aset lainnya milik Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

Perincian aset lainnya yang dimiliki dan dikuasai oleh badan/dinas/kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

Tabel 7.1.4

Perincian Aset Lainnya

Aset Lainnya	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1. Tuntutan Ganti Rugi	-	-
2. Kemitraan dengan pihak ketiga	100.626.650.004,00	119.532.900.004,00
3. Aset tidak berwujud	23.243.018.097,00	23.172.037.247,00
4. *Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud*	*(23.185.446.020,12)*	(22.699.916.915,00)
5. Aset tidak berwujud Netto	57.572.076,88	472.120.332,00
6. Aset lain-lain	40.374.839.389,37	58.843.255.389,37
7. *Akumulasi penyusutan aset lain-lain*	*(33.637.654.541,04)*	(33.637.654.541,04)
8. Aset lain-lain Netto	6.737.184.848,33	25.205.600.848,33
Jumlah bruto (1+2+3+6)	164.244.507.490,37	201.548.192.640,37
Akumulasi amortisasi + penyusutan (4+7)	*(56.823.100.561,16)*	(56.337.571.456,04)
Jumlah neto	107.421.406.929,21	145.210.621.184,33

7.1.5.1. Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	**0,00**	**0,00**

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo tuntutan ganti rugi pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 kerugian daerah yang telah diterbitkan Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) dan Surat Kesanggupan Membayar dari Pihak Ketiga di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

Tabel 7.1.4.1

Perincian Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Perubahan di tahun 2020 (Rp)	Saldo 31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2024 (Rp)
Tuntutan Ganti Rugi	**1**	**2**	**3**	**4**
Pihak ke III	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**

7.1.5.2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	**100.626.650.004,00**	**119.532.900.004,00**

Jumlah kemitraan dengan pihak ketiga milik Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 yang terdiri dari Bangun Guna Serah (BOT) dan Kerja Sama Pemanfaatan (KSP). Perincian mutasi kemitraan dengan pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2024 tersaji dalam tabel dibawah ini.

Tabel 7.1.5.2

Perincian Mutasi Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Perubahan di tahun 2024	Saldo 31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2024 (Rp)
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	1	2	3	4
Bangun Guna Serah (BOT)	31.979.755.000,00	0,00	18.906.250.000,00	13.073.505.000,00
Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)	87.553.145.004,00	0,00	0,00	87.553.145.004,00
	119.532.900.004,00	**0,00**	**18.906.250.000,00**	**100.626.650.004,00**

7.1.5.2.1.Bangun Guna Serah (BOT)

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Bangun Guna Serah (BOT)	**13.073.505.000,00**	**31.979.755.000,00**

Jumlah bangun guna serah merupakan jumlah aset yang tidak termasuk aset lancar, investasi dan aset tetap Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 yang dibangun melalui kemitraan dengan pihak ketiga.

Tabel 7.1.5.2.1

Perincian Mutasi Bangun Guna Serah (BOT)

Perubahan di tahun 2024	Saldo 31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2024 (Rp)
Bangun Guna Serah (BOT)	1	2	3	4

Carrefour	8.500.000.000,00	0,00	8.500.000.000,00	0,00
Taman Hiburan Rakyat /THR	10.406.250.000,00	0,00	10.406.250.000,00	0,00
Kawasan Suncity	13.073.505.000,00	0,00	0,00	13.073.505.000,00
	31.979.755.000,00	**0,00**	**18.906.250.000,00**	**13.073.505.000,00**

Perincian penggunaan bangun guna serah (BOT) sebagai berikut :

No.	Uraian	Jangka Waktu
1	PT. INDRACO (Kawasan Hiburan/Wisata. Perdagangan dan Hotel)	30 tahun atas penyerahan tanah milik Pemerintah Kota Madiun di Jl.Pelita Tama sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Madiun dengan PT INDRACO Nomor : 415.4/14/401.011/2010 Nomor : 02/SPK-IND/X/2010

7.1.5.2.2.Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)	**87.553.145.004,00**	**87.553.145.004,00**

Jumlah kerja sama pemanfaatan merupakan jumlah aset yang tidak termasuk aset lancar, investasi dan aset tetap Pemerintah Kota Madiun atas tanah dan bangunan Plaza Lawu Madiun yang terletak di Jalan Pahlawan Madiun pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 yang dibangun melalui kemitraan dengan pihak ketiga.

Perincian mutasi Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) pada tanggal 31 Desember 2024 tersaji dalam tabel dibawah ini.

Tabel 7.1.5.2.2

Perincian Mutasi Kerjasama Pemanfaatan (KSP)

Perubahan di tahun 2020	Saldo 31 Desember 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2024 (Rp)
Kerjasama Pemanfaatan(KSP)	1	2	3	4
Plaza Lawu Madiun	87.553.145.004,00	0,00	0,00	87.553.145.004,00
	87.553.145.004,00	**0,00**	**0,00**	**87.553.145.004,00**

Perincian Kerja Sama Pemanfaatan adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jangka Waktu
1.	PT. SRI TANAYA MEGATAMA (Kerjasama Pemanfaatan Plaza Lawu Madiun)	Jangka waktu 30 tahun atas penyerahan tanah dan bangunan beserta utilitas penunjang gedung Plaza Lawu Madiun milik Pemerintah Kota Madiun di Jl. Pahlawan No.47 Madiun sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Madiun dengan PT. SRI TANAYA MEGATAMA Nomor : 030/4/401.202/2017 Nomor : 003/STM-LP/HO/XII/2017 Berdasarkan Perjanjian Kerjasama tersebut, Pemerintah Kota Madiun setiap tahun mendapatkan kontribusi tetap sebesar Rp1.250.000.000,00 terhitung mulai tahun 2019 dan setiap 5 tahun sekali mengalami kenaikan sebesar 5% dari nilai kontribusi tetap, dan kontribusi profit sharing sebesar 7,5%. Selainini, PT. SRI TANAYA MEGATAMA menginvestasikan dananya sebesar Rp31.121.145.004,00 untuk melakukan renovasi Plaza Lawu Madiun.

7.1.5.3.Aset Tidak Berwujud

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Aset Tidak Berwujud	**23.243.018.097,00**	**23.172.037.247,00**

Jumlah tersebut merupakan jumlah aset tidak berwujud berupa pengadaan software yang dipergunakan oleh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023. Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp23.243.018.097,00 terdiri dari :

Tabel 7.1.5.3.1

Rincian Aset Tidak Berwujud

Saldo Awal 1 Januari 2023	23.172.037.247,00
Penambahan	753.743.850,00
Pengurangan	682.763.000,00
Saldo Akhir 31 Desember 2024	23.243.018.097,00

Penambahan Aset Tidak Berwujud sebesar Rp753.743.850,00 terdiri dari :

Tabel 7.1.5.3.2

Rincian Penambahan Aset Tidak Berwujud Tahun 2024

No.	Uraian	Jumlah
1	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Tahun 2024	750.345.350,00
2	Koreksi	3.398.500,00
	Jumlah	**753.743.850,00**

Adapun penjelasan atas penambahan Aset Tidak Berwujud Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Penambahan Aset Tidak Berwujud Tahun 2024 dari Belanja Modal Tahun 2024 sebesar Rp750.345.350,00.
2. Koreksi berupa reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp3.398.500,00.

Pengurangan Aset Tak Berwujud sebesar Rp682.763.000,00 terdiri dari :

Tabel 7.1.3.5.3

Rincian Pengurangan Aset Tidak Berwujud Tahun 2024

No.	Uraian	Jumlah
1	Koreksi	682.763.000,00
	Jumlah	682.763.000,00

Adapun penjelasan atas pengurangan Aset Tidak Berwujud Tahun 2024 sebesar Rp682.763.000,00 karena kesalahan penganggaran Belanja Aset Lainnya berupa ATB yang tidak memenuhi definisi sebagai ATB sesuai SAP berupa software dan kajian yang realisasinya adalah pendataan atas belanja ATB di Dinas Perkim sebesar Rp370.563.000,00 dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp312.200.000,00.

Perincian mutasi tambah dan kurang aset tidak berwujud dapat di lihat di **Lampiran 7.1.4.3.1**.

Amortisasi aset tidak berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp23.185.446.020,12 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp22.699.916.915,00. Perincian amortisasi aset tidak berwujud dapat di lihat di **Lampiran 7.1.4.3.2**.

7.1.5.4.Aset Lain-Lain

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Aset Lain-Lain	**40.374.839.389,37**	**58.843.255.389,37**

Jumlah tersebut merupakan jumlah aset lain-lain berupa reklasifikasi dari piutang lain-lain, aset rusak berat belum dihapuskan milik OPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun dan aset yang akan diserahkan ke pihak lain Per 31 Desember 2024.

Mutasi penambahan aset lain-lain selama tahun 2024 berasal dari beberapa hal yaitu :

- ☑ Reklas dari aset tetap peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya yang rusak berat sehingga tidak dipergunakan untuk kegiatan operasional pemerintahan dan aset tetap karena akan diserahkan ke pihak lain.
- ☑ Koreksi aset tetap rusak berat seperti koreksi karena belum tercatat, kurang catat, salah catat, atau kesalahan posting.
- ☑ Perolehan non APBD seperti perolehan yang berasal dari mutasi antar OPD, hibah dari pusat, hibah dari provinsi, dana BOS, dana blockgrand, komite sekolah, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi tetapi tidak dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintahan karena rusak berat/tidak dimanfaatkan atau berlebih.

Mutasi pengurangan aset lain-lain selama tahun 2024 berasal dari beberapa hal yaitu:

- ☑ Penghapusan aset rusak berat dan aset yang telah diserahkan ke pihak ketiga.
- ☑ Koreksi aset tetap rusak berat ke aset tetap karena masih dipergunakan untuk kegiatan operasional pemerintahan.
- ☑ Koreksi aset tetap rusak berat seperti koreksi karena belum tercatat, kurang catat, salah catat, atau kesalahan posting.

Aset lain-lain senilai Rp40.374.839.389,37 yang tersaji merupakan aset tetap rusak berat dan aset yang akan diserahkan ke pihak lain. Penyajian atas aset lain-lain antara aset tetap rusak berat dan aset yang akan diserahkan ke pihak lain tercatat dalam satu akun karena aplikasi belum bisa mengakomodir dan memisahkan kedua aset tersebut. Adapun perincian sebagaimana berikut :

- ✓ Aset tetap rusak berat senilai Rp2.748.292.011,04 berada di OPD/unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Madiun
- ✓ Aset yang akan diserahkan ke pihak lain senilai Rp31.526.447.447,33 berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Ruang.
- ✓ Aset berupa bangunan gedung yang direncanakan untuk dihapuskan karena dilakukan rehab total senilai Rp6.100.099.931,00, berada di Dinas Pendidikan, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Tabel 7.1.5.4

Perincian Aset Lain-Lain pada Dinas Pekerjaan Umum yang Akan Diserahkan

Nama Barang	Konstruksi	Letak / Lokasi Alamat	Tahun Perolehan	Luas (m2)	Nilai Perolehan (Rp)	Instansi Penerima
1	2	3	4	5	6	7
Jalan Kabupaten Kelas III	Hotmix	Jl. Urip Sumoharjo	2014	27.200	775.305.395,00	Kementerian PUPR
Jalan Kabupaten Kelas III	Hotmix	Jl. Ahmad Yani	2014	12.800	584.120.074,00	Kementerian PUPR
Jalan Kabupaten Kelas III	Hotmix	Jl. Yos Sudarso	2014	37.440	1.222.407.801,00	Kementerian PUPR
Jalan Kabupaten Kelas III	Hotmix	Jl. Basuki Rachmad	2014	17.700	620.375.256,00	Kementerian PUPR
Jalan Kabupaten Kelas III	Hotmix	Jl. S. Parman	2014	6.400	513.308.579,00	Kementerian PUPR
Jalan Kabupaten Kelas III	Hotmix	Jl. Thamrin	2014	9.600	548.152.730,00	Kementerian PUPR
Jalan Kabupaten Kelas III	Hotmix	Jl. Letjend. Haryono	2014	12.400	763.325.250,00	Kementerian PUPR
Jalan Kabupaten Kelas III	Hotmix	Jl. Letjend. Panjaitan	2014	17.300	1.607.513.490,00	Kementerian PUPR
Jalan Kabupaten Kelas III	Hotmix	Jl. Trunojoyo	2014	15.360	1.496.230.227,00	Kementerian PUPR
Jalan Kabupaten Kelas III	Hotmix	Jl. Sukarno Hatta	2014	22.400	1.941.751.956,00	Kementerian PUPR
Jalan Kabupaten Kelas III	Hotmix	Jl. Mayjend. Sungkono	2014	16.100	958.716.483,00	Kementerian PUPR
Jalan Kabupaten Lokal	Hotmix	-	2014	3.744	59.904.000,00	Kementerian PUPR
Jalan Khusus Lain-lain	-	Pembangunan dan Penataan Arena Road Race Bantaran Kali	2016	-	8.056.148.500,00	Balai Wilayah Sungai V Bengawan Solo
Jalan Khusus Lain-lain	-	pengaspalan halaman polresta madiun	2016	-	202.691.596,00	Polres Madiun Kota
Jalan Khusus Lain-lain	-	Pengaspalan halaman kantor dan rumah dinas korem	2016	-	407.951.377,00	Kodim
Jalan Kabupaten Kelas III	Hotmix	Jl. Urip Sumoharjo	2020	-	205.316.000,00	Kementerian PUPR
Jalan Kabupaten Kelas III	Hotmix	Jl. Yos Sudarso	2020	-	207.024.000,00	Kementerian PUPR
Jalan Kabupaten Kelas III	Hotmix	Jl. Trunojoyo	2020	-	207.300.000,00	Kementerian PUPR
Jalan Khusus Lain-lain	-	Pembangunan dan Penataan Arena Road Race Bantaran Kali Mdn	2020	-	882.298.600,00	Balai Wilayah Sungai V Bengawan Solo
Jalan Kabupaten Kelas III	-	Penataan Trotoar Pintu Masuk Kota Madiun-Jiwan	2020	-	209.539.000,00	-
Jalan Kabupaten Kelas III	-	Peningkatan Bangunan Pelengkap Jalan A.Yani	2020	-	202.654.000,00	Kementerian PUPR
Jalan Kabupaten Kelas III	-	Peningkatan Bangunan Pelengkap Jalan Depan INKA	2020	-	206.280.000,00	Kementerian PUPR

Jalan Kabupaten Kelas III	-	Pembangunan Bangunan Pelengkap Jl. Yos Sudarso	2020	-	204.879.000,00	Kementerian PUPR
Jalan Kabupaten Kelas III	-	Pemeliharaan Berkala Jalan Paket I - Jalan Basuki Rahmad	2020	-	1.258.101.000,00	Kementerian PUPR
Jalan Kabupaten Kelas III	-	Peningkatan Bangunan Pelengkap Jalan S.Parman	2020	-	213.318.000,00	Kementerian PUPR
Jalan Kabupaten Kelas III	-	Peningkatan Bangunan Pelengkap Jl. DI Panjaitan	2020	-	208.716.000,00	Kementerian PUPR
Jalan Khusus Lain-lain	-	Penataan Kawasan Road Race Bantaran Kali Madiun	2020	-	195.655.000,00	Balai Wilayah Sungai V Bengawan Solo
Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	Gedung Kodim 0803	2023	-	459.966.333,33	Kodim
Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	Gedung Kantor Kejaksaan Negeri	2023	-	235.992.000,00	Kejaksaan Negeri
Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	Gedung Kejaksaan Negeri	2023	-	925.069.400,00	Kejaksaan Negeri
Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	Gedung Ruang SKPT Polres Madiun Kota	2023	-	224.335.000,00	Polres Madiun Kota
Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	Pos Polisi Manguharjo	2023	-	227.158.900,00	Polres Madiun Kota
Jalan Kabupaten Arteri	-	Jl. Yos Sudarso	2023	-	39.600.000,00	Kementerian PUPR
Jalan Kabupaten Arteri	-	Jl. Basuki Rahmat	2023	-	49.550.000,00	Kementerian PUPR
Bangunan Gedung Kantor Permanen	Beton	Gedung Kantor Kejaksaan Negeri	2024	58.58	79.200.000,00	Dinas PUPR
Bangunan Gedung Kantor Permanen	Beton	Gedung Kantor Kejaksaan Negeri	2024	58.58	1.231.122.100,00	Dinas PUPR
Bangunan Gedung Kantor Permanen	Beton	Gedung Kantor Kejaksaan Negeri	2024	58.58	3.777.379.400,00	Dinas PUPR
Bangunan Gedung Kantor Permanen	Beton	Gedung Kodim 0803	2024	-	318.091.000,00	Dinas PUPR
					31.526.447.447,33	

Terhadap aset yang akan diserahkan ke Kementerian PUPR telah dilakukan koordinasi oleh DPU&TR Pemerintah Kota Madiun. Tahapan sebelum pelaksanaan fisik mulai dari ijin dan asistensi perencanaan telah dilakukan dengan Balai Besar Jalan Nasional Wilayah V dan telah mendapatkan persetujuan. Setelah fisik konstruksi selesai dikerjakan dan akan diserahkan, Pihak Kementerian PUPR direncanakan akan meninjau lapangan dan sampai saat ini proses tersebut belum dilaksanakan sehingga sampai saat ini aset tersebut masih tersaji menjadi aset lain-lain.

Tabel 7.1.5.5

Perincian Aset Lain-Lain pada yang akan dihapuskan

Nama Barang	Konstruksi	Letak / Lokasi Alamat	Tahun Perolehan	Luas (m2)	Nilai Perolehan (Rp)	Instansi Penerima
1	2	3	4	5	6	7
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Beton	Jl .PG Kanigoro No.11, Madiun	1993	126	1.061.880.063,00	Dinas Pendidikan
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Beton	Jl .PG Kanigoro No.11, Madiun	1996	94	305.336.000,00	Dinas Pendidikan
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Beton	Jl. Abdul Rahman Saleh No. 3	2002	544	1.983.886.110,00	Dinas Pendidikan
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Beton	Jl .PG Kanigoro No.11, Madiun	1996	243	331.000.000,00	Dinas Pendidikan
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Beton	Jl .PG Kanigoro No.11, Madiun	1993	144	365.400.000,00	Dinas Pendidikan
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Beton	Jl. Mliwis No. 26	2004	143	238.273.500,00	Dinas Pendidikan
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Beton	Jl. Arwana No. 24, Madiun	1975	189	548.066.400,00	Dinas Pendidikan
Bangunan Klinik/Puskesmas	Beton	JL. Diponegoro, No.22	1980	72	15.120.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Bangunan Klinik/Puskesmas	Beton	JL. Diponegoro, No.22	2000	144	149.760.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Bangunan Klinik/Puskesmas	Beton	JL. Diponegoro, No.22	2000	199	602.466.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Bangunan Klinik/Puskesmas	Beton	JL. Diponegoro, No.22	2000	110	450.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Bangunan Klinik/Puskesmas	Beton	JL. Diponegoro, No.22	2000	5	3.900.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Bangunan Klinik/Puskesmas	Beton	JL. Diponegoro, No.22	2000	3	1.950.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Bangunan Gedung Instalasi lain-lain	Beton	TPS. JL. BASUKI RAKHMAD SUKOSARI	2016	58.58	43.061.858,00	Dinas Lingkungan Hidup
					6.100.099.931,00	

Perincian mutasi tambah dan kurang aset lain-lain dapat di lihat di **Lampiran 7.1.4.4.1.**

Akumulasi penyusutan lain-lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp33.637.654.541,04 dan per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp33.637.654.541,04. Perincian akumulasi penyusutan aset lain-lain dapat di lihat di **Lampiran 7.1.4.4.2.**

7.2. UTANG

7.2.1. UTANG JANGKA PENDEK

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Utang Jangka Pendek	**18.093.306.616,16**	**22.524.854.759,67**

Utang jangka pendek Pemerintah Kota Madiun adalah kewajiban yang harus dibayar oleh Pemerintah Kota Madiun dalam jangka waktu 12 bulan pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp18.093.306.616,16 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp22.524.854.759,67.

Perincian utang jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 tersaji dalam tabel dibawah ini.

Tabel 7.2.1
Perincian Utang Jangka Pendek

Utang Jangka Pendek	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	0,00	601.132.820,00
2. Pendapatan diterima dimuka	4.444.474.919,16	5.051.616.973,67
3. Utang belanja	13.648.831.697,00	16.872.104.966,00
Total	**18.093.306.616,16**	**22.524.854.759,67**

7.2.1.1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	**0,00**	**601.132.820,00**

PFK Per 31 Desember 2024 sebesa Rp0,00, sedangkan PFK Per 31 Desember 2023 sebesar Rp601.132.820,00

7.2.1.2. Pendapatan Diterima Dimuka

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Pendapatan Diterima Dimuka	**4.444.474.919,16**	**5.051.616.973,67**

Pendapatan di terima di muka berasal dari pembayaran atas pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp4.444.474.919,16 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp5.051.616.973,67.

Perincian mutasi pendapatan diterima dimuka pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp4.444.474.919,16 tersaji dalam tabel dibawah ini.

Tabel 7.2.1.2
Perincian Mutasi Pendapatan Diterima Dimuka

Perubahan di tahun 2024	Saldo 1 Januari 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2024 (Rp)
Pendapatan diterima dimuka	**1**	**2**	**3**	**4**
BKAD	849.722.874,00	567.880.715,00	849.722.874,00	567.880.715,00
Badan Pendapatan Daerah	811.369.759,17	928.069.392,91	811.369.759,17	928.069.392,91
Kecamatan Kartoharjo	1.081.110.146,00	1.125.535.730,83	1.081.110.146,00	1.125.535.730,83
Kecamatan Manguharjo	1.093.257.877,50	507.676.503,75	1.093.257.877,50	507.676.503,75
Kecamatan Taman	1.185.052.317,00	1.295.699.091,67	1.185.052.317,00	1.295.699.091,67
Dinas Pertanian dan KP	0,00	9.533.485,00	0,00	9.533.485,00
Dinas Perdagangan	31.104.000,00	10.080.000,00	31.104.000,00	10.080.000,00
	5.051.616.973,67	**4.444.474.919,16**	**5.051.616.973,67**	**4.444.474.919,16**

7.2.1.3. Utang Belanja

Utang belanja terdiri dari utang belanja pegawai atas beban pegawai atas Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) PNS dari seluruh OPD dan Gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (P3K), utang belanja jasa atas beban honorarium daerah, beban listrik, beban telp, beban air beberapa OPD, beban sampah dari BLUD RSUD serta dan utang belanja modal Per 31 Desember 2024 yang dibayarkan di tahun 2025 Rp13.651.219.983,00 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp16.872.104.966,00. Perincian utang belanja tersaji di tabel di bawah ini :

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Utang Belanja	**13.648.831.697,00**	**16.872.104.966,00**

Tabel 7.2.1.3
Perincian Utang Belanja

Utang Jangka Pendek	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1. Utang Belanja Pegawai	4.222.991.916,00	4.261.848.017,50
2. Utang Belanja Jasa	4.008.895.375,00	3.415.274.648,00
3. Utang Belanja Modal	482.866.331,00	351.047.830,00
4. Utang Persediaan (Obat)	4.934.078.075,00	8.843.934.470,50
Total	**13.648.831.697,00**	**16.872.104.966,00**

1. Utang belanja pegawai sebesar Rp4.222.991.916,00 merupakan utang belanja yang tersaji di Neraca audited Per 31 Desember 2024 yang sampai dengan per 31 Desember 2024 yang belum dibayarkan.

Tabel 7.2.1.3a

UTANG BELANJA ATAS BEBAN PEGAWAI TPP DAN P3K

OPD	UTANG BELANJA ATAS BEBAN PEGAWAI TPP DAN P3K			SALDO PER 31 DESEMBER 2024
	SALDO AWAL 1 JANUARI 2024	TPP		
		PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
JUMLAH	**4.261.848.017,50**	**4.222.991.916,00**	**4.261.848.017,50**	**4.222.991.916,00**
DIKNAS	817.958.936,00	899.310.134,00	817.958.936,00	899.310.134,00
DINAS KESEHATAN	1.243.945.321,00	1.322.307.221,00	1.243.945.321,00	1.322.307.221,00
D P U	83.647.028,00	76.529.559,00	83.647.028,00	76.529.559,00
DINAS PERKIM	59.859.296,00	62.243.073,00	59.859.296,00	62.243.073,00
DINAS SATPOL PP	85.797.991,00	84.086.923,00	85.797.991,00	84.086.923,00
BPBD	20.882.464,00	19.666.370,00	20.882.464,00	19.666.370,00
DINAS SOSIAL	76.907.631,00	65.336.481,00	76.907.631,00	65.336.481,00
DINAS TENAGA KERJA	70.281.124,00	61.681.983,00	70.281.124,00	61.681.983,00
DLH	95.594.968,00	96.434.572,00	95.594.968,00	96.434.572,00
DUKCAPIL	62.572.739,00	62.572.739,00	62.572.739,00	62.572.739,00
PERHUBUNGAN	77.063.178,00	75.547.182,00	77.063.178,00	75.547.182,00
DINAS INFOKOM	66.125.392,00	63.874.471,00	66.125.392,00	63.874.471,00
DINAS PM DAN PTSP	54.880.798,00	50.715.469,00	54.880.798,00	50.715.469,00
DINAS KEBUDAYAAN PARPORA	68.945.398,00	55.227.365,00	68.945.398,00	55.227.365,00
DINAS PERPUSTAKAAN	52.092.353,00	49.565.839,00	52.092.353,00	49.565.839,00
BAG PEMERINTAHAN	17.519.836,00	14.890.087,00	17.519.836,00	14.890.087,00
BAG ORGANISASI	33.841.684,00	36.439.583,00	33.841.684,00	36.439.583,00
BAG UMUM	81.071.155,00	80.589.542,00	81.071.155,00	80.589.542,00
BAG HUKUM	18.433.027,00	19.354.600,00	18.433.027,00	19.354.600,00
BAG PEREK SOSIAL	20.372.581,00	16.654.879,00	20.372.581,00	16.654.879,00
BAG ADBANG	27.619.075,00	27.213.264,00	27.619.075,00	27.213.264,00
SEKRETARIAT DPRD	41.474.247,00	39.701.211,00	41.474.247,00	39.701.211,00
BKD	75.934.019,00	69.921.505,00	75.934.019,00	69.921.505,00
BKAD	71.253.006,00	70.080.906,00	71.253.006,00	70.080.906,00
BAPENDA	115.308.195,50	52.477.781,00	115.308.195,50	52.477.781,00
INSPEKTORAT	128.168.210,00	92.219.347,00	128.168.210,00	92.219.347,00
BAPELITBANGDA	65.603.820,00	52.891.136,00	65.603.820,00	52.891.136,00
KEC KARTOHARJO	141.586.029,00	138.132.366,00	141.586.029,00	138.132.366,00
KEC MANGUHARJO	138.860.226,00	134.727.002,00	138.860.226,00	134.727.002,00
KEC TAMAN	143.547.901,00	139.693.783,00	143.547.901,00	139.693.783,00
BAKESBANG	49.571.532,00	45.774.986,00	49.571.532,00	45.774.986,00
DINAS PERTANIAN & KETAHANAN PANGAN	59.562.348,00	59.115.826,00	59.562.348,00	59.115.826,00
DINAS PERDAGANGAN	95.566.509,00	88.014.731,00	95.566.509,00	88.014.731,00

2. Rekapitulasi utang belanja jasa tersaji sebesar Rp4.008.895.375,00 merupakan utang belanja yang terdiri dari utang atas beban honda, listrik, telepon, air dan jasa medis RSUD sampai dengan per 31 Desember 2024 yang belum dibayarkan. Rekapitulasi dan rincian utang belanja atas beban jasa per OPD tersaji sebagai berikut :

Tabel 7.2.1.3b

REKAPITULASI UTANG BELANJA JASA

REKAPITULASI UTANG BELANJA ATAS BEBAN JASA HONDA, LISTRIK, TELP, AIR JASA MEDIS PER 31 DESEMBER 2024

OPD	TOTAL UTANG BELANJA ATAS BEBAN JASA			SALDO PER 31 DESEMBER 2024
	SALDO AWAL 1 JANUARI 2024	TOTAL MUTASI BEBAN JASA		
		PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
JUMLAH	**3.415.274.648,00**	**4.015.588.225,00**	**3.421.967.498,00**	**4.008.895.375,00**
Dinas Pendidikan	56.100.000,00	56.100.000,00	56.100.000,00	56.100.000,00
Dinas kesehatan	2.778.020.735,00	2.872.589.759,00	2.778.020.735,00	2.872.589.759,00
DPU TR	26.550.000,00	26.550.000,00	26.550.000,00	26.550.000,00
Didinas Perkim	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00
Dinas Satpol	96.850.000,00	96.850.000,00	96.850.000,00	96.850.000,00
BPBD	-	-	-	-
Dinas Sosial	22.378.695,00	23.565.064,00	22.378.695,00	23.565.064,00
Dinas Tenaga Kerja	2.249.486,00	4.452.758,00	2.249.486,00	4.452.758,00
DLH	20.100.000,00	22.350.000,00	20.100.000,00	22.350.000,00
Dukcapil	2.250.000,00	-	2.250.000,00	-
Perhubungan	59.450.000,00	59.450.000,00	59.450.000,00	59.450.000,00
Dinas infokom	11.039.487,00	13.342.850,00	17.732.337,00	6.650.000,00
Dinas PM dan PTSP	11.564.858,00	11.867.940,00	11.564.858,00	11.867.940,00
Dinas Kebudayaan Parpora	44.804.160,00	44.650.000,00	44.804.160,00	44.650.000,00
Dinas Perpustakaan	-	-	-	-
Bag Pemerintahan	2.200.000,00	-	2.200.000,00	-
Bag Organisasi	-	-	-	-
Bag Umum	70.780.534,00	63.796.125,00	70.780.534,00	63.796.125,00
Bag Hukum	-	-	-	-
Bag Perek Sosial	-	-	-	-
Bag Adbang	-	-	-	-
Sekretariat dprd	51.446.936,00	47.687.138,00	51.446.936,00	47.687.138,00
BKD	8.900.000,00	8.900.000,00	8.900.000,00	8.900.000,00
BKAD	32.373.470,00	588.510.682,00	32.373.470,00	588.510.682,00
Bapenda	6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00
Insspektorat	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
Bapelitbangda	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
Kec . Kartoharjo	19.820.175,00	9.523.061,00	19.820.175,00	9.523.061,00
Kec. Manguharjo	39.765.732,00	8.800.000,00	39.765.732,00	8.800.000,00
Kec. Taman	18.480.380,00	16.452.848,00	18.480.380,00	16.452.848,00
Bakesbang	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
Dinas pertanian & ketahanan pangan	11.100.000,00	11.100.000,00	11.100.000,00	11.100.000,00
Dinas Perdagangan	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00

Tabel 7.2.1.3b1

UTANG BELANJA ATAS BEBAN HONORARIUM DAERAH

DATA UTANG BELANJA ATAS BEBAN JASA HONDA PER 31 DESEMBER 2024

OPD	UTANG BELANJA ATAS BEBAN HONDA			SALDO PER 31 DESEMBER 2024
	SALDO AWAL 1 JANUARI 2024	HONORARIUM DAERAH		
		PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
JUMLAH	**567.089.487,00**	**562.242.850,00**	**573.782.337,00**	**555.550.000,00**
Dinas Pendidikan	56.100.000,00	56.100.000,00	56.100.000,00	56.100.000,00
Dinas kesehatan	65.450.000,00	65.450.000,00	65.450.000,00	65.450.000,00
DPU TR	26.550.000,00	26.550.000,00	26.550.000,00	26.550.000,00
Didinas Perkim	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00
Dinas Satpol	96.850.000,00	96.850.000,00	96.850.000,00	96.850.000,00
BPBD	-	-	-	-
Dinas Sosial	11.050.000,00	11.050.000,00	11.050.000,00	11.050.000,00
Dinas Tenaga Kerja	2.200.000,00	4.400.000,00	2.200.000,00	4.400.000,00
DLH	20.100.000,00	22.350.000,00	20.100.000,00	22.350.000,00
Dukcapil	2.250.000,00	-	2.250.000,00	-
Perhubungan	59.450.000,00	59.450.000,00	59.450.000,00	59.450.000,00
Dinas infokom	11.039.487,00	13.342.850,00	17.732.337,00	6.650.000,00
Dinas PM dan PTSP	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00
Dinas Kebudayaan Parpora	44.650.000,00	44.650.000,00	44.650.000,00	44.650.000,00
Dinas Perpustakaan	-	-	-	-
Bag Pemerintahan	2.200.000,00	-	2.200.000,00	-
Bag Organisasi	-	-	-	-
Bag Umum	66.700.000,0	61.750.000,00	66.700.000,00	61.750.000,00
Bag Hukum	-	-	-	-
Bag Perek Sosial	-	-	-	-
Bag Adbang	-	-	-	-
Sekretariat dprd	11.200.000,00	11.200.000,00	11.200.000,00	11.200.000,00
BKD	8.900.000,00	8.900.000,00	8.900.000,00	8.900.000,00
BKAD	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
Bapenda	6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00
Insspektorat	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
Bapelitbangda	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
Kec . Kartoharjo	8.950.000,00	8.950.000,00	8.950.000,00	8.950.000,00
Kec. Manguharjo	8.800.000,00	8.800.000	8.800.000,00	8.800.000,00
Kec. Taman	17.850.000,00	15.650.000,00	17.850.000,00	15.650.000,00
Bakesbang	2.200.000,00	2.200.000	2.200.000,00	2.200.000,00
Dinas pertanian & ketahanan pangan	11.100.000,00	11.100.000	11.100.000,00	11.100.000,00
Dinas Perdagangan	2.250.000,00	2.250.000	2.250.000,00	2.250.000,00

Tabel 7.2.1.3b2

UTANG BELANJA ATAS BEBAN LISTRIK

DATA UTANG BELANJA ATAS BEBAN JASA LISTRIK PER 31 DESEMBER 2024

OPD	UTANG BELANJA ATAS BEBAN LISTRIK			SALDO PER 31 DESEMBER 2024
	SALDO AWAL 1 JANUARI 2024	LISTRIK		
		PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
JUMLAH	**283.311.134,00**	**802.802.493,00**	**283.311.134,00**	**802.802.493,00**
Dinas Pendidikan	-	-	-	-
Dinas kesehatan	188.157.151,00	181.914.029,00	188.157.151,00	181.914.029,00
DPU TR	-	-	-	-
Didinas Perkim	-	-	-	-
Dinas Satpol	-	-	-	-
BPBD	-	-	-	-
Dinas Sosial	11.328.695,00	12.410.052,00	11.328.695,00	12.410.052,00
Dinas Tenaga Kerja	49.486,00	52.758,00	49.486,00	52.758,00
DLH	-	-	-	-
Dukcapil	-	-	-	-
Perhubungan	-	-	-	-
Dinas infokom	-	-	-	-
Dinas PM dan PTSP	5.878.054,00	7.083.793,00	5.878.054,00	7.083.793,00
Dinas Kebudayaan Parpora			-	-
Dinas Perpustakaan	-	-	-	-
Bag Pemerintahan	-	-	-	-
Bag Organisasi	-	-	-	-
Bag Umum	3.927.834,00	1.996.625,00	3.927.834,00	1.996.625,00
Bag Hukum	-	-	-	-
Bag Perek Sosial	-	-	-	-
Bag Adbang	-	-	-	-
Sekretariat dprd	34.711.876	34.713.998	34.711.876,00	34.713.998,00
BKD	-	-	-	-
BKAD	-	564.505.872	-	564.505.872,00
Bapenda	-	-	-	-
Insspektorat	-	-	-	-
Bapelitbangda	-	-	-	-
Kec . Kartoharjo	10.016.434,00	-	10.016.434,00	-
Kec. Manguharjo	29.155.968,00	-	29.155.968,00	-
Kec. Taman	85.636,00	125.366	85.636,00	125.366,00
Bakesbang	-	-	-	-
Dinas pertanian & ketahanan pangan	-	-	-	-
Dinas Perdagangan	-	-	-	-

Tabel 7.2.1.3b3

UTANG BELANJA ATAS BEBAN TELEPON

DATA UTANG BELANJA ATAS BEBAN JASA TELEPON PER 31 DESEMBER 2024

OPD	UTANG BELANJA ATAS BEBAN TELEPON			SALDO PER 31 DESEMBER 2024
	SALDO AWAL 1 JANUARI 2024	TELEPON		
		PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
JUMLAH	**3.741.462,00**	**1.945.452,00**	**3.741.462,00**	**1.945.452,00**
Dinas Pendidikan	-	-	-	-
Dinas kesehatan	1.435.473,00	891.540,00	1.435.473,00	891.540,00
DPU TR	-	-	-	-
Didinas Perkim	-	-	-	-
Dinas Satpol	-	-	-	-
BPBD	-	-	-	-
Dinas Sosial	-	105.012,00	-	105.012,00
Dinas Tenaga Kerja	-	-	-	-
DLH	-	-	-	-
Dukcapil	-	-	-	-
Perhubungan	-	-	-	-
Dinas infokom	-	-	-	-
Dinas PM dan PTSP	561.664,00	244.537,00	561.664,00	244.537,00
Dinas Kebudayaan Parpora	56.300,00	-	56.300,00	-
Dinas Perpustakaan	-	-	-	-
Bag Pemerintahan	-	-	-	-
Bag Organisasi	-	-	-	-
Bag Umum	-	-	-	-
Bag Hukum	-	-	-	-
Bag Perek Sosial	-	-	-	-
Bag Adbang	-	-	-	-
Sekretariat dprd	-	-	-	-
BKD	-	-	-	-
BKAD	-	-	-	-
Bapenda	-	-	-	-
Insspektorat	-	-	-	-
Bapelitbangda	-	-	-	-
Kec . Kartoharjo	486.661,00	538.561,00	486.661,00	538.561,00
Kec. Manguharjo	1.052.620,00	-	1.052.620,00	-
Kec. Taman	148.744,00	165.802,00	148.744,00	165.802,00
Bakesbang	-	-	-	-
Dinas pertanian & ketahanan pangan	-	-	-	-
Dinas Perdagangan	-	-	-	-

Tabel 7.2.1.3b4

UTANG BELANJA ATAS BEBAN AIR

DATA UTANG BELANJA ATAS BEBAN JASA AIR PER 31 DESEMBER 2024

OPD	UTANG BELANJA ATAS BEBAN AIR			SALDO PER 31 DESEMBER 2024
	SALDO AWAL 1 JANUARI 2024	AIR		
		PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
JUMLAH	**40.922.664,00**	**28.597.430,00**	**40.922.664,00**	**28.597.430,00**
Dinas Pendidikan	-	-	-	-
Dinas kesehatan	2.768.210,00	4.334.190,00	2.768.210,00	4.334.190,00
DPU TR	-	-	-	-
Didinas Perkim	-	-	-	-
Dinas Satpol	-	-	-	-
BPBD	-	-	-	-
Dinas Sosial	-	-	-	-
Dinas Tenaga Kerja	-	-	-	-
DLH	-	-	-	-
Dukcapil	-	-	-	-
Perhubungan	-	-	-	-
Dinas infokom	-	-	-	-
Dinas PM dan PTSP	725.140,00	139.610,00	725.140,00	139.610,00
Dinas Kebudayaan Parpora	97.860	-	97.860,00	-
Dinas Perpustakaan	-	-	-	-
Bag Pemerintahan	-	-	-	-
Bag Organisasi	-	-	-	-
Bag Umum	152.700,00	49.500,00	152.700,00	49.500,00
Bag Hukum	-	-	-	-
Bag Perek Sosial	-	-	-	-
Bag Adbang	-	-	-	-
Sekretariat dprd	5.535.060	1.773.140	5.535.060,00	1.773.140,00
BKD	-	-	-	-
BKAD	30.123.470	21.754.810	30.123.470,00	21.754.810,00
Bapenda	-	-	-	-
Insspektorat	-	-	-	-
Bapelitbangda	-	-	-	-
Kec . Kartoharjo	367.080,00	34.500	367.080,00	34.500,00
Kec. Manguharjo	757.144,00	-	757.144,00	-
Kec. Taman	396.000,00	511.680,00	396.000,00	511.680,00
Bakesbang	-	-	-	-
Dinas pertanian & ketahanan pangan	-	-	-	-
Dinas Perdagangan	-	-	-	-

Tabel 7.2.1.3b5

UTANG BELANJA ATAS JASA MEDIS RSUD

DATA UTANG BELANJA ATAS BEBAN JASA MEDIS DAN OBAT PER 31 DESEMBER 2024

OPD	UTANG BELANJA ATAS BEBAN JASA MEDIS DAN OBAT			SALDO PER 31 DESEMBER 2024
	SALDO AWAL 1 JANUARI 2024	JASA MEDIS		
		PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
JUMLAH	**2.520.209.901,00**	**2.620.000.000,00**	**2.520.209.901,00**	**2.620.000.000,00**
Dinas kesehatan	2.520.209.901,00	2.620.000.000,00	2.520.209.901,00	2.620.000.000,00

3. Utang belanja modal tersaji sebesar Rp482.866.331,00 merupakan utang belanja atas pekerjaan fisik yang di Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang sampai dengan per 31 Desember 2024 yang belum dibayarkan. Data utang belanja modal tersaji sebagai berikut :

Tabel 7.2.1.3c

UTANG BELANJA ATAS BELANJA MODAL

DATA UTANG BELANJA MODAL PER 31 DESEMBER 2024

OPD	UTANG BELANJA ATAS BELANJA MODAL			SALDO PER 31 DESEMBER 2024
	SALDO AWAL 1 JANUARI 2024	BELANJA MODAL		
		PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
JUMLAH	**351.047.830,00**	**351.047.830,00**	**482.866.331,00**	**482.866.331,00**
DPU TR	351.047.830,00	351.047.830,00	482.866.331,00	482.866.331,00

7.3 EKUITAS

7.3.1. Ekuitas

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Ekuitas	**2.859.417.722.186,95**	**2.806.862.353.839,15**

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo ekuitas akhir yang berasal dari saldo akhir Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.859.417.722.186,95 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp2.806.862.353.839,15.

BAB

8

LAPORAN OPERASIONAL (LO)

8.1. PENDAPATAN LO

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4 = (2/3x100%)-100%
Pendapatan LO	**1.219.995.775.508,42**	**1.167.775.852.624,59**	**4,47%**

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo pendapatan yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023. Pendapatan LO mengakui penerimaan yang merupakan hak Pemerintah Kota Madiun tanpa mempertimbangkan apakah kas sudah diterima atau belum oleh kas daerah pada tahun berjalan. Pendapatan LO terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer LO dan lain-lain pendapatan yang sah LO. Pendapatan LO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp1.219.995.775.508,42 dibandingkan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.167.775.852.624,59 terjadi kenaikan sebesar 4,47%

Perincian pendapatan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 8.1
Pendapatan LO

Pendapatan LO	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4 = (2/3x100%)-100%
Pendapatan Asli Daerah LO	295.134.813.302,79	264.360.007.027,12	11,64%
Pendapatan Transfer LO	873.815.280.785,63	880.526.052.824,80	(0,76%)
Lain-lain Pendapatan yang sah LO	51.045.681.420,00	22.889.792.772,67	123,01%
Jumlah	**1.219.995.775.508,42**	**1.167.775.852.624,59**	**4,47%**

8.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH LO

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4 = (2/3x100%)-100%
Pendapatan Asli Daerah LO	**295.134.813.302,79**	**264.360.007.027,12**	**11,64%**

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo pendapatan asli daerah LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023. Pendapatan asli daerah LO mengakui penerimaan yang merupakan hak pemerintah Kota Madiun tanpa mempertimbangkan apakah kas sudah diterima atau belum oleh kas daerah pada tahun berjalan. Pendapatan asli daerah LO terdiri dari pajak daerah LO, retribusi daerah LO, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan LO dan lain-lain PAD yang sah LO. Pendapatan asli daerah LO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp295.134.813.302,79 dibandingkan pendapatan asli daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp264.360.007.027,12 terjadi kenaikan sebesar 11,64%.

Perincian pendapatan asli daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 8.1.1
Pendapatan Asli Daerah LO

Pendapatan Asli Daerah LO	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4 = (2/3x100%)-100%
1. Pajak Daerah LO	126.368.449.432,26	114.046.677.401,10	10,80%
2. Retribusi Daerah LO	140.430.742.272,42	21.264.290.040,92	560,41%
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan LO	22.726.366.969,54	22.714.358.167,73	0,05%
4. Lain-lain PAD yang sah LO	5.609.254.628,57	106.334.681.417,37	(94,72%)
Jumlah	**295.134.813.302,79**	**264.360.007.027,12**	**11,64%**

8.1.1.1. Pajak Daerah LO

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4 = (2/3x100%)-100%
Pajak Daerah LO	**126.368.449.432,26**	**114.046.677.401,10**	**10,80%**

Jumlah pendapatan pajak daerah LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023. Pendapatan pajak daerah LO mengakui penerimaan yang merupakan hak pemerintah Kota Madiun tanpa mempertimbangkan apakah kas sudah diterima atau belum oleh kas daerah pada tahun berjalan. Pendapatan pajak daerah LO terdiri dari pajak hotel LO, pajak restoran LO, pajak hiburan LO, pajak reklame LO, pajak penerangan jalan LO, pajak parkir LO, pajak air tanah LO, BPHTB LO dan PBB LO. Pendapatan pajak daerah LO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp126.368.449.432,26 dibandingkan 31 Desember 2023 sebesar Rp114.046.677.401,10 terjadi kenaikan sebesar 10,80%.

Perincian pendapatan pajak daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 8.1.1.1
Pendapatan Pajak Daerah LO

Pendapatan Pajak Daerah LO	Ket	31 Desember 2024 (Rp)
1. Pendapatan Pajak LRA	+	121.651.792.796,00
2. Piutang Pajak Daerah 2024	+	16.829.329.323,35
3. Piutang Pajak Daerah 2023	(-)	(11.995.973.053,35)
4. Pendapatan Pajak Diterima Dimuka 2024	(-)	(928.069.392,91)
5. Pendapatan Pajak Diterima Dimuka 2023	+	811.369.759,17
Jumlah Pajak Daerah LO (1+2-3-4+5)		**126.368.449.432,26**

Perincian pajak daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 8.1.1.2
Pendapatan Pajak Daerah LO

Pendapatan Pajak Daerah LO	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4 = (2/3x100%)-100%
1. Pajak Reklame	2.999.706.365,26	2.140.243.381,08	40,16%
2. Pajak Air Tanah	506.650.151,00	321.693.220,84	57,49%
3. PBBP2	24.267.595.724,00	22.885.528.900,00	6,04%
4. BPHTB	30.594.835.130,00	28.519.672.350,00	7,28%
5. Pajak Barang Jasa Tertentu	67.999.662.032,00	34.505.160.898,00	97,07%
6. Pajak Penerangan Jalan	0,00	25.674.378.651,18	(100%)
Total	**126.368.449.432,26**	**114.046.677.401,10**	**10,80%**

1. Pendapatan pajak reklame LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (OPD) yang diterbitkan untuk masa pajak tahun 2024 adalah sebesar Rp2.999.706.365,26. Pendapatan pajak reklame LO yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp2.867.767.796,00 yang menjadi piutang pajak tahun lalu sebesar Rp194.618.740 dan piutang pajak tahun 2024 sebesar Rp443.256.943,00. Terdapat pendapatan diterima dimuka yang sudah dibayarkan di Tahun sebelumnya sebesar Rp811.369.759,17 dan pendapatan diterima dimuka tahun berjalan sebesar Rp928.069.392,91. Pajak reklame LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp2.999.706.365,26 dibandingkan dengan pendapatan pajak reklame LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp2.140.243.381,08 terjadi kenaikan sebesar 40,16%.
2. Pendapatan pajak air tanah LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang diterbitkan untuk masa pajak tahun 2024 adalah sebesar Rp506.650.151,00. Pendapatan pajak air tanah LO tahun 2024 yang telah disetor ke kasda sebesar Rp450.821.413,00 yang menjadi piutang pajak tahun lalu sebesar Rp4.780.752,00 dan piutang pajak tahun 2024 sebesar Rp60.609.520,00. Pendapatan pajak air tanah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp506.650.181,00 dibandingkan dengan pendapatan pajak air tanah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp321.693.220,84 terjadi kenaikan sebesar 57,49%.
3. Pendapatan PBB LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang diterbitkan untuk masa pajak tahun 2024 adalah sebesar Rp24.267.595.724,00.

Pendapatan PBB LO Tahun 2024 yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp22.998.810.935,00 yang menjadi piutang tahun lalu sebesar Rp9.424.063.619,00 dan piutang tahun 2024 sebesar Rp10.692.848.408,00. Pendapatan PBB LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp24.267.595.724,00 dibandingkan dengan pendapatan PBB LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp22.885.528.900,00,00 terjadi keniakan sebesar 6,04%.

4. Pendapatan BPHTB LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang diterbitkan untuk masa pajak tahun 2024 adalah sebesar Rp30.594.835.130. Pendapatan BPHTB LO yang telas disetor ke kasda sebesar Rp30.575.437.417,00 yang menjadi piutang tahun lalu adalah sebesar Rp54.099.400,00 dan piutang pajak tahun 2024 sebesar Rp73.497.113,00. Pendapatan BPHTB LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp30.594.835.130,00 dibandingkan dengan pendapatan BPHTB LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp28.519.672.350,00 terjadi kenaikan sebesar 7,28%.
5. Pendapatan barang jasa tertentu LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang diterbitkan untuk masa pajak tahun 2024 adalah sebesar Rp67.999.662.032,00. Pendapatan pajak Hotel LO tahun 2024 tersebut telah disetor ke kas daerah sebesar Rp64.758.955.235,00 yang menjadi piutang pajak tahun lalu sebesar Rp2.318.410.542,35 dan piutang pajak tahun 2024 sebesar Rp5.559.117.339,35. Pendapatan pajak hotel LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp62.980.112.176,00 dibandingkan dengan pendapatan pajak hotel LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp34.505.160.898,00 terjadi kenaikan sebesar 97,07%.
6. Pendapatan pajak penerangan jalan LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Pemberitahuan Potongan Pajak Penerangan Jalan dari PLN dan non PLN yang diterbitkan untuk masa pajak tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00. Pendapatan pajak penerangan jalan LO yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp0,00 Pendapatan pajak penerangan jalan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dibandingkan dengan pendapatan pajak penerangan jalan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp25.674.378.651,18 terjadi penurunan sebesar 100%.

8.1.1.2. Retribusi Daerah LO

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4 = (2/3x100%)-100%
Retribusi Daerah LO	**140.430.742.272,42**	**21.264.290.040,92**	**560,41%**

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo pendapatan retribusi daerah LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023. Pendapatan retribusi daerah LO mengakui penerimaan yang merupakan hak pemerintah Kota Madiun tanpa mempertimbangkan apakah kas sudah diterima atau belum oleh kas daerah pada tahun berjalan. Pendapatan retribusi daerah LO terdiri dari retribusi jasa umum LO, retribusi usaha LO, retribusi perizinan tertentu LO. Pendapatan retribusi daerah LO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp140.430.742.272,42 dibandingkan 31 Desember 2023 sebesar Rp21.264.290.040,92 terjadi kenaikan sebesar 560,41%.

Perincian pendapatan retribusi daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 per OPD tersaji pada tabel dibawah ini

Tabel 8.1.1.2
Retribusi Daerah LO

Retribusi Daerah LO	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4 = (2/3x100%)-100%
1. 7.1.02.01 Retribusi Jasa Umum	**118.695.814.286,97**	**3.791.532.578,00**	**3.030,55%**
a. 7.1.02.01.02 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	**288.273.905,97**	**171.940.000,00**	**67,75%**
. Dinas Lingkungan Hidup	266.273.905,97	171.940.000,00	54,86%
. Dinas Perkim	22.000.000,00	0,00	100%
b. 7.1.02.01.04 Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum	**2.398.403.050,00**	**2.984.553.408,00**	**(19,82%)**
Dinas Perhubungan	2.398.403.050,00	2.984.553.408,00	(19,64%)
c. 7.1.02.01.06 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	**0,00**	**364.421.204,00**	**(100%)**
Dinas Perhubungan	0,00	364.421.204,00	(100%)
d. 7.1.02.01.11 Retribusi Ulang Tera	**0,00**	**71.884.000,00**	**(100%)**
Dinas Perdagangan	0,00	71.884.000,00	(100%)
e. 7.1.02.01.13 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	**0,00**	**198.733.966,00**	**(100%)**
Dinas Kominfo	0,00	198.733.966,00	(100%)

Retribusi Daerah LO	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4 = (2/3x100%)-100%
f. 7.1.02.01.01 Retribusi Layanan Kesehatan	**116.009.137.331,00**	**0,00**	**100%**
Dinas Kesehatan	116.009.137.331,00	0,00	100%
2. 7.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha	**21.088.171.137,45**	**16.282.356.108,92**	**29,52%**
a. 7.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	**12.034.658.470,25**	**8.474.176.086,92**	**42,02%**
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	578.910.000,00	5.025.000,00	11.420,60%
Dinas Perumahan dan Permukiman	0,00	179.385.000,00	(100%)
Disbudparpora	455.675.000,00	368.756.000,00	23,57%
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM)	232.660.000,00	176.450.000,00	31,86%
Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)	5.185.420.997,00	4.549.048.537,00	13,99%
Kecamatan Kartoharjo	1.352.994.769,17	1.270.070.645,67	6,53%
Kecamatan Taman	1.532.174.135,33	1.041.859.888,00	47,06%
Kecamatan Manguharjo	2.305.803.603,75	840.267.016,25	174,41%
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	14.543.515,00	43.314.000,00	(66,42%)
Dinas Tenaga Kerja	21.500.000,00	0,00	100%
Dinas Kesehatan	354.976.450,00	0,00	100%
b. 7.1.02.02.02 Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	**6.859.590.089,20**	**6.263.331.622,00**	**9,52%**
Dinas Perdagangan	6.859.590.089,20	6.263.331.622,00	9,52%
c. 7.1.02.02.05 Retribusi Tempat Khusus Parkir	**906.370.000,00**	**784.061.000,00**	**15,60%**
Dinas Perhubungan	906.370.000,00	784.061.000,00	15,60%
d. 7.1.02.02.07 Retribusi Rumah Potong Hewan	**19.396.000,00**	**23.079.000,00**	**(15,96%)**
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	19.396.000,00	23.079.000,00	(15,96%)
e. 7.1.02.02.09 Tempat Rekreasi dan Olah Raga	**1.008.991.878,00**	**737.708.400,00**	**36,77%**
Dinas Perumahan dan Pemukiman	0,00	12.500.000,00	(100%)

Retribusi Daerah LO	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4 = (2/3x100%)-100%
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1.008.991.878,00	725.208.400,00	39,13%
f.7.1.02.02.20 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	**260.785.700,00**	**0,00**	**100%**
Dinas Perkim	250.547.200,00	0,00	100%
Dinas Perdagangan	10.238.500,00	0,00	100%
3. 7.1.02.03 Retribusi Perizinan Tertentu	**719.718.248,00**	**1.190.401.354,00**	**(39,54%)**
a. 7.1.02.03.01 Retribusi Mendirikan Bangunan	**719.718.248,00**	**1.189.201.354,00**	**(39,48%)**
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	719.718.248,00	1.189.201.354,00	(39,48%)
b. 7.1.02.03.03 Retribusi Izin Trayek	**0,00**	**1.200.000,00**	**(100%)**
Dinas Perhubungan	0,00	1.200.000,00	(100%)
	140.430.742.272,42	**21.264.290.040,92**	**560,41%**

1. Retribusi Jasa Umum

A. Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

Retribusi jasa umum LO terdiri dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan LO.

☑ Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan karcis retribusi parkir/setoran untuk masa tahun 2024 adalah sebesar Rp266.273.905,97. Pendapatan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan LO periode 31 Desember 2024 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp266.273.905,97. Pendapatan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp266.273.905,97 dibandingkan dengan pendapatan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp171.940.000,00 terjadi kenaikan sebesar 54,84%.

B. Dinas Perumahan dan Permukiman

Retribusi jasa umum LO terdiri dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan LO.

☑ Retribusi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun tahun 2024 adalah sebesar Rp22.000.000,00. Pendapatan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan LO tahun 2024 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp22.000.000,00. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp22.000.000,00 dibandingkan dengan pendapatan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 terjadi kenaikan sebesar 100%.

C. Dinas Perhubungan

Retribusi jasa umum LO terdiri dari retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum LO, Retribusi pelayanan pasar LO dan retribusi pengujian kendaraan bermotor LO.

☑ Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan karcis retribusi parkir/setoran dari juru parkir untuk masa tahun 2024 adalah sebesar Rp2.398.403.050,00. Pendapatan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum LO tahun 2024 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp2.398.403.050,00 yang menjadi piutang retribusi 2024 sebesar Rp0,00 dan piutang tahun lalu sebesar Rp0,00. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp2.398.403.050,00 dibandingkan dengan pendapatan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp2.984.553.408,00 terjadi penurunan sebesar 19,64%.

☑ Retribusi kendaraan bermotor LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan hasil untuk masa tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00. Pendapatan retribusi pengujian kendaraan bermotor LO tahun 2024 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp0,00. Retribusi pengujian kendaraan bermotor LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dibandingkan dengan pendapatan retribusi pengujian kendaraan bermotor LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp364.421.204,00 terjadi penurunan sebesar 100%.

D. Dinas Perdagangan

Retribusi jasa umum LO terdiri dari retribusi tera ulang LO.

☑ Retribusi tera ulang LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang dipersamakan yang diterbitkan untuk masa tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00. Pendapatan retribusi penjualan produksi usaha daerah LO tahun 2024

tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp0,00 Pendapatan retribusi tera ulang LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dibandingkan dengan pendapatan retribusi tera ulang LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp71.884.000,00 terjadi penurunan sebesar 100%.

E. Dinas Kominfo

Retribusi jasa umum LO terdiri dari retribusi pengendalian menara telekomunikasi LO.

☑ Retribusi pengendalian menara telekomunikasi LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang dipersamakan yang diterbitkan untuk masa tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00. Pendapatan retribusi pengendalian menara telekomunikasi LO tahun 2024 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp0,00 dan yang menjadi pendapatan diterima dimuka tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00. Pendapatan retribusi pengendalian menara telekomunikasi LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dibandingkan dengan pendapatan retribusi pengendalian menara telekomunikasi LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp198.733.966,00 terjadi penurunan sebesar 100%.

F. Dinas Kesehatan dan Kb

Retribusi jasa umum LO terdiri dari retribusi layanan kesehatan LO.

☑ Retribusi layanan kesehatan LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang dipersamakan yang diterbitkan untuk masa tahun 2024 adalah sebesar Rp116.009.137.331,00. Pendapatan retribusi layanan kesehatan LO tahun 2024 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp117.186.065.666,00 dan yang menjadi piutang tahun 2024 adalah sebesar Rp6.772.933.867,85 dan piutang tahun sebelumnya sebesar Rp7.987.153.402,85. Pendapatan retribusi layanan kesehatan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp109.430.612.270,00 dibandingkan dengan pendapatan retribusi layanan kesehatan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 terjadi kenaikan sebesar 100%.

2. Retribusi Jasa Usaha

A. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Dinas PU dan TR)

Retribusi jasa usaha LO terdiri dari retribusi pemakaian kekayaan daerah LO

☑ Retribusi pemakaian kekayaan daerah LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan

Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang dipersamakan yang diterbitkan untuk masa tahun 2024 adalah sebesar Rp578.910.000,00. Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO tahun 2024 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp578.910.000,00. Piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah 2024 sebesar Rp0,00. Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp578.910.000,00 dibandingkan dengan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp5.025.000,00 terjadi kenaikan sebesar 11.420,60%.

B. Dinas Perumahan dan Pemukiman

Retribusi jasa usaha LO terdiri dari retribusi pemakaian kekayaan daerah LO dan retribusi tempat rekreasi dan olah raga LO.

- ☑ Retribusi pemakaian kekayaan daerah LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk masa tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00. Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO tahun 2024 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp0,00. Retribusi pemakaian kekayaan daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dibandingkan dengan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp179.385.000,00 terjadi penurunan sebesar 100%.
- ☑ Retribusi retribusi tempat rekreasi dan olahraga LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk masa tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00. Pendapatan retribusi tempat rekreasi dan olahraga LO tahun 2024 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp0,00. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dibandingkan dengan pendapatan retribusi tempat rekreasi dan olahraga LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp12.500.000,00 terjadi penurunan sebesar 100%.
- ☑ Retribusi pemanfaatan aset daerah LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk masa tahun 2024 adalah sebesar Rp250.547.200,00. Pendapatan pemanfaatan aset daerah LO tahun 2024 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp249.677.200,00. Yang menjadi piutang tahun berjalan Rp17.870.000,00 dan piutang tahun lalu sebesar Rp17.000.000,00. Retribusi pemanfaatan aset daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp250.547.200,00 dibandingkan dengan pendapatan retribusi

pemanfaatan aset daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 terjadi kenaikan sebesar 100%.

C. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Retribusi jasa usaha LO terdiri dari retribusi pemakaian kekayaan daerah LO dan retribusi tempat rekreasi dan olah raga LO.

☑ Retribusi pemakaian kekayaan daerah LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang dipersamakan yang diterbitkan untuk masa tahun 2024 adalah sebesar Rp455.675.000,00. Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO tahun 2024 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp455.675.000,00. Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp455.675.000,00 dibandingkan dengan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp368.756.000,00 terjadi kenaikan sebesar 23,57%.

☑ Retribusi tempat rekreasi dan olah raga LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang dipersamakan yang diterbitkan untuk masa tahun 2024 adalah sebesar Rp1.008.991.878,00. Pendapatan retribusi tempat rekreasi dan olah raga LO tahun 2024 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp1.008.991.878,00. Yang menjadi piutang tahun 2024 sebesar Rp0,00 dan piutang tahun sebelumnya sebesar Rp0,00. Pendapatan retribusi tempat rekreasi dan olah raga LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp1.008.991.878,00 dibandingkan dengan pendapatan retribusi tempat rekreasi dan olah raga LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp725.208.400,00 terjadi kenaikan sebesar 39,13%.

D. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM (BKDPSDM)

Retribusi jasa usaha LO terdiri dari retribusi pemakaian kekayaan daerah LO.

☑ Retribusi pemakaian kekayaan daerah LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang dipersamakan yang diterbitkan untuk masa tahun 2024 adalah sebesar Rp232.660.000,00. Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO tahun 2024 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp272.335.000,00 dan yang menjadi piutang tahun lalu sebesar Rp39.675.000,00. Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp232.660.000,00 dibandingkan dengan pendapatan retribusi

pemakaian kekayaan daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp176.450.000,00 terjadi kenaikan sebesar 31,86%.

E. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)

Retribusi jasa usaha LO terdiri daria retribusi pemakaian kekayaan daerah LO.

☑ Retribusi pemakaian kekayaan daerah LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang dipersamakan yang diterbitkan untuk masa tahun 2024 adalah sebesar Rp5.185.420.997,00. Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO tahun 2024 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp4.849.774.078. Yang menjadi pendapatan diterima dimuka tahun 2024 sebesar Rp567.880.715,00 dan pendapatan diterima dimuka tahun 2023 sebesar Rp849.722.874,00 dan sisanya menjadi piutang tahun berjalan sebesar Rp1.778.152.751,00 dan piutang tahun 2023 sebesar Rp1.724.347.991,00. Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp5.185.420.997,00 dibandingkan dengan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp4.549.048.537,00 terjadi kenaikan sebesar 13,99%

F. Kecamatan Kartoharjo

Retribusi jasa usaha LO terdiri dari retribusi pemakaian kekayaan daerah LO.

☑ Retribusi pemakaian kekayaan daerah LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang dipersamakan yang diterbitkan untuk masa tahun 2024 adalah sebesar Rp1.352.994.769,17. Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO tahun 2024 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp1.397.420.354,00. Yang menjadi pendapatan diterima dimuka tahun 2024 sebesar Rp1.125.535.730,83 dan pendapatan diterima dimuka 2023 sebesar Rp1.081.110.146,00. Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp1.352.994.769,17 dibandingkan dengan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp1.270.070.645,67 terjadi kenaikan sebesar 6,53%.

G. Kecamatan Taman

Retribusi jasa usaha LO terdiri dari retribusi pemakaian kekayaan daerah LO.

☑ Retribusi pemakaian kekayaan daerah LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang dipersamakan yang diterbitkan untuk

masa tahun 2024 adalah sebesar Rp1.532.174.135,33. Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO tahun 2024 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp1.642.820.910,00. Yang menjadi pendapatan diterima dimuka tahun 2024 sebesar Rp1.295.699.091,67 dan pendapatan diterima dimuka tahun 2023 sebesar Rp1.185.052.317,00. Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp1.532.174.135,33 dibandingkan dengan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp1.041.859.888,00 terjadi kenaikan sebesar 47,06%.

H. Kecamatan Manguharjo

Retribusi jasa usaha LO terdiri dari retribusi pemakaian kekayaan daerah LO.

☑ Retribusi pemakaian kekayaan daerah LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang dipersamakan yang diterbitkan untuk masa tahun 2024 adalah sebesar Rp2.305.803.603,75. Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO tahun 2024 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp1.720.222.230,00. Yang menjadi pendapatan diterima dimuka tahun 2024 sebesar Rp507.676.503,75 dan pendapatan diterima dimuka tahun 2023 sebesar Rp1.093.257.877,50. Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp2.305.803.603,75 dibandingkan dengan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp840.267.016,25 terjadi kenaikan sebesar 174,41%.

I. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Retribusi jasa usaha LO terdiri dari retribusi pemakaian kekayaan daerah LO dan retribusi rumah potong hewan LO

☑ Retribusi pemakaian kekayaan daerah LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang dipersamakan yang diterbitkan untuk masa tahun 2024 adalah sebesar Rp14.543.515,00. Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO tahun 2024 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp24.077.000,00. Yang menjadi pendaapatan diteima dimuka tahun 2023 adalah sebesar Rp0,00 dan pendapatan diterima dimuka tahun berjalan sebesar Rp9.533.485,00. Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp14.543.515,00 dibandingkan dengan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp43.314.000,00 terjadi penurunan sebesar 66,42%.

☑ Retribusi rumah potong hewan LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang dipersamakan yang diterbitkan untuk masa tahun 2024 adalah sebesar Rp19.396.000,00. Pendapatan retribusi rumah potong hewan LO tahun 2024 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp19.396.000,00. Pendapatan retribusi rumah potong hewan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp19.396.000,00 dibandingkan dengan pendapatan retribusi rumah potong hewan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp23.079.000,00 terjadi penurunan sebesar 15,96%.

J. Dinas Tenaga Kerja

Retribusi jasa usaha LO terdiri dari retribusi pemakaian kekayaan daerah LO.

☑ Retribusi pemakaian kekayaan daerah LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang dipersamakan yang diterbitkan untuk masa tahun 2024 adalah sebesar Rp21.500.000,00. Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO tahun 2024 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp21.500.000,00. Yang menjadi pendaapatan diterima dimuka tahun 2023 adalah sebesar Rp0,00 dan pendapatan diterima dimuka tahun berjalan sebesar Rp0,00. Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp21.500.000,00 dibandingkan dengan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 terjadi kenaikan sebesar 100%.

K. Dinas Kesehatan

Retribusi jasa usaha LO tediri dari retribusi pemakaian kekayaan daerah LO.

☑ Retribusi pemakaian kekayaan daerah LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang dipersamakan yang diterbitkan untuk masa tahun 2024 adalah sebesar Rp354.976.450,00. Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO tahun 2024 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp354.976.450,00. Yang menjadi pendaapatan diterima dimuka tahun 2023 adalah sebesar Rp0,00 dan pendapatan diterima dimuka tahun berjalan sebesar Rp0,00. Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp354.976.450,00 dibandingkan dengan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 terjadi kenaikan sebesar 100%.

L. Dinas Perdagangan

Retribusi jasa usaha LO terdiri dari retribusi pasar grosir/atau pertokoan LO dan retribusi pemanfaatan aset daerah LO.

☑ Retribusi pasar grosir/atau pertokoan LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang dipersamakan yang diterbitkan untuk masa tahun 2024 adalah sebesar Rp6.859.590.089,20. Pendapatan retribusi pasar grosir/atau pertokoan LO tahun 2024 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp4.797.996.181,00. Yang menjadi piutang tahun berjalan sebesar Rp4.699.974.038,20 dan piutang tahun 2023 sebesar Rp2.659.404.130,00. Yang menjadi pendapatan diterima dimuka tahun berjalan sebesar Rp10.080.000,00 dan yang menjadi pendapatan diterima dimuka tahun 2023 sebesar Rp31.104.000,00. Pendapatan retribusi pasar grosir/atau pertokoan LO untuk periode yang berakhir 31 Sesember 2024 sebesar Rp6.859.590.089,20 dibandingkan dengan pendapatan retribusi pasar grosir/atau pertokoan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp6.263.331.622,00 terjadi kenaikan sebesar 9,52%.

☑ Retribusi pemanfaatan aset daerah LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang dipersamakan yang diterbitkan untuk masa tahun 2024 adalah sebesar Rp10.238.500,00. Pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah LO tahun 2024 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp 10.238.500,00 Pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp10.238.500,00 dibandingkan dengan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 terjadi kenaikan sebesar 100%.

M. Dinas Perhubungan

Retribusi jasa usaha LO terdiri dari retribusi tempat khusus parkir LO.

☑ Retribusi tempat khusus parkir LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk masa tahun 2024 adalah sebesar Rp906.370.000,00. Pendapatan retribusi tempat khusus parkir LO tahun 2024 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp906.370.000,00. Retribusi tempat khusus parkir LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp906.370.000,00 dibandingkan dengan pendapatan retribusi tempat khusus parkir LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp784.061.000,00 terjadi kenaikan sebesar 15,60%.

3. **Retribusi Perizinan Tertentu**

A. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR)

Retribusi perizian tertentu LO berupa retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) LO.

☑ Retribusi IMB LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan IMB yang diterbitkan untuk masa tahun 2024 adalah sebesar Rp719.718.248,00. Pendapatan retribusi IMB LO tahun 2024 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp719.718.248,00 dan yang menjadi piutang tahun lalu adalah sebesar Rp0,00. Pendapatan retribusi IMB LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp719.718.248,00 dibandingkan dengan pendapatan retribusi IMB LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp1.189.201.354,00 terjadi penurunan sebesar 39,48%.

B. Dinas Perhubungan

Retribusi perizian tertentu LO berupa retribusi izin trayek LO.

☑ Retribusi izin trayek LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk masa tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00. Pendapatan retribusi izin trayek LO tahun 2024 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp0,00. Retribusi izin trayek LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dibandingkan dengan pendapatan retribusi izin trayek LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp1.200.000,00 terjadi penurunan sebesar 100%.

8.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LO

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4 = (2/3x100%)-100%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan LO	**22.726.366.969,54**	**22.714.358.167,73**	**0,05%**

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan LO mengakui penerimaan yang merupakan hak pemerintah Kota Madiun tanpa mempertimbangkan apakah kas sudah diterima atau belum oleh kas daerah pada tahun berjalan. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PDAM

LO, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari BPR Bank Daerah LO, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PD Aneka Usaha LO dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Bank Jatim LO. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan LO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp22.726.366.969,54 dibandingkan 31 Desember 2023 sebesar Rp22.714.358.167,73 terjadi kenaikan sebesar 0,05%.

Perincian pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 tersaji pada tabel dibawah ini. Dan tersaji pada lampiran 8.1.1.3

Tabel 8.1.1.3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LO

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan LO	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4 = (2/3x100%)-100%
1. PDAM	12.666.627.092,01	14.613.817.270,30	(13,32%)
2. BPR Bank Daerah	1.542.147.724,00	(263.592.908,00)	(685,05%)
3. Aneka Usaha	1.225.827.969,00	1.246.653.376,00	(1,67%)
4. Bank Jatim	7.291.764.184,53	7.117.480.429,43	2,45%
Total	**22.726.366.969,54**	**22.714.358.167,73**	**0,05%**

1. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PDAM LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan laba bersih yang tersaji pada Laporan Keuangan PDAM Tahun 2024 adalah sebesar Rp12.666.627.092,01. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PDAM LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp12.666.627.092,01 dibandingkan dengan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PDAM LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp14.613.817.270,30 terjadi penurunan sebesar 13,32%.
2. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Perumda BPR Bank Daerah LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah sesuai laba bersih yang tersaji pada Laporan Keuangan BPR Bank Daerah Tahun 2024 adalah sebesarRp1.542.147.724,00. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Perumda BPR Bank Daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp1.617.868.593,17 dibandingkan dengan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Perumda BPR Bank Daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar (Rp263.592.908,00) terjadi penurunan sebesar 685,05%.

3. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Perumda Aneka Usaha LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan laba bersih yang tersaji pada Laporan Keuangan PD Aneka Usaha LO Tahun 2024 adalah sebesar Rp1.225.827.969,00. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Perumda Aneka Usaha LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp1.225.827.969,00 dibandingkan dengan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Perumda Aneka Usaha LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp1.246.653.376,00 terjadi penurunan sebesar 1,67%.
4. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Bank jatim yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan laba bersih yang tersaji pada Laporan Keuangan Bank Jatim LO Tahun 2024 telah tersaji Rp7.291.764.184,53. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Bank Jatim LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp7.291.764.184,53 dibandingkan dengan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Bank Jatim LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp7.117.480.429,43 terjadi kenaikan sebesar 2,45%.

8.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah LO

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4 = (2/3x100%)-100%
Lain-lain PAD Yang Sah LO	**5.609.254.628,57**	**106.334.681.417,37**	**(94,72%)**

Jumlah pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp5.609.254.628,57 merupakan pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang dipisahkan yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun tahun 2024. Pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah LO mengakui penerimaan yang merupakan hak pemerintah Kota Madiun pada tahun 2024 tanpa mempertimbangkan apakah kas sudah diterima atau belum oleh kas daerah. Pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah LO terdiri dari hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan LO, jasa giro LO, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan LO, hasil pengelolaan dana bergulir LO, pendapatan lain-lain LO, dan pendapatan BLUD LO. Pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah LO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp5.609.254.628,57 dibandingkan pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp106.334.681.417,37 terjadi penurunan sebesar 94,72%.

Perincian obyek pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 8.1.1.4.1
Lain-Lain PAD yang Sah LO

4.1.4 Lain-Lain PAD yang sah	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
1	2	3	4 = (3/2)
7.1.4.02 Jasa giro	810.070.401,32	599.729.647,13	35,07%
7.1.4.07 Pendapatan Bunga deposito	1.267.092.988,64	2.880.498.521,96	(56,01%)
7.1.4.06 Denda keterlambatan pelaksanaan keg	220.591.369,81	172.086.543,39	28,19%
7.1.4.10 Pendapatan dari Pengembalian	509.412.385,09	1.187.998.977,67	(57,12%)
7.1.4.13 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir (LKK)	845.569.329,35	837.527.189,49	0,96%
7.1.4.15 Pendapatan BLUD	1.220.236.904,36	99.873.032.079,73	(98,78%)
7.1.4.14 Denda Pajak	658.795.250,00	629.196.758,00	4,70%
7.1.4.21 Denda atas pelanggaran lengkap peraturan daerah	44.610.000,00	121.838.700,00	(63,39%)
7.1.04.01.02 Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
7.1.04.01.05 Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	32.876.000,00	32.773.000,00	0,31%
Jumlah	**5.609.254.628,57**	**106.334.681.417,37**	**(94,72%)**

Perincian pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 per OPD tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 8.1.1.4.2
Lain-Lain PAD yang Sah LO - OPD

Lain-lain PAD Yang Sah LO	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4 = (2/3x100%)-100%
1. Dinas Naker	**774.581.937,10**	**762.194.165,48**	**1,63%**
a. LKK	774.581.937,10	762.194.165,48	1,63%
2. Dinas Kesehatan dan RSUD	**1.220.236.904,36**	**99.873.032.079,73**	**(98,78%)**

Lain-lain PAD Yang Sah LO	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4 = (2/3x100%)-100%
a. Pendapatan BLUD	1.220.236.904,36	99.873.032.079,73	(98,78%)
3. BAPENDA	**658.795.250,00**	**629.196.758,00**	**4,70%**
a. Pendapatan Denda Pajak	658.795.250,00	629.196.758,00	4,70%
4. BKAD	**2.878.154.537,11**	**4.915.646.714,16**	**(41,45%)**
a. Jasa giro	810.070.401,32	599.729.647,13	35,07%
b. Pendapatan bunga deposito	1.267.092.988,64	2.880.498.521,96	(56,01%)
c. Hasil pengelolaan dana bergulir	70.987.392,25	75.333.024,01	(5,77%)
d. Pendapatan atas denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan	220.591.369,81	172.086.543,39	28,19%
e. Pendapatan pengembalian pembayaran gaji dan tunjangan	509.412.385,09	1.187.998.977,67	(57,12%)
f.Hasil penjualan peralatan dan mesin	0,00	0,00	0,00
5. Dinas Perhubungan	**44.255.500,00**	**121.462.500,00**	**(63,56%)**
a. Pendapatan denda atas pelanggaran	44.255.500,00	121.462.500,00	(63,56%)
6. Dinas Pertanian	**32.876.000,00**	**32.773.000,00**	**0,31%**
a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan	32.876.000,00	32.773.000,00	0,31%
7. Dinas Perkim	**354.500,00**	**376.200,00**	**(5,77%)**
a. Pendapatan denda atas pelanggaran	354.500,00	376.200,00	(5,77%)
TOTAL	**5.609.254.628,57**	**106.334.681.417,37**	**(94,72%)**

1. Dinas Naker

☑Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir berupa pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) LO. Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir LKK LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan persentasi bagian hasil atas laba LKK menurut Laporan Keuangan LKK di seluruh kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Madiun untuk masa tahun 2024 adalah sebesar Rp774.581.937,10. Pendapatan hasil

pengelolaan dana bergulir LKK LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp774.581.937,10 dibandingkan dengan pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir LKK LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp762.194.165,48terjadi kenaikan sebesar 1,63%.

2. Dinas Kesehatan dan RSUD

☑ Pendapatan BLUD Puskesmas dan RSUD LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan jasa pelayanan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) untuk masa tahun 2024 adalah sebesar Rp1.220.236.904,36. Terdapat pembayaran piutang tahun berjalan sebesar Rp0,00 dan piutang tahun 2023 sebesar Rp0,00. Pendapatan RSUD LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp1.220.236.904,36 dibandingkan dengan pendapatan BLUD Puskesmas LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp99.873.032.079,73 terjadi penurunan sebesar 98,78%.

3. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)

☑ Pendapatan Badan Pendapatan Daerah LO berupa Pendapatan lain-lain LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk masa tahun 2024 adalah sebesar Rp658.795.250,00. Pendapatan lain-lain LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp658.795.250,00 dibandingkan dengan pendapatan lain-lain LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp629.196.758,00 terjadi kenaikan sebesar 4,70%.

4. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)

☑ Pendapatan jasa giro LO berupa pendapatan jasa giro RKUD dan jasa giro pemegang kas LO. Pendapatan jasa giro LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan jasa giro RKUD dan seluruh bendahara pengeluaran non BLUD untuk masa tahun 2024 adalah sebesar Rp810.070.401,32. Pendapatan jasa giro LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp810.070.401,32 dibandingkan dengan pendapatan jasa giro LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp599.729.647,13 terjadi kenaikan sebesar 35,07%.

☑ Pendapatan bunga deposito LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan bunga deposito RKUD dan seluruh bendahara pengeluaran non BLUD untuk masa tahun 2024 adalah sebesar Rp1.267.092.988,64. Pendapatan bunga deposito LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp1.267.092.988,64 dibandingkan dengan pendapatan bunga

deposito LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp2.880.498.521,96 terjadi penurunan sebesar 56,01%.

- ☑ Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir berupa pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) LO. Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir LKK LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan persentasi bagian hasil atas laba LKK menurut Laporan Keuangan LKK di seluruh kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Madiun untuk masa tahun 2024 adalah sebesar Rp70.987.392,25. Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir LKK LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp70.987.392,25. Dibandingkan dengan pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir LKK Lo untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp75.333.024,01 terjadi penurunan sebesar 5,77%.
- ☑ Pendapatan atas denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun tahun 2024 sebesar Rp220.591.369,81. Pendapatan atas denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp220.591.369,81 dibandingkan dengan pendapatan atas denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp172.086.543,39 terjadi kenaikan sebesar 28,19%.
- ☑ Pendapatan dari pengembalian pembayaran gaji dan tunjangan LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun sebesar Rp509.412.385,09. Pendapatan dari pengembalian pembayaran gaji dan tunjangan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp509.412.385,09 dibandingkan dengan pendapatan pengembalian pembayaran gaji dan tunjangan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp1.187.998.977,67 terjadi penurunan sebesar 57,12%.

5. Dinas Perhubungan

Pendapatan atas pelanggaran (lengkap peraturan) LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun tahun 2024 sebesar Rp44.255.500,00. Pendapatan atas pelanggaran (lengkap peraturan) LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp44.255.500,00 dibandingkan dengan pendapatan atas denda atas pelanggaran (lengkap peraturan) LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp121.462.500,00 mengalami penurunan sebesar 63,56%.

6. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Pendapatan penjualan hasil perikanan LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan hasil kekayaan

daerah yang tidak dipisahkan untuk masa tahun 2024 adalah sebesar Rp32.876.000,00. Pendapatan penjualan hasil perikanan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp32.876.000,00 dibandingkan dengan pendapatan penjualan hasil perikanan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp32.773.000,00 terjadi kenaikan sebesar 0,31%.

7. Dinas Perkim

Pendapatan atas pelanggaran (lengkap peraturan) LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun tahun 2024 sebesar Rp354.500,00. Pendapatan atas pelanggaran (lengkap peraturan) LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp354.500,00 dibandingkan dengan pendapatan atas denda atas pelanggaran (lengkap peraturan) LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp376.200,00 mengalami penurunan sebesar 5,77%.

8.1.2. PENDAPATAN TRANSFER LO

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4 = (2/3x100%)-100%
Pendapatan Transfer LO	**873.815.280.785,63**	**880.526.052.824,80**	**(0,76%)**

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo pendapatan transfer LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024. Pendapatan transfer LO mengakui penerimaan yang merupakan hak pemerintah Kota Madiun yang sudah diterima oleh kas daerah untuk tahun berjalan. Pendapatan transfer LO terdiri transfer pemerintah pusat-dana perimbangan LO, transfer pemerintah pusat – lainnya LO, dan transfer pemerintah provinsi LO. Pendapatan transfer LO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp873.815.280.785,63 dibandingkan pendapatan transfer LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp880.526.052.824,80 terjadi penurunan sebesar 0,76%.

Perincian pendapatan transfer LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 8.1.2
Pendapatan Transfer LO

Pendapatan Transfer LO	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%

1. Transfer Pemerinta Pusat – Dana Perimbangan LO	706.803.458.685,63	684.539.046.012,80	3,25%
2. Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya LO	49.368.525.000,00	74.714.922.000,00	(33,92%)
3. Transfer Pemerintah Provinsi LO	117.643.297.100,00	121.272.084.812,00	(2,99%)
Total	**873.815.280.785,63**	**880.526.052.824,80**	**0,76%**

8.1.2.1. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan LO

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4 = (2/3x100%)-100%
Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan LO	**706.803.458.685,63**	**684.539.046.012,80**	**3,25%**

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo pendapatan transfer pemerintah pusat-dana perimbangan LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023. Pendapatan transfer pemerintah pusat-dana perimbangan LO mengakui penerimaan yang merupakan hak pemerintah Kota Madiun yang sudah diterima oleh kas daerah pada tahun berjalan. Pendapatan transfer pemerintah pusat-dana perimbangan LO terdiri bagi hasil pajak LO, bagi hasil bukan pajak/SDA LO, DAU LO, DAK LO dan bagi hasil cukai LO. Sesuai dengan pagu anggaran Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2023 tentang rincian anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2024 tentang pengelolaan Dana Bagi Hasil atau Dana Alokasi Umum yang di salurkan secara non tunai melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility. Dengan demikian, kenaikan maupun penurunan dana bagi hasil merupakan kewenangan penuh dari Pemerintah Pusat. Pendapatan transfer pemerintah pusat-dana perimbangan LO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp706.803.458.685,63 dibandingkan 31 Desember 2023 Rp684.539.046.012,80 terjadi kenaikan sebesar 3,25%.

Perincian pendapatan transfer pemerintah pusat-dana perimbangan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 8.1.2.1
Tranfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan LO

Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan LO	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4 = (2/3x100%)-100%
1. Bagi hasil pajak LO	5.645.523.741,00	42.560.552.000,00	(86,74%)

2. Bagi hasil SDA LO	27.094.012.200,00	36.475.210.342,00	(25,72%)
3. DAU LO	509.310.785.281,00	487.141.770.396,00	4,55%
4. DAK LO	117.131.678.463,63	82.402.483.839,80	42,15%
5. Bagi hasil cukai LO	47.621.459.000,00	35.959.029.435,00	32,43%
Total	**706.803.458.685,63**	**684.539.046.012,80**	**3,25%**

8.1.2.1.1.Bagi Hasil Pajak LO

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4 = (2/3x100%)-100%
Bagi Hasil Pajak LO	**5.645.523.741,00**	**42.560.552.000,00**	**(86,74%)**

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo pendapatan bagi hasil pajak LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023. Pendapatan bagi hasil pajak LO mengakui penerimaan yang merupakan hak pemerintah Kota Madiun yang telah diterima oleh kas daerah pada tahun berjalan. Pendapatan bagi hasil pajak LO terdiri bagi hasil PBB LO, bagi hasil PPh Pasal 21, 25 dan 29 LO. Pendapatan dana bagi hasil pajak LO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp5.645.523.741,00 dibandingkan pendapatan dana bagi hasil pajak LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp42.560.552.000,00 terjadi penurunan sebesar 86,74%.
Perincian pendapatan bagi hasil pajak LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 tersaji pada tabel dibawah ini

Tabel 8.1.2.1.1
Bagi Hasil Pajak LO

Bagi Hasil Pajak LO	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4 = (2/3x100%)-100%
1. PBB LO	2.815.756.741,00	2.725.606.000,00	3,31%
2. PPh Pasal 21,25,29 LO	2.829.767.000,00	39.834.946.000,00	(92,90%)
Total	**5.645.523.741,00**	**42.560.552.000,00**	**(86,74%)**

1. Pendapatan bagi hasil pajak-PBB LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan setoran bagi hasil

pajak-PBB LO dari pemerintah pusat sebesar Rp2.815.756.741,00 untuk masa tahun 2024. Pendapatan bagi hasil pajak-PBB LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp2.815.756.741,00 dibandingkan dengan pendapatan dana bagi hasil pajak-PBB LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp2.725.606.000,00 terjadi kenaikan sebesar 3,31%.

2. Pendapatan bagi hasil pajak – PPh Pasal 21, 25, 29 LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan setoran bagi hasil pajak – PPh Pasal 21, 25, 29 LO dari pemerintah pusat sebesar Rp2.829.767.000,00 untuk masa tahun 2024. Pendapatan bagi hasil pajak PPh Pasal 21, 25, 29 LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp2.829.767.000,00 dibandingkan dengan pendapatan bagi hasil pajak – PPh Pasal 21, 25, 29 LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp39.834.946.000,00 terjadi penurunan sebesar 92,90%.

8.1.2.1.2.Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA LO

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4 = (2/3x100%)-100%
Bagi Hasil Bukan Pajak/ SDA LO	**27.094.012.200,00**	**36.475.210.342,00**	**(25,72%)**

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo pendapatan bagi hasil bukan pajak/SDA LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023. Pendapatan bagi hasil bukan pajak/SDA LO mengakui penerimaan yang merupakan hak pemerintah Kota Madiun yang sudah diterima atau belum oleh kas daerah. Pendapatan bagi hasil bukan pajak/SDA LO terdiri bagi hasil sumber daya kehutanan LO, bagi hasil pungutan hasil perikanan LO, dan bagi hasil pertambangan umum migas LO. Pendapatan bagi hasil bukan pajak/SDA LO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp27.094.012.200,00 dibandingkan 31 Desember 2023 sebesar Rp36.475.210.342,00 terjadi penurunan sebesar 25,72%.

Perincian pendapatan bagi hasil bukan pajak/SDA LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 tersaji pada tabel dibawah ini

Tabel 8.1.2.1.2
Bagi Hasil Bukan Pajak LO

Bagi Hasil Bukan Pajak LO	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4 = (2/3x100%)-100%
1. DBH SDA Minyak Bumi	25.158.425.000,00	33.797.056.552,00	(25,56%)
2. DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	16.230.200,00	12.969.320,00	25,14%
3. DBH SDA Mineral dan Batu Bara	311.461.200,00	938.550.591,00	(66,81%)
4.DBH SDA Mineral dan Batu Bara Royalty	380.674.800,00	0,00	100%
5. DBH SDA Kehutanan	153.410.000,00	281.746.668,00	(45,55%)
6. DBH SDA Perikanan	1.073.811.000,00	1.444.887.211,00	(25,68%)
Total	**27.094.012.200,00**	**36.475.210.342,00**	**(25,72%)**

1. Pendapatan bagi hasil bukan pajak- SDA minyak bumi LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan setoran dana bagi hasil bukan pajak- SDA minyak bumi LO dari pemerintah pusat sebesar Rp25.158.425.000,00 untuk masa tahun 2024. Pendapatan bagi hasil bukan pajak- SDA minyak bumi LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp25.158.425.000,00 dibandingkan dengan pendapatan bagi hasil bukan pajak- SDA minyak bumi LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp33.797.056.552,00 terjadi penurunan sebesar 25,56%.
2. Pendapatan bagi hasil bukan pajak- SDA panas bumi LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan setoran bagi hasil bukan pajak- panas bumi LO dari pemerintah pusat sebesar Rp16.230.200,00 untuk masa tahun 2024. Pendapatan bagi hasil bukan pajak- SDA panas bumi LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp16.230.200,00 dibandingkan dengan pendapatan bagi hasil bukan pajak- SDA panas bumi LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp12.969.320,00 terjadi kenaikan sebesar 25,14%.
3. Pendapatan bagi hasil bukan pajak- SDA mineral dan batu bara LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan setoran bagi hasil bukan pajak- SDA mineral dan batu bara LO dari pemerintah pusat sebesar Rp311.461.200,00 untuk masa tahun 2024. Pendapatan bagi hasil bukan pajak- SDA mineral dan batu bara LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp311.461.200,00 dibandingkan dengan pendapatan bagi hasil bukan pajak- SDA mineral dan

batu bara LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp938.550.591,00 terjadi penurunan sebesar 66,81%.

4. Pendapatan bagi hasil bukan pajak- SDA mineral dan batu bara Royalty LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan setoran bagi hasil bukan pajak- SDA mineral dan batu bara Royalty LO dari pemerintah pusat sebesar Rp380.674.800,00 untuk masa tahun 2024. Pendapatan bagi hasil bukan pajak- SDA mineral dan batu bara Royalty LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp380.674.800,00 dibandingkan dengan pendapatan bagi hasil bukan pajak- SDA mineral dan batu bara LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 terjadi kenaikan sebesar 100%.
5. Pendapatan bagi hasil bukan pajak- SDA kehutanan LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan setoran bagi hasil bukan pajak- SDA kehutanan LO dari pemerintah pusat untuk masa tahun 2024 adalah sebesar Rp153.410.000,00. Pendapatan bagi hasil bukan pajak- SDA kehutanan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp153.410.000,00 dibandingkan dengan pendapatan bagi hasil bukan pajak- SDA kehutanan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp281.746.668,00 terjadi penurunan sebesar 45,55%.
6. Pendapatan bagi hasil bukan pajak- SDA perikanan LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan setoran bagi hasil bukan pajak- SDA perikanan LO dari pemerintah pusat sebesar Rp1.073.811.000,00 untuk masa tahun 2024. Pendapatan bagi hasil bukan pajak- SDA perikanan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp1.073.811.000,00 dibandingkan dengan pendapatan bagi hasil bukan pajak- SDA perikanan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp1.444.887.211,00 terjadi penurunan sebesar 25,68%.

8.1.2.1.3.Dana Alokasi Umum (DAU) LO

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4 = (2/3x100%)-100%
Dana Alokasi Umum LO	**509.310.785.281,00**	**487.141.770.396,00**	**4,55%**

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo pendapatan DAU LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023. Pendapatan DAU LO mengakui penerimaan yang merupakan hak pemerintah Kota Madiun yang sudah diterima oleh kas daerah. Pendapatan DAU LO

untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp509.310.785.281,00 apabila dibandingkan pendapatan DAU LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp487.141.770.396,00 terjadi kenaikan sebesar 4,55%.

8.1.2.1.4.Dana Alokasi Khusus (DAK) LO

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4 = (2/3x100%)-100%
Dana Alokasi Khusus/DAK LO	**117.131.678.463,63**	**82.402.483.839,80**	**42,15%**

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo pendapatan DAK LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023. Pendapatan DAK LO mengakui penerimaan yang merupakan hak pemerintah Kota Madiun yang sudah diterima oleh kas daerah. Dana Alokasi Khusus Pemerintah Madiun mendapat alokasi Dana Alokasi Khusus dengan realisasi sampai dengan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp117.131.678.463,63. Pendapatan DAK LO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp117.131.678.463,63 dibandingkan DAK LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp82.402.483.839,80 terjadi kenaikan sebesar 42,15%. Perincian pendapatan DAK LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 8.1.2.1.4
Dana Alokasi Khusus LO

Penerimaan Dana Alokasi Khusus	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Prosentase
1	2	3	4
4.2.01.01.03 DAK Fisik	29.693.124.361,00	5.699.869.054,00	420,94%
4.2.01.01.04 DAK Non Fisik	87.438.554.102,63	76.702.614.785,80	14,00%
Jumlah	**117.131.678.463,63**	**82.402.483.839,80**	**42,15%**

8.1.2.1.5.Bagi Hasil Cukai LO

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4 = (2/3x100%)-100%
Bagi Hasil Cukai LO	**47.621.459.000,00**	**35.959.029.435,00**	**32,43%**

Jumlah pendapatan bagi hasil cukai LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023. Pendapatan bagi hasil cukai LO mengakui penerimaan yang merupakan hak pemerintah Kota Madiun yang sudah diterima oleh kas daerah. Pendapatan bagi hasil cukai LO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp47.621.459.000,00 dibandingkan bagi hasil cukai LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp35.959.029.435,00 terjadi kenaikan sebesar 32,43%.

8.1.2.2.Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya LO

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4 = (2/3x100%)-100%
Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya LO	**49.368.525.000,00**	**74.714.922.000,00**	**(33,92%)**

Jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat-lainnya LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023. Pendapatan transfer pemerintah pusat-lainnya LO mengakui penerimaan yang merupakan hak pemerintah Kota Madiun yang sudah diterima oleh kas daerah. Pendapatan transfer pemerintah pusat-lainnya LO terdiri dana otonomi khusus LO dan dana penyesuaian LO. Pendapatan transfer pemerintah pusat-lainnya LO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp49.368.525.000,00 dibandingkan transfer pemerintah pusat-lainnya LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp74.714.922.000,00 terjadi penurunan sebesar 33,92%. Perincian pendapatan transfer pemerintah pusat-lainnya LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 8.1.2.2
Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya LO

Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya LO	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4 = (2/3x100%)-100%
1. DAK otonomi khusus LO	0,00	0,00	0,00
2. Dana penyesuaian LO	49.368.525.000,00	74.714.922.000,00	(33,92%)
Total	**49.368.525.000,00**	**74.714.922.000,00**	**(33,92%)**

8.1.2.2.2.Dana Penyesuaian LO

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4 = (2/3x100%)-100%
Dana Penyesuaian LO	**49.368.525.000,00**	**74.714.922.000,00**	**(33,92%)**

Jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat-dana penyesuaian LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023. Pendapatan dana penyesuaian LO mengakui penerimaan yang merupakan hak pemerintah Kota Madiun yang sudah diterima oleh kas daerah. Pendapatan dana penyesuaian LO terdiri dana insentif daerah (DID) LO dan dana insentif daerah tambahan LO.

Perincian pendapatan dana penyesuaian LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 8.1.2.2.1
Dana Penyesuaian LO

Dana Penyesuaian LO	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4 = (2/3x100%)-100%
1. Dana insentif daerah (DID) LO	49.368.525.000,00	74.714.922.000,00	(33,92%)
Total	**49.368.525.000,00**	**74.714.922.000,00**	**(33,92%)**

Pendapatan dana insentif daerah LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan setoran dana insentif daerah LO, untuk tahun anggaran 2023 Pemerintah Kota Madiun mendapatkan alokasi pendapatan dana insentif daerah LO sebesar Rp49.368.525.000,00. Pendapatan Dana Insentif Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp49.368.525.000,00 dibandingkan pendapatan Dana Insentif Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp74.714.922.000,00 mengalami penurunan sebesar 33,92%

8.1.2.3.Transfer Pemerintah Provinsi LO

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4 = (2/3x100%)-100%
Transfer Pemerintah Provinsi LO	**117.643.297.100,00**	**121.272.084.812,00**	**(2,99%)**

Jumlah pendapatan transfer pemerintah provinsi LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31

Desember 2024 dan 31 Desember 2023. Pendapatan transfer pemerintah provinsi LO mengakui penerimaan yang merupakan hak pemerintah Kota Madiun yang sudah diterima oleh kas daerah. Pendapatan transfer pemerintah provinsi LO terdiri dana bagi hasil pajak LO dan dana bagi hasil lainnya LO. Pendapatan transfer pemerintah provinsi LO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp117.643.297.100,00 dibandingkan 31 Desember 2023 sebesar Rp121.272.084.812,00 terjadi penurunan sebesar 2,99%.

Perincian pendapatan transfer pemerintah provinsi LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 8.1.2.3
Transfer Pemerintah Provinsi LO

Transfer Pemerintah Provinsi LO	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4 = (2/3x100%)-100%
1. Dana bagi hasil pajak LO	116.973.247.100,00	120.565.582.200,00	(2,98%)
2. Dana bagi hasil lainnya LO	0,00	0,00	0,00
3. Bantuan Keuangan LO	670.050.000,00	706.502.612,00	(5,16%)
Total	**117.643.297.100,00**	**121.272.084.812,00**	**(2,99%)**

8.1.2.3.1.Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak LO

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4 = (2/3x100%)-100%
Pendapatan Dana Bagi Pajak LO	**116.973.247.100,00**	**120.565.582.200,00**	**(2,98%)**

Jumlah pendapatan dana bagi hasil pajak LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023. Pendapatan dana bagi hasil pajak LO mengakui penerimaan yang merupakan hak pemerintah Kota Madiun yang sudah diterima oleh kas daerah. Pendapatan dana bagi hasil pajak LO terdiri pajak kendaraan bermotor (PKB) LO, bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) LO, pajak pemanfaatan air permukaan LO, dan pajak rokok LO. Pendapatan dana bagi hasil pajak LO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp116.973.247.100,00 dibandingkan 31 Desember 2023 sebesar Rp120.565.582.200,00 terjadi penurunan sebesar 2,98%.
Perincian pendapatan dana bagi hasil pajak LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 8.1.2.3.1
Transfer Pemerintah Provinsi Dana Bagi Hasil Pajak LO

Transfer Pemerintah Provinsi Dana Bagi Hasil Pajak LO	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
1. PKB LO	34.171.954.000,00	34.918.489.800,00	(2,14%)
2. BBNKB LO	13.954.270.800,00	15.339.681.100,00	(9,03%)
3. Pajak bahan bakar kendaran bermotor LO	33.317.236.500,00	29.292.250.400,00	13,74%
4. Pajak air permukaan LO	253.777.100,00	371.681.600,00	(31,72%)
5. Pajak Rokok LO	35.276.008.700,00	40.643.479.300,00	(13,21%)
Total	**116.973.247.100,00**	**120.565.582.200,00**	**(2,98%)**

1. Pendapatan dana bagi hasil PKB LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan setoran dana bagi hasil PKB LO sebesar Rp34.171.954.000,00 untuk masa tahun 2024. Pendapatan dana bagi hasil PKB LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp34.171.954.000,00 dibandingkan dengan pendapatan dana bagi hasil PKB LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp34.918.489.800,00 terjadi penurunan sebesar 2,41%.
2. Pendapatan dana bagi hasil BBNKB LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan setoran dana bagi hasil BBNKB LO sebesar Rp13.954.270.800,00 untuk masa tahun 2024. Pendapatan dana bagi hasil BBNKB LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp13.954.270.800,00 dibandingkan dengan pendapatan dana bagi hasil BBNKB LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp15.339.681.100,00 terjadi penurunan sebesar 9,03%.
3. Pendapatan dana bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan setoran dana bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor LO sebesar Rp33.317.236.500,00 untuk masa tahun 2024. Pendapatan dana bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp33.317.236.500,00 dibandingkan dengan pendapatan dana bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp29.292.250.400,00 terjadi kenaikan sebesar 13,74%.
4. Pendapatan dana bagi hasil pajak air permukaan LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan

setoran dana bagi hasil pajak air permukaan LO sebesar Rp253.777.100,00 untuk masa tahun 2024. Pendapatan dana bagi hasil pajak air permukaan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp253.777.100,00 dibandingkan dengan pendapatan dana bagi hasil pajak air permukaan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp371.681.600,00 terjadi penurunan sebesar 31,72%.

5. Pendapatan dana bagi hasil pajak rokok LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan setoran dana bagi hasil pajak rokok LO sebesar Rp35.276.008.700,00 untuk masa tahun 2024. Pendapatan dana bagi hasil pajak rokok LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp35.276.008.700,00 dibandingkan dengan pendapatan dana bagi hasil pajak rokok LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp40.643.479.300,00 terjadi penurunan sebesar 13,21%.

8.1.2.3.2.Bantuan Keuangan LO

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4 = (2/3x100%)-100%
Bantuan Keuangan dari Provinsi LO	**670.050.000,00**	**706.502.612,00**	**(5,16%)**

Jumlah pendapatan bantuan keuangan dari provinsi LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023. Pendapatan bantuan keuangan dari provinsi LO mengakui penerimaan yang merupakan hak pemerintah Kota Madiun yang sudah diterima oleh kas daerah. Pendapatan bantuan keuangan dari provinsi LO berupa bantuan keuangan penyelenggaaraan pendidikan madrasah diniyah dan guru swasta LO, bantuan keuangan pelaksanan hari aksara LO, bantuan keuangan community college LO, bantuan keuangan BOP Madiun LO, bantuan keuangan peningkatan hari jadi provinsi LO, bantuan keuangan pengembangan taman posyandu LO, Kegiatan Seleksi dan Pembinaan guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Diknas Berprestasi LO, Setoran Bantuan Provinsi Honor 1 Dokter Puskesmas rawat Inap dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan. Pendapatan bantuan keuangan dari provinsi LO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp670.050.000,00 dibandingkan 31 Desember 2023 sebesar Rp706.502.612,00 terjadi penurunan sebesar 5,16 %.
Perincian pendapatan dana bagi hasil pajak LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 8.1.2.3.2
Transfer Pemerintah Provinsi Dana Bagi Hasil Lainnya LO

Transfer Pemerintah Provinsi Dana Bagi Hasil Lainnya LO	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4 = (2/3x100%)-100%
Bantuan keuangan dari provinsi LO	670.050.000,00	706.502.612,00	(5,16%)
Total	**670.050.000,00**	**706.502.612,00**	**(5,16%)**

8.1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH LO

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4 = (2/3x100%)-100%
Lain-lain Pendapatan Yang Sah LO	**51.045.681.420,00**	**22.889.792.772,67**	**123,01%**

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo pendapatan lain-lain pendapatan yang sah LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023. Pendapatan lain-lain pendapatan yang sah LO mengakui penerimaan yang merupakan hak pemerintah Kota Madiun pada tahun 2024 tanpa mempertimbangkan apakah kas sudah diterima atau belum oleh kas daerah. Pendapatan lain-lain pendapatan yang sah LO terdiri pendapatan hibah LO, pendapatan darurat LO, pendapatan lainnya LO. Pendapatan lain-lain pendapatan yang sah LO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp51.045.681.420,00 dibandingkan 31 Desember 2023 sebesar Rp22.889.792.772,67 terjadi kenaikan sebesar 123,01%.

Perincian pendapatan lain-lain pendapatan yang sah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 8.1.3
Lain-Lain Pendapatan yang Sah LO

Lain-Lain Pendapatan Yang Sah LO	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4 = (2/3x100%)-100%
1. Pendapatan hibah LO	51.045.681.420,00	22.889.792.772,67	123,01%
2. Pendapatan lainnya LO	0,00	0,00	0,00
Total	**51.045.681.420,00**	**22.889.792.772,67**	**123,01%**

8.1.3.1.Pendapatan Dana Hibah LO

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4 = (2/3x100%)-100%
Pendapatan Dana Hibah LO	**51.045.681.420,00**	**22.889.792.772,67**	**123,01%**

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo pendapatan dana hibah LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023. Pendapatan dana hibah LO mengakui penerimaan yang merupakan hak pemerintah Kota Madiun tanpa mempertimbangkan apakah kas sudah diterima atau belum oleh kas daerah pada tahun berjalan. Pendapatan dana hibah terdiri pendapatan hibah tugas pembantuan dari pemerintah pusat LO, pendapatan hibah dekonsentrasi dari provinsi, pendapatan hibah dari bantuan operasional sekolah, pendapatan hibah bantuan operasional sekolah (BOS) SMPN LO, pendapatan hibah bantuan operasional sekolah (BOS) SDN LO yang dianggarkan di BPKAD selaku SKPKD, pendapatan hibah blockgrant LO, pendapatan hibah barang dari pemerintah pusat LO, pendapatan hibah barang dari pemerintah provinsi LO, pendapatan hibah barang dari komite LO, pendapatan hibah lainnya LO. Pendapatan dana hibah LO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp51.045.681.420,00 dibandingkan pendapatan dana hibah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp22.889.792.772,67 terjadi kenaikan sebesar 123,01%.

Perincian pendapatan dana hibah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 8.1.3.1
Pendapatan Hibah LO

Pendapatan Dana Hibah LO	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4 = (2/3x100%)-100%
1.Pendapatan Hibah LO Dinkes	37.254.670,00	265.329.805,00	(85,96%)
2. Pendapatan Hibah LO DPU	0,00	1.164.905.527,67	(100%)
3. Pendapatan Hibah LO Dinas Perkim	22.968.077.000,00	20.604.672.812,00	11,47%
4. Pendapatan Hibah LO Satpol PP	0,00	42.327.500,00	(100%)
5.Pendapatan Hibah LO Dinsos	0,00	50.400.000,00	(100%)
6. Pendapatan Hibah LO Dishub	0,00	2.438.739,00	(100%)
7. Pendapatan Hibah LO Diskominfo	275.000.000,00	2.020.270,00	13.512,04%
8.Pendapatan Hibah LO Dispora	0,00	55.114.200,00	(100%)
9. Pendapatan Hibah LO Dinas Perpus	0,00	10.149.000,00	(100%)
10. Pendapatan Hibah LO Pereksos	0,00	533.000.000,00	(100%)

11. Pendapatan Hibah LO Sekwan	0,00	4.499.000,00	(100%)
12. Pendapatan Hibah LO BKAD	27.755.109.750	0,00	100%
13.Pendapatan Hibah LO Manguharjo	1.360.000,00	4.550.000,00	(70,11%)
14. Pendapatan Hibah LO Kec. Taman	0,00	80.385.919,00	(100%)
15. Pendapatan Hibah LO Disnaker	0,00	0,00	(100%)
16. Pendapatan Hibah LO Dukcapil	8.880.000,00	0,00	100%
17. Pendapatan Hibah LO Kec.Kartoharjo	0,00	0,00	(100%)
18. Pendapatan Hibah Dinas Perdagangan	0,00	70.000.000,00	(100%)
Total	**51.045.681.420,00**	**22.889.792.772,67**	**123,01%**

8.2. BEBAN OPERASI

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4 =(2/3x100%)-100%
Beban Operasi	**1.166.743.698.594,63**	**1.137.849.555.033,26**	**2,54%**

Jumlah tersebut merupakan jumlah beban operasi yang seharusnya dibayar atau menjadi kewajiban Pemerintah Kota Madiun yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023. Beban operasi merupakan beban yang menjadi kewajiban pemerintah Kota Madiun tanpa mempertimbangkan apakah sudah dibayar atau belum, pemakaian/konsumsi aset, penurunan nilai aset sebagai akibat aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun berjalan. Beban operasi terdiri dari beban pegawai, beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyisihan piutang, beban penyisihan kerugian investasi non permanen, beban penyusutan aset tetap, beban amortisasi aset tidak berwujud dan beban lain lain. Beban lain-lain terdiri dari belanja modal yang tidak memenuhi kapitalisasi (asset extracom). Beban operasi untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp1.166.743.698.594,63 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp1.137.849.555.033,26 terjadi kenaikan 2,54%.

Perincian beban operasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 8.2
Beban Operasi

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4 = (2/3x100%)-100%
1. Beban pegawai	438.132.139.826,25	422.881.149.234,89	3,61%
2. Beban persediaan	151.563.133.409,66	162.232.535.065,04	(6,55%)
3. Beban jasa	241.500.808.847,46	247.925.077.120,63	(2,59%)
4. Beban pemeliharaan	50.647.945.990,15	31.556.734.043,18	60,50%
5. Beban perjalanan dinas	45.152.002.754,00	42.894.685.591,00	5,26%
6. Beban Subsidi	49.955.750,00	99.146.000,00	(49,61%)
7. Beban hibah	45.738.043.231,63	44.134.020.599,50	3,63%
8. Beban bantuan sosial	30.881.786.000,00	31.804.857.500,00	(2,90%)
9. Beban Penyisihan Piutang	2.170.389.687,56	578.175.207,58	275,39%
Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Prosentase %

1		3	4 = (2/3x100%)-100%
10. Beban Penyusutan	144.425.326.887,70	150.036.103.064,44	(3,74%)
11. Beban Amortisasi	485.529.105,12	998.849.333,00	(51,39%)
12. Beban Penyusutan Aset Lain-lain	0,00	492.226.518,00	(100%)
13. Beban Lain-lain	15.996.637.105,10	2.215.995.756,00	621,87%
Jumlah	**1.166.743.698.594,63**	**1.137.849.555.033,26**	**2,54%**

8.2.1. Beban Pegawai

Uraian	30 Semptember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Prosentase % (Rp)
1	2	3	4 = (2/3x100%)-100%
Beban Pegawai	**438.132.139.826,25**	**422.881.149.234,89**	**3,61%**

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo beban pegawai yang seharusnya dibayar atau menjadi kewajiban Pemerintah Kota Madiun yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023. Beban pegawai mengakui beban yang merupakan kewajiban pemerintah Kota Madiun tanpa mempertimbangkan apakah sudah dibayar atau belum sebagai akibat aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun berjalan. Beban pegawai terdiri dari beban pegawai yang didanai dari APBD tahun anggaran 2024, beban pegawai yang didanai BLUD, beban pegawai yang didanai dari BOS. Beban pegawai untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp438.132.139.826,25 dibandingkan 31 Desember 2023 sebesar Rp422.881.149.234,89 terjadi kenaikan sebesar Rp15.250.990.591,36 atau sebesar 3,61%.

Perincian beban pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 8.2.1
Beban Pegawai
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024

Beban Pegawai	Ket	31 Desember 2024 (Rp)
1. Belanja Pegawai APBD	+	427.502.782.758,75
2. Belanja Pegawai BOS	+	0,00
3. Belanja Pegawai BLUD	+	10.206.834.281,00
4. Utang Belanja Pegawai 2024	+	4.221.941.950,00
5. Utang Belanja Pegawai 2023	(-)	(4.260.798.051,50)
6. BOK	+	461.378.888,00
Jumlah Beban Pegawai (1+2+3+4-5)		**438.132.139.826,25**

8.2.1.1. Beban Pegawai APBD

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4 = (2/3x100%)-100%
Beban Pegawai (APBD)	**427.502.782.758,75**	**415.044.760.473,39**	**3,00%**

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo pegawai yang seharusnya dibayar atau menjadi kewajiban Pemerintah Kota Madiun yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiun tahun 2024 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023. Beban pegawai mengakui beban yang merupakan kewajiban pemerintah Kota Madiun tanpa mempertimbangkan apakah sudah dibayar atau belum sebagai akibat aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun berjalan. Beban pegawai terdiri dari beban gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS, insentif pemungutan pajak daerah dan insentif pemungutan retribusi daerah, beban honorarium PNS, beban honorarium non PNS, beban uang lembur. Beban pegawai untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp427.502.782.758,75 dibandingkan beban pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp415.044.760.473,39 terjadi kenaikan sebesar Rp12.458.022.285,36 atau sebesar 3,00%.
Perincian beban pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 per OPD tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 8.2.1.1
Beban Pegawai APBD

Beban Pegawai Per OPD	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4 = (2/3x100%)-100%
Dinas Pendidikan	159.144.871.610,00	159.677.191.999,00	(0,33%)
Dinas Kesehatan KB	73.982.101.758,00	63.072.294.006,00	17,30%
Dinas PU TR	6.805.633.078,00	6.741.362.679,00	0,95%
Dinas Perkim	5.066.925.249,00	4.787.941.364,00	5,83%
KantorSatpol PP	6.494.142.959,00	6.239.014.742,00	4,09%
BPBD	1.773.490.829,00	1.701.613.226,00	4,22%
Dinas Sosial	5.194.962.296,00	5.424.675.511,00	(4,23%)
Dinas Tenaga Kerja	4.654.436.934,00	5.067.862.752,00	(8,16%)

Dinas LH	8.292.384.099,00	9.297.966.573,00	(10,82%)
Dispendukcapil	4.544.738.378,00	4.317.572.955,00	5,26%
Dinas Perhubungan	6.282.182.536,00	6.228.595.727,00	0,86%
Dinas Infokom	5.003.317.840,00	4.931.346.454,00	1,46%
Dinas PM, PTSP/KPPT	3.903.958.972,00	3.818.343.136,00	2,24%
Dinas Budparpora	4.215.979.804,00	4.265.260.370,00	(1,16%)
Dinas Perpustakaan	3.778.129.518,00	3.723.966.456,00	1,45%
Bagian Pemerintahan	708.486.262,00	816.749.507,00	(13,26%)
Bagian Organisasi	804.014.807,00	790.595.690,00	1,70%
Bagian Umum	10.937.245.577,00	11.090.677.770,00	(1,38%)
Bagian Hukum	827.003.410,00	829.661.789,00	(0,32%)
Bagian Perekkesra	850.117.200,00	906.628.617,00	(6,23%)
Bagian Adbang	1.448.781.373,00	1.652.305.058,00	(12,32%
Sekretariat DPRD	18.027.160.192,00	17.377.019.689,00	3,74%
BKPSDM	5.621.087.086,00	5.690.093.810,00	(1,21%)
BPKAD	20.343.872.547,00	18.764.087.938,00	8,42%
Bapenda	7.732.644.935,75	7.725.180.552,39	0,10%
Inspektorat	7.451.210.586,00	7.166.570.507,00	3,97%
BAPPEDA	4.574.356.082,00	4.693.769.022,00	(2,54%)
Kec Kartoharjo	10.713.111.447,00	10.742.772.955,00	(0,28%)
Kec Manguharjo	10.718.265.394,00	11.070.556.260,00	(3,18%)
Kec Taman	11.273.079.029,00	10.266.975.319,00	9,80%
Bakesbangpol	3.697.882.799,00	3.618.182.330,00	2,20%
Dinas Pertanian KP	4.423.226.641,00	4.204.677.559,00	5,20%

Dinas Perdagangan	8.213.981.531,00	8.343.248.151,00	(1,55%)
Total	**427.502.782.758,75**	**415.044.760.473,39**	**3,00%**

8.2.1.2. Beban Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
Beban Pegawai BLUD	**10.206.834.281,00**	**8.851.392.371,00**	**15,31%**

Jumlah beban pegawai BLUD yang seharusnya dibayar atau menjadi kewajiban Pemerintah Kota Madiun yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023. Beban pegawai BLUD mengakui beban pegawai yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan BLUD yang merupakan kewajiban pemerintah Kota Madiun tanpa mempertimbangkan apakah sudah dibayar atau belum sebagai akibat aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun berjalan. Beban pegawai BLUD terdiri dari beban pegawai BLUD Puskesmas dan beban pegawai blud RSUD. Beban pegawai BLUD untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 10.206.834.281,00 dibandingkan 31 Desember 2023 sebesar Rp8.851.392.371,00 terjadi kenaikan sebesar Rp1.355.441.910,00 atau sebesar 15,31%.

Perincian beban pegawai BLUD yang berakhir periode 31 Desember 2023 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 8.2.1.2
Beban Pegawai BLUD

Beban Pegawai BLUD	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4 = (2/3x100%)-100%
1. RSUD	10.206.834.281,00	8.851.392.371,00	15,31%
2. Puskesmas Ngegong	0,00	0,00	(100%)
3. Puskesmas Manguharjo	0,00	0,00	(100%)
4. Puskesmas Banjarejo	0,00	0,00	(100%)
5. Puskesmas Demangan	0,00	0,00	(100%)
6. Puskesmas Sukosari	0,00	0,00	(100%)
7. Puskesmas Tawangrejo	0,00	0,00	(100%)
Total	**10.206.834.281,00**	**8.851.392.371,00**	**15,31%**

8.2.1.3. Beban Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4 = (2/3x100%)-100%
Beban Pegawai BOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo beban pegawai BOS yang seharusnya dibayar atau menjadi kewajiban Pemerintah Kota Madiun yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023. Beban pegawai BOS mengakui beban pegawai yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan BOS pendidikan dasar dan menengah negeri yang merupakan kewajiban Pemerintah Kota Madiun tanpa mempertimbangkan apakah sudah dibayar atau belum sebagai akibat aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun berjalan. Beban pegawai BOS mengakui beban pegawai yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan BOS pendidikan dasar dan menengah negeri yang merupakan kewajiban pemerintah Kota Madiun tanpa mempertimbangkan apakah sudah dibayar atau belum sebagai akibat aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun berjalan. Beban pegawai BOS meliputi beban pegawai BOS SDN, beban pegawai BOS SMPN. Beban pegawai BOS untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dibandingkan 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 terjadi penurunan sebesar 100%.

Beban Pegawai BOS sebesar Rp0,00 merupakan beban pegawai yang tidak dikeluarkan melalui rekening kas daerah tetapi dilaksanakan di masing masing rekening BOS sekolah negeri. Perincian beban pegawai BOS yang berakhir untuk periode 31 Desember 2024 tersaji pada table dibawah ini.

Tabel 8.2.1.3
Beban Pegawai BOS

Beban Pegawai BOS	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4 = (2/3x100%)-100%
1. Pegawai BOS SDN	0,00	0,00	0,00
2. Pegawai BOSSMPN	0,00	0,00	0,00
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**

8.2.2. Beban Persediaan

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4 = (2/3x100%)-100%
Beban Persediaan	**151.563.133.409,66**	**162.232.535.065,04**	**(6,58%)**

Jumlah beban persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 merupakan konsumsi/pemakaian persediaan oleh Pemerintah Kota Madiun yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiun. Beban persediaan mengakui konsumsi/pemakaian persediaan tanpa mempertimbangkan apakah sudah dibayar atau belum sebagai akibat aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun berjalan. Beban persediaan mengakui konsumsi/pemakaian persediaan yang berasal dari sisa persediaan tahun lalu, hasil pengadaan dana APBD tahun anggaran 2024 hasil pengadaan dana BOS, hasil pengadaan dana BLUD, hasil pengadaan blockgrant, hasil pengadaan komite sekolah, hasil pengadaan tugas pembantuan, hasil pengadaan dekonsentrasi, hibah barang persediaan lainnya yang dipergunakan untuk aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun 2024. Pencatatan persediaan menggunakan pendekatan beban, sehingga setiap belanja barang jasa berupa belanja persediaan di catat sebagai beban persediaan dan pada akhir tahun dilakukan perhitungan fisik untuk mengetahui persediaan akhir. Beban persediaan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp151.563.133.409,66 dibandingkan 31 Desember 2023 sebesar Rp162.232.535.065,04 terjadi penurunan sebesar Rp10.634.046.404,38 atau sebesar 6,58%.

Perincian beban persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 8.2.2
Beban Persediaan
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024

Uraian	Ket	31 Desember 2024 (Rp)
1. Pemakaian Persediaan Tahun Lalu	+	11.987.864.968,26
2. Belanja Persediaan APBD	+	101.782.381.816,00
3. Belanja Persediaan BLUD	+	46.400.535.386,00
4. Belanja Persediaan BOS	+	7.688.723.164,00
5. BOK	+	2.945.937.500,00

6. Reklas Barang Jasa	-	(815.456.320)
7. Utang Persediaan	-	(8.843.934.470,50)
8. Koreksi Utang	-	4.934.078.075,00
9. Koreksi Aset	-	(449.488.817)
10. Sisa Persediaan Tahun 2023	-	(14.102.863.143,10)
11. Persediaan Kadaluwarsa	+	35.355.251,00
Jumlah Beban Persediaan (1+2+3+4+5-6+7-8+9-10)		**151.563.133.409,66**

8.2.3. Beban Jasa

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4 = (2/3x100%)-100%
Beban Jasa	**241.500.808.847,46**	**247.925.077.120,63**	**(2,59%)**

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo beban jasa atas penggunaan jasa oleh Pemerintah Kota Madiun yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023. Beban jasa mengakui penggunaan jasa yang merupakan kewajiban pemerintah Kota Madiun tanpa mempertimbangkan apakah sudah dibayar atau belum sebagai akibat aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun berjalan. Beban jasa mengakui penggunaan jasa yang berasal dari dana APBD tahun anggaran 2024, dana BOS, hasil dana BLUD, dana blockgrant, dana komite sekolah, dana tugas pembantuan, dana dekonsentrasi, hibah jasa lainnya yang dipergunakan untuk aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama berjalan. Beban jasa untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp241.500.808.847,46dibandingkan 31 Desember 2023 sebesar Rp247.925.077.120,63 terjadi penurunan sebesar Rp6.424.268.273,17 atau sebesar 2,59%.
Perincian beban jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 8.2.3
Beban Jasa
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024

Beban Jasa	Ket	31 Desember 2024 (Rp)
1. Belanja jasa APBD	+	184.564.929.530,23
2. Belanja jasa BLUD	+	48.009.809.143,00
3. Belanja jasa BOS	+	7.618.484.660,00
4. BOP	+	0,00
5. BOK	+	0,00

6. Utang Jasa 2024	+	3.756.314.098,00
7. Utang Jasa 2023	-	(3.162.693.371,00)
8. Jasa dibayar dimuka 2023	+	364.051.750,00
9. Jasa dibayar dimuka 2024	-	(332.849.962,77)
10. Koreksi Beban Jasa	+	682.763.000,00
11. Reklas Aset	-	0,00
12. Hibah	-	0,00
Jumlah Beban Persediaan (1+2+3+4+5-6+7-8-9+10-11-11)		**241.500.808.847,46**

8.2.4. Beban Pemeliharaan

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4 = (2/3x100%)-100%
Beban Pemeliharaan	**50.647.945.990,15**	**31.556.734.043,18**	**60,50%**

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo beban pemeliharaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Madiun yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023. Beban pemeliharaan mengakui beban yang berkaitan langsung dengan pemanfaatan aset yang merupakan kewajiban pemerintah Kota Madiun tanpa mempertimbangkan apakah sudah dibayar atau belum sebagai akibat aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun berjalan. Beban pemeliharaan mengakui pengeluaran biaya pemeliharaan yang berasal dari dana APBD tahun anggaran 2024, dana BOS, hasil dana BLUD, dana blockgrant, dana komite sekolah, dana tugas pembantuan, dana dekonsentrasi, hibah jasa lainnya yang dipergunakan untuk aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun berjalan. Beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp50.647.945.990,15 dibandingkan 31 Desember 2023 sebesar Rp31.556.734.043,18 kenaikan sebesar Rp19.091.211.946,97 atau sebesar 60,50%.

Perincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 8.2.4
Beban Pemeliharaan
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024

Beban Pemeliharaan	Ket	31 Desember 2024 (Rp)
1. Belanja pemeliharaan APBD	+	46.845.075.390,15
2. Belanja pemeliharaan BLUD	+	4.596.196.862,00
3. Belanja pemeliharaan BOS	+	2.242.347.218,00
4. BOK	+	0,00
5. Utang 2024	+	0,00
6. Utang 2023	-	0,00
7. Koreksi Beban pemeliharaan	-	(3.035.673.480,00)
Jumlah Beban Persediaan (1+2+3+4-5+6)		**50.647.945.990,15**

8.2.5. Beban Perjalanan Dinas

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4 = (2/3x100%)-100%
Beban Perjalanan Dinas	**45.152.002.754,00**	**42.894.685.591,00**	**5,26%**

Jumlah tersebut merupakan saldo beban perjalanan dinas yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Madiun yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023. Beban perjalanan dinas mengakui beban perjalanan dinas yang merupakan kewajiban pemerintah Kota Madiun tanpa mempertimbangkan apakah sudah dibayar atau belum sebagai akibat aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun berjalan. Beban perjalanan dinas mengakui pengeluaran biaya perjalanan dinas yang berasal dari dana APBD tahun anggaran 2024 dana BLUD, dana BOS, dana blockgrant, dana komite sekolah, dana tugas pembantuan, dana dekonsentrasi, dana lainnya yang dipergunakan untuk aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun 2023. Beban perjalanan dinas untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp45.152.002.754,00 dibandingkan 31 Desember 2023 sebesar Rp42.894.685.591,00 terjadi kenaikan sebesar Rp2.257.317.163,00 atau sebesar 5,26%

Perincian beban perjalanan dinas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 8.2.5
Beban Perjalanan Dinas
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024

Beban Pemeliharaan	Ket	31 Desember 2024 (Rp)
1. Belanja Perjalanan Dinas APBD	+	43.762.654.322,00
2. Belanja Perjalanan Dinas BLUD	+	1.028.779.232,00
3. Belanja Perjalanan Dinas BOS	+	21.739.000,00
4. Utang 2024	+	0,00
5. Utang 2023	(-)	0,00
6. BOK	+	338.830.200,00
Jumlah Beban Persediaan (1+2+3+4-5+6)		**45.152.002.754,00**

8.2.6. Beban Subsidi

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
Beban Subsidi	**49.955.750,00**	**99.146.000,00**	**(49,61%)**

Jumlah tersebut merupakan beban Subsidi yang harus dibayar/dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Madiun untuk mengurangi dampak inflasi pada masyarakat. Belanja subsidi ini dalam rangka untuk penekanan inflasi dalam program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di kegiatan pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota pada sub kegiatan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) kabupaten/ kota.

8.2.7. Beban Hibah

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4 = (2/3x100%)-100%
Beban Hibah	**45.738.043.231,63**	**44.134.020.599,50**	**3,63%**

Jumlah tersebut merupakan jumlah beban hibah yang harus dibayar/dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Madiun yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023. Beban hibah mengakui beban hibah yang merupakan kewajiban Pemerintah Kota Madiun tanpa mempertimbangkan apakah sudah dibayar atau belum sebagai akibat aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun berjalan. Beban hibah mengakui hibah berasal dari belanja OPD tahun anggaran 2024 dan reklas dari belanja barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat yang berasal dari dana APBD tahun anggaran 2024, dana BOS, dana BLUD, dana blockgrant, dana komite sekolah, dana tugas pembantuan, dana dekonsentrasi, dana bantuan keuangan parpol, dana lainnya yang dipergunakan untuk aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun berjalan. Beban hibah untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 sebesar

Rp45.738.043.231,63 dibandingkan 31 Desember 2023 sebesar Rp44.134.020.599,50 terjadi kenaikan sebesar Rp1.604.022.632,13 atau sebesar 3,63%.

Perincian beban hibah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 8.2.7
Beban Hibah

Beban Hibah	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4 = (2/3x100%)(100
1. Beban Hibah Dinas Pendidikan	10.619.578.048,63	5.704.289.840,00	86,17%
2. Beban Hibah Dinas Kesehatan	1.084.499.583,00	3.918.238.964,50	(72,32%)
3. Beban Hibah DPU	6.742.206.000,00	10.358.184.000,00	(34,91%)
4. Beban Hibah Dinas Perkim	0,00	94.200.000,00	(100%)
5. Beban Hibah Dinas Sosial	0,00	644.600.000,00	(100%)
6. Beban Hibah Disnaker	0,00	102.797.900,00	(100%)
7. Beban Hibah DLH	0,00	469.950.000,00	(100%)
8. Beban Hibah Dishub	0,00	14.320.000,00	(100%)
9. Beban Hibah Diskominfo	0,00	12.000.000,00	(100%)
10. Beban Hibah PTSP	0,00	23.500.000,00	(100%)
11. Beban Hibah Dinas Kebudayaan	987.400.000,00	3.569.082.100,00	(72,33%)
12. Beban Hibah Dinas Perpus	0,00	32.865.000,00	(100%)
13. Beban Hibah Bag. Pemerintahan	0,00	67.000.000,00	(100%)
14. Beban Hibah Bag. Organisasi	0,00	90.000.000,00	(100%)
15. Beban Hibah Bag. Pereksos	0,00	3.526.465.000,00	(100%)
16. Beban Hibah Bapelitbangda	0,00	44.265.000,00	(100%)
17. Beban Hibah Kec. Mangu	0,00	546.075.557,00	(100%)
18. Beban Hibah Kec. Taman	0,00	331.598.700,00	(100%)
19. Beban Hibah Kesbangpol	26.086.109.600,00	13.000.563.500,00	100,65%
20. Beban Hibah Disperta	0,00	1.584.025.038,00	(100%)
21. Beban Hibah BKPSDM	218.250.000,00	0,00	100%
Total Beban Hibah	**45.738.043.231,63**	**44.134.020.599,50**	**3,63%**

8.2.8 Beban Bantuan Sosial

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4 = (2/3x100%)-100%
Beban Bantuan Sosial	**30.881.786.000,00**	**31.804.857.500,00**	**(2,90%)**

Jumlah tersebut merupakan jumlah beban bantuan sosial yang harus dibayar/dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Madiun yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023. Beban bantuan sosial mengakui beban bantuan keuangan yang merupakan kewajiban Pemerintah Kota Madiun tanpa mempertimbangkan apakah sudah dibayar atau belum sebagai akibat aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun berjalan. Beban bantuan Sosial untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp30.881.786.000,00 dibandingkan 31 Desember 2023 sebesar Rp31.804.857.500,00 terjadi penurunan sebesar Rp923.071.500,00 atau sebesar 2,90%.

Perincian beban bantuan Sosial untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 tersaji pada tabel dibawah ini

Tabel 8.2.8
Beban Bansos

Beban Bansos	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4 = (2/3x100%)(100
1. Beban Bansos Dinas Pendidikan	9.758.500.000,00	10.481.900.000,00	(6,90%)
2. Beban Bansos Perkim	6.422.500.000,00	2.100.000.000,00	205,83%
3. Beban Bansos BPBD	27.500.000,00	0,00	100%
4. Beban Bansos Dinsos	13.284.386.000,00	12.604.157.500,00	5,40%
5. Beban Bansos Bag.Pereksos	0,00	6.568.800.000,00	(100%)
6. Beban Bansos Kesbangpol	1.388.900.000,00	0,00	100%
7. Beban Bansos SatpolPP	0,00	50.000.000,00	(100%)
Jumlah	**30.881.786.000,00**	**31.804.857.500,00**	**(2,90%)**

8.2.9 Beban Penyisihan Piutang

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4 = (2/3x100%)-100%
Beban Penyisihan Piutang	**2.170.389.687,56**	**578.175.207,58**	**275,39%**

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo beban penyisihan piutang yang diestimasikan berdasarkan umur piutang oleh Pemerintah Kota Madiun yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023. Beban penyisihan piutang mengakui penyisihan piutang berasal dari penyisihan piutang pajak daerah, piutang retribusi daerah dan penyisihan piutang lain-lain. Beban penyisihan piutang untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp2.170.389.687,56 dibandingkan 31 Desember 2023 sebesar Rp578.175.207,58 terjadi kenaikan sebesar Rp1.592.214.479,98 atau sebesar 275,39%.

Perincian beban penyisihan piutang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 8.2.9
Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan piutang	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4 = (2/3x100%)-100%)
1. Pajak Daerah	1.202.436.037,89	21.951.902,84	5.377,59%
2. Retribusi Daerah	709.707.899,11	97.530.700,40	627,68%
3. Piutang lain-lain	0,00	15.423.834,34	(100%)
4. Investasi Dana Bergulir	258.245.750,56	443.268.770,00	(41,74%)
Jumlah	**2.170.389.687,56**	**578.175.207,58**	**275,39%**

8.2.10. Beban Penyusutan Aset Tetap

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4 = (2/3x100%)-100%
Beban Penyusutan Aset Tetap	**144.425.326.887,70**	**150.036.103.064,44**	**(3,74%)**

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo beban penyusutan aset tetap akibat penurunan nilai aset tetap yang diestimasikan berdasarkan umur ekonomis aset tetap oleh Pemerintah Kota Madiun yang

mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 15 Tahun 2017 Aset tetap lainnya tidak disusutkan. Beban penyusutan aset tetap terdiri dari penyisihan aset tetap peralatan dan mesin, penyusutan gedung dan bangunan, penyusutan jalan, irigasi dan jaringan yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp144.425.326.887,70 dibandingkan 31 Desember 2023 sebesar Rp150.036.103.064,44 terjadi penurunan sebesar Rp5.610.776.176,74 atau sebesar 3,74%.

Perincian beban penyusutan aset tetap untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 8.2.10
Beban Penyusutan Aset Tetap

Beban Penyusutan Aset Tetap	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4 = (2/3x100%)-100%
1. Peralatan dan Mesin	45.352.350.172,39	67.378.238.257,44	(32,69%)
2. Gedung dan Bangunan	60.275.006.553,47	21.228.960.991,00	183,93%
3. Properti Investasi	0,00	0,00	100%
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	38.677.703.196,60	61.320.649.566,00	(36,93%)
5. Penyusutan Aset Tetap Lainnya	120.266.965,24	108.254.250,00	11,10%
Jumlah	**144.425.326.887,70**	**150.036.103.064,44**	**(3,74%)**

8.2.11. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4 = (2/3x100%)-100%
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	**485.529.105,12**	**998.849.333,00**	**(51,39%)**

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo beban amortisasi aset tidak berwujud akibat penurunan nilai aset tidak berwujud yang diestimasikan berdasarkan umur ekonomis aset tidak berwujud oleh Pemerintah Kota Madiun yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp485.529.105,12. Beban amortisasi aset tidak berwujud untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp485.529.105,12 dibandingkan beban amortisasi aset tidak berwujud untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp998.849.333,00 terjadi penurunan sebesar Rp513.320.227,88 atau sebesar 51,39%.

8.2.12. Beban Penyusutan Aset Lain-Lain

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4 = (2/3x100%)-100%
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	**0,00**	**492.226.518,00**	**(100%)**

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo beban penyusutan aset lain-lain akibat dilakukan koreksi atas penyusutan aset lain-lain yang tahun 2024 tidak dilakukan penyusutan. Belum dilakukan penyusutan atas aset lain-lain untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024. Beban penyusutan aset lain-lain untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 Rp0,00 dibandingkan beban penyusutan lain-lain untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp492.226.518,00 terjadi penurunann sebesar 100%.

8.2.13. Beban Lain-Lain

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4 = (2/3x100%)-100%
Beban Lain-lain	**15.996.637.105,10**	**2.215.995.756,00**	**621,87%**

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo beban lain-lain beban atas reklas pengadaan aset tetap yang tidak memenuhi nilai kapitalisasi aset tetap oleh Pemerintah Kota Madiun yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp15.996.637.105,10 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp2.215.995.756,00 terjadi kenaikan sebesar Rp13.780.641.349,10 atau sebesar 621,87%

Rincian beban lain-lain yang berasal dari realisasi belanja modal yang tidak memenuhi kapitalisasi aset tetap Per OPD pada tanggal 31 Desember 2024 tersaji dalam tabel dibawah ini.

Tabel 8.2.13.1
Beban Lain-Lain

Beban Lain-lain	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
Reklas BM tidak memenuhi kapitalisasi			
1. Tanah	0,00	0,00	0,00
2. Peralatan dan Mesin	1.417.247.330,40	156.124.235,00	807,77%
3. Gedung dan Bangunan	12.473.476.978,70	0,00	100%
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	141.189.846,00	0,00	100%
5. Aset Tetap Lainnya	1.962.822.950	2.059.871.521,00	(4,71%)

6. Aset Tidak Berwujud	1.900.000,00	-	100%
Jumlah	**15.996.637.105,10**	**2.215.995.756,00**	**621,87%**

Rincian beban lain-lain yang berasal dari realisasi belanja modal yang tidak memenuhi kapitalisasi aset tetap Per OPD pada tanggal 31 Desember 2024 tersaji dalam tabel dibawah ini.

Tabel 8.2.13.2
Beban Lain-lain OPD

Penambahan selama 2023	KIB A (Rp)	KIB B (Rp)	KIB C (Rp)	KIB D (Rp)	KIB E (Rp)	ATB (Rp)
Beban Lain-lain	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Dinas Pendidikan	0,00	135.560.452,00	0,00	0,00	1.962.822.950,00	0,00
Dinas Kesehatan KB	0,00	29.669.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RSUD	0,00	28.395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas PU TR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perkim	0,00	529.229.070,00	903.615.099,79	0,00	0,00	0,00
Dinas Satpol PP	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BPBD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Sosial	0,00	6.961.400,00	21.980.000,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Tenaga Kerja	0,00	36.734.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas LH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dispendukcapil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
Dinas Perhubungan	0,00	483.489.196,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Infokom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas PM, PTSP&UM	0,00	6.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Budparpora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Walikota/Wakil Walikota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Pemerintahan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Umum	0,00	124.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Hukum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Pereksos	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Adbang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BKD	0,00	4.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BPKAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BPKAD (SKPKD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bapenda	0,00	6.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inspektorat	0,00	0,00	2.475.000,00	0,00	0,00	0,00
BAPPEDA	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kec. Kartoharjo	0,00	725.000,00	4.156.805.374,86	36.634.888,00	0,00	0,00
Kec. Manguharjo	0,00	0,00	3.132.509.987,00	30.294.249,00	0,00	0,00
Kec. Taman	0,00	0,00	4.231.427.317,05	74.260.709,00	0,00	0,00
Bakesbangpol	0,00	5.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pertanian	0,00	8.567.800,00	24.664.200,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	**1.417.247.330,40**	**12.473.476.978,70**	**141.189.846,00**	**1.962.822.950,00**	**1.900.000,00**

Beban lain-lain atas reklas pengadaan aset tetap yang tidak memenuhi nilai kapitalisasi aset tetap oleh Pemerintah Kota Madiun yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp15.996.637.105,10

8.3. Kegiatan Non Operasional

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4 = (2/3x100%)-100%
Kegiatan Non Operasional	**383.979.980,00**	**(452.881.988,00)**	**184,79%**

Jumlah tersebut adalah jumlah surplus (defisit) kegiatan non operasional Kota Madiun yang berakhir pada periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023. Kegiatan Non Operasional terdiri dari surplus penjualan aset non lancar, surplus penyelesaian jangka panjang, defisit penjualan aset non lancar, defisit penjualan aset non lancar dan defisit dari kegiatan non operasional lainnya. Surplus (defisit) dari Kegiatan Non Operasional yang berakhir pada periode 31 Desember 2024 sebesar Rp383.979.980,00 dibandingkan dengan surplus (defisit) dari kegiatan non operasional yang berakhir pada periode 31 Desember 2023 Rp(452.881.988,00) terjadi kenaikan sebesar Rp836.861.968,00 atau sebesar 184,79%.

8.3.1 Surplus Penjualan Aset Non Lancar

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4 = (2/3x100%)-100%
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	**383.979.980,00**	**449.118.662,00**	**(14,50%)**

Jumlah tersebut adalah jumlah surplus penjualan aset non lancar yang berakhir pada periode 31 Desember 2024 sebesar Rp383.979.980,00.

8.3.2 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	**35.355.251,00**	**902.000.650,00**	**(96,08%)**

Jumlah tersebut adalah defisit penjualan aset non lancar dan defisit dari kegiatan non operasional lainnya yang berakhir pada periode 31 Desember 2024 sebesar Rp35.355.251,00 dibandingkan dengan defisit dari kegiatan non operasional lainnya periode 31 Desember 2023 Rp902.000.650,00 terjadi penurunan sebesar Rp902.000.650,00 atau sebesar 96,08%.

8.4. Pos Luar Biasa

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4 = (2/3x100%)-100%
Pos Luar Biasa	**273.889.083,00**	**1.238.717.822,00**	**(77,89%)**

Jumlah tersebut adalah adalah beban pos luar biasa yang berakhir pada periode 31 Desember 2024. Beban pos luar biasa terdiri dari pendapatan luar biasa, beban luar biasa, dan beban tidak terduga. Beban pos luar biasa yang berakhir pada periode 31 Desember 2024 sebesar Rp273.889.083,00 dibandingkan dengan beban pos luar biasa yang berakhir pada periode 31 Desember 2023 Rp1.238.717.822 terjadi penurunan Rp964.828.739,00 atau sebesar 77,89%

8.4.1. Beban Tidak Terduga

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4 = (2/3x100%)-100%
Beban Tidak Terduga	**273.889.083,00**	**1.238.717.822,00**	**(77,89%)**

Jumlah tersebut adalah adalah beban tidak terdugayang berakhir pada periode 31 Desember 2024. Beban tidak terduga yang berakhir pada periode 31 Desember 2024 sebesar Rp273.889.083,00 dibandingkan dengan beban pos luar biasa yang berakhir pada periode 31 Desember 2023 Rp1.238.717.822 terjadi penurunan sebesar Rp964.828.739,00 atau sebesar 77,89%.

Perincian beban tidak terduga untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 8.4.1.1
Perincian OPD yang menggunakan Beban Tidak Terduga
untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2024

Tanggal	Uraian	Jumlah
19 Januari 2024	Pembayaran Sisa Dana Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan dan Bidang Kesehatan dari Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023	19.812.712,00
18 Maret 2024	Pembayaran BTT Pengembalian Dana Retribusi Sewa Aula Asrama Haji an. Nurul Idawati pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Ta.2024	4.200.000,00
19 April 2024	Pembayaran BTT Upah Petugas dalam rangka Penanganan Penanggulangan KLB Covid-19 (Jasa Pemakaman) An. Sunarto Sumarwi Jl Jati Kusumo No 8 Demangan Kec Taman di Pemakaman Umum Kecik Demangan tanggal 14 Februari 2024 Dinas Kesehatan PP & KB TA. 2024	3.000.000,00
27 Mei 2024	Pembayaran BTT Belanja Cetak Media PROMKES (FLYER) Materi Sub PIN Polio pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Tahun Anggaran 2024	4.000.000,00
03 Juli 2024	Pembayaran BTT BELANJA Subsidi harga Pedagang Pasar Besar dan Pasar Sleko Kota Madiun bulan Februari, Maret, April 2024 pada Program Tekan Inflasi Dinas Perdagangan Kota Madiun Ta. 2024	28.850.000,00
16 Agustus 2024	Pembayaran BTT Pengembalian Dana BOK Tahun 2023 pada Puskesmas Ngegong Kota Madiun TA 2024	712.058,00
16 Agustus 2024	Pembayaran BTT Pengembalian Dana Salah Transfer an. Aang Imam Subarkah TA. 2024	1.500.000,00
09 Oktober 2024	Pembayaran BTT Pengembalian Kelebihan Pembayaran BPHTB an. ANIE SETYANINGRUM TA. 2024	4.672.800,00
22 Oktober 2024	Pembayaran BTT Pengembalian Kelebihan Pembayaran BPHTB an. HERLIN DWI PURWITOSARI NOMOR 112938b99 TA. 2024	4.835.000,00
22 Oktober 2024	Pembayaran BTT Pengembalian Kelebihan Pembayaran BPHTB an. HERLIN DWI PURWITOSARI NOMOR 112938b98 TA. 2024	8.679.600,00
08 November 2024	Pembayaran BTT Penanganan Inflasi melalui Belanja Subsidi Harga Pelaksanaan Operasi Pasar Tanggal 31 Juli-12 Agustus 2024 Program Tekan Inflasi Dinas Perdagangan Ta.	1.569.500,00
19 Desember 2024	Pembayaran BTT Bantuan Perbaikan Rumah Korban Bencana Angin Puting Beliung pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran	187.057.413,00

30 Desember 2024	Pembayaran Sisa Dana Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2024	5.000.000,00
	Jumlah Total	**273.889.083,00**

Perincinan Dinas yang mengunakan anggaran Belanja Tidak Terduga tersaji pada table dibawah ini :

Tabel 8.4.1.2
Perincian OPD yang menggunakan Beban Tidak Terduga
untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2024

Nama OPD	Realisasi 2024 (Rp)
1	2
BKAD	26.312.712,00
Disbudparpora	4.200.000,00
BPBD	187.057.413,00
Dinas Perdagangan	30.419.500,00
Dinas Kesehatan	7.712.058,00
Bappenda	18.187.400,00
Total	**273.889.083,00**

BAB

9

PENJELASAN POS - POS LAPORAN ARUS KAS

9.1. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus kas dari aktivitas operasi adalah arus kas yang diakibatkan oleh kegiatan yang dilaksanakan sehingga memperoleh penerimaan pendapatan yang berarti menambah kas dan atau mengeluarkan belanja yang berarti mengurangi kas dalam rangka pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penyelenggaraan pemerintahan.

9.1.1. ARUS KAS MASUK

9.1.1.1. Penerimaan Pajak Daerah

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Penerimaan Pajak Daerah	**121.651.792.796,00**	**113.514.116.369,67**

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas masuk ke kas daerah yang berasal dari penerimaan pajak daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

Perincian penerimaan pendapatan pajak daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 9.1.1.1
Penerimaan Pajak Daerah

Pajak Daerah	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.1.01.06. Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	8.130.855.159,00
4.1.01.07. Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	23.343.654.772,00
4.1.01.08. Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	1.845.737.251,00

4.1.01.09. Pajak Reklame	2.372.500.000,00	2.867.767.796,00	120,88	2.304.955.619,00
4.1.01.10. Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	23.482.333.529,83
4.1.01.11. Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	1.683.862.056,00
4.1.01.12. Pajak Air Tanah	350.000.000,00	450.821.413,00	128,81	318.395.998,84
4.1.01.15. PBB P2	22.360.000.000,00	22.998.810.935,00	102,86	23.884.649.634,00
4.1.01.16. BPHTB	26.675.000.000,00	30.575.437.417,00	114,62	28.519.672.350,00
Pajak Barang Jasa Tertentu	**57.846.426.000,00**	**64.758.955.235,00**	**111,95**	**0,00**
4.1.01.19.01. PBJT Makanan Minuman	24.200.000.000,00	27.722.629.419,00	114,56	0,00
4.1.01.19.02. PBJT Tenaga Listrik	23.225.000.000,00	25.480.021.040,00	109,71	0,00
4.1.01.19.03. PBJT Jasa Perhotelan	7.200.000.000,00	7.683.440.676,00	106,71	0,00
4.1.01.19.04. PBJT Jasa Parkir	900.000.000,00	1.123.769.041,00	124,86	0,00
4.1.01.19.05. PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan	2.321.426.000,00	2.749.095.059,00	118,42	0,00
Jumlah	**109.603.926.000,00**	**121.651.792.796,00**	**110,99**	**113.514.116.369,67**

9.1.1.2. Penerimaan Retribusi Daerah

Uraian	Penerimaan 2024 (Rp)	Penerimaan 2023 (Rp)
Penerimaan Retribusi Daerah	**138.902.841.650,97**	**22.551.072.553,00**

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas masuk ke kas daerah yang berasal dari penerimaan retribusi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

Perincian anggaran dan penerimaan pendapatan retribusi daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 9.1.1.2
Retribusi Daerah

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.1.02.01. Jasa Umum	121.043.487.400,00	119.872.742.621,97	99,03	3.797.537.578,00
4.1.02.02. Jasa Usaha	14.518.920.600,00	18.310.380.781,00	126,11	17.563.133.621,00
4.1.02.03. Perizinan tertentu	750.000.000,00	719.718.248,00	95,96	1.190.401.354,00
Jumlah	**136.312.408.000,00**	**138.902.841.650,97**	**101,90**	**22.551.072.553,00**

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 tersaji dibawah ini.

1. 4.1.2.01 Retribusi Jasa Umum	**121.043.487.400,00**	**119.872.742.621,97**	**99,03**	**3.797.537.578,00**
4.1.02.01.01. Retribusi Pelayanan Kesehatan **(Dinas Kesehatan & RSUD)**	117.669.910.000,00	117.186.065.666,00	99,59	0,00
4.1.02.01.02. Retribusi PelayananPersampahan Kebersihan **(Dinas Lingkungan Hidup & Donas Perkim)**	186.126.000,00	288.273.905,97	154,88	171.940.000,00
4.1.02.01.04. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum **(Dinas Perhubungan)**	3.187.451.400,00	2.398.403.050,00	75,25	2.986.960.408,00
4.1.02.01.05. Retribusi Pelayanan Pasar/Kios **(Dinas Perhubungan)**	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.01.06. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor **(Dinas Perhubungan)**	0,00	0,00	88,88	364.421.204,00
4.1.02.01.11. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang **(Dinas Perdagangan)**	0,00	0,00	117,73	71.884.000,00
4.1.02.01.13. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikas **(Dinas Komunikasi dan Informatika**	0,00	0,00	126,46	202.331.966,00

2. 4.1.2.02 Retribusi Jasa Usaha	**14.518.920.600,00**	**18.310.380.781,00**	**126,11**	**17.563.133.621,00**
4.1.02.02.01. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	7.907.071.600,00	11.317.711.022,00	143,13	8.564.678.574,00
4.1.02.02.02. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan	4.604.000.000,00	4.797.996.181,00	104,21	7.456.013.647,00
4.1.02.02.05. Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.080.439.000,00	906.370.000,00	83,89	781.654.000,00
4.1.02.02.07. Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	32.410.000,00	19.396.000,00	59,85	23.079.000,00
4.1.02.02.09. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	700.000.000,00	1.008.991.878,00	144,14	737.708.400,00
4.1.02.02.20. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	195.000.000,00	259.915.700,00	133.29	0,00
4.1.02.03 Retribusi Perizinan Tertentu	**750.000.000,00**	**719.718.248,00**	**95,96**	**1.190.401.354,00**
4.1.02.03.01. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan **(Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**	750.000.000,00	719.718.248,00	95,96	1.189.201.354,00
4.1.02.03.03. Retribusi Izin Trayek **(Dinas Perhubungan)**	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Jumlah	**136.312.408.000,00**	**138.902.841.650,97**	**101,90**	**22.551.072.553,00**

9.1.1.3. Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Uraian	Penerimaan 2024 (Rp)	Penerimaan 2023 (Rp)
Penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	**13.456.071.814,53**	**14.983.008.032,73**

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas masuk ke kas daerah yang berasal dari penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

Perincian penerimaan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024dan 31 Desember 2023 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 9.1.1.3
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Derah yang Dipisahkan

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2		4 = (3/2)	5
4.1.03.02.01 Bank Jatim & Bank Daerah	6.986.097.200,00	7.291.764.184,53	104,38	7.697.384.827,43
4.1.03.02.02 Perumda Aneka Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.02.03 Perumda PDAM	7.141.328.700,00	6.164.307.630,00	86,32	7.285.623.205,30
Total	**14.127.425.900,00**	**13.456.071.814,53**	**95,25**	**14.983.008.032,73**

9.1.1.4. Penerimaan Lain-lain PAD yang sah

Uraian	Penerimaan 2024 (Rp)	Penerimaan 2023 (Rp)
Penerimaan lain-lain PAD yang sah	**4.834.672.691,47**	**104.057.177.790,22**

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas masuk ke kas daerah dan kas blud yang berasal dari penerimaan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 setelah dikurangi reklas ke Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi.

Perincian penerimaan pendapatan lain-lain PAD yang sah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 9.1.1.4
Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
a. 4.1.04.01.02 Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
b. 4.1.04.01.05 Hasil Penjualan Aset Tetap Lainya	32.000.000,00	32.876.000,00	102,74	32.773.000,00
c. 4.1.04.05 Jasa giro	80.000.000,00	810.070.401,32	1.012,59	599.729.647,13
d 4.1.04.06 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	128.290.300,00	70.987.392,25	55,33	75.333.024,01
e. 4.1.04.07 Pendapatan Bunga Deposito	992.335.233,00	1.267.092.988,64	127,69	2.880.498.521,96
f. 4.1.04.11 Pendapatan Denda atas keterlambatan	0,00	220.591.369,81	0,00	172.086.543,39
g. 4.1.04.12 Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	658.795.250,00	0,00	629.196.758,00
h. 4.1.04.13 Pendapatan Denda Retribusi Daerah	142.852.500,00	44.610.000,00	31,23	121.838.700,00
i. 4.1.04.15 Pendapatan dari Pengembalian	0,00	509.412.385,09	0,00	1.187.998.977,67
j. 4.1.04.16 Pendapatan BLUD	863.740.000,00	1.220.236.904,36	141,27	98.357.722.618,06
Jumlah	**2.239.218.033,00**	**4.834.672.691,47**	**215,91**	**104.057.117.790,22**

9.1.1.5. Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak

Uraian	Penerimaan 2024 (Rp)	Penerimaan 2023 (Rp)
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	**24.113.939.741,00**	**24.092.136.000,00**

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas masuk ke kas daerah yang berasal dari penerimaan dana bagi hasil pajak dari Pemerintah Pusat untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

Perincian penerimaan pendapatan dana bagi hasil pajak untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 9.1.1.5
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.2.01.01.01.0001 Bagi Hasil PBB	21.612.094.000,00	2.815.756.741,00	13,03	2.725.606.000,00
4.2.01.01.01.0003 Bagi hasil PPh Pasal 25 dan 29	21.298.183.000,00	21.298.183.000,00	100,00	21.366.530.000,00
Total	**42.910.277.000,00**	**24.113.939.741,00**	**56,20**	**24.092.136.000,00**

9.1.1.6. Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

Uraian	Penerimaan 2024 (Rp)	Penerimaan 2023 (Rp)
Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	**27.094.012.200,00**	**36.475.210.342,00**

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas masuk ke kas daerah yang berasal dari penerimaan dana bagi hasil bukan pajak dari Pemerintah Pusat untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

Perincian penerimaan pendapatan dana bagi hasil sumber daya alam (SDA) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 9.1.1.6
Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.2.01.01.01.0005 Bagi Hasil Bukan Pajak Minyak Bumi	24.619.133.000,00	25.158.425.000,00	102,19	33.797.056.552,00
4.2.01.01.01.0007 Bagi Hasil Bukan Pajak Panas Bumi	15.859.000,00	16.230.200,00	102,34	12.969.320,00
4.2.01.01.01.0008 Bagi Hasi Bukan Pajak Mineral dan Batubara Landrent	692.136.000,00	311.461.200,00	45,00	938.550.591,00
4.2.01.01.01.0009 Bagi Hasi Bukan Pajak Mineral dan Batubara Royalti	0,00	380.674.800,00	0,00	0,00
4.2.01.01.01.0010 Bagi Hasil Bukan Pajak Kehutanan	153.410.000,00	153.410.000,00	100,00	281.746.668,00
4.2.01.01.01.0013 Bagi Hasil Bukan Pajak Perikanan	1.073.811.000,00	1.073.811.000,00	100,00	1.444.887.211,00
Total	**26.554.349.000,00**	**27.094.012.200,00**	**102,03**	**36.475.210.342,00**

9.1.1.7. Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU)

Uraian	Penerimaan 2024 (Rp)	Penerimaan 2023 (Rp)
Penerimaan Dana Alokasi Umum	**509.310.785.281,00**	**487.141.770.396,00**

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas masuk ke kas daerah yang berasal dari penerimaan dana alokasi umum dari Pemerintah Pusat untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

Tabel 9.1.1.7
Penerimaan Dana Alokasi Umum

Penerimaan Dana Alokasi Umum	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.2.01.01.02.0001 DAU DAK Fisik	471.940.090.000,00	471.940.090.000,00	100,00	459.508.986.396,00
4.2.01.01.02.0002 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	5.400.000.000,00	5.400.000.000,00	100,00	5.400.000.000,00
4.2.01.01.02.0004 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Penggajian P3K	6.727.293.000,00	5.384.920.281,00	80,05	22.232.784.000,00
4.2.01.01.02.0005 DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	17.226.408.000,00	17.226.408.000,00	100,00	0,00
4.2.01.01.02.0006 DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	9.359.367.000,00	9.359.367.000,00	100,00	0,00
Jumlah	**510.653.158.000,00**	**509.310.785.281,00**	**99,74**	**487.141.770.396,00**

9.1.1.8. Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Uraian	Penerimaan 2024 (Rp)	Penerimaan 2023 (Rp)
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	**117.131.678.463,63**	**82.402.483.839,80**

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas masuk ke kas daerah yang berasal dari penerimaan dana alokasi khusus dari Pemerintah Pusat untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

Perincian penerimaan pendapatan dana alokasi khusus (DAK) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 9.1.1.8
Penerimaan Dana Alokasi Khusus

Penerimaan Dana Alokasi Khusus	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.2.01.01.03 DAK Fisik	34.637.942.000,00	29.693.124.361,00	85,72	5.699.869.054,00
4.2.01.01.04 DAK Non Fisik	89.050.009.000,00	87.438.554.102,63	98,19	76.702.614.785,80
Jumlah	**123.687.951.000,00**	**117.131.678.463,63**	**94,70**	**82.402.483.839,80**

9.1.1.9. Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai

Uraian	Penerimaan 2024 (Rp)	Penerimaan 2023 (Rp)
Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai	**47.621.459.000,00**	**35.959.029.435,00**

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas masuk ke kas daerah yang berasal dari penerimaan dana bagi hasil cukai dari Pemerintah Pusat untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

Tabel 9.1.1.9
Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.2.01.01.04 DBH Cukai	26.402.123.000,00	47.621.459.000,00	180,37	35.959.029.435,00
Jumlah	**26.402.123.000,00**	**47.621.459.000,00**	**180,37**	**35.959.029.435,00**

9.1.1.10. Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

Uraian	Penerimaan 2024 (Rp)	Penerimaan 2023 (Rp)
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi	**116.973.247.100,00**	**120.565.582.200,00**

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas masuk ke kas daerah yang berasal dari penerimaan dana bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

Perincian penerimaan dana bagi hasil pajak dari provinsi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 9.1.1.10
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2		4 = (3/2)	5
4.2.02.01.0001 Pendapatan Bagi Hasil Pajak PKB	30.277.000.000,00	34.171.954.000,00	112,86	34.918.489.800,00
4.2.02.01.0002 Pendapatan Bagi Hasil Pajak BBNKB	10.608.000.000,00	13.954.270.800,00	131,54	15.339.681.100,00
4.2.02.01.0003 Pendapatan Bagi Hasil Pajak PBBKB	28.968.000.000,00	33.317.236.500,00	115,01	29.292.250.400,00
4.2.02.01.0004 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	228.000.000,00	253.777.100,00	111,31	371.681.600,00
4.2.02.01.0005 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	36.993.020.000,00	35.276.008.700,00	95,36	40.643.479.300,00
Total	**107.074.020.000,00**	**116.973.247.100,00**	**109,25**	**120.565.582.200,00**

9.1.1.11. Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi

Uraian	Penerimaan 2024 (Rp)	Penerimaan 2023 (Rp)
Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi	**670.050.000,00**	**706.502.612,00**

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas masuk ke kas daerah yang berasal dari penerimaan bantuan keuangan provinsi dari Pemerintah Provinsi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

Perincian penerimaan bantuan keuangan dari provinsi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 9.1.1.11
Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.2.02.02.02.0001 Bantuan Keuangan dari Pemprov	670.050.000,00	670.050.000,00	100,00%	706.502.612,00
Jumlah	**670.050.000,00**	**670.050.000,00**	**100,00%**	**706.502.612,00**

9.1.1.12. Penerimaan Dana Penyesuaian

Uraian	Penerimaan 2024 (Rp)	Penerimaan 2023 (Rp)
Penerimaan Dana Penyesuaian	**49.368.525.000,00**	**74.714.922.000,00**

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas masuk ke kas daerah yang berasal dari penerimaan dana penyesuaian dari Pemerintah Pusat berupa Dana Insentif Fiskal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

Perincian penerimaan dana penyesuaian dari Pemerintah Pusat untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 9.1.1.12
Penerimaan Dana Penyesuaian

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.2.01.02.01 Dana Insentif Fiskal	32.597.699.000,00	49.368.525.000,00	151,45%	74.714.922.000,00
Jumlah	**32.597.699.000,00**	**49.368.525.000,00**	**151,45%**	**74.714.922.000,00**

9.1.1.13. Penerimaan Hibah

Uraian	Penerimaan 2024 (Rp)	Penerimaan 2023 (Rp)
Penerimaan Hibah	**0,00**	**0,00**

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas masuk ke kas daerah yang berasal dari penerimaan hibah dari Pemerintah Pusat untuk periode yang berakhir 30 September 2024 dan 31 Desember 2023.

Tidak terdapat realisasi penerimaan hibah disebabkan karena pendapatan hibah dana BOS pada tahun anggaran 2023 reklas menjadi penerimaan DAK Non Fisik.

Perincian penerimaan hibah dari Pemerintah Pusat untuk periode yang berakhir 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 9.1.1.13
Penerimaan Hibah

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.3.03.01.01 Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan atas Pengembalian Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

9.1.2. ARUS KAS KELUAR

9.1.2.1. Pembayaran Pegawai

Uraian	Pengeluaran 2024 (Rp)	Pengeluaran 2023 (Rp)
Pembayaran pegawai	**438.170.995.927,75**	**423.896.152.844,39**

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas keluar dari kas daerah dan kas blud yang berasal dari pengeluaran belanja pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023. Perincian penerimaan belanja pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 9.1.2.1
Pembayaran Pegawai

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan	245.186.069.483,00	231.278.137.979,00	94,33	210.825.345.289,00
5.1.1.02 Tambahan Penghasilan ASN	145.205.369.961,00	131.866.176.802,00	90,81	132.981.043.160,00

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
5.1.1.03 Tambahan Penghasilan berdasar Pertimbangan Obyektif Lainnya	60.564.755.418,00	57.630.417.107,45	95,16	64.056.690.831,33
5.1.1.04 Belanja Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD	15.789.368.665,00	15.039.533.046,00	95,25	14.287.484.704,00
5.1.1.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	964.144.614,00	678.832.513,00	70,41	912.138.860,06
5.1.1.06 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD, KDH/WKDH	778.180.000,00	744.580.000,00	95,68	731.340.000,00
5.1.1.88 Belanja Pegawai BOS	642.065.200,00	0,00	00,00	0,00
5.1.1.99 Belanja Pegawai BLUD	871.537.416,00	933.318.480,00	107,09	102.110.000,00
Jumlah Belanja Pegawai	**470.001.490.757,00**	**438.170.995.927,75**	**93,23**	**423.896.152.844,39**

9.1.2.2. Pembayaran Barang dan Jasa

Uraian	Pengeluaran 2024 (Rp)	Pengeluaran 2023 (Rp)
Pembayaran barang dan Jasa	**497.881.778.674,38**	**487.718.322.693,31**

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas keluar dari kas BLUD dan kas daerah yang berasal dari pengeluaran pembayaran barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023. Perincian pengeluaran barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 tersaji pada tabel dibawah ini.

Perincian pengeluaran barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 9.1.2.2
Pembayaran Barang dan Jasa

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
5.1.02.01 Belanja Barang	106.450.429.863,00	101.817.737.067,00	95,65	122.590.404.708,50

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
5.1.02.02 Belanja Jasa	193.352.998.427,00	179.875.796.850,23	93,03	191.169.925.758,63
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan	49.280.670.242,00	46.845.075.390,15	95,06	25.428.091.070,18
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas	51.743.814.851,00	43.762.654.322,00	84,58	41.205.029.504,00
5.1.02.05 Belanja Uang dan/Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.866.752.260,00	4.689.132.680,00	96,35	4.183.782.600,00
5.1.02.88 Belanja Barang Jasa BOS	16.753.081.390,00	17.571.294.042,00	104,88	17.756.446.336,00
5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK	3.317.316.000,00	3.284.767.700,00	99,02	0,00
5.1.02.99Belanja Barang Jasa BLUD	100.882.230.202,00	100.035.320.623,00	99,16	85.384.642.716,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa	**526.647.293.235,00**	**497.881.778.674,38**	**94,54**	**487.718.322.693,31**

9.1.2.3. Pembayaran Subsidi

Uraian	Pengeluaran 2024 (Rp)	Pengeluaran 2023 (Rp)
Pembayaran Subsidi	**49.955.750,00**	**99.146.000,00**

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas keluar dari kas daerah yang berasal dari pengeluaran pembayaran subsidi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023. Belanja subsidi ini dalam rangka untuk penekanan inflasi melalui program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di kegiatan pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota pada sub kegiatan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1(satu) kabupaten/ kota pada Dinas Perdagangan.

9.1.2.3. Pembayaran Hibah

Uraian	Pengeluaran 2024 (Rp)	Pengeluaran 2023 (Rp)
Pembayaran hibah	**45.781.591.231,63**	**32.355.896.005,00**

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas keluar dari kas daerah yang berasal dari pengeluaran pembayaran hibah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, sesuai dengan Surat Keputusan Wali Kota Madiun Nomor : 400-401.202/8/2024 tentang Badan/Lembaga/Organisasi/Kelompok Masyarakat/ Perorangan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Yang Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Surat Keputusan Wali Kota Madiun nomor : 400-401.202/9/2024 tentang Pejabat Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah terhadap Hibah yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Perincian pengeluaran hibah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 9.1.2.4
Belanja Hibah

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
5.1.05.01. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	7.044.575.904,00	6.713.335.400,00	95,30	6.383.188.600,00
5.1.05.05. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan, yang berbadan Hukum Indonesia	28.856.306.017,00	28.748.938.733,00	99,63	25.022.143.905,00
5.1.05.06. Belanja Hibah Dana BOS	4.410.910.000,00	4.522.212.951,00	102,52	0,00
5.1.05.07. Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	950.563.500,00	949.894.600,00	99,93	950.563.500,00
5.1.05.08. Belanja Hibah Dana BOSP	4.706.910.000,00	4.847.209.547,63	102,98	0,00
Jumlah Belanja Hibah	**45.969.265.421,00**	**45.781.591.231,63**	**99,59**	**32.355.896.005,00**

9.1.2.4. Pembayaran Bantuan Sosial

Uraian	Pengeluaran 2024 (Rp)	Pengeluaran 2023 (Rp)
Pembayaran Bantuan Sosial	**30.881.786.000,00**	**31.804.857.500,00**

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas keluar dari kas daerahyang berasal dari pengeluaran pembayaran bantuan sosial untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan

31 Desember 2023, Sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor : 400-401.202/8/2024 tentang Badan/Lembaga/Organisasi/Kelompok Masyarakat/ Perorangan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Yang Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Perincian pengeluaran bantuan sosial untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 9.1.2.5
Belanja Bantuan Sosial

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu	30.200.519.528,00	28.093.111.000,00	93,02	27.376.940.000,00
5.1.06.04 Belanja Bantuan Sosial Kepada lembaga non pemerintahan	2.860.565.000,00	2.788.675.000,00	97,49	4.427.917.500,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial	**33.061.084.528,00**	**30.881.786.000,00**	**93,41**	**31.804.857.500,00**

9.1.2.6. Pembayaran Tidak terduga

Uraian	Pengeluaran 2024 (Rp)	Pengeluaran 2023 (Rp)
Pembayaran Tidak Terduga	**273.889.083,00**	**1.238.717.822,00**

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas keluar dari kas daerah yang berasal dari pengeluaran pembayaran tidak terduga untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023. Perincian pembayaran tidak terduga untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 9.1.2.6
Pembayaran Tidak Terduga

Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3
Belanja Barang	217.476.913,00	551.363.000,00

Belanja Jasa	7.712.058,00	0,00
Belanja Perjalanan		0,00

Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3
Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial		0,00
Belanja Pengembalian	26.312.712,00	641.753.696,00
Pengembalian Pajak	18.187.400,00	26.011.126,00
Pengembalian Retribusi	4.200.000,00	17.576.000,00
Pengembalian ganti rugi sewa tanah		2.014.000,00
Total	**273.889.083,00**	**1.238.717.822,00**

9.1.3. ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Arus kas bersih dari aktivitas operasi	**158.089.079.071,84**	**140.049.918.705,72**

Arus kas bersih dari aktivitas operasi adalah selisih antara arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas operasi. Perincian arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas operasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

Tabel 9.1.3
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Arus kas masuk	1.171.129.075.738,60	1.117.163.011.570,42
Arus kas keluar	(1.013.039.996.666,76)	(977.113.092.864,70)
Jumlah aliran kas bersih dari aktivitas operasi	**158.089.079.071,84**	**140.049.918.705,72**

9.2. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas netto sehubungan dengan perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan di masa yang akan datang.

9.2.1. ARUS KAS MASUK

9.2.1.2 Penjualan Aktiva Tetap

Uraian	Pengeluaran 2024 (Rp)	Pengeluaran 2023 (Rp)
Penjualan Aktiva Tetap	**383.979.980,00**	**449.118.662,00**

Jumlah arus kas masuk dari aktivitas investasi antara lain berasal dari penjualan alat angkut dan penjualan alat kantor dan rumah tangga pada OPD Dinas Pendidikan, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Organisasi, Bagian Administrasi Perekonomian, Bagian Hukum, Bakesbangpol, Bapenda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal & PTSP, Dinas Pekerjaan Umum, Kecamatan Manguharjo, Kecamatan Taman, Badan Kepegawaian, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil, Inspektorat untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024.

Perincian penjualan aktiva tetap untuk periode tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 9.2.1.2
Penjualan Aktiva Tetap

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Penjualan Alat Angkut		
1. Bagian Umum		150.620.000,00
2. Badan Pendapatan Daerah		32.726.541,00
3. Sekretariat Dewan	168.800.000,00	
4. Badan Keuangan dan Aset Daerah		
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		31.919.096,00
6. Dinas Pekerjaan Umum		19.962.499,00
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
8. Dinas Perdagangan		
9. Dinas Sosial		
10. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		0,00

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
11. Dinas Kesehatan dan KB		129.351.976,00
12. Puskemas Banjarejo		15.455.677,00
13. Puskesmas Ngegong		6.744.999,00
14. Dinas Lingkungan Hidup		10.300.000,00
15. Dinas Perumahan dan Permukiman		3.700.000,00
16.Dinas Penanaman Modal		0,00
17. Kelurahan Patihan		3.349.999,00
18. Kecamatan Manguharjo		0,00
19.Dinas Pendidikan		0,00
20. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		44.278.875,00
21. Satuan Pamong Praja		0,00
Jumlah Penjualan Alat Angkut	**168.800.000,00**	**448.409.662,00**
Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga	**215.179.980,00**	**709.000,00**
Jumlah total Aktiva Tetap	**383.979.980,00**	**449.118.662,00**

9.2.2. ARUS KAS KELUAR

9.2.2.1.Perolehan Modal Tanah

Uraian	Pengeluaran 2024 (Rp)	Pengeluaran 2023 (Rp)
Perolehan Modal Tanah	**0,00**	**0,00**

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas keluar dari kas daerah, yang berasal dari perolehan modal Tanah untuk periode tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

9.2.2.2.Perolehan Modal Peralatan dan Mesin

Uraian	Pengeluaran 2024 (Rp)	Pengeluaran 2023 (Rp)
Perolehan Modal Peralatan dan Mesin	**24.597.646.021,00**	**71.585.868.051,04**

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas keluar dari kas daerah, kas blud dan kas BOS yang berasal dari perolehan modal peralatan dan mesin untuk periode tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

Perincian perolehan modal peralatan dan mesin untuk periode tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 9.2.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Belanja Modal Peralatan dan Mesin		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1		2	3	4 = (3/2)	5
5.2.02.	**Belanja modal Peralatan dan Mesin**	**26.303.310.160,00**	**24.597.646.021,00**	**93,52**	**71.585.868.051,04**
5.2.02.01	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Besar/ Berat	2.285.538.613,00	2.188.901.500,00	95,77	2.654.100.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	4.916.671.838,00	4.336.308.440,00	88,20	3.243.522.130,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel/ Alat Ukur	93.600.000,00	92.950.000,00	99,95	81.120.000,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	92.050.000,00	79.620.000,00	86,50	128.500.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat kantor/ Rumah Tangga	9.855.527.750,00	9.470.132.350,00	96,09	4.624.879.550,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	173.931.970,00	158.652.090,00	91,22	872.617.018,00
5.2.02.07	Belanja Modal Peralatan Kedokteran	2.403.521.196,00	2.086.508.700,00	86,81	4.804.418.371,00
5.2.3.02.10	Belanja Modal Komputer	1.509.275.670,00	1.494.054.680,00	98,99	50.089.399.142,00
5.2.3.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	0,00	0,00	00,00	25.308.000,00
5.2.3.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Permurnian	0,00	0,00	00,00	0,00
5.2.3.02.14	Belanja Modal Alat Bantu	20.360.000,00	19.931.715,00	97,90	0,00
5.2.3.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan	0,00	0,00	00,00	35.030.000,00
5.2.3.02.18	Belanja Modal Rambu - Rambu	932.212.263,00	931.449.500,00	99,92	3.058.049.636,04
5.2.3.02.19	Belanja Modal Peralatan Olah Raga	100.000.000,00	99.459.330,00	99,46	126.928.500,00
5.2.3.02.88	Belanja Modal Peralatan Mesin BOS	750.236.610,00	896.262.344,00	119.46	1.048.869.678,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
5.2.3.02.99 Belanja Modal Peralatan Mesin BLUD	3.170.384.250,00	2.743.415.372,00	86,53	793.126.026,00

9.2.2.3.Perolehan Modal Gedung dan Bangunan

Uraian	Pengeluaran 2024 (Rp)	Pengeluaran 2023 (Rp)
Perolehan modal gedung dan bangunan	**41.774.680.516,62**	**80.940.539.683,65**

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas keluar dari kas daerah, kas blud dan kas BOS yang berasal dari perolehan modal gedung dan bangunan untuk periode tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

Perincian perolehan modal gedung dan bangunan untuk periode tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 9.2.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
5.2.3.03 Belanja modal Gedung dan Bangunan	**45.581.145.997,00**	**41.774.680.516,62**	**91,65**	**80.940.539.683,65**
5.2.3.03.01 Belanja Modal Gedung Tempat Kerja	45.453.496.197,00	41.657.671.173,10	91,65	79.753.930.683,65
5.2.3.03.02 Belanja Modal Monumen	6.000.000,00	5.943.000,00	99,05	681.564.000,00
5.2.3.03.01 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	121.649.800,00	111.066.343,52	91,30	0,00
5.2.3.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	0,00	0,00	00,00	505.045.000,00

9.2.2.4.Perolehan Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Uraian	Pengeluaran 2024 (Rp)	Pengeluaran 2023 (Rp)
Perolehan modal jalan, irigasi dan jaringan	**90.028.130.537,11**	**62.832.477.443,00**

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas keluar dari kas daerah, kas blud dan kas BOS yang berasal dari perolehan modal jalan, irigasi dan jaringan untuk periode tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

Perincian perolehan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan untuk periode tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 9.2.2.4
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Belanja Modal Jalan, irigasi dan jaringan		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1		2	3	4 = (3/2)	5
5.2.04.01	**Belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan**	**93.594.443.387,00**	**90.028.130.537,11**	**96,19**	**62.832.477.443,00**
5.2.04.01	Belanja modal Jalan dan jembatan	51.620.771.048,00	49.602.699.428,14	96,09	34.989.390.906,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	37.765.672.339,00	36.268.625.734,11	96,04	24.239.146.850,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	0,00	0,00	00,00	3.125.017.187,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	4.208.000.000,00	4.156.805.374,86	98,78	478.922.500,00

9.2.2.5.Perolehan Modal Aset Tetap Lainnya

Uraian	Pengeluaran 2024 (Rp)	Pengeluaran 2023 (Rp)
Perolehan modal aset tetap lainnya	**2.015.705.050,00**	**2.431.417.485,00**

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas keluar dari kas daerah, kas blud dan kas BOSyang berasal dari perolehan modal aset tetap lainnya untuk periode tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

Perincian perolehan modal aset tetap lainnya untuk periode tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 9.2.2.5
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Belanja Modal Aset tetap lainnya	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2		4 = (3/2)	5
5.2.05 Belanja modal Aset Tetap lainnya	**2.213.911.600,00**	**2.015.705.050,00**	**91,05**	**2.431.417.485,00**
5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan	0,00	0,00	00,00	73.487.150,00
5.2.05.02 Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/	79.365.000,00	78.000.000,00	98,28	263.074.464,00
5.2.05.08 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	00,00	43.465.000,00
5.2.05.88 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	2.134.546.600,00	1.937.705.050,00	90,78	2.051.390.871,00

9.2.2.6.Perolehan Aset Lainnya

Uraian	Pengeluaran 2024 (Rp)	Pengeluaran 2023 (Rp)
Perolehan modal aset lainnya	**750.345.350,00**	**0,00**

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas keluar yang berasal dari perolehan modal aset lainnya untuk periode tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

Perincian perolehan modal aset lainnya untuk periode tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 9.2.2.5
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Belanja Modal Aset tetap lainnya	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2		4 = (3/2)	5
5.2.3.06 Belanja modal Aset Lainnya	**864.265.000,00**	**750.345.350,00**	**86,82**	**0,00**
5.2.3.06.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Sofware	864.265.000,00	750.345.350,00	86,82	0,00

9.2.3. ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Arus kas bersih dari aktivitas investasi	**(158.782.527.494,73)**	**(217.341.184.000,69)**

Arus kas bersih dari aktivitas investasi adalah selisih antara arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas investasi. Perincian arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas investasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 9.2.3
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Arus kas masuk	383.979.980,00	449.118.662,00
Arus kas keluar	159.166.507.474,73	217.790.302.662,69
Jumlah aliran kas bersih dari aktivitas investasi	**(158.782.527.494,73)**	**(217.341.184.000,69)**

9.3. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Arus kas dari pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan Surplus (Defisit) anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak yang terkait terhadap arus kas di masa yang akan datang.

9.3.1. ARUS KAS MASUK

Jumlah arus kas masuk dari aktivitas pendanaan antara lain berasal dari Sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu (SILPA) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 yang bukan merupakan arus kas masuk dari aktivitas pendanaan melainkan sebagai saldo awal kas tahun 2023 dan tahun 2022, penerimaan pinjaman dan obligasi, transfer dari dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan dan penerimaan kembali pemberian pinjaman.

9.3.1.1.Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

Uraian	Penerimaan 2024 (Rp)	Penerimaan 2023 (Rp)
Penerimaan kembali pemberian pinjaman	**0,00**	**1.198.000,00**

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas masuk ke kas daerah yang berasal dari penerimaan kembali pemberian pinjaman pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

9.3.2. ARUS KAS KELUAR

Arus kas keluar dari aktivitas pendanaan antara lain untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah, pembayaran pokok hutang pinjaman dan obligasi, dan pemberian pinjaman.

9.3.3. ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	**0,00**	**1.198.000,00**

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan adalah selisih antara arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas pendanaan. Perincian arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas pendanaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 9.3.3
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Arus kas masuk	0,00	1.198.000,00
Arus kas keluar	0,00	0,00
Jumlah aliran kas bersih dari aktivitas pendanaan	**0,00**	**1.198.000,00**

9.4. ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Arus kas dari aktivitas transitoris adalah penerimaan dan pengeluaran kas yang diperoleh dan digunakan oleh pihak ketiga dan tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

9.4.1. ARUS KAS MASUK

9.4.1.1.Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Uraian	Penerimaan 2024 (Rp)	Penerimaan 2023 (Rp)
Penerimaan perhitungan fihak ketiga (PFK)	**68.065.879.797,81**	**61.215.397.853,00**

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas masuk dari aktivitas transitorisyang berasal dari penerimaan perhitungan fihak ketiga (PFK) yang dipotong melalui SP2D LS oleh BUD terdapat utang perhitungan

fihak ketiga (PFK) dan sisa uang persediaan yang baru disetor pada tahun berikutnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

Perincian penerimaan PFK dan sisa uang persediaan untuk periode tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 9.4.1.1
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Uraian	Pengeluaran 2024 (Rp)	Pengeluaran 2023 (Rp)
Penerimaan perhitungan fihak ketiga (PFK)	68.065.879.797,81	61.215.397.853,00
Total	**68.065.879.797,81**	**61.215.397.853,00**

9.4.2. ARUS KAS KELUAR

9.4.2.1.Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Uraian	Pengeluaran 2024 (Rp)	Pengeluaran 2023 (Rp)
Pengeluaran perhitungan fihak ketiga (PFK)	**68.667.012.617,81**	**60.623.056.743,00**

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas keluar dari aktivitas transitorisyang berasal dari pengeluaran perhitungan fihak ketiga (PFK)yang dipotong melalui SP2D LS oleh BUD dan sisa uang persediaan yang baru disetor pada tahun berikutnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dan Pengeluaran fihak ketiga (PFK) merupakan honorarium panitia pelaksana kegiatan dan upahan di OPD yang baru ditransfer ke rekening masing masing penerima honorarium tersebut di awal bulan Januari 2023.

Perincian pengeluaran PFK dan sisa uang persediaan untuk periode tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 9.4.2.1
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Uraian	Pengeluaran 2024 (Rp)	Pengeluaran 2023 (Rp)
Pengeluaran perhitungan fihak ketiga (PFK)	68.667.012.617,81	60.623.057.743,00
Total	**68.667.012.617,81**	**60.623.056.743,00**

9.4.3. ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Arusk kas bersih dari aktivitas transitoris	**(601.132.820,00)**	**592.341.110,00**

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris adalah selisih antara arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas transitoris. Perincian arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas transitoris untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 9.4.3
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Arus kas masuk	68.065.879.797,81	61.215.397.853,00
Arus kas keluar	(68.667.012.617,81)	(60.623.056.743,00)
Jumlah aliran kas bersih dari aktivitas transitoris	**(601.132.820,00)**	**592.341.110,00**

9.5. KENAIKAN (PENURUNAN) KAS

Kenaikan (penurunan) kas bersih untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 merupakan penjumlahan yang terdiri dari arus kas bersih dari aktivitas operasi, aktivitas investasi non keuangan, aktivitas pendanaan dan aktivitas transitoris.

Perincian kenaikan (penurunan) kas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 9.5
Kenaikan (Penurunan) Kas

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Arus kas bersih dari aktivitas operasi	158.089.079.071,84	140.049.918.705,72
Arus kas bersih dari aktivitas investasi	(158.782.527.494,73)	(217.341.184.000,69)
Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	0,00	1.198.000,00
Arus kas bersih dari aktivitas transitoris	(601.132.820,00)	592.341.110,00
Jumlah kenaikan (penurunan) kas	**(1.294.581.242,89)**	**(76.697.726.184,97)**

9.6. SALDO AKHIR KAS

Saldo akhir kas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 merupakan saldo awal kas Pemerintah Daerah yang terdiri dari Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas ditambah Saldo Kas Daerah dan saldo awal kas. Jumlah Saldo Akhir Kas tersebut juga menunjukkan jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran SiLPA) tahun berjalan.

Perincian saldo akhir kas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 tersaji pada tabel di bawah ini

Tabel 9.6
Saldo Akhir Kas

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Kenaikan (penurunan) bersih kas	(1.294.581.242,89)	(76.697.726.184,97)
Saldo awal kas daerah	67.071.188.644,14	119.817.397.122,23
Saldo awal kas di bendahara pengeluaran	601.132.820,00	0,00
Saldo awal kas di BLUD Dinas Kesehatan	7.503.164.480,85	6.254.896.034,24
Saldo awal kas di BLUD RSUD	38.758.539.712,32	64.695.549.324,61
Saldo awal kas di Bendahara Penerimaan	10.230.722,00	10.236.077,000
Saldo awal kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Saldo awal Kas Lainnya BOS	610.481.593,15	465.593.889,35
Saldo Akhir Kas Lainnya PFK	0,00	8.791.710,00
Jumlah saldo akhir kas	**113.260.156.729,57**	**114.554.737.972,46**
Saldo Akhir Kas	65.071.277.733,03	67.071.188.644,14
Saldo akhir kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	601.132.820,00
Saldo akhir kas di BLUD Dinas Kesehatan	9.732.906.535,35	7.503.164.480,85
Saldo akhir kas di BLUD RSUD	38.226.719.614,04	38.758.539.712,32
Saldo akhir kas di Bendahara Penerimaan	7.006.000,00	10.230.722,00
Saldo akhir kas di Bendahara Penerimaan BLUD RSUD	0,00	0,00
Saldo akhir Kas Lainnya BOS+BOK+BOP	222.24.845,15	610.481.593,15
Saldo akhir Kas Lainnya PFK	0,00	0,00
Jumlah saldo akhir kas	**113.260.156.729,57**	**114.554.737.972,46**

BAB

10

PENJELASAN POS – POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

10.1. Ekuitas Awal

Uraian	1 Januari 2024 (Rp)	1 Januari 2023 (Rp)
Ekuitas awal	**2.806.862.353.839,15**	**2.798.933.012.648,62**

Jumlah tersebut merupakan jumlah ekuitas milik Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 1 Januari 2024 dan 1 Januari 2023.

10.2. Surplus (Defisit) LO

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Surplus (Defisit) LO	**53.326.812.559,79**	**28.234.697.781,33**

Jumlah tersebut merupakan jumlah surplus (defisit) yang berasal dari Laporan Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

10.3. Lain-lain

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Lain-lain	**-771.444.211,99**	**(20.305.356.590,80)**

Jumlah tersebut merupakan perubahan kebijakan/kesalahan mendasar, koreksi ekuitas yang berasal dari lain-lain yang mempengaruhi perubahan ekuitas secara langsung periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023. Perincian ekuitas lain-lain Per

OPD dan rincian ekuitas lain lain Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 tersebut dibawah ini. Rincian ekuitas lain-lain Per OPD pada tanggal 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023 tersaji dalam tabel dibawah ini :

Tabel 10.3
Rincian Ekuitas Lain - Lain per OPD

Perubahan	Saldo 31 Des 2024 (Rp)	Saldo 31 Des 2023 (Rp)
Ekuitas Lain - Lain	1	2
1. Dinas Pendidikan	-8,34	(2.511.605.365,00)
2. Dinas Kesehatan & KB	-299.992,42	(173.648.485,69)
3. Dinas PU & TR	0,13	(16.138.805.447,77)
4. Dinas Perkim		(7.261.835.290,53)
5. Satpol PP		1.299.868,00
6. BPBD		809.984,00
7. Dinas Sosial	1.377.915,65	1.445.917.953,00
8. Dinas Tenaga Kerja	-312.506.258,03	(347.088.607,17)
9. Dinas L.Hidup	369.999,97	219.087.041,00
9. Dispendukcapil		2.276.959,00
10 Dinas Perhubungan	-0,15	788.712.915,00
11. Dinas Infokom	-1,02	325.350.172,00
12. Dinas PM PTSP	-1,98	869.335,00
13. Dinas Budparpora		2.069.550.575,00
14. Dinas Perpustakaan		(5,00)
15. Bagian Pemerintahan		(582.083,00)
16. Bagian Organisasi		0,00
17. Bagian Umum	-0,26	2.050.739.830,71
18. Bagian Hukum		0,00
19. Bagian Perekokesra		990.003,00
20. Bagian Adbang		(1.418.542,00)
21. Sekretariat DPRD	-370.008,00	2.147.792,00
21. Sekretariat DPRD	-370.008,00	2.147.792,00
22. BKD		1.249.699,00
23. BKAD	-460.015.855,95	(8.158.080.355,05)
24. BAPENDA		1.335.254.292,57

Perubahan	Saldo 31 Des 2024 (Rp)	Saldo 31 Des 2023 (Rp)
Ekuitas Lain - Lain	1	2
25. Inspektorat	- 0,01	614.832.697,00
26. Bapelitbangda	-1,20	392.447.509,00
27. Kec. Kartoharjo	- 3,93	1.548.190.339,33
28. Kec. Manguharjo	- 1,98	1.089.444.116,00
29. Kec. Taman	- 2,33	2.818.684.250,00
30. Bakesbangpol		9.969.600,00
31. Dinas Pertanian & KP		(1.759.991,00)
32. Dinas Perdagangan		15.990.618,80
Total	**- 771.444.211,99**	**20.305.356.590,80**

LAMPIRAN 10.3B

LAIN – LAIN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 DAN 31 Desember 2023

OPD	Uraian	Penambahan	Pengurangan	Saldo
				30-Sep-24
1	2	3	4	5 = 3 - 4
DINAS PENDIDIKAN	MENCATAT BEBAN PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN MESIN TAHUN 2024		235.000.000,00	- 235.000.000,00
	KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN KARENA UBAH MASA MANFAAT DI TAHUN 2024		8,34	- 8,34
	JURNAL KOREKSI BPK ATAS KESALAHAN JURNAL SAAT PERPINDAHAN ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN DARI DINAS PENDIDIKAN KE	235.000.000,00		235.000.000,00

	BAGIAN UMUM YANG MENDEBET EKUITAS SEBESAR NILAI PERALATAN DAN MESIN TERSEBUT			
				-
				-
				-
				-
		235.000.000,00	**235.000.008,34**	
			- 8,34	
DINAS KESEHATAN & KB	BEBAN PENYISIHAN DAN AKUMULASI PENYISIHAN PIUTANG LAIN-LAIN ATAS PELAYANAN JASA MEDIS DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAHUN 2024	65.492.369,07	-	65.492.369,07
	MENCATAT KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN MESIN KARENA UBAH MASA MANFAAT RSUD DI TAHUN 2024	-	802.254.992,42	- 802.254.992,42
	MENCATAT PENYISIHAN PIUTANG RETRUBI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT TAHUN 2024	680.262,00	-	680.262,00
	PENGAKUAN PERSEDIAAN KEDALUWARSA DARI GUDANG OBAT DINKES DI TAHUN 2024	-	35.355.251,00	- 35.355.251,00

	KOREKSI ATAS KEASALAHAN JURNAL PEMBAYARAN PIUTANG RETRIBUSI PADA DINAS KESEHATAN YANG ADA DI BLUD RSUD DAN BLUD PUSKESMAS YANG DIAKUI DITAHUN 2023 DAN TELAH DIBAYARKAN PADA BULAN JANUARI 2024 YANG SEBELUMNYA DI EKUITAS	-	66.172.631,07	- 66.172.631,07
	JURNAL KOREKSI BPK ATAS LEBIH SAJI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN MESIN KARENA KESALAHAN JURNAL DI RSUD DI TAHUN 2024	802.254.992,42	-	802.254.992,42
	JURNAL KOREKSI BPK ATAS KURANG SAJI AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN MESIN KARENA NILAI BUKU ADA YANG MINUS DI TAHUN 2024	-	300.000,00	- 300.000,00
	JURNAL KOREKSI BPK ATAS KURANG SAJI AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN MESIN KARENA PEMBULATAN DI TAHUN 2024	-	2,62	- 2,62
	JURNAL KOREKSI BPK ATAS LEBIH SAJI AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN MESIN KARENA PEMBULATAN DI TAHUN 2024	10,20	-	10,20
	PENGAKUAN PERSEDIAAN KEDALUWARSA DARI GUDANG OBAT DINKES DI TAHUN 2024	35.355.251,00	-	35.355.251,00

				-
				-
				-
				-
		903.782.884,69	**904.082.877,11**	
			- 299.992,42	
PUPR	MENCATAT KOREKSI KURANG AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN MESIN KARENA UBAH MASA MANFAAT DI TAHUN 2024	0,13		0,13
	MENCATAT KOREKSI KURANG AKUMULASI JALAN IRIGASI DAN JARINGAN KARENA PEMBULATAN DI TAHUN 2024		1.573.842,84	- 1.573.842,84
	MENCATAT KOREKSI KURANG AKUMULASI JALAN IRIGASI DAN JARINGAN KARENA PEMBULATAN DI TAHUN 2024	1.573.842,84		1.573.842,84
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
		1.573.842,97	**1.573.842,84**	
			- 0.13	

DINAS PERKIM			-	-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
SATPOL PP				-
				-
BPBD				-
				-
				-

DINSOS	MENCATAT KOREKSI TAMBAH AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN DI TAHUN 2024	-	1,00	- 1,00
	MENCATAT KOREKSI TAMBAH AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN MESIN DI TAHUN 2024	-	0,99	- 0,99
	MENCATAT KOREKSI LEBIH SAJI AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN MESIN KARENA SALDO AWAL PENYUSUTAN NILAI BUKUNYA MINUS DI TAHUN 2024	1.377.916,65	-	1.377.916,65
		1.377.916,65	**1,00**	
			1.377.915,65	
DISNAKER	MENCATAT PENGAKUAN MUTASI ASET PERALATAN MESIN R4 KE DINAS PENDIDIKAN DI TAHUN 2024	-	175.490.000,00	- 175.490.000,00
	KOREKSI LABA YANG DIBAGIKAN 40%	-	312.506.258,03	- 312.506.258,03
	JURNAL KOREKSI BPK ATAS AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN MESIN KARENA MUTASI ASET R4 KE DINAS PENDIDIKAN DI TAHUN 2024	175.490.000,00	-	
				-
				-
		175.490.000,00	**487.996.258,03**	
			312.506.258,03	

DINAS LINGKUNGAN HIDUP	MENCATAT PENYESUAIAN MUTASI MASUK ASET TETAP PERALATAN MESIN KE SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2024	-	1.850.000,00	- 1.850.000,00
	MENCATAT KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN MESIN KARENA UBAH MASA MANFAAT DI TAHUN 2024	-	0,03	- 0,03
	JURNAL KOREKSI BPK ATAS AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN MESIN KE SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2024	1.850.000,00	-	
	JURNAL KOREKSI BPK ATAS AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN MESIN KE SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2024	370.000,00	-	
				-
				-
		2.220.000,00	**1.850.000,03**	
			369.999,97	
DUKCAPIL				-
				-
				-
				-
		-	-	
			-	
				-

DINHUB	KOREKSI TAMBAH AKUMULASI PENYUSUTAN OPERALATAMNM ESIN KARENA PERUBAHAN MASA MANFAAT DI TAHUN 2024		0,15	- 0,15 -
				-
				-
				-
				-
		-	**0,15**	
			- **0,15**	
				-
DISKOMINFO	MENCATAT KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN MESIN KARENA PEMBULATAN DI TAHUN 2023		1,02	- 1,02
				-
				-
				-
				-
				-
		-	**1,02**	
			- **1,02**	
DINAS PTSP	MENCATAT PENYESUAIAN MUTASI ASET TETAP PERALATAN MESIN KE BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BKAD) DI TAHUN 2024	-	162.840.000,00	- 162.840.000,00

	KOREKSI KURANG AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN MESIN KARENA APLIKASI DI TAHUN 2024	-	1,98	
	JURNAL MENGHAPUS KOREKSI KURANG SAJI ATAS AKUMULASI PENYUSTAN PERALATAN MESIN TAHUN 2024	162.840.000,00	-	162.840.000,00
		162.840.000,00	**162.840.001,98**	
			- **1,98**	
				-
DINAS BUDPORA				-
				-
				-
		-	-	
			-	
DINAS PERPUSTAKAAN				-
		-	-	
			-	
BAGIAN PEMERINTAHAN				-
		-	-	-
			-	

BAGIAN UMUM	MENCATAT PENYESUIAN AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN MESIN KARENA UBAH MASA MANFAAT DI TAHUN 2024	-	0,26	- 0,26
	MENCATAT KOREKSI TAMBAH AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN MESINDI TAHUN 2024	-	25.481.666,00	- 25.481.666,00
	KOREKSI ATAS KESALAHAN JURNAL SAAT PERPINDAHAN ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN DARI BAGIAN UMUM YANG MENDEBET EKUITAS SEBESAR NILAI PERALATAN DAN MESIN TERSEBUT	25.481.666,00	-	25.481.666,00
				-
				-
				-
		25.481.666,00	**25.481.666,26**	
			- **0,26**	
BAGIAN PEREKOKESRA				-
				-
		-	-	
			-	
BAGIAN ADBANG				-

				-
		-	-	
			-	
SEKRET. DPRD	MENCATAT KOREKSI PENYESUAIAN KARENA PEMBULATAN AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN MESIN TAHUN 2024		8,00	- 8,00
	JURNAL KOREKSI BPK ATAS KURANG SAJI AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN MESIN KE SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2024		185.000,00	- 185.000,00
	JURNAL KOREKSI BPK ATAS LEBIH SAJI BEBAN PENYUSUTAN PERALATAN MESIN KE SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2024		185.000,00	- 185.000,00
		-	**370.008,00**	
			- **370.008,00**	
BKD				-
				-
				-
		-	-	
			-	

BKAD	MENCATAT KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN PERATAN DAN MESIN TAHUN LALU DI TAHUN 2024	5.285.946.441,05	-	5.285.946.441,05
	MENCATAT KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN PERATAN DAN MESIN TAHUN LALU DI TAHUN 2024	-	3.292.000,00	3.292.000,00
	MENCATAT KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN	3.292.000,00	-	3.292.000,00
	MENCATAT PENYESUIAN KOREKSI KURANG ATAS PENGUNAAN LABA UNTUK CSR NGROWO SEBESAR RP83.784.000,00 DAN PROGRAM PASANG BARU GRATIS SEBESAR rp443.100.000,00 DAN KOREKSI PEMBULATAN SEBESAR RP1,00 DI TAHUN 2024	-	526.884.000,00	526.884.000,00
	MENGHAPUSAN JURNAL KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN PERATAN DAN MESIN TAHUN LALU DI TAHUN 2024	-	5.285.946.441,05	5.285.946.441,05
	KOREKSI ATAS PENGEMBALIAN JASPRO TAHUN BUKU 2021 YANG DIJURNAL SEBAGAI PENDAPATAN LO NAMUN SEHARUSNYA LANGSUNG MERUBAH EKUITAS PADA LPE KARENA BUKAN TAHUN BERJALAN DI BUMD PDAM	63.576.144,00	-	63.576.144,00

	KOREKSI BPK ATAS PEMBULATAN AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN MESIN DI TAHUN 2024	0,05	-	0,05
	MENGHAPUS KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN PERATAN DAN MESIN TAHUN LALU DI TAHUN 2024	3.292.000,00	-	3.292.000,00
				-
				-
		5.356.106.585,10	**5.816.122.441,05**	
			- **460.015.855,95**	
BAPENDA				-
				-
				-
				-
		-	-	
			-	
INSPEKTORAT	MENCATAT PENYESUIAN AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP GEDUNGDAN BANGUNAN KARENA UBAH MASA MANFAAT ASET TETAP DI TAHUN 2024		0,01	- 0,01
				-
				-
				-
				-

		-	**0,01**	
			- **0,01**	
BAPPEDA	MENCATAT KOREKSI PEMBULATAN AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN MESIN TH 2024		1,20	- 1,20
				-
				-
				-
		-	**1,20**	
			- **1,20**	
KARTOHARJO	MENCATAT PENYESUIAN KOREKSI MENGURANGI PEMBULATAN AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN MESIN DI TAHUN 2024	3,96		3,96
	MENCATAT PENYESUIAN KOREKSI MENGURANGI PEMBULATAN AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN DI TAHUN 2024		0,03	- 0,03
				-
				-
				-
				-
		3,96	**0,03**	
			3,93	

MANGUHARJO	MENCATAT KOREKSI TAMBAH AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN MESIN KARENA PEMBULATAN DI TAHUN 2024		1,98	- 1,98
				-
				-
				-
				-
				-
		-	**1,98**	
			- **1,98**	
TAMAN	MENCATAT KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN MESIN KARENA UBAH MASA MANFAAT DI TAHUN 2023		2,33	- 2,33
				-
				-
				-
		-	**2,33**	
			- **2,33**	
BAKESBANGPOL				

		-	-	
			-	
DINAS PERTANIAN & KP				
		-	-	
			-	
DINAS PERDAGANGAN				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
		-	-	
			-	
				-
	6.862.299.056,53	7.635.317.111,36	950.728.053,84	
TOTAL			**-771.444.211,99**	

10.4. Ekuitas Akhir

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Ekuitas akhir	**2.859.417.722.186,95**	**2.806.862.353.839,15**

Jumlah tersebut merupakan jumlah ekuitas akhir milik Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023. Ekuitas akhir diperoleh dari hasil penjumlahan saldo awal ditambah surplus (defisit) LO, dan memperhitungkan dampak kumulatif sebagai akibat dari perubahan kebijakan akuntansi.

BAB

11

INFORMASI NON KEUANGAN

11.1 GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KOTA MADIUN

11.1.1 Keadaan Geografis

Kota Madiun secara geografis memiliki luas wilayah 33,23 km^2 dan terletak pada koordinat 111^0 sampai 112^0 Bujur Timur dan 7^0 sampai 8^0 Lintang Selatan, yang secara administrative terbagi dalam 3 (tiga) kecamatan dan 27 (dua puluh tujuh) Kelurahan.

Sedangkan secara administratif, Kota Madiun dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Madiun, dengan batas-batas sebagai berikut:

a. Sebelah utara : berbatasan dengan Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun ;
b. Sebelah selatan : berbatasan dengan Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun ;
c. Sebelah timur : berbatasan dengan Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun ;
d. Sebelah barat : berbatasan dengan Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun.

Kota Madiun merupakan dataran rendah dengan ketinggian kurang lebih 63 M di atas permukaan air laut. Daerah kota dilintasi Kali Madiun yang mengalir ke arah utara dan bertemu dengan Bengawan Solo di wilayah Kabupaten Ngawi dan selanjutnya bermuara ke Laut Jawa. Kali Madiun membelah Kota Madiun menjadi 2 (dua) bagian yaitu Kota Bagian Timur 82% dan Kota Bagian Barat 18%.

11.1.2 Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kota Madiun dari tahun ke tahun terus meningkat, meskipun tingkat laju pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan tetapi tetap menunjukkan adanya peningkatan laju pertumbuhan penduduk. Jumlah penduduk berdasarkan hasil registrasi penduduk akhir tahun tahun 2022 mencapai 199.192 jiwa terdiri atas 97.370 penduduk laki-laki dan 101.822 penduduk perempuan. Sedangkan, rata-rata kepadatan penduduk/Km^2 di Kota Madiun sebesar 5.994,34 jiwa/km^2.

Kecamatan Taman adalah kecamatan paling padat. Sebanyak 41.753 penduduk mendiami wilayah Kecamatan Taman yang seluas 12,46 km², sehingga kepadatannya 6.866,93 penduduk/km².

Jumlah penduduk yang tinggal di dua kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Manguharjo dan Kecamatan Kartoharjo sebanyak 59.243 jiwa dan 54.387 jiwa. Dengan luas wilayah masing-masing 10,04 km² dan 10,73 km², maka kepadatan penduduk kedua kecamatan tersebut adalah 5.900,70 dan 5.068,69 penduduk/ km².

11.2 ORGANISASI

Pemerintah Kota Madiun dibentuk berdasarkan Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta.Unsur Pimpinan Pemerintah Kota Madiun periode 2019–2024 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor:131.35-8262 Tahun 2018 tanggal 12 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Walikota dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor:131.35-8263 Tahun 2018 tanggal 12 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Wakil Walikota Madiun Provinsi Jawa Timur, yang telah dilantik pada tanggal 29 April 2019.

Unsur Pimpinan Pemerintah Kota Madiun periode 2019 - 2024 terdiri dari:

a. Pimpinan Eksekutif
   1. Walikota Madiun : Drs. H. Maidi, SH, MM, M.Pd
   2. Wakil Walikota Madiun : Inda Raya Ayu Miko Saputri, SE, MIB
b. Pimpinan Legislatif
   1. Ketua DPRD : Andi Raya Bagus Miko Saputro, SH
   2. Wakil Ketua DPRD : Drs.Istono, M.Pd
   3. Wakil Ketua DPRD : Drs. H. Armaya

Yang selanjutnya sesuai hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah & Legislatif 2024 Jabatan Walikota, Wakil Walikota dan Unsur Pimpinan Pemerintah Kota Madiun periode 2025 hingga 2030 terdiri dari :

a. Pimpinan Eksekutif
   1. Walikota Madiun : Dr.Drs.H.Maidi, MM, M.Pd
   2. Wakil Walikota Madiun : F. Bagus Panuntun
b. Pimpinan Legislatif
   1. Ketua DPRD : Drs. H. Armaya
   2. Wakil Ketua DPRD : Drs.Istono, M.Pd
   3. Wakil Ketua DPRD : Andi Raya Bagus Miko Saputro, SH

Pada tahun 2020, Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perangkat daerah terdiri dari :

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat;
4. Dinas Pendidikan;
5. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga;
6. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
7. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Dinas Perdagangan;
11. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
12. Dinas Komunikasi dan Informatika;
13. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
14. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
15. Dinas Perhubungan;
16. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
17. Dinas Lingkungan Hidup;
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
19. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
20. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
21. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
22. Badan Pendapatan Daerah;
23. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
24. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
25. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
26. Kecamatan Kartoharjo;
27. Kecamatan Manguharjo;
28. Kecamatan Taman;

Pada tanggal 4 Januari 2021, Pemerintah Kota Madiun telah melantik seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Madiun untuk mengisi jabatan-jabatan pada perangkat daerah

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

11.3 VISI MISI KEPALA DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun telah memuat visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Madiun terpilih untuk periode 2019-2024

11.3.1 Visi

Visi Jangka Menengah, yang selanjutnya hanya disebut sebagai Visi, adalah rumusan umum mengenai kondisi yang ingin dicapai (*desired future*) pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari Visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Madiun, maka kondisi yang ingin dicapai (*desired future*) pada periode 2019–2024 adalah:

"Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera"

Makna substantif dari visi di atas dapat diturunkan dari pokok-pokok visi sebagai berikut:

1. **Bersih** mempunyai makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang terhindar dari praktik KKN, mengedepankan pelayanan prima yang didukung oleh profesionalisme aparatur, transparansi dan akuntabel.
2. **Berwibawa** mempunyai makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan ke depan mendengarkan aspirasi masyarakat, mengedepankan keterbukaan informasi publik, dan adanya kepemimpinan publik yang dihormati dalam mendorong peningkatan kinerja.
3. **Sejahtera** mempunyai makna bahwa kondisi masyarakat yang mampu melangsungkan kehidupan individu maupun kelompok secara layak, sehat dan produktif, adanya ketenteraman lahir batin serta tidak diliputi oleh rasa takut.

11.3.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu memperjelas penggambaran visi yang ingin dicapai, dan membantu menguraikan upaya-upaya strategis yang harus dilakukan. Secara teknis, rumusan misi

menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi perumusan tujuan dan sasaran yang harus dicapai untuk mencapai mewujudkan visi daerah.

Memperhatikan perubahan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang dan dalam rangka mewujudkan Visi Kota Madiun 2019-2024, maka misi pembangunan daerah Kota Madiun pada periode 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*);
2. Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan;
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun;
4. Mewujudkan kemandirian ekonomi dan memeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun.

Misi pembangunan Kota Madiun tersebut disarikan dalam **PANCA KARYA** yang melekat dalam semboyan Kota Madiun, yaitu: **PENDEKAR**. Panca Karya dalam akronim PENDEKAR tersebut meliputi: **PINTAR, MELAYANI, MEMBANGUN, PEDULI dan TERBUKA yang KHARISMATIK.**

Tabel 11.1
Keterkaitan Visi dan Misi Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024

Visi Kota Madiun 2019-2024 **Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera**	
Pokok - Pokok Visi	**Misi**
Bersih Berwibawa	Misike- 1 : Mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*)
	Misike- 2 : Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan
Sejahtera	Misike- 3 : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun
	Misike- 4 : Mewujudkan kemandirian ekonomi dan memeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun

Misi yang telah ditetapkan oleh Walikota dan Wakil Walikota terpilih merupakan jawaban dari isustrategis Kota Madiun dalam periode 2019 - 2024. Misi daerah menjawab kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun peluang di masa mendatang. Selain itu, hal tersebut juga menjawab potensi daerah yang belum terkelola dan dapat menjadi modal pembangunan yang signifikan. Keterkaitan antara misi daerah dan isu strategis daerah selanjutnya akan menjadi rujukan dalam penentuan tujuan dan sasaran pembangunan daerah beserta indikator masing-masing tujuan dan sasaran tersebut. Keterkaitan antara misi dan isu strategis daerah ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 11.2
Keterkaitan Misi Daerah dan Isu Strategis Daerah
Kota Madiun Tahun 2019-2024

No	Misi	Isu Strategis
1.	Mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*)	Penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel dan berorientasi pelayanan publik berbasis system informasi dan teknologi serta inovasi
		Peningkatan keamanan dan ketentraman kehidupan masyarakat
2.	Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	Peningkatan pembangunan infrastruktur kota dan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkeanjutan secara terpadu
3.	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun	Peningkatan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4.	Mewujudkan kemandirian ekonomi dan memeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun	Percepatan pemulihan ekonomi daerah yang inklusif melalui pengembangan kawasan pertumbuhan ekonomi

11.3.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Madiun Tahun 2019-2024 juga akan menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Rencana Strategis seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Kota Madiun untuk periode tersebut. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

11.3.3.1 Tujuan dan Sasaran dari Misi Pertama

Misi pertama untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Madiun tahun 2019-2024 adalah **Mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*)**.

Dalam pencapaian misi pertama, ditetapkan 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran pembangunan daerah, yaitu:

Tujuan 1	:	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan profesional yang berorientasi pada Pelayanan Publik berbasis *smart cities*
Sasaran 1.1	:	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Sasaran 1.2	:	Meningkatnya kualitas pelayanan publik

11.3.3.2 Tujuan dan Sasaran dari Misi Kedua

Misi kedua untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Madiun tahun 2019-2024 adalah **Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan.** Dalam pencapaian misi kedua, ditetapkan 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran pembangunan daerah, yaitu:

Tujuan 1	:	Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Kota yang Maju, Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan
Sasaran 1.1	:	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur
Sasaran 1.2	:	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

11.3.3.3 Tujuan dan Sasaran dari Misi Ketiga

Misi ketiga untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Madiun tahun 2019-2024 adalah **Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun**. Dalam pencapaian misi ketiga, ditetapkan 1 (satu) tujuan dan 3 (tiga) sasaran pembangunan daerah, yaitu:

Tujuan 1	:	Terwujudnya Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing
Sasaran 1.1	:	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat
Sasaran 1.2	:	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
Sasaran 1.3	:	Meningkatnya Pemberdayaaan Gender

5.3.4 Tujuan dan Sasaran dari Misi Keempat

Misi keempat untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Madiun tahun 2019-2024 adalah **Mewujudkan kemandirian ekonomi dan memeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun.** Dalam pencapaian misi keempat, ditetapkan 2 (dua) tujuan dan 4 (empat) sasaran pembangunan daerah, yaitu:

Tujuan 1	:	Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Inklusif
Sasaran 1.1	:	Menurunnya Tingkat Penganguran Terbuka
Sasaran 1.2	:	Meningkatnya Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi
Tujuan 2	:	Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat
Sasaran 2.1	:	Pengurangan Kemiskinan
Sasaran 2.2	:	Meningkatnya Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat

BAB

12

PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2024 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan selama satu periode pelaporan. Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2024 bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi seluruh pihak pengguna, baik untuk perencanaan, pengendalian maupun pengambilan keputusan.

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip keterbukaan, profesional dan bertanggungjawab. Laporan ini disusun dengan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Untuk menjamin keandalan laporan keuangan yang dihasilkan, Pemerintah Kota Madiun telah berupaya untuk mewujudkan hal tersebut dengan melaksanakan berbagai pentahapan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang - undangan serta memperhatikan situasi, kondisi dan sumber daya yang dimiliki.

Sesuai regulasi yang mendasarinya, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2024 telah disajikan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan untuk teknis pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran 1 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Madiun Tahun 2024 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kota Madiun dalam penyampaian maksud dan penjelasan isi laporan keuangan. Kami menyadari bahwa penyajian Laporan Keuangan ini masih jauh

dari sempurna, meskipun upaya pengendalian terkait dengan penyusunan laporan keuangan ini telah kami lakukan dan kami antisipasi jauh-jauh hari sebelumnya, tidak menutup kemungkinan masih banyak hal-hal yang harus kami perbaiki dalam penyusunan laporan keuangan yang periode berikutnya.

Seluruh hasil pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2024 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan diharapkan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum selanjutnya. Dengan segala kekurangannya, kami meyakini bahwa secara umum pengelolaan keuangan Tahun 2024 telah memenuhi target dan sasaran pengelolaan, serta pengungkapan yang disajikan dapat memberikan gambaran utuh pengelolaan keuangan guna pengambilan keputusan.